



Ensiklopedia
**Kerajaan
Islam
Di Indonesia**

Binuko Amarseto

Binuko Amarseto

ENSIKLOPEDIA KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA



Ensiklopedia Kerajaan Islam Di Indonesia
Copyright © Binuko Amarseto

Penyunting : Kholiq
Desain Sampul : /endo
Tata Letak : Roney

Cetakan, 2015
viii+348; 15 x 23
ISBN: 978-602-0862-04-0

Istana Media
(Grup Relasi Inti Media, anggota IKAPI)
Jln. Permadi Nyutran rt. 16 rw. 19 MG II No. 1606 C
Wirogunan, Mergangsan, Yogyakarta
Tlp/Fax: 0274-2870300

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang.

Jangan sekali-kali melupakan sejarah (*JASMERAH*) kata Bung Karno,

Bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Karena dengan sejarah identitas suatu bangsa dapat diketahui dan dengan sejarah pula kita dapat mempelajari asal-usul suatu bangsa atau negara. Sungguh ironis jika dimasa sekarang ini banyak generasi muda yang lupa akan sejarah bangsanya.

Nusantara Indonesia dulunya selain terdapat agama Hindu dan Budha yang berasal dari pengaruh luar Nusantara, juga terdapat agama Islam yang pengaruhnya juga berasal dari luar yaitu dari Jazirah Arab. Pengembangan dan penyiaran agama Islam yang dinamis dan cepat dibandingkan dengan agama-agama lainnya. Hal tersebut diukur dengan kurun waktu yang sebanding dengan sikon, alat komunikasi dan transportasi yang sepadan. Catatan sejarah telah membuktikan bahwa Islam dalam waktu 23 tahun dari kelahirannya sudah menjadi tuan di negerinya sendiri, yaitu jazirah Arab.

Ditambah lagi bahwa di Indonesia, banyak sekali tempat-tempat bersejarah, tetapi kadangkala tidak terawat dan

terpelihara dengan baik, sehingga dengan berjalannya waktu maka generasi berikutnya sangat mungkin sudah tidak tahu lagi bahwa itu adalah tempat bersejarah. Ini juga yang menjadi salah satu faktor berkurangnya identitas diri sebagai bangsa Indonesia. Sebagai tempat yang dapat dijadikan sebagai pusat menggali lagi jati diri bangsa, siapa dan bagaimana kita pada masa lampau. Terlebih tentang sejarah Agama Islam, Agama yang menjadi agama mayoritas di Indonesia saat ini.

Atas dasar demikianlah yang mendasari penulis untuk menuliskan sebuah buku tentang sejarah masuk dan berkembangnya agama Islam di Nusantara, tentang kerajaan-kerajaan Islam yang pernah Berjaya dengan berbagai polemik menjadi sebuah pembelajaran sendiri untuk para generasi selanjutnya. Dalam penyusunan buku ini penulis berusaha berpandangan seobjektif mungkin dalam menyajikan fakta – fakta sejarah.

Terimakasih yang tak terhingga Penulis ucapkan pada pihak yang memberikan kesempatan pada penulis untuk dapat dipercayai dalam penulisan buku ini, pada Jachinta Desy Kencanawati yang telah memberikan dorongan untuk terus menulis, bantuan dalam mengkoreksi dan memberikan arahan dalam menentukan bagaimana kaedah-kaedah menyampaikan suatu sejarah. Kepada Latif Pungkasniar yang memberikan semangat dan selalu menunggu lahirnya *anak* dari penulis dan kepada Azwar Anas yang telah memberikan pintu masuk untuk berusaha mewujudkan mimpi dalam menulis dan dibukukan.

Akhirnya buku ini penulis hadirkan, walaupun penulis yakin masih banyak kekurangan dan kekhilafannya. Namun penulis kira buku ini cukup memadai bagi para pembaca untuk menggali lagi tentang sejarah agama Islam dengan kerajaan-kerajaan Islam dalam perkembangannya di Nusantara.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
Sejarah Masuknya Islam Di Indonesia	1
Kerajaan Perlak	33
Kerajaan Samudera Pasai	47
Kerajaan Aceh	71
Kerajaan Demak	109
Kerajaan Banten	141
Kerajaan Mataram Islam	181
Kerajaan Makassar	215
Kerajaan Ternate	235
Kerajaan Tidore	257
Kerajaan Cirebon	285
Kerajaan Bone	295

Kerajaan Islam Di Pontianak	303
Kerajaan Indrapura	309
Banjar	315
Gowa	321
Pajang	327
Kerajaan Kutai Kartanegara	333
Kerajaan Siak	337
Daftar Pustaka	343
Tentang Penulis	347

SEJARAH MASUKNYA ISLAM DI INDONESIA

Proses Masuknya Agama Islam

Keberhasilan proses Islamisasi di Indonesia sebagai agama pendatang memaksa Islam untuk mendapatkan simbol-simbol kultural yang selaras dengan kemampuan penangkapan dan pemahaman masyarakat yang akan dimasukinya. Langkah ini merupakan salah satu sifat dari agama Islam yang plural yang dimiliki semenjak awal kelahirannya.

Kedatangan agama Islam di berbagai daerah Indonesia tidaklah bersamaan. Demikian pula kerajaan-kerajaan dan daerah-daerah yang didatanginya mempunyai situasi politik dan sosial-budaya yang berbeda. Sementara itu, sumber-sumber pendukung masuknya Islam di Indonesia di antaranya adalah:

1. Berita dari Arab

Berita ini bersumber dari para pedagang Arab yang melakukan aktivitas perdagangan orang-orang Melayu. Pedagang Arab diyakini telah datang ke Nusantara sejak masa Kerajaan Sriwijaya yang kurang lebih pada abad ke-7 M. Kerajaan Sriwijaya adalah kerajaan yang menguasai jalur pelayaran perdagangan di wilayah Nusantara bagian barat, termasuk Selat Malaka pada waktu itu. Kerajaan Sriwijaya di Asia Tenggara dalam upayanya memperluas kekuasaannya ke Semenanjung Malaka sampai Kedah dapat dihubungkan dengan bukti-bukti prasasti 775, berita-berita Cina dan Arab abad ke-8 sampai ke-10 M. Hal ini erat hubungannya dengan usaha penguasaan Selat Malaka yang merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional.

Pendapat ini dikemukakan oleh Crawford, Keyzer, Nieman, de Hollander, Syeh Muhammad Naquib Al-Attas dalam bukunya yang berjudul *Islam dalam Sejarah Kebudayaan Melayu* dan mayoritas tokoh-tokoh Islam di Indonesia, seperti halnya Hamka dan Abdullah bin Nuh. Bahkan Hamka dengan keras menuduh bahwa teori yang mengatakan bahwa Islam datang dari India adalah sebagai sebuah bentuk propaganda, bahwa Islam yang datang ke Asia Tenggara itu tidak murni.

2. Berita dari Eropa

Berita dari Eropa ini berasal dari Marcopolo tahun 1292 M. Marcopolo adalah orang Eropa yang pertama kali menginjakkan kakinya di Indonesia (Nusantara waktu itu),

ketika ia kembali dari Cina menuju Eropa melalui jalur laut. Pada saat itu, Marcopolo mendapat tugas dari Kaisar Cina untuk mengantarkan putrinya yang dipersembahkan kepada Kaisar Romawi. Dalam perjalanannya itu, Marcopolo singgah di Sumatra bagian utara. Di daerah ini, ia menemukan adanya kerajaan Islam, yaitu kerajaan Samudera dengan ibukotanya Pasai. Di antara sejarawan yang menganut teori ini adalah C. Snouch Hurgronje, W.F. Stutterheim, dan Bernard H.M. Vlekke.

3. Berita dari India

Berita ini menyebutkan bahwa para pedagang India dari Gujarat mempunyai peranan penting dalam penyebaran agama dan kebudayaan Islam di Indonesia. Karena di samping mereka datang untuk berdagang, mereka juga aktif mengajarkan agama dan kebudayaan Islam kepada setiap masyarakat yang dijumpainya, terutama kepada masyarakat yang terletak di daerah pesisir pantai. Teori ini lahir selepas tahun 1883 M, dibawa oleh C. Snouch Hurgronje. Pendukung teori ini, di antaranya adalah Dr. Gonda, Van Ronkel, Marrison, R.A. Kern, dan C.A.O. Van Nieuwinhuize.

4. Berita dari Cina

Berita dari Cina ini bersumber dari catatan dari Ma Huan. Ia adalah seorang penulis yang mengikuti perjalanan Laksamana Cheng-Ho. Ma Huan dalam tulisannya menyatakan bahwa sejak kira-kira-kira tahun 1400 telah

ada saudagar-saudagar Islam yang bertempat tinggal di pantai utara Pulau Jawa. Begitu juga dengan T.W. Arnol yang menyatakan para pedagang Arab yang menyebarkan agama Islam di Nusantara, saat itu mereka mendominasi perdagangan barat-timur sejak abad-abad awal Hijriah atau abad ke-7 dan ke-8 M. Dalam sumber-sumber Cina yang lain disebutkan bahwa pada abad ke-7 M seorang pedagang Arab menjadi pemimpin sebuah permukiman Arab-Muslim di pesisir pantai Sumatra yang disebut dengan *Ta'shib*.

5. Sumber dalam Negeri

Terdapat sumber-sumber berasal dari dalam negeri yang menerangkan tentang berkembangnya pengaruh Islam di Nusantara. Keterangan tersebut berdasarkan pada penemuan sebuah batu bersurat di Leran, kabupaten Gresik. Batu bersurat tersebut dituliskan dengan menggunakan huruf dan bahasa Arab. Walaupun sebagian tulisannya telah rusak, tetapi dari batu tersebut dapat menceritakan tentang meninggalnya seorang perempuan yang bernama Fatimah binti Maimun, yang berangka tahun 1028. Sumber lain yaitu makam Sultan Malik Al-Saleh di Sumatra Utara yang meninggal pada bulan Ramadan tahun 676 H atau tahun 1297 M. sementara itu, makam Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik yang wafat tahun 1419 M juga menjadi bukti bahwa masuknya Islam telah terjadi di masa itu.

Kedatangan Islam ke wilayah Nusantara dan penyebarannya kepada golongan bangsawan dan rakyat umumnya, dilakukan secara damai. Saluran-saluran Islamisasi yang berkembang ada enam, yaitu:

1. Saluran Perdagangan

Dari berbagai jalan Islamisasi di Nusantara pada taraf permulaannya, banyak yang sepakat bahwa Islam datang dan berkembang melalui perdagangan. Hal ini sesuai dengan kondisi akan adanya kesibukan lalu lintas perdagangan abad ke-7 sampai abad ke-16, yang saat itu terjadi perdagangan antara negeri-negeri di bagian barat, tenggara, dan timur benua Asia. Di lokasi-lokasi tersebut, pedagang-pedagang Muslim baik dari Arab, Persia, maupun India turut serta mengambil bagiannya di Nusantara.

Proses Islamisasi melalui perdagangan ini sangat menguntungkan. Hal tersebut dikarenakan jalinan di antara masyarakat Melayu dan pedagang Muslim terjalin dengan tidak adanya suatu paksaan. Proses Islamisasi melalui saluran perdagangan tersebut dipercepat lagi dengan situasi dan kondisi politik dari beberapa kerajaan yang adipati-adipati pesisir berusaha melepaskan diri dari kekuasaan pusat kerajaan yang sedang mengalami kekacauan dan perpecahan.

Secara umum, proses Islamisasi yang dilakukan oleh para pedagang melalui perdagangan mungkin dapat digambarkan sebagai berikut: Mula-mula mereka berdatangan di tempat-

tempat pusat perdagangan dan kemudian di antaranya ada yang tinggal, baik untuk sementara maupun untuk menetap. Lambat laun tempat tinggal mereka berkembang menjadi perkampungan-perkampungan. Perkampungan golongan pedagang Muslim dari negeri-negeri asing itu disebut dengan *pekojan*.

2. Saluran Pernikahan

Pernikahan adalah salah satu dari jalan proses terjadinya Islamisasi yang paling mudah. Hal itu dikarenakan dalam ikatan pernikahan akan terjadi ikatan lahir batin, tempat mencari kedamaian di antara dua individu yang berbeda jenis. Kedua individu, (suami dan istri) akan membentuk sebuah keluarga yang posisinya adalah bagian dari inti masyarakat. Dalam hal ini berarti pernikahan pedagang/saudagar Muslim dan wanita pribumi akan membentuk masyarakat Muslim. Melalui pernikahan inilah akan terlahir seorang Muslim. Dari sudut ekonomi, para pedagang Muslim memiliki status sosial yang lebih baik daripada kebanyakan pribumi, sehingga penduduk pribumi, terutama putri-putri bangsawan, tertarik untuk menjadi istri saudagar-saudagar dari pedagang Muslim, dengan tujuan meningkatkan nilai harkat dan marabat keluarga dalam masyarakat.

Sebelum wanita pribumi menikah dengan para pedagang Muslim, mereka harus diislamkan terlebih dahulu. Setelah mereka mempunyai keturunan, maka anak mereka pun akan menjadi Muslim seperti ayahnya hingga akhirnya akan membentuk generasi-generasi Muslim selanjutnya

dan lingkungan mereka semakin luas. Dengan semakin banyaknya keluarga Muslim yang tercipta, maka akhirnya timbul kampung-kampung dengan mayoritas berpenduduk Muslim, yang meluas menjadi daerah-daerah dan kerajaan-kerajaan Muslim.

3. Saluran Tasawuf

Tasawuf merupakan salah satu jalan yang penting dalam proses Islamisasi. Tasawuf termasuk kategori yang berfungsi dan membentuk kehidupan sosial bangsa Indonesia. Perkembangan Tasawuf dapat dilihat dari peninggalan bukti-bukti yang jelas pada tulisan-tulisan antara abad ke-13 dan ke-18. Hal itu berkaitan langsung dengan penyebaran Islam di Indonesia. Dalam praktiknya, para ahli tasawuf hidup dalam kesederhanaan, mereka selalu berusaha menghayati kehidupan masyarakatnya dan hidup bersama di tengah-tengah masyarakatnya. Para ahli tasawuf biasanya diyakini memiliki keahlian untuk menyembuhkan penyakit dan lain-lain.

Jalur tasawuf merupakan proses Islamisasi dengan mengajarkan teosofi dengan mengkomodasi nilai-nilai budaya, bahkan ajaran agama yang ada ke dalam ajaran Islam, dengan tentu saja terlebih dahulu dimodifikasi dengan nilai-nilai Islam sehingga mudah dimengerti dan diterima. Di antara ahli-ahli tasawuf yang memberikan ajaran yang mengandung persamaan dengan alam pikiran Indonesia pra-Islam itu adalah Hamzah Fansuri di Aceh, Syeh Lemah Abang, dan Sunan Panggung di Jawa. Bahkan ajaran tasawuf dikaitkan dengan ajaran mistik. Walaupun

demikian, ajaran tasawuf seperti ini masih berkembang di abad ke-19 bahkan di abad ke-20 ini.

4. Saluran Pendidikan

Para ulama, dan guru agama berperan besar dalam proses Islamisasi. Mereka menyebarkan agama Islam melalui jalur pendidikan, yaitu dengan mendirikan surau-surau atau pondok-pondok pesantren yang merupakan tempat pengajaran agama Islam bagi para santri. Pada umumnya, di pondok pesantren ini diajar oleh guru-guru agama, kiai-kiai, atau ulama-ulama. Di tempat tersebut, para santri belajar ilmu-ilmu agama dari berbagai kitab. Setelah keluar dari suatu pesantren tersebut, mereka akan kembali ke masing-masing kampung atau desanya untuk menjadi tokoh agama atau menjadi ulama yang mendirikan dan menyelenggarakan pesantren lagi. Semakin terkenal ulama yang mengajarkan tersebut, maka semakin terkenal pesantrennya, dan pengaruhnya akan mencapai radius yang lebih jauh lagi.

Di pesantren-pesantren ini, para santri diajarkan berbagai materi kajian yang menggunakan referensi kitab kuning. Kitab kuning adalah sebutan untuk buku atau kitab tentang ajaran-ajaran Islam atau tata bahasa Arab yang dipelajari di pondok pesantren yang ditulis atau dikarang oleh para ulama pada abad pertengahan dalam huruf Arab. Disebut kitab kuning karena biasanya dicetak dengan kertas berwarna kuning yang dibawa dari Timur Tengah.

5. Saluran Kesenian

Proses Islamisasi juga dilakukan melalui seni, seperti seni bangunan, seni pahat atau ukir, seni tari, seni musik, dan seni sastra. Pada seni bangunan, tampak arsitektur Islami, misalnya pada Masjid Kuno Demak, Sendang Duwur Agung Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Banten, Masjid Baiturrahman di Aceh, masjid di Ternate, dan masjid lainnya di Nusantara. Contoh lain dalam proses Islamisasi melalui seni adalah lewat pertunjukan wayang yang digemari oleh masyarakat. Melalui cerita-cerita wayang itu disisipkan ajaran agama Islam. Seni gamelan juga dapat mengundang masyarakat untuk datang melihat pertunjukan tersebut. Selanjutnya, pertunjukan seni tersebut disisipi dakwah keagamaan Islam saat masyarakat telah berkumpul.

6. Saluran Politik

Pengaruh kekuasaan raja kepada rakyat sangat besar dalam proses Islamisasi. Ketika seorang raja memeluk agama Islam, maka dengan otomatis rakyat juga akan mengikuti jejak rajanya. Pada saat itu rakyat memiliki kepatuhan yang sangat tinggi kepada rajanya. Raja dianggap sebagai panutan, bahkan menjadi teladan bagi rakyatnya. Seperti yang terjadi di Sulawesi Selatan dan Maluku, kebanyakan rakyatnya masuk Islam setelah rajanya memeluk agama Islam terlebih dahulu. Dengan bukti dan teori ini, maka dapat dikatakan bahwa pengaruh politik raja benar-benar sangat membantu tersebarnya Islam di daerah tersebut.

Pengaruh kedatangan agama Islam ke Nusantara mendatangkan kecerdasan dan kebudayaan bangsa. Agama Islam pada gilirannya mengangkat bangsa Indonesia menjadi bangsa yang berbudaya, baik secara lahiriah maupun batiniah. Kebudayaan lahiriah tampak pada benda-benda budaya Islam seperti bangunan masjid-masjid dan surat yang tersebar luas di seluruh Indonesia. Mimbar-mimbar masjid serta ukiran-ukiran berupa hiasan pada mimbar, kaligrafi yang sangat disenangi kaum Muslimin, serta busana yang dikenal sebagai busana muslim juga merupakan kebudayaan lahiriah yang lahir karena pengaruh agama Islam.

Sementara itu, kebudayaan batiniah yang muncul sebagai akibat masuknya agama Islam antara lain berupa adat istiadat dan budi pekerti yang terformat dari ajaran Islam yang membentuk kepribadian bangsa Indonesia. Kepribadian bangsa, Pancasila dan butir-butir yang terdapat di dalamnya sebetulnya adalah manifestasi dari ajaran Islam. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa seorang Muslim adalah juga seorang Pancasilais sejati. Akidah Islam yang tertanam dalam dada seorang Muslim menimbulkan semangat patriotisme untuk membela bangsa dari cengkeraman penjajah. Sejarah dapat membuktikan semangat yang terpancar dari akidah Islam ini. Perang Aceh, Perang Banjar, Perang Diponegoro, Perang Padri, begitu pula patriotisme Fatahillah serta pasukan Demak untuk menghalau Portugis tahun 1527 adalah gambaran dari patriotisme bangsa untuk mengusir penjajah. Perang Aceh (1873–1905) dan Perang Banjar (1859–1905) yang dapat bertahan sangat lama dan menghabiskan tenaga dan pikiran bangsa Belanda itu karena

masyarakat pribumi termotivasi oleh akidah Islam. Sehubungan dengan inilah Dr. Setia Budi (E.F.E. Douwes Dekker 1879-1952) pernah mengatakan dalam salah satu ceramahnya di Yogyakarta menjelang akhir hayatnya, yang antara lain mengatakan:

“Jika tidak karena pengaruh dan didikan agama Islam, maka patriotisme bangsa Indonesia tidak akan sehebat seperti yang diperlihatkan oleh sejarah bangsa Indonesia hingga mencapai kemerdekaan.”

Jalanan pelayaran antara negeri-negeri Islam di Timur Tengah dengan orang-orang di Nusantara sudah berkembang sejak masa kebesaran khalifah abad ke- 9. Pada waktu itu, tidak ada kapal-kapal lain yang melayari rute tersebut kecuali bangsa-bangsa dari Islam. Sehubungan dengan ini, Al-Mas’udi, seorang pengarang, ahli sejarah, pelaut, dan pengeliling benua yang wafat pada 246 H atau 957 M, mengatakan dalam bukunya *Murujul Zhahab* atau *Padang Luas Bertaburan Emas*:

“Sangat luas kerajaan maharaja Jawa itu, bala tentaranya tidak terhitung banyaknya. Dua tahun habis waktu jika hendak menjalani kerajaannya. Sangat cukup pula berbagai hasil tumbuh-tumbuhan dan kayu-kayuan yang wangi dan minyak wangi. Kapur barus, cengkih, dan cendana datang dari negeri itu dan lain-lain lagi. Di sebelah sana terbentang jalan luas lautan besar jalan ke negeri Cina.”

Mas'udi adalah seorang Arab keturunan Abdullah bin Mas'ud, salah seorang sahabat Nabi saw. Pada tahun 309 H setelah dia mengelilingi Parsi dan Kirman, dia mengelilingi India dan Srilanka, dan dari sana mengarungi samudra berlayar ke Cina. Dia beberapa kali mengadakan pelayaran antara Cina dan Madagaskar.

Namun demikian, Mas'ud bukan satu-satunya orang Arab yang melayari rute ini, tetapi yang jelas bahwa abad ke-3 H, Mas'udi telah singgah di Nusantara. Pada abad ke-2 H atau abad ke-9 M, telah terjalin hubungan antara Arab dengan dataran Cina. Adalah hal yang sangat mungkin bahwa hubungan dengan Nusantara pun telah ada pada abad ke-2 H di pesisir Cina yang gudangnya terletak di Canton.

Pada tahun 758 M, terjadi keributan di Canton dan menyebabkan gudang perdagangan itu dirampok orang. Pada abad itu telah terbentuk jemaah masjid di Canton. Jika pada abad ke-2 H telah terbentuk jemaah dan masyarakat Muslim, hal itu berarti bahwa agama Islam telah masuk ke Cina sebelum abad itu, karena terjadinya sebuah masyarakat Muslim memakan waktu yang cukup lama. Dengan demikian, dapatlah dipastikan bahwa Islam telah masuk ke Cina pada abad ke-2 H.

Pelayaran antara Arab-Cina cukup jauh dengan kapal layar, oleh sebab itu Nusantara adalah satu-satunya tempat persinggahan selama menunggu datangnya angin baik untuk dapat melanjutkan pelayaran ke negeri Cina. Kalau Islam masuk ke negeri Cina pada abad ke-2 H, hal itu sangat mungkin sekali Islam masuk ke Nusantara ini pada abad pertama Hijriah atau abad 7-8 M.

Menurut pendapat Ir. Moens dalam bukunya *“De Noord Sumatraanse Rijken der Parfums en Specerjen in voor Moslimse Tijd”*, yang dikutip oleh MD. Mansur, mengatakan bahwa kerajaan Samudra Pasai telah berdiri sejak lama dan pada abad ke-5 M telah menjadi pusat perdagangan yang resmi antara India dan Cina. Sementara itu, Sir Thomas Arnold dalam bukunya *“Preaching of Islam”* mengatakan bahwa di pantai barat pulau Sumatra telah terdapat satu kelompok perkampungan orang Arab, yaitu pada zaman pemerintahan Yazid dari Dinasti Umayyah tahun 684 M.

Dari dua pendapat ini dapatlah ditarik suatu kesimpulan bahwa Islam telah masuk sekitar abad 7-8 M. Hubungan antara pedagang India dan Arab sudah lama terjalin dan tidaklah mustahil bahwa pedagang India itu juga termasuk di antaranya pedagang Arab yang telah bermukim di India. Umumnya, setiap pedagang Arab juga berfungsi sebagai mubalig, yang di mana mereka itu menetap, maka di situ pula Islam berkembang.

Masuknya agama Islam ke Nusantara tidaklah bersamaan dengan berdirinya kerajaan Islam di Nusantara ini. Tidak pernah terjadi dalam sejarah kedatangan agama Islam langsung mendirikan kerajaan Islam. Antara datangnya agama Islam dengan berdirinya sebuah kerajaan Islam melintasi waktu yang cukup lama. Sementara itu, sebelum agama Islam masuk, telah berdiri kerajaan yang mendapat pengaruh agama Hindu dan Buddha. Karena itulah tentunya agama baru yang masuk melalui proses yang lama baru dapat diterima oleh masyarakat sebagai agama.

Abad 7-8 M adalah zaman keemasan Dinasti Umayyah kemudian Dinasti Abbasiyah dan pada masa itu pula pedagang-pedagang Muslim yang terdiri dari orang-orang Arab, India, dan Gujarat melakukan kegiatan perniagaan ke daerah Timur Jauh dan Asia Tenggara. Jika diperhatikan, abad itu adalah masa Sriwijaya mengembangkan kekuasaannya. Ketika itu, Selat Malaka merupakan daerah pengawasan Sriwijaya, tetapi sudah dilalui oleh pedagang-pedagang Muslim yang melalui jalur pelayaran tersebut.

Berdasarkan berita Cina dari Dinasti T'ang, disebutkan bahwa masa itu sudah ada pedagang Muslim, baik yang bermukim di Kanfu (Canton) maupun di daerah Sumatra sendiri. Perdagangan yang meningkat pada masa itu dimungkinkan pula oleh kegiatan kerajaan Islam di bawah Dinasti Umayyah di bagian barat serta Kerajaan Cina di bagian timur yang telah meramaikan jalur perdagangan lewat Asia Tenggara di bawah Sriwijaya.

Penguasaan Selat Malaka oleh Sriwijaya sangat penting karena merupakan kunci bagi pelayaran dan perdagangan internasional masa itu. Kedatangan pedagang-pedagang Muslim tidak terasa akibatnya bagi kerajaan di Asia Tenggara dan Timur Jauh. Akan tetapi, dua abad kemudian, yaitu abad ke-9, telah terjadi pemberontakan oleh petani Cina yang dalam pemberontakan tersebut masyarakat Muslim di sana telah turut serta dan banyak di antaranya yang terbunuh. Sebagian penduduk Muslim yang selamat melarikan diri dan menetap di Kedah. Kaisar Cina yang diberontak itu adalah Hi-Tsung (878-879) dari Dinasti T'ang. Kaum Muslimin yang menetap

itu kemudian melakukan kegiatan politik dan ini berakibat terjadinya pertentangan antara Sriwijaya dengan negeri Cina, karena Kedah berada di bawah perlindungan Sriwijaya.

Kondisi Sriwijaya pada abad ke-13 sudah mulai menurun dan perdagangannya sudah lemah. Hal itu merupakan situasi yang menguntungkan bagi pedagang Muslim. Pedagang-pedagang Muslim di beberapa daerah memperoleh keuntungan politik, yang dalam hal itu mereka merupakan pendukung politik berdirinya kerajaan yang bercorak Islam. Kerajaan pertama yang terbentuk dengan corak Islam ini adalah kerajaan Samudra Pasai yang berdiri pada abad ke-13.

Jika pada abad ke-13 sudah ada kerajaan yang bercorak Islam di Nusantara, maka ini berarti bahwa proses hubungan kaum Muslim dengan pribumi yang bergaul dalam waktu yang lama telah menghasilkan berdirinya sebuah institusi kerajaan yang bercorak Islam. Hal ini berarti pula bahwa orang pribumi telah berhubungan dan mengenal Islam melalui kegiatan perdagangan. Pedagang-pedagang yang menetap di pelabuhan-pelabuhan mendapat simpati dari penduduk pribumi, lebih-lebih masyarakat golongan bangsawan, karena pedagang Muslim ini memegang peranan penting dalam dunia perdagangan, yang di situ kaum bangsawan dan raja-raja memiliki saham. Hal yang mempermudah adalah karena Islam tidak mengenal adanya kasta. Seorang pemeluk agama Hindu dari kasta Sudra, yaitu kasta yang paling rendah dalam masyarakat Hindu, apabila dia masuk agama Islam, derajatnya akan sama dengan setiap pemeluk Islam lainnya. Hal ini berarti bahwa setiap Muslim mempunyai kewajiban

untuk mengajak umat lain memeluk agama Islam. Berbeda dengan agama Hindu, kewajiban seperti itu hanya dimiliki kasta Brahmana, kasta tertinggi di kalangan masyarakat Hindu.

Seorang musafir Portugis, Tome Pires, yang berlayar di sebagian besar daerah Nusantara pada permulaan abad ke-16 (1512-1515), menyebutkan bahwa hampir seluruh pesisir utara Jawa dan Sumatra sudah menganut agama Islam dan sudah banyak kerajaan yang bercorak Islam, hanya beberapa daerah pedalaman yang belum menganut Islam. Lebih mengherankan lagi ketika Kerajaan Majapahit sedang mencapai puncak kejayaannya, di jantung ibukota Majapahit telah terdapat kelompok kaum Muslimin dan hal ini terbukti dengan ditemukannya kelompok makam orang Islam yang bertuliskan angka tahun dari abad 14 dan 15 di sekitar Trowulan, Mojokerto. Kenyataan ini memperkuat dugaan bahwa di daerah pantai utara Jawa Timur, khususnya sekitar Gresik adalah daerah permukiman kaum Muslimin dan tempat kegiatan perdagangan serta sosial. Hal ini dapat dilihat dari bukti ditemukannya sebuah batu nisan berangka tahun 475 H atau 1082 M, yaitu makam Fatimah binti Maimun di Leran, Gresik.

Pertumbuhan masyarakat Muslim di pusat ibukota Kerajaan Majapahit dan di daerah-daerah pelabuhan, terutama seperti Gresik, Tuban, dan Jaratan, sangat erat hubungannya dengan tumbuhnya kekuasaan politik Samudera Pasai dan Malaka. Hubungan perdagangan yang sudah berlangsung lama dengan kerajaan dan pedagang Muslim, menyebabkan daerah-daerah pelabuhan itu menjadi pusat pertumbuhan masyarakat

Muslim. Pada tahap pertama hubungan antara raja-raja Majapahit dengan daerah kekuasaannya di daerah pesisir berjalan seperti biasa, tetapi setelah para adipati pesisir itu memeluk Islam dan mempunyai posisi perdagangan yang mantap dan kekuatan yang besar, barulah terasa ancaman itu datangnya dari para adipati pesisir. Pertikaian di kalangan keluarga Majapahit untuk memperebutkan kedudukan sebagai raja mempercepat proses penghancuran Majapahit. Proses kehancuran pusat pemerintahan Majapahit berkaitan dengan proses pertumbuhan kerajaan pantai yang bercorak Islam.

Proses kehancuran Majapahit menjadi sempurna setelah Demak muncul sebagai kekuatan politik dan pusat Islam di pantai utara Jawa. Sejak abad 15, Demak menjadi pusat kegiatan penyebaran Islam di tanah Jawa yang di pelopori oleh Wali Songo. Babad Banten bahkan menyebutkan bahwa ketika ada penyerangan dari Majapahit, maka di Demaklah para wali berkumpul untuk musyawarah menentukan langkah-langkah yang perlu diambil.

Dari berita Tome Pires dan berita-berita Babad setempat diketahui bahwa Demak berdiri sebagai kerajaan. Dengan Raden Patah sebagai raja, satu demi satu daerah pesisir utara Jawa mulai mengakui kekuasaan Demak. Lebih-lebih lagi ketika benteng kekuasaan Hindu di Jawa Barat dapat diduduki dengan jatuhnya Jayakarta oleh Falatehah, maka praktis hegemoni sudah tidak dapat dibendung lagi.

Namun demikian, masuknya Islam ke Nusantara memang belum diketahui secara pasti. Beberapa penelitian dan teori dilakukan untuk mengungkap sejarah tersebut, di antaranya

adalah teori proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia yang dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara dalam bukunya yang berjudul *Menemukan Sejarah*. Dia menyatakan bahwa terdapat tiga teori dalam melihat masuk dan berkembangnya Islam di Nusantara, yaitu teori Gujarat, teori Mekkah dan teori Persia.

1. Teori Gujarat

Teori ini mengungkapkan bahwa agama Islam masuk ke Indonesia pada abad 13 dan pembawanya berasal dari Gujarat (Cambay), India. Dasar dari teori ini adalah:

- a. Kurangnya fakta yang menjelaskan peranan bangsa Arab dalam penyebaran Islam di Indonesia (Nusantara).
- b. Hubungan dagang Indonesia dengan India telah lama melalui jalur Indonesia – Cambay – Timur Tengah – Eropa.
- c. Adanya batu nisan Sultan Samudra Pasai yaitu Malik Al-Saleh tahun 1297 yang bercorak khas Gujarat.

Pendukung teori Gujarat adalah Snouck Hurgronje, WF Stutterheim, dan Bernard H.M. Vlekke. Para ahli yang mendukung teori Gujarat, lebih memusatkan perhatiannya pada saat timbulnya kekuasaan politik Islam, yaitu adanya kerajaan Samudra Pasai. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marcopolo dari Venesia (Italia) yang pernah singgah di Perlak (Perureul) tahun 1292. Dia menceritakan

bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam.

2. Teori Mekkah

Teori ini merupakan teori baru yang muncul sebagai sanggahan terhadap teori lama, yaitu teori Gujarat. Teori Mekkah mengungkapkan bahwa Islam masuk ke Indonesia (Nusantara) pada abad ke-7 dan pembawanya berasal dari Arab (Mesir). Dasar teori ini adalah:

- a. Pada abad ke-7, tepatnya tahun 674, di pantai barat Sumatra sudah terdapat perkampungan Islam (Arab) dengan pertimbangan bahwa pedagang Arab sudah mendirikan perkampungan di Canton sejak abad ke-4. Hal ini juga sesuai dengan berita Cina.
- b. Kerajaan Samudra Pasai menganut mazhab Syafi'i, hal itu sesuai karena di Mesir dan Mekkah saat itu mayoritas juga bermazhab Syafi'i. Sementara itu, Gujarat/India adalah penganut mazhab Hanafi.
- c. Raja-raja Samudra Pasai menggunakan gelar "Al-Malik". Gelar tersebut berasal dari Mesir.

Pendukung teori Mekkah ini adalah Hamka, Van Leur, dan T.W. Arnold. Para ahli yang mendukung teori ini menyatakan bahwa abad 13 sudah berdiri kekuasaan politik Islam, jadi masuknya ke Indonesia terjadi jauh sebelumnya, yaitu abad ke-7, dan yang berperan besar terhadap proses penyebarannya adalah bangsa Arab sendiri.

3. Teori Persia

Teori ini berpendapat bahwa Islam masuk ke Indonesia abad 13 dan pembawanya berasal dari Persia (Iran). Dasar teori ini adalah kesamaan budaya Persia dengan budaya masyarakat Islam Indonesia seperti:

- a. Peringatan 10 Muharram atau Asyura atas meninggalnya Husein bin Ali, cucu Nabi Muhammad saw yang sangat dijunjung oleh masyarakat Syiah/Islam Iran. Di Sumatra Barat, peringatan tersebut disebut dengan upacara Tabuik/Tabut, sedangkan di pulau Jawa ditandai dengan pembuatan bubur Syuro.
- b. Ada kesamaan ajaran sufi yang dianut Syaikh Siti Jenar dengan sufi dari Iran, yaitu Al-Hallaj.
- c. Penggunaan istilah bahasa Iran dalam sistem mengeja huruf Arab untuk tanda tanda bunyi harakat.
- d. Ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim tahun 1419 di Gresik.

Pendukung teori ini antara lain adalah Umar Amir Husen dan P.A. Hussein Jayadiningrat.

Dari ketiga teori yang dikemukakan oleh Ahmad Mansur Suryanegara tersebut memiliki kebenaran dan kelemahan masing-masing, tetapi dari ketiga teori tersebut juga dapat ditarik kesimpulan bahwa Islam masuk pada abad ke-7 dengan jalan damai dan mulai berkembang pada abad ke-13, yang ketika itu

pemegang peranan dalam penyebaran Islam adalah bangsa Arab, Persia, dan Gujarat (India).

Dalam kitab sejarah Cina yang berjudul *Chiu T'hang Shu* disebutkan bahwa pada tahun 651 M atau 31 H, Cina pernah mendapat kunjungan diplomatik dari orang-orang Ta Shih (sebutan bangsa Cina untuk orang Arab). Pada masa Dinasti Umayyah, ada sebanyak 17 juta Muslim yang datang ke Cina. Sementara itu pada masa Dinasti Abbasiyah, dikirimlah 18 duta ke negeri Cina. Bahkan pada pertengahan abad ke-7 tercatat sudah berdiri beberapa perkampungan Muslim di daerah Kanfu (Canton). Jauh sebelum para penjelajah dari Eropa punya kemampuan mengarungi dunia, terlebih dulu pelayar-pelayar dari Arab dan Timur Tengah sudah mampu melayari rute dunia dengan intensitas yang cukup padat, dan pelayaran sejauh ini adalah rute pelayaran paling panjang yang pernah ada sebelum abad 16. Hal ini didukung pula oleh catatan para peziarah Buddha-Cina menjelang abad ke-7 yang kerap kali menumpang kapal-kapal ekspedisi milik orang-orang Arab untuk pergi ke India. Selain itu, pengembara Arab yang masyhur, Ibn Bathutah, mencatat perjalanannya ke beberapa wilayah Nusantara.

Para pengembara Arab ini tak hanya berlayar sampai di Cina, tapi juga terus menjelajah sampai di Timur Jauh yang pelayaran tersebut tentunya akan melewati Nusantara. Hal itu dikarenakan posisi strategis Nusantara (dulu dikuasai Sriwijaya) yang merupakan pintu masuk pelayaran barat untuk menuju Timur Jauh. Tidak ada satu ekspedisi yang akan menuju Cina tanpa melawat terlebih dahulu ke Sriwijaya.

Menurut Farid, yang dikutip oleh Azyumardi Azra dalam buku *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII* menyebutkan bahwa ada proses korespondensi yang berlangsung antara Kerajaan Sriwijaya yang pada masa itu dipimpin oleh Sri Indravarman dengan khalifah yang terkenal adil, khalifah Umar bin Abdul Azis.

“Dari Raja di Raja (Malik al-Amlak) yang merupakan keturunan seribu raja, yang istrinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan Tuhan-Tuhan lain dengan Tuhan. Saya telah mengirimkan kepada Anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekadar tanda persahabatan. Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.”

Demikian antara lain bunyi surat Raja Sriwijaya, Sri Indravarman, kepada Khalifah Umar bin Abdul Azis. Diperkirakan hubungan diplomatik antara kedua pemimpin wilayah ini berlangsung pada kurang lebih tahun 100 H atau 718 M. Tak dapat diketahui secara pasti apakah selanjutnya Raja Sri Indravarman memeluk Islam atau tidak, tapi hubungan antara

Sriwijaya dan pemerintahan Islam di Arab menjadi penanda babak baru agama Islam di Nusantara. Jika awalnya Islam masuk memainkan peranan hubungan ekonomi dan dagang, maka kini telah berkembang menjadi hubungan politik keagamaan. Pada kurun waktu ini pula Islam mengawali kiprahnya memasuki kehidupan raja-raja dan kekuasaan di wilayah-wilayah Nusantara.

Sriwijaya mengalami masalah serius yang berakibat pada kemunduran kerajaan pada awal abad ke-12. Kemunduran Sriwijaya ini memengaruhi pada perkembangan Islam di Nusantara. Faktor kemerosotan ekonomi juga membuat Sriwijaya menaikkan nilai upeti kepada kapal-kapal asing yang memasuki wilayahnya. Hal ini mengubah arus perdagangan yang telah berperan dalam penyebaran Islam.

Selain Sriwijaya disebut-sebut telah dijamah oleh dakwah Islam, daerah-daerah lain di Pulau Sumatra seperti Aceh dan Minangkabau juga menjadi lahan dakwah agama Islam. Bahkan di Minangkabau ada tambo (riwayat) yang mengisahkan tentang alam Minangkabau yang tercipta dari Nur Muhammad. Ini adalah salah satu jejak Islam yang berakar sejak mula masuk ke Nusantara. Di saat-saat itulah, Islam telah memainkan peran penting di ujung Pulau Sumatra. Kerajaan Samudera Pasai menjadi kerajaan Islam pertama yang dikenal dalam sejarah. Namun demikian, ada pendapat lain dari Prof. Ali Hasjmy (1978), yang menyatakan bahwa kerajaan Islam pertama adalah Kerajaan Perlak. Masih banyak perdebatan tentang hal ini, tetapi pada periode inilah Islam telah memegang peranan yang signifikan dalam sebuah kekuasaan.

Masuknya Islam ke Nusantara bertepatan pada masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya. Literatur kuno Arab yang berjudul *Aja'ib Al-Hind* yang ditulis oleh Buzurg bin Shahriyar Al-Ramhurmuzi pada tahun 1000 menuliskan bahwa terdapat perkampungan-perkampungan Muslim di wilayah Zabaj atau Sribuza (yang lebih dikenal dengan nama Sriwijaya). Hal ini sangat bisa diterima karena zaman itu adalah masa-masa keemasan Kerajaan Sriwijaya, salah satu kerajaan dengan bandar terbesar di Nusantara pada masanya.

Bandar dalam pengertiannya merupakan tempat berlabuh kapal-kapal atau persinggahan kapal-kapal dagang. Bandar juga merupakan pusat perdagangan di pesisir laut, bahkan juga digunakan sebagai tempat tinggal para pengusaha perkapalan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terletak pada jalur perdagangan internasional, memiliki banyak bandar besar. Bandar-bandar ini pada masa lalu memiliki peranan dan arti yang sangat penting dalam proses masuknya Islam ke Nusantara. Hal itu dikarenakan di bandar-bandar inilah para pedagang beragama Islam memperkenalkan Islam kepada para pedagang lain ataupun kepada penduduk lokal. Bisa juga dikatakan bahwa bandar menjadi pintu masuk penting dan pusat penyebaran agama Islam ke Nusantara. Hal itu bisa dilihat dari fakta bahwa pusat kerajaan Islam pada umumnya secara geografis terletak di pesisir-pesisir dan muara sungai.

Bandar juga menjadi tempat para pedagang untuk berinteraksi dengan masyarakat pribumi. Selain berdagang, para pedagang Islam juga melakukan syiar agama Islam kepada penduduk setempat, selanjutnya bahkan ada yang menetap dan

mendirikan perkampungan dagang Islam seperti perkampungan Pekojan yang didirikan oleh pedagang dari Gujarat. Dengan demikian maka intensitas interaksi antara pedagang Islam dan penduduk setempat semakin sering, bahkan hingga terjadi pernikahan antara pendatang dan wanita pribumi.

Perkembangan Islam yang cepat memunculkan tokoh ulama atau mubalig yang menyebarkan Islam melalui pendidikan dengan mendirikan pondok-pondok pesantren, tempat untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada masyarakat yang ingin belajar lebih jauh tentang agama Islam, baik penduduk setempat maupun dari berbagai wilayah lainnya yang terdiri dari berbagai kalangan dan status. Setelah lulus dari pondok pesantren, para alumninya merasa wajib melakukan syiar menjadi juru dakwah ke daerah masing-masing sehingga ajaran Islam begitu cepat berkembang dan masuk ke pelosok-pelosok.

Sementara itu, penduduk setempat yang telah memeluk agama Islam kemudian menyebarkan Islam kepada sesama pedagang setempat, juga kepada sanak familinya. Akhirnya, lahirlah keluarga dan anak-anak yang Islam. Hal ini berlangsung terus selama bertahun-tahun sehingga muncul komunitas Islam. Dari hal itulah kemudian terbentuk sebuah pemerintahan Islam, dengan kata lain menjadi akar dari lahirnya kesultanan-kesultanan Islam di Nusantara.

Berbagai cara dan metode dilakukan untuk menyebarkan agama Islam, di antaranya melalui perdagangan, pesantren dan syiar oleh santri-santri, hingga syiar Islam yang dipadukan dengan asimilasi dan akulturasi kebudayaan. Dalam buku "*Masuknya*

Islam ke Indonesia”, Hartini menyebutkan bahwa Islam tidak hanya masuk melalui syiar-syiar ke Indonesia, tetapi juga dengan mencampurkan kebudayaan Islam dengan kebudayaan lokal setempat. Berbagai contoh asimilasi dan akulturasi dalam hal ini antara lain:

1. Seni Bangunan

Wujud asimilasi dan akulturasi dalam seni bangunan dapat terlihat pada bangunan masjid, makam, dan istana. Wujud akulturasi dari masjid akan terlihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Atap berbentuk tumpang atau bersusun yang semakin ke atas semakin kecil, dari tingkatan paling atas berbentuk limas dengan jumlah atapnya berjumlah ganjil 1, 3, atau 5. Sementara itu pada ujungnya diberikan tekanan bentuk yang lebih kecil yang disebut dengan mustaka.
- b. Penggunaan kentongan dan bedug sebagai penyeru sebelum menyerukan azan. Kentongan dan bedug adalah budaya asli Nusantara.
- c. Masjid terletak dekat dengan istana, berada di sebelah barat alun-alun atau di tempat-tempat keramat, seperti di atas bukit atau dekat dengan makam. Gambaran masjid yang dimaksud adalah Masjid Agung Demak, Masjid Gunung Jati (Cirebon), Masjid Kudus, dan lain sebagainya.

2. Makam

- a. Peletakan makam-makam kuno dibangun di atas bukit atau tempat-tempat yang dianggap keramat.
- b. Adanya jirat atau kijing; makam yang terbuat dari bangunan batu, atau juga dikenal dengan sebutan nisan.
- c. Pendirian cungkup watu atau *kubba* di atas jirat/makam.
- d. Adanya tembok atau gapura yang menghubungkan antara makam dengan makam atau kelompok-kelompok makam yang berbentuk kori agung (beratap dan berpintu) atau berbentuk candi bentar (tidak beratap dan tidak berpintu).
- e. Pembangunan masjid di dekat makam, dikenal dengan sebutan masjid makam dan biasanya makam yang memiliki masjid adalah makam para wali atau raja.

3. Istana

Arsitektur istana yang dibangun pada awal perkembangan Islam, juga memperlihatkan adanya unsur akulturasi baik dari segi arsitektur atau ragam hias maupun dari seni patungnya. Hal ini dapat dilihat pada istana Kasultanan Yogyakarta yang juga dilengkapi dengan patung penjaga, *Dwarapala*, yaitu simbol penjaga yang diyakini pada ajaran agama Hindu.

4. Seni Rupa

Dalam Islam tidak dibenarkan menggambar bentuk manusia atau hewan, *Pandangan* ini dilakukan oleh kaum konservatif yang populer pada awal kemunculan agama Islam, kaum ini beranggapan bahwa segala bentuk peniruan adalah usaha menyaingi kesempurnaan Tuhan dan wujud keinginan menciptakan Tuhan baru. Tetapi banyak pula yang menyatakan pandangan bahwa bagaimanapun hasil penciptaan manusia tetap tidak akan bisa menyamai apa yang telah diciptakan oleh Tuhan ataupun berusaha menciptakan Tuhan itu sendiri, dengan tambahan bahwa seni rupa tidak hanya penjiplakan saja, tetapi diiringi pula dengan stilisasi yang memperlihatkan keagungan Pencipta.

Senirupa abstrak berkembang pesat dalam senirupa Islam. Senirupa abstrak muncul dalam karya lukisan, grafis, maupun hiasan dalam arsitektur bangunan-bangunan keagamaan atau bangunan-bangunan umum. Jika bangunan-bangunan keagamaan maupun umum di Eropa, dipenuhi dengan gambar-gambar representasional, di dunia Islam justru gambar-gambar representasional tidak muncul.

Komposisi karya seperti ini merupakan ciri khas pada seni rupa Islam berupa stilisasi berbagai bentuk tanaman atau makhluk hidup yang disusun silang menyilang, sehingga tidak menyisakan ruang. Unsur-unsur senirupa berupa amorf, geometrik, maupun biomorphic Islam sangat kuat pada karya seni rupa seperti itu. Seni rupa seperti ini dapat ditemukan pada gambar-gambar atap di masjid pada pintu

dan tiang juga ditemukan pada gapura-gapura baik masjid, istana kerajaan islam ataupun makam.

5. Aksara dan Seni Sastra

Masuknya agama Islam ke Indonesia memengaruhi bidang aksara atau tulisan, yang dari situ masyarakat mulai mengenal tulisan Arab. Bahkan melahirkan tulisan Arab Melayu atau biasanya dikenal dengan istilah Arab pegon. Di samping itu, berkembangnya seni kaligrafi yang digunakan sebagai motif hiasan ataupun lukisan adalah perkembangan kesenian dari huruf Arab itu sendiri.

Sementara itu, dalam seni sastra yang berkembang pada awal periode Islam adalah seni sastra yang berasal dari perpaduan sastra pengaruh Hindu-Buddha dan sastra Islam yang banyak mendapat pengaruh Persia. Dengan demikian, wujud akulturasi dalam seni sastra tersebut terlihat dari tulisan/aksara yang menggunakan huruf Arab Melayu dan isi ceritanya juga ada yang mengambil karya sastra yang berkembang pada zaman Hindu. Di antara berbagai bentuk seni sastra yang berkembang ialah:

- a. Babad, yaitu kisah rekaan pujangga keraton yang sering dianggap sebagai peristiwa sejarah. Contohnya, Babad Tanah Jawi (Jawa Kuno), Babad Cirebon, dan lain sebagainya.
- b. Suluk, yaitu kitab yang menjelaskan dan mengajarkan soal-soal tasawuf. Contohnya, Suluk Sukarsa, Suluk Wijil, Suluk Malang Sumirang, dan lain sebagainya.

- c. Primbon, yaitu hasil sastra yang sangat berhubungan dengan suluk karena kitab ini berisi ramalan-ramalan, keajaiban, dan penentuan hari baik atau buruk. Bentuk seni sastra Primbon banyak berkembang di Melayu dan Pulau Jawa.
- d. Hikayat, yaitu cerita atau dongeng yang berasal dari peristiwa atau tokoh sejarah. Hikayat ditulis dalam bentuk peristiwa atau tokoh sejarah yang berupa karangan bebas atau prosa. Beberapa contoh hikayat yang terkenal yaitu Hikayat 1001 Malam, Hikayat Amir Hamzah, Hikayat Pandawa Lima (Hindu), dan Hikayat Sri Rama (Hindu).

6. Sistem Pemerintahan

Dalam pemerintahan, sebelum Islam masuk Indonesia, terlebih dahulu berkembang pemerintahan yang bercorak Hindu-Buddha, tetapi setelah Islam masuk, maka kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha mengalami keruntuhan dan digantikan peranannya oleh kerajaan-kerajaan yang bercorak Islam, seperti Samudra Pasai, Demak, Malaka, dan sebagainya. Sistem pemerintahan yang bercorak Islam, rajanya bergelar Sultan atau Sunan, seperti halnya para wali. Apabila raja meninggal, maka tidak lagi dimakamkan di candi atau dicandikan, tetapi dimakamkan secara Islam. Demikianlah penjelasan wujud akulturasi dalam sistem pemerintahan.

7. Sistem Kalender

Masyarakat Indonesia sudah mengenal kalender Saka sebelumnya (kalender Hindu) yang dimulai tahun 78 M sebelum budaya Islam masuk ke Nusantara. Dalam kalender Saka ditemukan nama-nama pasaran hari seperti Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Namun demikian, setelah berkembangnya agama Islam, Sultan Agung dari kerajaan Mataram Islam menciptakan kalender Jawa, dengan perhitungan yang menggunakan peredaran bulan (*qamariyah*) seperti tahun Hijriah (Islam). Sultan Agung melakukan perubahan pada nama-nama bulan seperti Muharram diganti dengan Syura, Ramadan diganti dengan Pasa, dan lain sebagainya. Sementara itu, dalam penamaan hari tetap menggunakan penamaan hari sesuai dengan bahasa Arab. Bahkan hari pasaran pada kalender Saka juga masih dipergunakan. Kalender Sultan Agung dimulai pada tanggal 1 Syura 1555 Jawa, atau tepatnya 1 Muharram 1053 H yang bertepatan dengan tanggal 8 Agustus 1633 M.

Munculnya Kerajaan-kerajaan Islam

Islam berkembang di Nusantara ini melalui kehadiran individu-individu Muslim dari asing dan dari penduduk pribumi sendiri yang telah memeluk Islam. Dengan usaha mereka pada masa lalu, Islam tersebar hingga menjadi agama mayor di Indonesia saat ini. Langkah penyebaran Islam mulai dilakukan secara besar-besaran ketika dakwah telah memiliki orang-orang

yang khusus menyebarkan dakwah. Setelah fase itu, kerajaan-kerajaan Islam pun mulai terbentuk.

Di Nusantara ini, pada masa lalu banyak berdiri kerajaan-kerajaan Islam. Hal itu dikarenakan pengaruh Islam sudah mulai menguat sehingga keberadaan kerajaan-kerajaan Islam tersebut mampu menggantikan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang telah lebih dulu berdiri di bumi Nusantara ini. Pada pembahasan setelah ini, akan diuraikan lebih lanjut tentang beberapa kerajaan Islam besar yang pernah ada di bumi Nusantara yang keberadaannya merupakan siklus penting tentang perkembangan Islam yang terkait dengan politik, sosial, ekonomi, dan sejarah Indonesia.

KERAJAAN PERLAK

Sejarah Berdirinya Kerajaan Perlak

Perlak yang terletak di Aceh Timur disebut sebagai kerajaan Islam pertama (tertua) di Nusantara, bahkan di Asia Tenggara. Hal itu didasarkan pada satu dokumen tertua bernama kitab *Idharul Haq Fi Mamlakatil Peureulak* karangan Abu Ishak Al-Makarani Sulaiman Al-Pasy. Namun demikian, kitab yang dijadikan sumber satu-satunya tersebut juga menyisakan keraguan. Sebagian sejarawan meragukan keabsahan dari kitab tersebut, apalagi kitab yang diperlihatkan dalam sebuah seminar penetapan bahwa Perlak itu kerajaan Islam pertama di Nusantara tersebut bukan dalam bentuk asli dan sudah tidak utuh lagi, melainkan hanya lembaran lepas.

Kitab itu sendiri masih misteri, karena sampai sekarang belum ditemukan dalam bentuk aslinya sehingga ada yang mengatakan bahwa kitab *Idharul Haq Fi Mamlakatil Peureulak* hanya satu rekayasa sejarah untuk menguatkan pendapat bahwa

berdasarkan kitab itu, Perlak adalah benar-benar kerajaan Islam pertama di Aceh dan Nusantara. Banyak peneliti sejarah yang secara kritis meragukan Perlak sebagai tempat pertama berdirinya kerajaan Islam besar di Aceh.

Hal itu juga diperkuat dengan belum ditemukannya artefak-artefak atau situs-situs tertua peninggalan sejarah sehingga para peneliti lebih cenderung menyimpulkan kerajaan Islam pertama di Aceh dan Nusantara adalah Kerajaan Islam Samudra Pasai yang terdapat di Aceh Utara. Banyak bukti yang meyakinkan, baik dalam bentuk teks maupun benda-benda arkeologis lainnya, seperti mata uang dirham Pasai dan batu-batu nisan yang bertuliskan tahun wafatnya para Sultan Kerajaan Islam Samudra Pasai. Keraguan para sejarawan tentang Kerajaan Perlak sebagai bekas kerajaan Islam pertama yang hanya mengambil dari sumber kitab *Idharul Haq Fi Mamlakatil Peureulak* perlu ditelaah lebih jauh lagi. Namun demikian, pembahasan tentang Kerajaan Perlak kali ini bukanlah perdebatan tentang status ketertuaan Kerajaan Perlak di Nusantara, melainkan uraian tentang Kerajaan Perlak itu sendiri sebagai sebuah kerajaan Islam yang bersejarah dan sebagai bukti bahwa Islam ketika itu sudah memiliki akar kuat untuk menancapkan pengaruh serta ajaran-ajarannya di Nusantara.

Kerajaan Perlak merupakan kerajaan yang terkenal sebagai penghasil kayu Perlak yang merupakan kayu yang berkualitas bagus untuk bahan baku pembuatan kapal. Tidak mengherankan jika para pedagang dari Gujarat, Arab, dan India tertarik untuk datang ke wilayah Perlak.

Karena banyak disinggahi oleh para pedagang, pada awal abad ke-8, Kerajaan Perlak berkembang sebagai bandar niaga yang amat maju. Hal ini tidak terlepas dari letak yang strategis pula di ujung utara pulau Sumatra atau berada di bibir masuk selat Malaka. Kondisi ini membuat maraknya perkawinan campuran antara para saudagar Muslim dengan penduduk setempat. Dengan demikian, realitas seperti itu mendorong perkembangan Islam yang pesat dan pada akhirnya memunculkan Kerajaan Islam Perlak sebagai kerajaan Islam di Nusantara.

Perlak adalah sebuah kerajaan dengan masa pemerintahan cukup panjang. Kerajaan yang berdiri pada tahun 840 ini berakhir pada tahun 1292 karena bergabung dengan Kerajaan Samudra Pasai. Sejarah Kerajaan Perlak tidak terlepas dari kisah seorang Sayid Maulana Ali Al-Muktabar yang datang ke Perlak beserta orang-orang Arab dari Bani Hasyim atau keturunan Rasulullah saw lainnya yang datang ke Aceh dan wilayah Nusantara lainnya. Mereka datang ke Aceh dalam rangka melakukan perdagangan sekaligus menyiarkan agama Islam. Mereka kemudian berbaur dan menikah dengan penduduk setempat.

Seperti diketahui dalam sejarah Islam, setelah masa *Al-Khulārah Al-Rasyidun* berakhir, secara politik muncullah dua dinasti besar, yakni Dinasti Umayyah dan Dinasti Abbasiyah. Berangkat dari perbedaan politik, pada waktu yang sama, muncul pula banyak aliran pemahaman dan pengamalan Islam, seperti aliran Sunni, Syiah, Khawarij dan lain sebagainya. Sementara itu, Dinasti Umayyah dan Abbasiyah sangat menentang aliran Syiah yang dipimpin oleh keturunan Ali bin Abi Thalib yang juga menantu Rasulullah saw. Oleh karena itu,

tidak mengherankan aliran Syiah pada era dua dinasti ini tidak mendapatkan tempat yang aman. Karena jumlahnya minoritas, banyak penganut Syiah terpaksa harus menyingkir dari wilayah yang dikuasai oleh dua dinasti tersebut. Pada masa Khalifah Al-Makmun bin Harun Al-Rasyid (167-219 H/813-833M), salah satu keturunan Ali bin Abi Thalib di Mekkah yang bernama Muhammad bin Ja'far Al-Shadiq menentang pemerintahan yang berpusat di Baghdad. Muhammad bin Ja'far Al-Shadiq adalah Imam Syiah ke-6 yang juga masih keturunan Rasulullah saw. Adapun silsilahnya sampai ke Rasulullah saw adalah sebagai berikut: Muhammad bin Ja'far Al-Shadiq bin Muhammad Al-Baqir bin Ali Muhammad Zain Al-Abidin bin Husain Al-Syahid bin Fatimah binti Muhammad saw.

Khalifah Al-Makmun akhirnya mengirim pasukan ke Mekkah untuk meredakan pemberontakan kaum Syiah yang dipimpin oleh Muhammad bin Ja'far Al-Shadiq tersebut. Kaum pemberontak dapat ditumpas, namun Muhammad bin Ja'far Al-Shadiq dan para penganutnya tidak dibunuh, tetapi disarankan oleh Khalifah Al-Makmun untuk berhijrah dan menyebarkan Islam ke Hindi, Asia Tenggara, dan daerah sekitarnya. Sebagai tindak lanjut, maka berangkatlah satu kapal yang memuat rombongan angkatan dakwah yang kemudian hari dikenal di Aceh dengan sebutan “Nakhoda Khalifah” yang mempunyai misi menyebarkan Islam.

Salah satu anggota dari Nakhoda Khalifah itu adalah Sayid Ali Al-Muktabar bin Muhammad Diba'i bin Imam Ja'far Al-Shadiq. Menurut kitab *Idharul Haq Fi Mamlakatil Peureulak*, pada tahun 173 H (800 M), Bandar Perlak disinggahi oleh satu

kapal yang membawa kurang lebih 100 orang dai yang terdiri atas orang-orang Arab dari suku Quraisy, Palestina, Persia, dan India di bawah pimpinan Nakhoda Khalifah. Mereka datang untuk berdagang sekaligus sambil berdakwah. Setiap orang mempunyai keterampilan khusus baik di bidang pertanian, kesehatan, pemerintahan, strategi, taktik perang, maupun keahlian-keahlian lainnya.

Ketika sampai di Perlak, rombongan Nakhoda Khalifah disambut dengan damai oleh penduduk dan penguasa Perlak yang berkuasa saat itu, yakni Meurah Syahir Nuwi. Dengan cara dakwah yang sangat menarik, akhirnya Meurah Syahir Nuwi memeluk agama Islam sehingga menjadi penguasa pertama yang menganut Islam di Perlak. Di sisi lain, sambil berdakwah, mereka juga menularkan keahlian itu kepada penduduk lokal secara perlahan-lahan untuk diterapkan dalam kehidupan mereka.

Kegiatan-kegiatan ini rupanya menarik penduduk lokal sehingga seiring berjalannya waktu, mereka tertarik masuk Islam secara suka rela. Sebagian dan anggota rombongan itu menikah dengan penduduk lokal, termasuk Sayid Ali Al-Muktabar yang menikah dengan adik Syahir Nuwi yang bernama Putri Tansyir Dewi. Pernikahan Sayid Ali Al-Muktabar ini dianugerahi seorang putra bernama Sayid Maulana Abdul Aziz Syah. Sayid Maulana Abdul Aziz Syah ini ketika dewasa dinobatkan menjadi sultan pertama Kerajaan Islam Perlak, bertepatan pada tanggal 1 Muharram 225 H.

Dengan berdirinya Kerajaan Islam Perlak, semakin banyak orang Arab yang datang untuk berdagang, baik dari kalangan Syiah maupun Sunni. Mereka tidak hanya berdagang, tetapi

juga menyebarkan ajaran Islam yang mereka yakini. Kalangan Sunni memengaruhi elite lokal yang juga masih kerabat istana Perlak. Sementara itu, kedua aliran ini (Syiah dan Sunni) terus menyebarkan pengaruhnya hingga sampai pada perebutan kekuasaan dan perlawanan terbuka yang terjadi pada masa sultan Perlak keempat, yakni Sultan Sayid Maulana Ali Mughayat Syah (915-918 M). Perebutan akhirnya dimenangkan pihak Sunni sekaligus menandai keruntuhan Dinasti Sayid atau Aziziyah dan lahirnya Dinasti Makhдум. Dengan demikian, sultan kelima Perlak sekaligus sultan pertama dari kalangan Sunni adalah Sultan Makhдум Alaidin Malik Abdul Kadir Syah Johan Berdaulat (918-922 M).

Untuk stabilitas Perlak, golongan Syiah diangkat menjadi perdana menteri. Wakil Syiah Maulana Abdullah pun diangkat menjadi perdana menteri oleh sultan Perlak keenam, yakni Sultan Makhдум Alaidin Malik Muhammad Amin Syah Johan Berdaulat (922-946 M). Sultan Muhammad Amin Syah sendiri adalah seorang ulama besar sekaligus pengasuh pondok pesantren Cot Kala. Namun demikian, ternyata pengangkatan Maulana Abdullah sebagai perdana menteri belum mampu meredam perlawanan kaum Syiah sampai akhirnya terjadi perang saudara pada masa sultan ketujuh, yakni pada masa kekuasaan Sultan Makhдум Alaidin Abdul Malik Syah Johan Berdaulat (946-973 M).

Perang ini berlangsung sampai empat tahun dan baru berakhir setelah dibuat perjanjian damai yang dikenal dengan Perjanjian Alue Meuh pada tanggal 10 Muharram 353 H. Perjanjian tersebut mengatur pembagian Perlak menjadi dua:

Perlak Baroh (berpusat di Bandar Khalifah) dengan wilayah di pesisir pantai diserahkan kepada Dinasti Aziziyah dan Perlak Tunong dengan wilayah di pedalaman diserahkan kepada Dinasti Makhdum. Sejak saat itu, tercapailah perdamaian antara kedua aliran tersebut dan Islam semakin menyebar di Sumatra bagian utara. Namun demikian, Islam Syiah tidak berkembang karena Perlak Baroh dihancurkan Sriwijaya dalam suatu serangan tahun 986. Pada saat itu, Perlak Baroh dipimpin Sultan Sayid Maulana Mahmud Syah (976-988). Sultan Sayid Maulana Mahmud Syah juga meninggal dalam usaha mempertahankan kerajaannya. Kerajaan Perlak Tunong yang dikuasai kaum Sunni selamat karena Sriwijaya terpaksa harus menarik mundur pasukannya dari Perlak karena mendapat ancaman dari Dharma Bangsa dan Jawa.

Islam Sunni terus berkembang bahkan pada zaman Sultan Makhdum Alaidin Malik Ibrahim Syah Johan Berdaulat (1012-1059 M) menyatukan kedua wilayah Perlak tersebut dalam satu bendera Perlak. Bahkan gerakana Sunni berhasil mengislamkan Raja Lingga, Adi Genali, melalui utusannya yang bernama Syekh Sirajuddin.

Sejak berdiri sampai bergabungnya Perlak dengan kerajaan Samudra Pasai, terdapat 19 orang raja yang memerintah. Raja yang pertama ialah Sultan Alaidin Saiyid Maulana Abdul Aziz Syah (225–249 H/840–964 M). Sultan bernama asli Saiyid Abdul Aziz tersebut pada tanggal 1 Muhharam 225 H dinobatkan menjadi Sultan Kerajaan Perlak. Setelah pengangkatan ini, Bandar Perlak diubah menjadi Bandar Khalifah. Sementara itu, kerajaan ini mengalami masa kejayaannya pada masa

pemerintahan Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat (622-662 H/1225-1263 M). Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat, terutama dalam bidang pendidikan Islam dan perluasan dakwah Islam.

Sultan mengawinkan dua putrinya: Putri Ganggang Sari (Putri Raihani) dengan Sultan Malik Al-Saleh dari Samudra Pasai serta Putri Ratna Kumala dengan Raja Tumasik (Singapura sekarang). Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat kemudian digantikan oleh Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Syah Johan Berdaulat (662-692 H/1263-1292 M). Inilah sultan terakhir Perlak. Setelah wafat, Perlak disatukan dengan Kerajaan Samudra Pasai dengan raja Muhammad Malik Al-Dhahir, putra Sultan Malik Al-Saleh dengan Putri Ganggang Sari.

Para Sultan Perlak dapat dikelompokkan menjadi dua dinasti, yaitu Dinasti Sayid Maulana Abdul Azis Syah dan Dinasti Johan Berdaulat. Di bawah ini merupakan nama-nama sultan yang memerintah Kerajaan Perlak:

- Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Azis Syah (840 – 864) berpaham sunni
- Sultan Alaidin Sayid Maulana Abdul Rahim Syah (864 – 888) berpaham sunni
- Sultan Alaidin Sayid Maulana Abbas Syah (888 – 913) berpaham sunni

- Sultan Alaidin Sayid Maulana Ali Mughat Syah (915 – 918) berpaham syiah
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Abdul Kadir (928 – 932) berpaham syiah
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Muhammad Amin (932 – 956) berpaham syiah
- Sultan Makhдум Alaidin Abdul Malik (956 – 983) berpaham syiah
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Ibrahim (986 – 1023) berpaham sunni
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Mahmud (1023 – 1059) berpaham sunni
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Mansur (1059 – 1078) berpaham sunni
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Abdullah (1078 – 1109) berpaham sunni
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Ahmad (1109 – 1135) berpaham sunni
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Mahmud (1135 – 1160) berpaham sunni
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Muhammad (1173 – 1200) berpaham sunni
- Sultan Makhдум Alaidin Malik Abdul Jalil (1200 – 1230) berpaham sunni

- Sultan Makhdum Alaidin Malik Muhammad Amin (1230 – 1267) berpaham sunni
- Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz (1267 – 1292). berpaham sunni

Pergolakan

Pergolakan pada Kerajaan Perlak lebih dipengaruhi oleh adanya perbedaan aliran Islam antara Sunni dengan Syiah. Perbedaan ini telah berlangsung lama, tatkala Dinasti Umayyah dan Abbasiyah sangat menentang aliran Syiah yang dipimpin oleh keturunan Ali bin Abi Thalib.

Sejarah keislaman di Kesultanan Perlak tidak luput dari persaingan antara kelompok Sunni dan Syiah. Perebutan kekuasaan antara dua kelompok Muslim ini menyebabkan terjadinya perang saudara dan pertumpahan darah. Silih berganti kelompok yang menang mengambil alih kekuasaan dari tangan pesaingnya.

Aliran Syiah datang ke Indonesia melalui para pedagang dari Gujarat, Arab, dan Persia. Mereka masuk pertama kali melalui Kesultanan Perlak dengan dukungan penuh dari Dinasti Fatimiyah di Mesir. Ketika dinasti ini runtuh pada tahun 1268, hubungan antara kelompok Syiah di pantai Sumatra dengan kelompok Syiah di Mesir mulai terputus. Kondisi ini menyebabkan konstelasi politik Mesir berubah haluan. Selanjutnya Dinasti Mamaluk memerintahkan pasukan yang dipimpin oleh Syaikh Ismail untuk pergi ke pantai timur

Sumatra dengan tujuan utamanya adalah menyebarkan pengikut Syiah di Kesultanan Perlak dan Kerajaan Samudra Pasai.

Sebagai informasi tambahan, raja pertama Kerajaan Samudera Pasai, Marah Silu dengan gelar Malik Al-Saleh berpindah agama, awalnya beragama Hindu kemudian memeluk Islam aliran Syiah. Karena bujukan Syaikh Ismail, Marah Silu kemudian menganut paham Syafii yang identik dengan aliran Sunni. Dua pengikut Marah Silu, Seri Kaya dan Bawa Kaya juga menganut paham Syafii, sehingga nama mereka berubah menjadi Sidi Ali Chiatuddin dan Sidi Ali Hasanuddin. Ketika berkuasa, Marah Silu dikenal sebagai raja yang sangat anti terhadap pemikiran dan pengikut Syiah.

Aliran Sunni mulai masuk ke Kesultanan Perlak pada masa pemerintahan sultan ke-3, Sultan Alaidin Syed Maulana Abbas Shah. Setelah sultan meninggal pada tahun 363 H (913 M), terjadi perang saudara antara kaum Syiah dan Sunni, yang menyebabkan kesultanan dalam kondisi tanpa pemimpin. Pada tahun 302 H (915 M), kelompok Syiah memenangkan perang. Sultan Alaidin Syed Maulana Ali Mughat Shah dari aliran Syiah kemudian memegang kekuasaan kesultanan sebagai sultan ke-4 (915-918). Ketika pemerintahannya berakhir, terjadi pergolakan antara kaum Syiah dan Sunni, hanya saja untuk kali ini justru dimenangkan oleh kelompok Sunni.

Kurun waktu antara tahun 918 hingga tahun 956 relatif tidak terjadi gejolak yang berarti. Hanya saja, pada tahun 362 H (956 M), setelah sultan ke-7, Sultan Makhdom Alaidin Abdul Malik Shah Johan Berdaulat meninggal, dan terjadilah

pergolakan lagi antara kelompok Syiah dan Sunni selama kurang lebih empat tahun. Bedanya, pergolakan kali ini diakhiri dengan adanya iktikad perdamaian dari keduanya. Kesultanan kemudian dibagi menjadi dua bagian, Perlak Pesisir (Syiah) yang dipimpin oleh Sultan Alaidin Syed Maulana Shah (986-988) dan Perlak Pedalaman (Sunni) yang dipimpin oleh Sultan Makhдум Alaidin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat (986-1023).

Kedua kepemimpinan tersebut bersatu kembali ketika salah satu dari kedua pemimpin wilayah tersebut, yaitu Sultan Alaidin Syed Maulana Syah meninggal. Ia meninggal ketika Perlak berhasil dikalahkan oleh Kerajaan Sriwijaya. Kondisi perang inilah yang membangkitkan semangat bersatunya kembali kepemimpinan dalam Kesultanan Perlak. Sultan Makhдум Alaidin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat, yang awalnya hanya menguasai Perlak di pedalaman kemudian ditetapkan sebagai Sultan ke-8 pada Kesultanan Perlak. Ia melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 1006.

Penggabungan dengan Kerajaan Samudra Pasai

Setelah perdamaian antara kaum Sunni dan Syiah, Sultan Makhдум Alaidin Malik Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat melanjutkan perjuangan melawan Sriwijaya hingga tahun 1006. Sultan melakukan politik persahabatan dengan negeri-negeri tetangga untuk memperkuat kekuatan guna menghadapi serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Sultan juga menikahkan dua putrinya dengan para pemimpin kerajaan

tetangga. Putri Ratna Kamala dinikahkan dengan Raja Kerajaan Malaka, Sultan Muhammad Syah (Parameswara) dan Putri Ganggang dinikahkan dengan Raja Kerajaan Samudra Pasai, Malik Al-Saleh. Kesultanan Perlak berakhir setelah sultan yang ke-18, Sultan Makhdum Alaidin Malik Abdul Aziz Johan Berdaulat meninggal pada tahun 1292.

Kesultanan Perlak pun pada akhirnya menyatu dengan Kerajaan Samudra Pasai di bawah kekuasaan Samudera Pasai yang memerintah pada saat itu, Sultan Muhammad Malik Al-Dhahir yang juga merupakan putra dari Malik Al-Saleh. Pada masa ini, berakhirlah Kerajaan Perlak.

KERAJAAN SAMUDERA PASAI

Sejarah Berdirinya Kerajaan Samudera Pasai

Awal berdirinya Kerajaan Pasai, yang juga dikenal sebagai Samudera Darussalam atau Samudera Pasai, belum diketahui secara pasti dan masih menjadi perdebatan para ahli sejarah. Namun, dalam sebuah catatan *Rihlah ila I-Masyriq* (Pengembaraan ke Timur) dari Ibnu Batutah dapat ditarik kesimpulan bahwa Kerajaan Samudera Pasai berdiri lebih awal dibandingkan dinasti Usmani di Turki yang pernah menjadi salah satu dinasti terbesar di dunia. Jika dinasti Turki Usmani mulai menancapkan kekuasaannya pada tahun 1385 M, maka Kerajaan Samudera Pasai lebih dahulu menebarkan pengaruhnya di Asia Tenggara kira-kira pada tahun 1297.

Catatan Ibnu Batutah tersebut bertuliskan “Sebuah negeri yang hijau dengan kota pelabuhannya yang besar dan indah,” ketika menggambarkan kekagumannya terhadap keindahan dan

kemajuan Kerajaan Samudera Pasai yang sempat disinggahinya selama 15 hari pada 1345 M. pendapat bahwa kerajaan Samudra Pasai lebih tua dari dinasti Usmani di Turki dikuatkan dengan catatan dari Marco Polo, seorang penjelajah asal Venezia (Italia), yang telah mengunjungi Samudera Pasai pada 1292 M. Marco Polo bertandang ke Samudera Pasai saat menjadi pemimpin rombongan yang membawa ratu dari Cina ke Persia. Bersama dua ribu orang pengikutnya, Marco Polo singgah dan menetap selama lima bulan di bumi Serambi Makkah itu. Dan perjalanan dari Marco Polo tersebut dituliskan dalam sebuah buku yang berjudul *Travel of Marco Polo*.

Sejumlah ahli sejarah Eropa pada masa pendudukan Kolonial Hindia Belanda seperti Snouck Hurgronje, J.P Moquette, J.L. Moens, dan J. Hulshoff Poll yang sudah beberapa kali menyelidiki asal-usul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai menyebutkan bahwa Kerajaan Samudera Pasai muncul sekitar pertengahan abad ke-13 M dengan Sultan Malik al-Saleh (kadang ditulis Malik Ul Salih, Malik Al Saleh, Malikussaleh, Malik Al Salih, atau Malik Ul Saleh) sebagai raja pertamanya.

Nama Samudera Pasai sendiri sebenarnya adalah “*Samudera Aca Pasai*” yang berarti “Kerajaan Samudera yang baik dengan ibukota di Pasai.” Meski pusat pemerintahan kerajaan itu sekarang tidak diketahui secara pasti, tetapi para ahli sejarah memperkirakan lokasinya berada di sekitar Blang Melayu. Konon, nama “Samudera” yang dipakai sebagai nama kerajaan itulah yang kini menjadi nama pulau Sumatera karena adanya pengaruh dialek oleh orang-orang Portugis. Sebelumnya, nama pulau tersebut adalah Perca. Berbeda dengan

orang Portugis, seperti yang bisa dilihat dalam tulisan-tulisan I'tsing, para pengelana Tiongkok menyebut Sumatera dengan “ChinCou” atau pulau emas. Sementara Raja Kertanegara dari Singosari yang terkenal itu menyebut pulau ini dengan sebutan “*Suvarnabhumi*” atau “*Swarnabhumi*” yang artinya pulau emas.



Gambar 1.1. Peta Lokasi Kerajaan Aceh

Kerajaan Samudera Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, kurang lebih terletak di kota Lhokseumawe, Aceh Utara. Beberapa kitab atau catatan

yang digunakan untuk melacak sejarah Kerajaan Samudera Pasai antara lain adalah *Hikayat Raja Pasai*, *Sejarah Melayu*, dan *Hikayat Raja Bakoy*. Meski nuansa mitos yang masih kental di dalamnya tak jarang menjadi kendala ketika karya ini hendak ditafsirkan, *Hikayat Raja Pasai* tercatat sudah memberikan andil yang cukup besar dalam menguak riwayat Kesultanan Samudera Pasai.

Sementara terkait penamaan Samudera Pasai, J.L. Moens menyatakan bahwa kata “Pasai” berasal dari kata “Parsi.” Menurut Moens, pada abad ke-7 banyak pedagang yang berasal dari Parsi atau Persia yang mengucapkan kata Pasai dengan kata *Pa’Se*. Pendapat J.L Moens ini mendapatkan dukungan dari beberapa peneliti sejarah lainnya, seperti oleh Prof. Gabriel Ferrand melalui bukunya yang berjudul *L’Empire Sumatranais de Crivijaya* dan oleh Prof. Paul Wheatley dengan buku *The Golden Khersonese*. Baik Gabriel maupun Paul menyandarkan data-datanya pada keterangan dari para pengelana Timur Tengah yang melakukan perjalanan ke Asia Tenggara. Mereka berdua juga meyakini bahwa pada abad ke-7, pelabuhan atau bandar-bandar besar di Asia Tenggara dan di kawasan Selat Malaka telah ramai dikunjungi oleh para pedagang dari Asia Barat. Data tersebut diperkuat oleh fakta bahwa di setiap kota dagang tersebut sudah ada permukiman-permukiman pedagang Islam yang singgah dan menetap di sana.

Di tempat lain, H. Mohammed Said, seorang penulis yang mendedikasikan hidupnya untuk meneliti dan menerbitkan buku-buku perihal Aceh, termasuk meneliti kerajaan Samudera Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam, menyatakan bahwa

kata “Pasai” dalam Samudera Pasai berasal dari para pedagang Cina. Menurutnya, kata “*Po Se*” yang populer digunakan pada pertengahan abad ke-8 M identik dengan penyebutan kata “Pase” atau “Pasai”. Ada juga pendapat lain yang menyatakan bahwa “Pasai” berasal dari kata “*Tapasai*” yang berarti “tepi laut.” Kata “Tapa” sendiri masih banyak ditemui dalam bahasa Polinesia yang berarti “tepi”, sedangkan kata “Sai” berarti “pantai”. Jadi, baik “Samudera” atau “Pasai” memiliki arti yang hampir sama yaitu “negara yang terletak di tepi laut.”

Seorang pencatat asal Portugis, Tome Pires, yang pernah menetap di Malaka pada kurun waktu 1512-1515, menyebutkan bahwa Pasai adalah kota terpenting untuk seluruh Sumatera pada zamannya. Menurut Pires, penduduk Pasai waktu itu kurang lebih berjumlah 20.000 orang. Sementara itu, Marco Polo dalam lawatannya dari Tiongkok ke Persia pada tahun 1267 M yang kemudian singgah ke Pasai pada tahun 1292 M menuliskan bahwa saat itu sudah ada kerajaan Islam di Nusantara yang tak lain adalah Samudera Pasai.

Kala itu Marco Polo ikut dalam rombongan Italia yang mendapatkan undangan dari Kubilai Khan, raja Mongol yang menguasai daerah Tiongkok. Menurut Marco Polo, penduduk Pasai waktu itu belum banyak yang memeluk Islam, namun komunitas orang-orang Arab atau *Saraceen* sudah cukup banyak dan berperan penting dalam upaya mengislamkan penduduk Aceh. Marco Polo menyebut daerah tersebut sebagai *Giava Minor* atau *Java Minor* (Jawa Kecil).

Sementara itu, dalam “Seminar Sejarah Nasional” yang diselenggarakan di Medan, Sumatera Utara pada 17-20 Maret 1963, maupun dalam “Masuk dan Berkembangnya Islam di Daerah Istimewa Aceh” yang diselenggarakan pada 10-16 Juli 1978 di Banda Aceh, yang dihadiri di antaranya adalah Prof. Hamka, Prof A. Hasjmy, Prof H. Aboe Bakar Atjeh, H. Mohammad Said dan M.D. Mansoer, telah menemukan perbedaan pada cara pandang sejarah berdirinya Kerajaan Samudera Pasai. Berdasarkan petunjuk dan sumber-sumber yang lebih baru, di antaranya dari para musafir Arab dan Tiongkok yang pernah ke Asia Tenggara dan ditambah dengan dua catatan lokal, yaitu *Idharul Haq Fi Mamlakatil Peureulak* karya Abu Ishak Al-Makarany dan *Tawarich Raja-raja Kerajaan Aceh* karya Yunus Djamil, para pakar sejarah nasional itu menyimpulkan bahwa Kesultanan Samudera Pasai sudah berdiri sejak abad ke-11 (tahun 433 H/1042 M), dengan pendiri dan sultan pertamanya adalah Maharaja Mahmud Syah, yang memerintah pada tahun 433-470 H/1042-1078 M.

Menurut G.P. Rouffaer, sejarawan Belanda yang serius mendalami sejarah Kerajaan Samudera Pasai, menyimpulkan bahwa letak Pasai mula-mula berada di sebelah kanan Sungai Pasai sementara Samudera berada di sebelah kiri sungai. Kemudian lambat laun kedua tempat tersebut menjadi satu menjadi Samudera Pasai. Jelasnya, Kerajaan Samudera Pasai adalah daerah aliran sungai yang hulunya berada jauh di pedalaman daratan tinggi Gayo, Kabupaten Aceh Tengah.

Ada banyak teori yang berkembang tentang perkiraan asal-usul berdirinya Kerajaan Samudera Pasai. Salah satu pendapat

menyatakan bahwa Kerajaan Samudera Pasai merupakan kelanjutan dari kerajaan-kerajaan pra-Islam yang sudah ada sebelumnya. Hal ini seperti yang tertuang dalam buku berjudul *Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam Di Nusantara* karya Slamet Muljana yang menyatakan bahwa Nazimuddin Al-Kamil, Laksamana laut dari Dinasti Fatimiyah di Mesir berhasil menaklukkan kerajaan Hindu-Buddha yang berada di Aceh dan menguasai salah satu daerah subur yang ada di sana yaitu Pasai. Nazimuddin Al-Kamil kemudian mendirikan kerajaan kecil di Pasai pada tahun 1128 M dengan nama Samudera Pasai.

Alasan Dinasti Fatimiyah melakukan penaklukan terhadap Pasai sendiri adalah karena memang ingin menguasai bandar dagang yang saat itu sangat ramai di Selat Malaka. Bukan hanya itu, Dinasti Fatimiyah juga telah mengerahkan armada perangnya untuk merebut kota Kambayat di Gujarat Arab dan menyerang penghasil lada, yakni Kampar Kanan dan Kampar Kiri di Minangkabau. Dalam ekspedisi tersebut, Nazimuddin Al-Kamil gugur dan kemudian pada tahun 1168 Dinasti Fatimiyah Mesir dikalahkan oleh tentara dari Dinasti Salahuddin yang menganut mazhab Syafi'i. Dengan runtuhnya Dinasti Fatimiyah tersebut, maka secara otomatis hubungan antara Samudera Pasai dan Mesir terputus. Kafrawi Al-Kamil kemudian melanjutkan kepemimpinan Nazimuddin Al-Kamil yang telah gugur. Tetapi tahun 1204 M, kekuasaan Samudera Pasai jatuh ke tangan Laksamana Johan Jani dari pulau We. Di bawah kekuasaan Laksamana Johan Jani, kekuasaan Samudera Pasai menjadi kekuatan maritim yang kuat di Nusantara pada masa itu.

Di Mesir sendiri setelah dikuasai oleh Dinasti Salahuddin, muncul Dinasti Mamaluk yang menggantikan Dinasti Fatimiyah. Sama dengan pendahulunya, Dinasti Mamaluk juga berniat menguasai perdagangan di Pasai. Niat tersebut pun dilancarkan dengan mengirim pendakwah yang telah menimba ilmu di Makkah, yaitu Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad yang sebelumnya telah berdakwah di Pantai Barat India. Di Pasai, kedua utusan tersebut bertemu dengan Marah Silu (Meurah Silu) yang saat itu menjadi salah satu anggota angkatan perang Kerajaan Pasai. Syaikh Ismail dan Fakir Muhammad kemudian berhasil membujuk Marah Silu untuk memeluk Islam dan membuat kerajaan tandingan untuk kerajaan Pasai yang akan dibantu oleh Dinasti Mamaluk di Mesir dan berganti nama menjadi Sultan Malik al-Saleh. Akhirnya Marah Silu dinobatkan menjadi Raja Kerajaan Samudera yang berada di kiri dari Sungai Pasai dengan letak menghadap ke arah Selat Malaka. Namun demikian, ternyata kedua kerajaan tersebut justru bersatu menjadi Kerajaan Samudera Pasai.

Keislaman Marah Silu juga disinggung dalam catatan *Hikayat Raja Pasai* dengan memberikan penjelasan bahwa Nabi Muhammad Saw. telah menyebutkan nama kerajaan Samudera dan menyuruh agar daerah tersebut diislamkan oleh sahabat Nabi. Dari sini, bisa ditarik kesimpulan bahwa ada kemungkinan Islam telah masuk ke Nusantara tidak lama setelah Nabi Muhammad wafat yakni (abad pertama Hijriah atau abad ke 7-8 M) atau bahkan muncul kemungkinan bahwa Islam masuk ke Indonesia langsung dari Mekkah.

Marah Silu adalah keturunan dari suku Imam Empat atau yang lebih dikenal sebagai Sukee Imuem Peuet, yaitu sebuah suku dari Champa yang merupakan pendiri kerajaan-kerajaan di Aceh sebelum berkembangnya agama Islam. Di antara empat kerajaan Hindu-Buddha yang didirikan oleh Sukee Imuem Peuet adalah Peureluak (Perlak) yang terletak di Aceh Timur, Jeumpha (Champa) di Bireun, Kerajaan Sama Indra di Pidie, dan Indra Purba di Aceh Besar/Banda Aceh.

Sultan Malik al-Saleh kemudian menikah dengan putri Ganggang Sari, keturunan Sultan Aladdin Muhammad Amin bin Abdul Kadi dari kerajaan Perlak. Dari pernikahan ini Sultan Malik al-Saleh dikaruniai dua orang putra yaitu Muhammad dan Abdullah. Kelak, Muhammad dipercaya untuk memimpin kerajaan Pasai dengan gelar Sultan Muhammad Malikul Zahir (Sultan Malik al-Tahir), berdampingan dengan ayahnya yang masih memimpin kerajaan Samudera. Sementara Abdullah lebih memilih keluar dari keluarga besar kerajaan Samudera Pasai dan mendirikan kerajaan sendiri yaitu Kerajaan Aru Barumun yang kurang lebih berdiri pada tahun 1295 M.

Menurut catatan Ibnu Battutah, kerajaan Samudera mengalami perkembangan pesat, bahkan bisa dikatakan berada dalam masa kejayaan di bawah kepemimpinan Muhammad Malikul Zahir. Hal ini ditandai dengan aktivitas perdagangan yang sudah maju, ramai, dan sudah menggunakan koin emas sebagai alat pembayaran. Ditambah lagi, posisi Kerajaan Pasai yang berada di aliran lembah sungai juga membuat tanah pertanian menjadi subur sehingga padi yang ditanam oleh

penduduk Kerajaan Islam Pasai pada abad ke 14 bisa dipanen dua kali setahun.

Masih dalam catatan Ibnu Battutah, dijelaskan bahwa Muhammad Malikul Zahir adalah raja yang sangat tertarik dengan ilmu pengetahuan, bahkan Muhammad Malikul Zahir sempat mendirikan pusat studi Islam di lingkungan kerajaan yang dijadikan tempat diskusi para ulama dan elit kerajaan. Maka tidak berlebihan jika kemudian Ibnu Battutah memasukkan nama Muhammad Malikul Zahir sebagai salah satu dari tujuh raja di dunia yang memiliki kemampuan luar biasa dengan kepribadian yang sangat rendah hati.

Sultan Muhammad Malikul Zahir dikaruniai dua orang putra, yaitu Malikul Mahmud dan Malikul Mansur. Ketika Sultan Muhammad Malikul Zahir wafat karena sakit, kerajaan dipegang oleh ayahnya, Sultan Malik Al Salih, yang juga memimpin kerajaan Samudera. Karena masih terlalu muda, maka kedua putra Muhammad Malikul Zahir dititipkan oleh Sultan Malik al-Salih pada ahli kenegaraan dan keagamaan, Malikul Mahmud dititipkan kepada Sayid Ali Ghitauddin sedangkan Malikul Mansur dititipkan pada Sayid Semayamuddin.

Setelah kedua putra tersebut dianggap layak untuk memimpin kerajaan, maka Sultan Malik al-Salih menyerahkan tampuk kekuasaan kepada kedua putra Muhammad Malikul Zahir, di mana diputuskan Malikul Mahmud memimpin kerajaan Pasai dan Malikul Mansur memimpin kerajaan Samudera, sesuai dengan hasil musyawarah para ulama dan para petinggi kerajaan. Dalam perjalanannya, disebutkan bahwa hubungan antara keduanya tidak berlangsung harmonis karena diam-diam

Malikul Mansur tertarik kepada istri Malikul Mahmud. Malikul Mansur kemudian diusir dari kerajaan dan meninggal ketika berada dalam perjalanannya. Akhirnya kerajaan Samudera dan Kerajaan Pasai pun menjadi satu kerajaan yang dikenal sebagai kerajaan Samudera Pasai dengan Malikul Mahmud sebagai rajanya.

Pada tahun 1346 terjadi pergantian kekuasaan dari sultan Malikul Mahmud kepada putranya yaitu Ahmad Permadala Permala dengan gelar kehormatan Sultan Ahmad Malik al-Zahir. Dalam sebuah catatan dituliskan bahwa Sultan Ahmad Malik al-Zahir memiliki lima orang anak, tiga putra dan dua putri. Ketiga putra itu adalah Tun Beraim Bapa, Tun Abdul Jalil dan Tun Abdul Fadil, sementara kedua putrinya adalah Tun Medam Peria dan Tun Takiah Dara.

Sultan Ahmad Malik al-Zahir dikenal sebagai raja yang memiliki citra buruk di mata masyarakatnya karena Sultan Ahmad Malik al-Zahir menaruh birahi pada kedua putrinya sendiri. Tak pelak sikapnya yang demikian itu membuat marah para petinggi kerajaan Samudera Pasai, termasuk Tun Beraim Bapa. Tun Beraim Bapa kemudian berusaha melindungi kedua saudara perempuannya dari jeratan nafsu ayah kandungnya dengan menyembunyikan kedua saudaranya di sebuah tempat. Merasa mendapat pertentangan dari putra sulungnya sendiri, Sultan Ahmad Malik al-Zahir murka dan menyuruh utusan untuk membunuh Tun Beraim Bapa. Sang putra mahkota yang seharusnya mewarisi tahta kerajaan itu pun meninggal karena diracun oleh utusan ayahnya. Merasa terharu dan tidak terima dengan perlakuan biadab sang ayah, Tun Medam Peria dan

Tun Takiah Dara kemudian memutuskan untuk mengakhiri hidup mereka dengan meminum racun yang telah membunuh kakaknya.

Kebiasaan Sultan Ahmad Malik al-Zahir ternyata tidak berhenti sampai di situ. Mengetahui bahwa putri dari kerajaan Majapahit yaitu Radin Galuh Gemerencang jatuh cinta kepada Tun Abdul Jalil, Sultan Ahmad al-Zahir yang juga menaruh hati kepada kecantikan dari putri raja Majapahit itu kembali menyuruh anak buahnya untuk menghabisi nyawa putra keduanya tersebut dan membuang jenazah Tun Abdul Jalil ke tengah laut.

Radin Galuh Gemerencang yang sangat merindukan pujaan hatinya, Tun Abdul Jalil, kemudian pergi bersama para pengawal menuju ke Pasai. Sesampainya di Pasai, Radin Galuh Gemerencang terkejut setelah mendengar berita bahwa sang putra mahkota meninggal dengan tragis di tangan ayahnya sendiri. Karena tidak kuasa menahan kesedihan, sang putri kemudian ikut menenggelamkan diri di tempat jenazah Tun Abdul Jalil ditenggelamkan.

Rombongan pengawal Radin Galuh Gemerencang yang tersisa kembali ke Jawa dan melaporkan kematian sang putri kepada Raja Majapahit. Mendengar berita tragis dan kebiasaan dari Raja Pasai, Raja Majapahit geram dan mengirim pasukan untuk menggempur kerajaan Pasai. Dalam peperangan itu, kerajaan Pasai akhirnya kalah dan Sultan Ahmad al-Zahir mengungsi ke daerah bernama Menduga yang berjarak kurang lebih lima belas hari perjalanan kaki dari Pasai. Sementara itu pasukan Majapahit yang telah menaklukkan kerajaan Pasai dan

mengambil harta rampasan kemudian berlayar kembali ke Jawa. Dalam perjalanannya, pasukan Majapahit juga sempat menaklukkan kerajaan Jambi dan Palembang.

Menurut sejarah, dalam silsilah kerajaan Pasai terdapat nama Sultanah Nahrasiyah (Nahrisyyah) Malikul Zahir, raja perempuan pertama di kerajaan Islam Nusantara yang bertahta dari tahun 1420 hingga 1428. Sultanah Nahrasiyah memiliki penasihat kontroversial bernama Ariya Bakooy yang bergelar Maharaja Bakooy Ahmad Permala. Ariya Bakooy pernah diperingatkan oleh para ulama agar tidak mengawini puterinya sendiri tapi peringatan itu ditentangnya. Bahkan, karena tidak terima keinginan dirinya ditentang, Ariya Bakooy sampai membunuh 40 ulama. Ariya Bakooy akhirnya tewas di tangan Malik Musthofa yang bergelar Pocut Cindan Simpul Alam, yang tidak lain adalah suami Sultanah Nahrasiyah dengan bantuan Sultan Mahmud Alaidin Johan Syah dari Kerajaan Aceh Darussalam (1409-1465).

Sultanah Nahrasiyah dalam catatan sejarah merupakan seorang perempuan muslimah yang berjiwa besar. Hal ini dibuktikan dengan hiasan di makamnya yang dibuat dengan sangat istimewa. Pada nisannya, tertulis nukilan huruf Arab terjemahannya berbunyi: *“Inilah kubur wanita bercahaya yang suci, ratu yang terhormat, almarhum yang diampunkan dosanya, Nahrasiyah, putri Sultan Zainal Abidin, putra Sultan Ahmad, putra Sultan Muhammad, putra Sultan Mailkus Salih. Kepada mereka itu dicurahkan rahmat dan diampunkan dosanya. Mangkat dengan rahmat Allah pada hari Senin, 17 Zulhijjah 832.”*

Berikut ini adalah silsilah Raja-raja Kerajaan Samudera Pasai:

1. Sultan Malik al-Saleh (1267-1297 M)
2. Sultan Muhammad Malik al-Zahir (1297-1326 M)
3. Sultan Mahmud Mahmud (1326-1345 M)
4. Sultan Malikul Mansur
5. Sultan Ahmad Malik al-Zahir (1346-1383 M)
6. Sultan Zain al-Abidin Malik al-Zahir (1383-1405)
7. Sultanah Nahrasiyah (1420-1428)
8. Sultan Sallah al-Din (1402)
9. Sultan Abu Zaid Malik al-Zahir (1455)
10. Sultan Mahmud Malik al-Zahir (1455-1477)
11. Sultan Zain al-Abidin (1477- 1500)
12. Sultan Abdullah Malik al-Zahir (1501-1513)
13. Sultan Zain al-Abidin (1513-1524)

KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK

Pada masa Kerajaan Samudera Pasai, para pedagang telah menggunakan *ceitis* atau mata uang berbentuk uang kecil, sedangkan yang terbuat dari emas disebut dengan *dramas* (mata uang emas dibuat dari emas sebenarnya tidak murni dari emas semua tetapi terbuat dari serbuk emas dan perak). Jika

dibandingkan dengan nilai mata uang portugis *crusade*, maka perbandingannya adalah 9 dramas = 1 *crusade* = 500 *cash*.

Disamping seorang sultan yang menjadi pimpinan kerajaan, ada juga beberapa jabatan dalam kerajaan seperti: Menteri Besar (Perdana Menteri atau Orang Kaya Besar), Bendahara, Komandan Militer atau Panglima Angkatan laut yang lebih dikenal dengan gelar Laksamana, Sekretaris Kerajaan, Kepala Mahkamah Agama yang dinamakan Qadi, dan Syahbandar yang mengepalai serta mengawasi pedagang-pedagang asing di kota-kota pelabuhan yang berada di bawah pengaruh kerajaan itu. Biasanya para Syahbandar ini juga menjabat sebagai penghubung antara sultan dengan para pedagang asing. Dalam bidang keagamaan, Ibnu Batutah menceritakan bagaimana taatnya Sultan Samudera Pasai terhadap agama Islam dari madzhab syafi'i dan Sultan Samudera Pasai selalu dikelilingi oleh ahli-ahli Islam. Kesultanan Samudera Pasai merupakan kerajaan besar, pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam.

Sebagai sebuah kerajaan besar, Samudera pasai juga menghasilkan banyak karya tulis yang baik. Sekelompok minoritas kreatif berhasil memanfaatkan huruf Arab yang dibawa oleh agama Islam untuk menulis karya mereka dalam bahasa Melayu. Inilah yang kemudian disebut sebagai bahasa Jawi dan hurufnya disebut Arab Jawi. Di antara karya tulis tersebut adalah *Hikayat Raja Pasai* yang mana bagian awal teks ini diperkirakan ditulis sekitar tahun 1360 M. *Hikayat Raja Pasai* ini juga sekaligus menandai dimulainya perkembangan sastra Melayu klasik di bumi nusantara. Bahasa Melayu itu juga

yang kemudian digunakan oleh Syaikh Abdurrauf al-Singkili untuk menuliskan buku-bukunya.

Bersamaan dengan berkembangnya sastra Melayu klasik, di Pasai juga berkembang ilmu tasawuf. Di antara buku tasawuf yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu adalah *Durru al-Manzum* karya Maulana Abu Ishak yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu atas permintaan dari Sultan Malaka, Makhdum Patakan. Kitab inilah yang kemudian dijadikan rujukan dalam melihat posisi Kerajaan Samudera Pasai dalam perannya sebagai pusat Tamadun Islam di Asia Tenggara pada masa itu.

PERKEMBANGAN DAN MASA KEEMASAN

Pada masa kejayanya, kerajaan Samudera Pasai merupakan pusat perniagaan penting di kawasan Nusantara. Samudera Pasai memiliki banyak bandar yang dikunjungi oleh para saudagar dari berbagai negeri seperti Cina, India, Siam, Arab dan Persia. Alasan mengapa Kesultanan Samudera Pasai tergabung dan ikut andil dalam jaringan perdagangan antar bangsa adalah letaknya yang berada di kawasan Selat Malaka yang menjadi jalur perdagangan internasional. Jarak pelayaran yang begitu jauh antara Arab dan Cina menjadikan Kerajaan Samudera Pasai sebagai tempat singgah para pedagang, terlebih karena pelayaran mengharuskan para pedagang menunggu angin musim yang cocok untuk berlayar meneruskan perjalanan.

Dalam kurun abad ke-13 hingga awal abad ke-16, Pasai merupakan wilayah penghasil rempah-rempah terkemuka di dunia, dengan lada sebagai salah satu komoditas andalannya. Setiap tahunnya, Pasai mampu mengeksport lada dengan produksi yang cukup besar. Tak hanya itu, Pasai juga menjadi produsen komoditas lainnya seperti sutra, kapur barus, dan emas. Samudera Pasai mengeluarkan mata uang emas yang disebut dirham dan kemudian digunakan secara resmi di kerajaan tersebut.

Di samping sebagai pusat perdagangan, Samudera Pasai juga merupakan pusat perkembangan agama Islam. Komposisi masyarakat di Kerajaan Pasai sendiri terbagi dalam beberapa lapis, meliputi Sultan, golongan abdi kerajaan, alim ulama, para pedagang dan hamba sahaya. Pada lapisan abdi kerajaan terbagi lagi menjadi perdana menteri, menteri, tentara, pegawai dan pesuruh. Kendati orang Arab yang tinggal di Pasai tidak sebanyak orang dari India, tapi orang Arab memberikan pengaruh yang sangat kuat ke dalam sistem kerajaan, bahkan dalam menentukan kebijakan sang raja.

Semasa Sultan Malik Al-Saleh menjabat sebagai penguasa pertama kerajaan Pasai, terdapat orang-orang besar di negeri itu, di antaranya adalah Tun Sri Kaya dan Tun Baba Kaya. Kedua orang besar ini juga ikut berperan dalam mengontrol jalannya pemerintahan dengan gelar Sayid Ali Ghitauddin dan Sayid Asmayuddin.

Kemajuan Kerajaan Samudera Pasai dapat dilihat dari adanya aktivitas perdagangan yang semakin maju dan ramai ditambah dengan sudah mengenal penggunaan koin emas

sebagai alat pembayaran, Ibnu Batutah mengisahkan, setelah berlayar selama 25 hari dari Barhnakar (sekarang masuk wilayah Myanmar), ia mendarat di sebuah tempat yang sangat subur. Ibnu Batutah tidak bisa menutupi rasa kagumnya begitu berkeliling kota pusat Kerajaan Pasai. Ia begitu takjub melihat sebuah kota besar yang sangat elok dengan dikelilingi dinding yang megah.

Ibnu Batutah juga mencatat bahwa ia harus berjalan sekitar empat mil dengan mengendarai kuda dari pelabuhan yang disebut Sahra untuk sampai ke pusat kota. Pusat pemerintahan kota itu cukup besar dan indah serta dilengkapi dengan menara-menara yang terbuat dari kayu-kayu yang kokoh. Di pusat kota ini, tulis Ibnu Batutah, terdapat tempat tinggal para penguasa dan bangsawan kerajaan. Bangunan yang terpenting ialah Istana Sultan dan masjid.

Masih menurut catatan Ibnu Battutah, di bawah kepemimpinan Muhammad Malikul Zahir, Pasai menjadi kerajaan yang begitu indah, bukan hanya saja karena keindahan dan kesuburan alamnya tetapi juga karena memiliki raja yang sangat rendah hati, mencintai rakyatnya, dan begitu mencintai ilmu pengetahuan.

Seperti yang sudah disinggung diawal, Ibnu Batutah sempat memasukkan nama Sultan Muhammad Malikul Zahir sebagai salah satu dari tujuh raja di dunia yang memiliki kelebihan luar biasa. Ketujuh raja yang memiliki kemampuan luar biasa itu menurut Ibnu Batutah adalah: Sultan Muhammad Malikul Zahir (Raja Melayu) yang dinilainya berilmu pengetahuan luas

dan mendalam, Raja Romawi yang sangat pemaaf, Raja Iraq yang berbudi bahasa, Raja Hindustani yang sangat ramah, Raja Yaman yang berakhlak mulia, Raja Turki yang gagah perkasa, dan Raja Turkistan yang bijaksana.



Gambar 1.2. *Peninggalan Sejarah Kerajaan Samudera Pasai*

Pergolakan dan Runtuhnya Kerajaan

Kejayaan Kerajaan Samudera Pasai mulai mendapat ancaman dari Kerajaan Majapahit pada saat Gajah Mada diangkat sebagai patih di Kahuripan pada periode 1319-1321 M oleh Raja Majapahit yang kala itu dijabat oleh Jayanegara dan kemudian naik pangkat menjadi Mahapatih pada 1331 ketika Majapahit dipimpin oleh Ratu Tribuana Tunggaladewi. Ketika pelantikan Gajah Mada menjadi Mahapatih Majapahit inilah keluar ucapannya janjinya yang dikenal dengan Sumpah Palapa,

yaitu bahwa Gadjah Mada tidak akan menikmati buah palapa sebelum seluruh Nusantara berada di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit.

Mahapatih Gadjah Mada rupanya sedikit terusik mendengar kabar tentang kebesaran Kerajaan Samudera Pasai. Majapahit khawatir akan pesatnya kemajuan Kerajaan Samudera Pasai yang memiliki jalur perdagangan strategis di selat Malaka. Karenanya, kemudian Gadjah Mada mulai mempersiapkan rencana untuk menyerang kerajaan Islam di pulau Sumatera tersebut. Desas-desus tentang akan adanya serangan tentara Majapahit, yang menganut agama Hindu Syiwa, terhadap kerajaan Islam Samudera Pasai santer terdengar di kalangan rakyat di Aceh.

Armada perang Kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gadjah Mada memulai aksinya pada 1350 dengan beberapa tahapan. Serangan pertama Majapahit diarahkan ke perbatasan Perlak tapi mengalami kegagalan karena lokasi itu dikawal ketat oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai. Gadjah Mada kemudian mundur ke laut dan mencari tempat lapang di pantai timur yang tidak terjaga. Di Sungai Gajah, Gadjah Mada mendaratkan pasukannya dan mendirikan benteng di atas bukit, yang hingga sekarang dikenal dengan nama Bukit Meutan atau Bukit Gadjah Mada.

Gadjah Mada kemudian menjalankan siasat serangan dua jurusan, yaitu dari jurusan laut dan jurusan darat. Serangan lewat laut dilancarkan ke daerah pesisir di Lhokseumawe dan Jambu Air, sedangkan penyerbuan jalan darat dilakukan lewat Paya Gajah yang terletak di antara daerah Perlak dan Pedawa.

Serangan dari darat tersebut ternyata tidak seperti yang telah direncanakan dan mengalami kegagalan karena dihadang oleh tentara Kesultanan Samudera Pasai. Sementara serangan yang dilakukan lewat jalur laut justru bisa mencapai istana.

Penyerangan kerajaan Majapahit atas Samudera Pasai dilatarbelakangi oleh faktor politis sekaligus kepentingan ekonomi. Kemajuan perdagangan dengan ramainya bandar-bandar yang berada dalam wilayah kerajaan dan kemakmuran rakyat Kerajaan Samudera Pasai membuat Mahapatih Gajah Mada berkeinginan untuk merebutnya. Meskipun ekspansi kerajaan Majapahit dalam rangka menguasai wilayah Samudera Pasai telah dilakukan berulang kali tetapi Kesultanan Samudera Pasai masih mampu bertahan, hingga akhirnya perlahan-lahan perlawanan yang diberikan oleh kerajaan Samudera Pasai mulai surut seiring semakin menguatnya pengaruh Majapahit di Selat Malaka.

Runtuhnya kekuatan Kerajaan Pasai sangat berkaitan dengan perkembangan yang terjadi di luar kerajaan Pasai itu sendiri. Munculnya pusat politik dan perdagangan baru di Malaka pada abad ke-15 adalah salah faktor yang menyebabkan Kerajaan Samudera Pasai mengalami kemunduran. Hancur dan hilangnya peranan Pasai dalam jaringan perdagangan antar bangsa bertambah dengan lahirnya suatu pusat kekuasaan baru di ujung barat pulau Sumatera yakni Kerajaan Aceh Darussalam pada abad ke-16.

Pasai ditaklukan dan dimasukkan ke dalam wilayah Kekuasaan Kerajaan Aceh Darussalam oleh Sultan Ali Mughayat Syah dan Lunceng Cakra Donya, hadiah dari Raja Cina untuk

Kerajaan Islam Samudera Pasai, dipindahkan ke Aceh Darussalam (sekarang Banda Aceh). Hingga menjelang abad ke-16, Kerajaan Samudera Pasai masih dapat mempertahankan peranannya sebagai bandar yang mempunyai kegiatan perdagangan dengan luar negeri. Para ahli sejarah yang menumpahkan minatnya pada perkembangan ekonomi mencatat bahwa Kerajaan Samudera Pasai pernah menempati kedudukan sebagai sentrum kegiatan dagang internasional di nusantara semenjak peranan Kedah berhasil dipatahkan.

Namun, kemudian peranan Kerajaan Samudera Pasai yang sebelumnya sangat penting dalam arus perdagangan di kawasan Asia Tenggara dan dunia mengalami kemerosotan dengan munculnya bandar perdagangan Malaka di Semenanjung Melayu. Bandar Malaka segera menjadi primadona dalam bidang perdagangan dan mulai menggeser kedudukan Pasai. Tidak lama setelah Malaka dibangun, kota itu dalam waktu singkat segera dibanjiri perantau-perantau dari Jawa. Akibat kemajuan pesat yang diperoleh Malaka itu, posisi dan peranan Kerajaan Samudera Pasai semakin tersudut, nyaris seluruh kegiatan perniagaannya menjadi kendor dan akhirnya benar-benar patah di tangan Malaka sejak tahun 1450.

Tidak hanya itu, Kesultanan Samudera Pasai semakin lemah ketika di Aceh berdiri satu lagi kerajaan yang mulai merintis menjadi sebuah peradaban yang besar dan maju. Pemerintahan baru tersebut adalah Kerajaan Aceh Darussalam yang didirikan oleh Sultan Ali Mughayat Syah. Kesultanan Aceh Darussalam sendiri dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan yang pernah ada di Aceh pada masa pra Islam, seperti

Kerajaan Indra Purba, Kerajaan Indra Purwa, Kerajaan Indra Patra, dan Kerajaan Indrapura. Pada 1524, Kerajaan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah menyerang Kesultanan Samudera Pasai. Akibatnya, pamor kebesaran Kerajaan Samudera Pasai semakin meredup sebelum akhirnya benar-benar runtuh dan berada di bawah kendali kuasa Kesultanan Aceh Darussalam.

KERAJAAN ACEH

Sejarah Berdiri Kerajaan Aceh

Kerajaan Aceh Darussalam berkuasa mulai akhir abad ke-15 hingga awal abad ke-20 M. Dalam rentang masa empat abad tersebut, telah berkuasa 35 orang sultan dan sultanah. Sebelum membahas lebih jauh tentang kerajaan ini, ada baiknya kita mengenal kondisi geografis dan topografis daerahnya (Aceh atau Banda Aceh) terlebih dahulu.

Aceh adalah salah satu Propinsi Indonesia yang terletak di ujung Barat Laut pulau Sumatera dan diapit oleh dua laut yaitu Lautan Indonesia dan Selat Malaka. Setelah 89 tahun nama Kutaraja dijadikan sebagai ibukota Kerajaan Aceh Darussalam menggantikan nama Banda Aceh Darussalam, maka pada tahun 1963 Banda Aceh kembali dihidupkan berdasarkan Keputusan Menteri Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah bertanggal

9 Mei 1963 No. Des 52/1/43-43. Sejak tanggal tersebut nama Banda Aceh kembali resmi menjadi ibukota Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Selain karena banyaknya versi serta sumber-sumber yang berbicara tentang riwayat Aceh masih sebatas mitos atau cerita rakyat, asal-usul Aceh masih belum terkuak dengan jelas. Seperti yang dituturkan oleh Lombard, sumber sejarah mengenai asal-usul Aceh yang berupa cerita-cerita turun-temurun tersebut sukar diperiksa kebenarannya. Mitos tentang orang Aceh, tulis Lombard, misalnya seperti yang dikisahkan oleh seorang pengelana Barat yang sempat singgah di Aceh. John Davis, nama musafir itu, mencatat bahwa orang Aceh menganggap diri mereka keturunan dari Imael dan Hagar (Nabi Ismail dan Siti Hajar).

Tiga abad kemudian, Snouck Hugronje mengungkapkan bahwa dia pernah mendengar cerita tentang seorang ulama sekaligus hulubalang bernama Teungku Kutakarang, yang menganggap orang Aceh lahir dari percampuran orang Arab, Persi, dan Turki. Menurut analisis Lombard, hegemoni semacam ini sengaja diciptakan sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah Eropa.

Dalam buku berjudul *“Kerajaan-kerajaan Islam di Aceh”* (2006) karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo, dikemukakan bahwa yang disebut Aceh adalah daerah yang sempat dinamakan sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (sebelumnya bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh). Tetapi pada saat Aceh masih menjadi sebuah kerajaan/kesultanan, yang dimaksud

dengan Aceh adalah yang sekarang dikenal dengan Kabupaten Aceh Besar atau dalam bahasa Aceh disebut Aceh Rayeuk atau disebut juga dengan “Aceh Lhee Sagoe” (Aceh Tiga Sagi). Selain itu, ada juga yang menyebutnya Aceh Inti (Aceh Proper) atau “Aceh yang sebenarnya” karena daerah itulah yang pada mulanya menjadi inti Kesultanan Aceh Darussalam sekaligus letak ibukotanya.

Nama Aceh sering juga dipakai oleh orang-orang Aceh untuk menyebut ibukota kerajaannya yang bernama Bandar Aceh Darussalam. Terkait asal-usul nama Aceh sendiri belum ada kepastian yang menyebutkan dari mana dan kapan nama Aceh mulai digunakan. Orang-orang asing yang pernah datang ke Aceh menyebutnya dengan nama yang berbeda-beda. Orang-orang Portugis dan Italia menyebutnya dengan nama ‘Achem,’ ‘Achen,’ dan ‘Aceh’; orang Arab menyebut ‘Asyi,’ ‘Dachem,’ ‘Dagin,’ dan ‘Dacin’; sementara orang Cina menyebutnya dengan nama ‘Atje’ dan ‘Tashi.’

Dalam karya Rusdi Sufi dan Agus Budi Wibowo yang lain (*Ragam Sejarah Aceh*, 2004: 1-2), disebutkan bahwa selain untuk penyebutan nama tempat, Aceh juga merupakan nama dari salah satu suku bangsa atau etnis penduduk asli yang mendiami Bumi Aceh. Terdapat cukup banyak etnis yang bermukim di wilayah Aceh, yakni etnis Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Aneuk, Jamee, Kluet, Simeulue, dan Singkil. Suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Aceh, termasuk suku bangsa Aceh itu telah eksis sejak Aceh masih menjadi kerajaan/kesultanan.

Sementara itu, menurut penelitian K.F.H. van Langen yang termaktub dalam karya ilmiah berjudul *“Susunan Pemerintahan Aceh Masa Kesultanan”* (1986: 3), dituliskan bahwa penduduk asli Aceh menurut cerita-cerita rakyat disebut Ureueng Mante. Sejauh mana validitas riwayat itu dan apakah Mante termasuk dalam suku Mantra yang mendiami daerah antara Selangor dan Gunung Ophir di Semenanjung Tanah Melayu, menurut van Langen, adalah pertanyaan-pertanyaan yang harus dipecahkan lagi dalam studi perbandingan bahasa Melayu-Polinesia. Sejauh masalah itu belum bisa dipecahkan, maka tetap bisa dianggap bahwa Mante adalah penduduk asal daerah Aceh, terutama karena nama itu tidak merujuk pada penduduk asal suku-suku bangsa lain.

Aceh adalah wilayah yang besar dan dulunya dihuni oleh beberapa pemerintahan besar pula. Selain Kesultanan Aceh Darussalam dan Samudera Pasai, dulu ditanah Rencong ini juga pernah berdiri Kerajaan Islam Lamuri, bahkan cikal bakal kerajaan Aceh tidak terlepas dari kerajaan Lamuri. Salah seorang sultan yang terkenal dari Kerajaan Islam Lamuri adalah Sultan Munawwar Syah. Sultan inilah yang kemudian dianggap sebagai moyangnya Sultan Aceh Darussalam yang terhebat, yakni Sultan Iskandar Muda. Pada akhir abad ke-15, dengan terjalinnya hubungan baik dengan kerajaan tetangganya, maka pusat singgasana Kerajaan Lamuri dipindahkan ke Mahkota Alam, yang dalam perkembangannya menjadi Kesultanan Aceh Darussalam.

Kerajaan Lamuri juga dikenal dengan banyak nama, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Indra Purba
2. Poli
3. Lamuri (seperti yang disebutkan oleh Marcopolo)
4. Ramini/Ramni atau Rami (seperti yang disebutkan oleh pedagang atau ulama Arab yaitu Abu Zayd Hasan, Sulayman ataupun Ibnu Batutah)
5. Lan-li, Lan-wuli dan Nanpoli (seperti yang disebut oleh orang Tionghoa).

Berita tentang kerajaan Lamuri ini diperoleh dari prasasti yang di tulis pada masa raja Rajendra Cola I pada tahun 1030 di Tanjore (India Selatan). Serangan yang dilakukan oleh Rajendra Cola I mengakibatkan beberapa kerajaan di Sumatera dan semenanjung Melayu menjadi lemah, termasuk di dalamnya adalah *Ilmauridacam* (Lamuri). Penyerangan terhadap Lamuri di ujung pulau Sumatera dilakukan karena kerajaan Lamuri merupakan bagian dari kerajaan Sriwijaya yang sebelumnya juga pernah mendapatkan serangan dari kerajaan Cola pada tahun 1017 M. Dari sini bisa disimpulkan bahwa kerajaan Lamuri diperkirakan sudah mulai berdiri pada abad ke IX dan sudah memiliki angkatan perang yang kuat dan hebat.

Peristiwa penyerangan Cola terhadap kerajaan Lamuri yang berlangsung selama kurang lebih tiga abad dan kemudian dilanjutkan dengan serangan oleh Majapahit dan Cheng Ho, akhirnya membuat Lamuri menjadi semakin lemah. Dari sinilah kemudian muncul beberapa kampung yang akhirnya disatukan kembali di bawah kekuasaan seorang raja. Kemudian terdengar pula berbagai nama menjelang lenyapnya Lamuri seperti Darul Kamal, Meukuta Alam, Aceh Darussalam (Darud Dunia).

Sejarawan Husein Djajadiningrat mengemukakan pendapat tentang urutan raja Lamuri yang pernah berkuasa berdasarkan dua naskah hikayah. Pertama (122) Hikayat yang berisi tentang raja Aceh (Lamuri) yang bernama Indra Syah (kemungkinan yang dimaksud adalah Maharaja Indra Sakti). Dalam hikayat tersebut juga menceritakan bahwa raja Indra Syah pernah berkunjung ke Cina. Cerita tentang Indra Syah dalam hikayat tersebut berhenti sampai di situ. kemudian dalam hikayat itu menceritakan Syah Muhammad dan Syah Mahmud, dua bersaudara putera dari raja.

Diceritakan juga mengenai Syah Sulaiman mempunyai dua orang anak yaitu raja Ibrahim dan puteri Safiah. Sedangkan Syah Mahmud setelah menikah dengan bidadari Madinai Cendara juga mempunyai dua orang anak yaitu, raja Sulaiman dan puteri Arkiah, kemudian Sulaiman di nikahkan dengan sepupunya Safiah dan Ibrahim dinikahkan dengan sepupunya yang bernama Arkiah, pernikahan ini merupakan usulan dari kakek mereka yang bernama raja Munawar Syah.

Dikatakan raja Munawar Syah yang pernah memerintah di kerajaan Lamuri. Hikayat ini juga menceritakan tentang lahirnya dua orang putera yang bernama Musaffar Syah yang memerintah di Mekuta Alam dan Inayat Syah yang memerintah di Darul Kamal. Namun kedua raja ini selalu berperang, dalam peperangan tersebut raja Musaffar Syah mampu menundukan Raja Munawar Syah. Kemudian Raja Musaffar Syah menyatukan dinasti Meukuta Alam dengan dinasti Darul Kamal. Dan dikatakan juga bahwa Inayat Syah mempunyai seorang putra bernama Firman Syah Paduka Almarhum, kemudian Firman Syah mempunyai seorang putra yaitu Said Al-Mukammil yang mempunyai beberapa orang anak diantaranya Paduka Syah Alam Puteri Indra Bangsa bunda Sri Sultan perkasa Alam Johan Berdaulat (Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam). Dengan demikian dapat diketahui bahwa Said Al-Mukammil merupakan kakek sultan Iskandar Muda dari garis keturunan ibu. Selain itu Sultan Alaidin Al-Mukammil mempunyai beberapa orang putera, salah satunya adalah sultan Muda Ali Riayat Syah (1604-1607), yang merupakan paman dari Sultan Iskandar Muda.

Naskah kedua (124) yang dimaksud dalam pembicaraan Husein Djajadiningrat mengenai hikayat raja-raja Lamuri (Aceh), dari hikayat ini yang dibuat silsilah yang dimaulai dari Sultan Johan Syah yang kemungkinan maksudnya adalah Meurah Johan atau Sultan Alauddin Johan Syah yang merupakan putera raja Lingge, Adi Genali. Dan kemudian menikah dengan Puteri Blieng Indra Kusuma. Berbeda dengan hikayat yang pertama,

hikayat ini menentukan hari,tanggal dan bulan tahunnya. Pada permulaan disebutkan bahwa Johan Syah memerintah dimulai pada tahun Hijrah 601 atau sekitar tahun 1205 M, lamanya 30 tahun.

Sepeninggalan Johan Syah, ia digantikan oleh anaknya akan tetapi tidak disebutkan namanya, setelah sultan kedua meninggal, ia digantikan oleh anaknya yang bernama Ahmad Syah yang memerintah selama 34 tahun 2 bulan 10 hari, hingga mangkatnya pada tahun 885 Hijrah. Setelah masa pemerintahan Ahmad Syah berakhir, kekuasaan diserahkan kepada anaknya yang bernama sultan Muhammad Syah yang memerintah selama 43 tahun. Pada masa itu sultan Muhammad Syah memerintahkan pemindahan kota dan pembangunan kota baru yang diberi nama Darud Dunia, sultan Muhammad Syah meninggal pada tahun 708 Hijrah. Dilihat dari tahun meninggalnya Sultan Muhammad Syah, dapat disimpulkan bahwa pembangunan Darud Dunia adalah sekitar tahun 700 Hijrah atau kira-kira tahun 1260 Masehi.

Sesudah sultan Muhammad Syah meninggal, maka tahta sebagai raja digantikan oleh Mansur Syah yang memerintah selama 56 tahun 1 bulan 23 hari. Ia kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama raja Muhammad pada tahun 811 Hijrah yang memerintah selama 59 tahun 4 bulan 12 hari dan meninggal pada tahun 870 Hijrah. Raja Muhammad kemudian digantikan oleh Husein Syah selama 31 tahun 4 bulan 2 hari untuk kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama sultan Ali Riayat Syah yang memerintah selama 15 tahun 2 bulan 3

hari, meninggal pada tanggal 12 Rajab 917 Hijrah atau tahun 1511 Masehi.

Atas dasar hikayat-hikayat yang di telitinya itu, Husein Djajadiningrat telah membuat urutan nama raja-raja Aceh (Lamuri). Yang memerintah semenjak Johan Syah (1205 Masehi) sebagai berikut;

1. Sultan Johan Syah Hijrah 601-631
2. Sultan Ahmad 631-662
3. Sri Sultan Muhammad Syah, anak Sultan ke-2, berumur setahun ketika mulai naik tahta pergi dari Kandang dan membangun kota Darud Dunia Hijrah 665-708
4. Firman Syah, anak Sultan ke-3 708-755
5. Mansur Syah 755-811
6. Alauddin Johan Syah, anak sultan ke-5, Mulanya bernama Mahmud 811-870
7. Sultan Husin Syah 870-901
8. Riayat Syah (Mughayat Syah?-MS) 901-907
9. Salahuddin, digantikan oleh no.10 (adiknya) 917-946
10. Alauddin (Alkahar?-MS) adik no.9. 946-975.

Dari data di atas kita dapat mengetahui urutan raja-raja yang pernah berkuasa, namun dari ke 10 nama raja-raja di atas, tidak ditemukan nama Sultan Musaffar Syah, dan juga tidak ditemukan nama Inayat Syah dan Syamsu Syah. Padahal nama-nama itu dapat dibuktikan kebenarannya dari nukilan pada makam mereka yang dijumpai kemudian.

Nama Musaffar Syah terdapat dalam naskah yang tersebut lebih dulu, sementara nama Mahmud Syah sebagai pembangun kota Darud Dunia terdapat pada naskah yang tersebut ke-2. Suatu penemuan penting lain adalah makam dari sultan Musaffar Syah, makam tersebut tidak di Meukuta Alam, ditempat dimana dia pernah memerintah, akan tetapi ditemukan di suatu kampung bernama Biluy, IX mukim, yang letaknya termasuk dalam wilayah Aceh Besar juga. Pada batu nisannya bertuliskan tahun meninggalnya yaitu 902 Hijrah atau 1497 Masehi.

Jejak Kerajaan Lamuri Hingga ke Aceh Darussalam

Sekitar tahun 1059-1069 Masehi, kerajaan Tiongkok melakukan penyerangan terhadap kerajaan Lamuri (Indra Purba) yang diperintah oleh maharaja Indra Sakti yang waktu itu masih memeluk agama Hindu. Maharaja Indra Sakti mempunyai seorang putri yang bernama Putri Blieng Indra Kusuma, ia dinikahkan dengan Meurah Johan. Meurah Johan juga ikut menyerang tentara Tiongkok, Meurah Johan merupakan putera Adi Genali atau Teungku Kawee Teupat yang menjadi raja Lingge.

Serangan tentara Tiongkok berhasil dikandaskan oleh 300 pasukan dibawah pimpinan Syaikh Abdullah Kanan yang bergelar Syiah Hudan, keturunan Arab dari Kanan dari kerajaan Peurlak. Setelah penyerangan oleh balatentara Tiongkok berhasil digagalkan, akhirnya Maharaja Indra Sakti dan seluruh rakyatnya akhirnya masuk agama Islam. Dua puluh lima tahun kemudian, maharaja Indra Sakti meninggal dunia, maka dari itu diangkatlah menantunya Meurah Johan menjadi raja dengan gelar Sultan Alaidin Johan Syah dan akhirnya kerajaan Indra Purba atau Lamuri menjadi kerajaan Islam. Pada masa sultan Alaidin Ahmad Syah yang memerintah dari tahun 1234-1267 Masehi, baginda berhasil merebut kembali kerajaan Indra Jaya dari kekuasaan tentara Tiongkok. Setelah itu ibu kota kerajaan dipindahkan disuatu tempat yang baru yaitu di tepi sungai krueng Aceh, yang sekarang lebih terkenal dengan sebutan Bandar Darussalam. Dan sultan Alauddin Johan Mahmud Syah juga membangun dalem atau keraton (Istana) yang di namai dengan Darud Dunia (Rumah dunia). Dan mesjid raya Baiturrahman di Kutaraja (Banda Aceh) pada tahun 1292 Masehi.

. Pada masa Sultan Alauddin Johan Mahmud Syah yang memerintah dari tahun 1267-1309 Masehi. Beliau berhasil mengislamkan daerah Indrapuri dan Indrapatra. Istana adalah lambang rumah dunia, sedangkan masjid merupakan lambang rumah akhirat. Keseimbangan atau harmoni inilah yang menandai system nilai sosial budaya masyarakat Aceh yang terkenal sangat religius.

Pada masa sultan Alaliddin Husain Syah yang memerintah dari tahun 1465-1480 Masehi, beberapa kerajaan kecil dan Pidie bersatu dengan kerajaan Lamuri yang sudah berganti nama menjadi kerajaan Darussalam, dan dalam sebuah federasi yang kemudian diberi nama kerajaan Aceh, sedangkan ibu kota kerajaan dirubah dengan nama Bandar Aceh Darussalam. Kemudian pada masa sultan Alaliddin Syamsu Syah yang memerintah dari tahun 1497-1511 inilah pembangunan istana baru dengan dilengkapi sebuah masjid yang diberi nama mesjid Baiturrahman.

Salah satu alasan kenapa kerajaan-kerajaan kecil Islam di Aceh bersatu adalah karena munculnya kekuatan Barat atau Eropa di Malaka. Sekitar permulaan abad ke-16, sebagian besar kerajaan Islam telah berada di bawah genggamannya kekuasaan imperialisme dan kolonialisme Barat. Daratan Aceh, yang dihuni oleh beberapa kerajaan Islam, juga tidak terlepas dari pendudukan dan pengaruh Barat. Kekuasaan imperialisme Barat ini bisa bertahan karena kekuasaan yang dimiliki oleh kerajaan-kerajaan Islam di Aceh terpecah dengan sejumlah kerajaan-kerajaan kecil, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Kerajaan Aceh (gabungan dari Lamuri, Meukuta Alam dan Darul Kamal) di Aceh Besar sekarang,
2. Kerajaan Peurlak di Aceh Timur,
3. Kerajaan Samudera Pasai di Aceh Utara,
4. Kerajaan Pedir di Pidie,
5. Kerajaan Lingge di Aceh Tengah,

sekaligus putra mahkota dari Sultan Alaiiddin Syamsu Syah (1497-1511 M), Ali Mughayat Syah meminta kepada ayahnya untuk meletakkan jabatan dan menyerahkan pimpinan kerajaan kepadanya.

Selain menyusun kekuatan dengan menyatukan kerajaan-kerajaan kecil di bawah payung kerajaan Aceh, Ali Mughayat Syah berpikir bahwa kerajaan juga harus memiliki angkatan darat dan laut. Maka kemudian sultan Ali Mughayat pun mendeklarasikan berdirinya kerajaan Aceh Darussalam. Agar bisa menggabungkan kerajaan-kerajaan kecil di sekitarnya dalam rangka pembentukan angkatan darat dan angkatan laut. Semenjak itu berdirilah kerajaan Aceh Darussalam sebagai kerajaan Islam terhebat dan terkuat di Asia Tenggara

walaupun masa kepemimpinan Mughayat Syah relatif singkat, hanya sampai tahun 1530 M, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri kerajaan Aceh Darussalam, yaitu:

- Mencukupi kebutuhan sendiri, sehingga tidak bergantung pada pihak luar.
- Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara.
- Bersikap waspada terhadap negara kolonial Barat.
- Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar.
- Menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan nusantara.

Sepeninggal Sultan Ali Mughiyat Syah, jalannya pemerintahan dilanjutkan oleh Sultan Alauddin Ri'ayat Syah. Pada masanya ekspansi terus dilaksanakan sebagaimana pendahulunya. Untuk meluaskan wilayahnya ke Barus ia mengutus suami saudara perempuannya yang kemudian oleh Sultan diangkat sebagai Sultan Barus.

Setelah Sultan Alauddin Ri'ayat meninggal dunia, ia diganti oleh salah seorang putranya yang bernama Husein. Padahal sebelumnya dua orang putranya yang lain masing-masing telah diangkat sebagai Sultan Aru dan Sultan Pariaman dengan sebutan Sultan Ghari dan Sultan Mughal sehingga tampilnya Sultan Husein menggantikan ayahnya itu menimbulkan rasa cemburu dan tidak suka saudara-saudaranya yang berkedudukan di Aru ataupun di Pariaman. Sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Sultan yang berkedudukan di Barus.

Sebagai akibatnya maka terjadilah perlawanan dan ketiga Sultan tersebut terhadap Sultan Husein. Dalam pertempuran itu Sultan Husein gugur, demikian pula Sultan Aru. Sehingga yang tinggal hanyalah Sultan Panaman. Semenjak kematian Sultan Alauddin kemudian diganti oleh sultan-sultan berikutnya, pada masa peninggalan Sultan Alauddin ini kerajaan Aceh mengalami kemunduran; banyak daerah yang tadinya berada dibawah pengaruhnya melepaskan diri akibat kurang intensifnya sistem pengawasan yang dilakukan oleh sultan-sultan pengganti Alauddin dan pengaruh penetrasi dari bangsa Portugis. Baru kemudian setelah Sultan Iskandar Muda tampil sebagai penguasa Aceh keadaan bisa pulih seperti sedia kala, bahkan Sultan Iskandar Muda mampu memperluas lagi daerah taklukannya.

Iskandar Muda Meukuta Alam merupakan raja terkenal dari kerajaan Aceh Darussalam. Semenjak dipimpin oleh Iskandar Muda Meukuta Alam kerajaan Aceh Darussalam menjelma sebagai kerajaan Islam terhebat dan terkuat di Asia Tenggara yang berdiri sejajar dengan kerajaan Islam lainnya di dunia seperti kerajaan Turki Usmani di Turki, kerajaan Safawi atau Ishafan di Persia dan kerajaan Mughal di India.

Masuknya Kolonialisme Barat

Selain serangan karena serangan Majapahit, yang menjadi penyebab runtuhnya Kerajaan Samudra Pasai adalah kedatangan bangsa Eropa. Portugis menjadi Bangsa Eropa yang pertama kali tiba di Aceh. kedatangan Bangsa Portugis pertama kali dipimpin oleh Diogo Lopez de Sequeira di perairan Selat Malaka Pada 1508, kurang dari setahun setelah Sultan Ali Mughayat Syah menetapkan berdirinya Kesultanan Aceh Darussalam. De Sequeira bersama rombongan datang dengan empat buah kapal lengkap dengan persenjataan perang. Akan tetapi armada De Sequira tak mendapatkan hasil yang diinginkan karena terpaksa mundur akibat perlawanan dari laskar tentara Kesultanan Malaka.

Percobaan oleh armada Portugis selanjutnya pada Mei 1521. Namun percobaan yang ini pun tidak menunjukkan hasil yang menggembirakan. Justru pemimpin armada Portugis pada saat itu Jorge de Britto yang tewas dalam pertempuran di perairan Aceh. Perlawanan dari pihak Aceh dipimpin sendiri oleh penguasa Kesultanan Aceh Darussalam yang pertama, Sultan Ali

Mughayat Syah. Pihak Portugis pun tidak menyerah begitu saja. Untuk menghadapi Kesultanan Aceh Darussalam dan kehebatan Sultan Ali Mughayat Syah, Portugis membujuk Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai untuk mendukungnya. Setelah dikalahkan oleh Kesultanan Aceh Darussalam, kemudian armada Portugis melarikan diri ke Kerajaan Pedir, akan tetapi dari pihak aceh tak mau berhenti sampai di situ, pasukan Aceh Darussalam tetap melakukan pengejaran dan akhirnya berhasil menguasai wilayah Kerajaan Pedir. Oleh sebab itu Portugis bersama Sultan Ahmad, Raja Kerajaan Pedir, melarikan diri menuju Samudera Pasai untuk mencari perlindungan. Pasukan Sultan Ali Mughayat Syah tetap melanjutkan pengejarannya dan berhasil menundukkan perlawanan Pasai pada 1524. Dalam usaha pengusiran Portugis dari bumi Aceh, pasukan Sultan Mughayat Syah menggunakan sejumlah rampasan yang berupa alat-alat perang, termasuk meriam yang dulu dibawa oleh pihak Portugis dari Eropa.

Pasukan Aceh Darussalam tak hanya mampu mengusir Portugis yang telah kalah secara mengenaskan. Akan tetapi pihak Aceh Darussalam pun justru mendapatkan keuntungan yang besar, berkat barang-barang rampasan yang berupa alat-alat perang, pasukan Aceh Darussalam menjadi lebih kuat. Sultan Ali Mughayat Syah memang dikenal sebagai sosok pemimpin yang pemberani dan penakluk yang handal. Selain berhasil mengusir Portugis serta menundukkan Kerajaan Pedir dan Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam di bawah pimpinan Sultan Ali Mughayat Syah, juga berhasil menaklukkan beberapa kerajaan lain seperti Kerajaan Haru, Kerajaan Deli, dan Kerajaan Daya.

Menurut catatan dari Barat yang ditulis oleh C.R. Boxer, mengungkapkan bahwa menjelang tahun 1530 armada perang Kesultanan Aceh Darussalam sudah mendapat kelengkapan perang yang cukup lengkap dan mutakhir. Bahkan, sejarawan Portugis sendiri, Fernao Loper de Costanheda, menyebut bahwa Sultan Aceh (Ali Mughayat Syah) lebih banyak memperoleh pasokan meriam dibandingkan dengan benteng Portugis di Malaka sendiri. Selain itu, menurut pejalan dari Barat lainnya, Veltman, Sultan Ali Mughayat Syah berhasil membawa lonceng besar yang kemudian diberi nama “Cakra Dunia”. Rampasan ini disebut-sebut sebagai rampasan yang paling berharga dari Samudera Pasai. Lonceng tersebut merupakan hadiah dari Laksamana Cheng Ho ketika panglima besar dari Kekaisaran Tiongkok itu berkunjung ke Pasai pada awal abad ke-15.

Kesultanan Aceh Darussalam dipimpin oleh Sultan Ali Mughayat Syah hanya sekitar 10 tahun. Menurut prasasti yang ditemukan dari batu nisan Sultan Ali Mughayat Syah, pemimpin pertama Aceh Darussalam ini meninggal dunia pada 12 Dzulhijah Tahun 936 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 7 Agustus 1530 Masehi. meskipun masa pemerintahan Sultan Mughayat Syah relatif singkat, namun ia berhasil membangun kerajaan Aceh yang besar dan kokoh. Sultan Ali Mughayat Syah juga meletakkan dasar-dasar politik luar negeri Kesultanan Aceh Darussalam, antara lain :

- Mencukupi kebutuhan sendiri sehingga tidak tergantung pada pihak lain.

- Menjalin persahabatan yang lebih erat dengan kerajaan-kerajaan Islam lain di nusantara.
- Bersikap waspada terhadap kolonialisme Barat.
- Menerima bantuan tenaga ahli dari pihak luar.
- Menjalankan dakwah Islam ke seluruh kawasan nusantara.

Sepeninggal Sultan Mughayat Syah, Sultan-Sultan penggantinya tetap menjalankan dasar-dasar kebijakan politik ini. Sebagai penerus tahta Kesultanan Aceh Darussalam, pemerintahan diserahkan kepada putra sulung almarhum Sultan Mughayat Syah yang bernama Salah ad-Din. Di bawah pemerintahan Sultan Salah ad-Din, Kesultanan Aceh Darussalam menyerang Malaka pada 1537 tetapi tidak berhasil.

Tahun 1539, kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam dipegang oleh Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar anak bungsu Mughayat Syah, atau yang sering dikenal juga dengan nama Sultan Mansur Syah. Adik dari Salah ad-Din ini pelan tapi pasti mengukuhkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam dengan melakukan beberapa gebrakan. Tidak lama setelah naik tahta, pada tahun yang sama Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar menyerbu orang-orang Batak yang tinggal di pedalaman. Menurut Mendez Pinto, pengelana yang singgah di Aceh pada 1539, balatentara Kesultanan Aceh di bawah pimpinan Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar, terdiri atas laksar-laskar yang antara lain berasal dari Turki, Kambay, dan Malabar.

Hubungan pada era Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar Kesultanan Aceh Darussalam menjalin hubungan diplomatik yang kuat dengan kerajaan-kerajaan mancanegara. Pada 1569 Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar mengirimkan utusannya ke Istanbul untuk meminta bantuan meriam. Kesultanan Aceh Darussalam tidak hanya mendapat bantuan berupa meriam beserta ahli-ahli senjata yang dikirim oleh penguasa Turki, namun Turki juga mengirimkan pasukan perang untuk mendukung Aceh melawan Portugis. Bahkan, Sultan Turki juga memerintahkan Gubernur-Gubernur Yaman, Aden, serta Mekkah untuk membantu laskar Turki yang sedang bertolak menuju Aceh. Laksamana Turki, Kurt Oglu Hizir adalah pemimpin ekspedisi tersebut dengan tugas khusus menghancurkan musuh Aceh, mempertahankan agama Islam, dan merampas benteng-benteng kafir.

Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar tak hanya melawan kaum penjajah dari Barat namun juga melakukan penyerangan terhadap kerajaan-kerajaan lokal yang membantu Portugis. pada tahun 1547 dan 1568 Pasukan Aceh Darussalam menyerbu Kerajaan Malaka sebanyak dua kali, Pasukan Aceh Darussalam menawan Sultan Johor karena membantu Portugis. Pasukan Aceh Darussalam juga berhasil mengalahkan Kerajaan Haru (Sumatra Timur) pada 1564.

Untuk melegalkan kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam atas Kerajaan Haru, maka putra pertama Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar yang bernama Abdullah, diangkat sebagai pemegang pemerintahan Kerajaan Haru yang sudah

menjadi bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh Darussalam. Dari berbagai peperangan besar yang terjadi antara Kesultanan Aceh Darussalam melawan Portugis telah memakan banyak korban dari kedua belah pihak. pada 16 Februari 1568 Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar kehilangan Sultan Abdullah yang memimpin bekas wilayah Kerajaan Haru dalam suatu pertempuran.

Pada 8 Jumadil Awal tahun 979 Hijriah atau 28 September 1571 Masehi Sultan Ala ad-Din Ri'ayat Syah al-Kahar tutup usia. Namun karena Putra mahkota yang bernama Abdullah telah gugur dalam sebuah pertempuran melawan Portugis, maka dari itu yang menduduki tahta tertinggi Kesultanan Aceh Darussalam adalah anak kedua almarhum yang bergelar Sultan Husin Ibnu Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah atau yang juga sering dikenal dengan nama Ali Ri'ayat Syah. Sultan Husin Ibnu Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah merupakan sosok pemimpin yang pengasih dan penyayang rakyatnya. Namun Sultan Husin Ibnu Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah tetap berjuang meneruskan perjuangan ayahandanya mengusir kolonialis Portugis dari bumi Aceh.

Akan tetapi, kepemimpinan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah tidak sehebat sang ayah meskipun dia sudah melakukan penyerangan ke Malaka hingga dua kali selama kurun 1573-1575. Ketahanan Sultan Husin Ibnu Sultan Ala'uddin Ri'ayat Syah semakin limbung ketika Aceh Darussalam menyerang Johor pada 1564, saat itu Sultan tertangkap dan menjadi tawanan perang. Sultan Husin Ibnu

Sultan `Ala`uddin Ri`ayat Syah hanya memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 7 tahun, dan kepemimpinannya berakhir ketika sang Sultan wafat pada 12 Rabi`ul Awal tahun 987 Hijriyah atau bertepatan dengan tanggal 8 Juni 1578 dalam tahun Masehi.

Setelah Sultan Husin Ibnu Sultan Ala`uddin Ri`ayat Syah meninggal dunia , Kesultanan Aceh Darussalam berada dalam gerbang kejancuran. Kekuasaan dipercayakan kepada putranya, Sultan Muda, yang hanya memerintah Kesultanan selama 7 bulan. Karena ketika wafat Sultan Muda masih berusia belia dan belum memiliki keturunan, maka yang menjadi penggantinya ialah Sultan Sri Alam yang merupakan anak dari Sultan Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar, penguasa ke-4 Kesultanan Aceh Darussalam. Akan tetapi, Sultan Sri Alam, yang sebelumnya menjadi raja kecil di Pariaman (Sumatra Barat), ternyata Sultan Sri Alam tak mampu memimpin Kesultanan, hanya 2 bulan memerintah, Sultan Sri Alam pun terbunuh.

Selanjutnya Sultan Zainal Abidin yang memegang tampuk Pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam. Pemimpin Kesultanan ini adalah cucu dari Sultan `Ala ad-Din Ri`ayat Syah al-Kahar atau anak dari Sultan Abdullah, pemimpin wilayah Haru yang tewas ketika pertempuran melawan Portugis. Namun nasibnya tak jauh berneda dengan penguasa sebelumnya, Sultan Zainal Abidin tidak memiliki kemampuan dalam memimpin Kesultanan Aceh Darussalam. Bahkan, Sultan ini merupakan sosok yang bengis, kejam, dan haus darah. Sultan Zainal Abidin tidak segan-segan membunuh demi memuaskan nafsu dan ambisinya. Sultan yang memerintah dengan tangan besi

ini memimpin Kesultanan Aceh Darussalam selama 10 bulan sebelum tewas pada 5 Oktober 1579.

Setelah era kekejaman Sultan Zainal Abidin berakhir, penerus kepemimpinan Kesultanan Aceh Darussalam sempat bergeser dari garis darah yang mula-mula. Dikisahkan, pada sekitar tahun 1577 serangan Kesultanan Aceh Darussalam terhadap Kesultanan Perak berhasil menewaskan Sultan Ahmad sebagai pemimpin Kesultanan Perak. Sebagai bagian dari rampasan perang maka dibawah Permaisuri Sultan Ahmad beserta 17 orang putra-putrinya ke Aceh. Putra tertua Sultan Ahmad, bernama Mansur, dikawinkan dengan seorang putri Sultan Aceh Darussalam yang bernama Ghana. Sekitar tahun 1579 Mansur dinobatkan menjadi pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam menggantikan Sultan Zainal Abidin, dengan gelar Sultan Ala al-Din Mansur Syah.

Sultan Sultan Mansur Syah bukan keturunan langsung dari sultan-sultan pendiri Kesultanan Aceh Darussalam. Ia berasal dari etnis Melayu Perak. Mansur Syah adalah sosok yang alim, shaleh, adil, tapi juga keras dan tegas. Pada masa kepemimpinan Sultan Mansur Syah, kehidupan masyarakat yang bernuansa islami sangat terasa di Kesultanan Aceh Darussalam. Sultan Mansur Syah juga mendatangkan guru-guru agama dan ulama ternama dari luar negeri untuk mendukung kebijakannya tersebut. Namun, kepemimpinan agamis Sultan Mansur Syah tidak serta merta menjadikan Aceh Darussalam lebih aman. Pada 12 Januari 1585, Sultan Mansur Syah terbunuh ketika rombongan Kesultanan Aceh Darussalam dalam perjalanan pulang dari lawatannya ke Perak.

Gugurnya Sultan Mansur Syah menjadikan menentukan siapa yang berhak menjadi pemimpin Aceh Darussalam menjadi sangat rumit. Atas mufakat para pembesar (tokoh-tokoh adat dan kesultanan yang berpengaruh dan dihormati), maka Sultan Buyong dengan gelar Sultan Ali Ri'ayat Syah Putra yang merupakan anak dari penguasa Inderapura, Sultan Munawar Syah. Diputuskan bahwa yang berhak menduduki tahta Kesultanan Aceh Darussalam untuk menggantikan Sultan Mansur Syah.

Akan tetapi, kekuasaan pucuk pimpinan Kesultanan Aceh Darussalam inipun tidak berlangsung lama. Sultan Ali Ri'ayat Syah Putra meninggal dunia pada 1589 dalam suatu peristiwa pembunuhan. Raja Ayim, cucu Sultan Mansur Syah yang sebenarnya akan dijadikan pemimpin Aceh Darussalam sebelumnya, akan tetapi calon sultan muda ini juga tewas terbunuh.

Pemimpin Kesultanan Aceh Darussalam yang berikutnya adalah Sultan Ala'udin Ri'ayat Syah Said Al-Mukammal Ibnu Sultan Firmansyah (1589-1604). Pada era Sultan Ala'udin Ri'ayat Syah Said Al-Mukammal berkuasa, dengan mulai masuknya Inggris dan Belanda maka kolonialisme barat semakin merasuk bumi nusantara. Tanggal 21 Juni 1595, armada dagang Belanda yang dipimpin de Houtman bersaudara, Cornelis dan Frederick, tiba di Aceh.

Cornelis memimpin kapal "De Leeuw" sementara Frederick bertindak sebagai kapten kapal "De Leeuwin". Pada awalnya kedatangan orang-orang Belanda disambut hangat oleh penduduk Aceh. Akan tetapi Portugis merasa kedatangan orang-

orang belanda sebagai sebuah ancaman dalam perdangan. Pada akhirnya Portugis dapat dilenyapkan dari bumi Aceh Darussalam pada 1606 berkat keberhasilan serangan yang dipimpin oleh Perkasa Alam yang kelak menjadi Sultan Aceh Darussalam dan terkenal dengan dengan nama Sultan Iskandar Muda.

Masa Kejayaannya

Dalam sejarah telah mencatat jatuh bangunya Aceh Darussalam. Aceh Darussalam menjadi kerajaan yang amat disegani di nusantara. maka sampailah ia pada suatu masa yang membuat orang begitu kagum atau menaruh hormat terhadapnya. Itulah masa keemasan; masa kejayaan yang merupakan buah perjuangan dari titian roda sejarah.

Sultan Iskandar Muda yang telah membawa Aceh Darussalam kedalam masa kejayaannya sekaligus mengembalikan daerah-daerah yang telah melepaskan diri dari pengaruh Aceh akibat pertikaian antar pewaris tahta sepeninggal Sultan Alauddin Ri'ayat Syah di akhir abad ke-16 Masehi serta adanya serangan Portugis yang berkedudukan di Malaka.

munculnya Sultan Iskandar Muda (1607 - 1638 M.) menandai masa kebangkitan Aceh, terutama dalam menghalau masuknya kolonialisme barat. Usaha yang dilakukan ialah dengan cara mempersulit dan memperketat perijinan bagi pedagang asing yang akan mengadakan hubungan dengan Aceh. Ia hanya memberi kesempatan salah satu nama yang lebih menguntungkan raja antara Inggris dan Belanda. Ia pernah memberikan izin Belanda untuk berdagang di Tiku, Pariaman dan Barus tetapi hanya berjalan masing-masing dua tahunan.



Gambar.1.4. *Sultan Iskandar Muda*

Hampir 30 tahun lamanya Sultan Iskandar Muda menjadi pemimpin Aceh. Ia telah berhasil menekan arus perdagangan yang dijalankan oleh orang Eropa. Ia juga berhasil mengadakan konsolidasi di berbagai sektor; baik ekonomi, politik, sosial budaya dan kehidupan beragama.

Di bidang politik misalnya, ia telah berhasil mempersatukan seluruh lapisan masyarakat, yang disebut dengan kaum; seperti kaum Lhoe Reotoih (kaum Tigaratus), kaum Tok Batee (orang-orang Asia), kaum orang Mante, Batak Karo, Arab, Persia dan Turki, kaum Ja sandang (orang-orang mindi) dan kaum Imam peucut (Imam Empat). Pada masanya pula tersusun sebuah Undang-undang tentang tata pemerintahan yang diberi nama Adat Makuta Alam; hukum syara menjadi dasar dari hukumadat ini.

Bandar Aceh dibuka kembali menjadi Pelabuhan Internasional merupakan gebrakannya yang progresif dalam upaya memakmurkan perekonomian negeri, sebab dengan dibukanya kembali pelabuhan tersebut, maka akses dalam menjual hasil

kekayaan alam dari aceh menjadi terbuka lebar walaupun pada akhirnya menjadi bumerang bagi Aceh itu sendiri. Namun disisi lain aceh juga mendapat keuntungan dengan kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan sisi lain kemajuan telah diperoleh oleh Aceh dalam bidang ilmu pengetahuan dan keagamaan.

B. Schiere dalam bukunya “Indonesian Sociological Studies” menyebutkan : ‘Aceh adalah pusat perdagangan Muslim India dan ahli fikirnya (kaum cendekiawan dan ulama-ulama) berkumpul sehingga Aceh menjadi pusat kegiatan studi Islam.

Lembaga-lembaga kajian ilmiah tersebut terdiri atas :

1. Balai Sertia Ulama’ (jawatan pendidikan)
2. Balai Jama’ah Himpunan Ulama’ yang merupakan studi club yang beranggotakan para ahli agama.
3. Balai Sertia Hukama’ (Lembaga Pengembangan Ilmu Pengetahuan).

Adapun lembaga pendidikan yang terdapat di sana, meliputi:

1. *Meunasah (Ibtidaiyah)*
2. *Kangkang (Tsanawiyah)*, untuk tingkat ini belajarnya di masjid dan yang dipelajari adalah kitab-kitab Ilmu Hisab, Al-Qur’an, Ilmu Falaq, Fiqih dan Hadits.
3. *Daya (Aliyah)*, tingkat ini berpusat di masjid-masjid besar.
4. *Daya Teuku Cik (Perguruan Tinggi)*, di sini diajarkan Tafsir, Tasawuf dan lain sebagainya.

Ilmu Tasauf (misticisme) adalah salah satu kajian keagamaan yang mendapat perhatian oleh Pihak Sultan sehingga pada masanya tercatat banyak ahli sufi, diantaranya: Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani dan Nuruddin ar-Raniri. Untuk yang terakhir ini kurang mendapat simpati dari Sultan Iskandar Muda.

Dapat dibayangkan betapa makmurnya Aceh Darussalam di masa keemasan yang dipimpin oleh Sultan Iskandar Muda. Ini merupakan suatu indikasi betapa suatu usaha itu bila diupayakan dengan segenap perhatian dan keseriusan akan menghasilkan sesuatu memuaskan. Maka tidaklah mengherankan jika Aceh saat itu menjadi batu sandungan bagi imperium Barat yang berusaha mencengkeram seluruh wilayah Nusantara secara utuh ; baik itu Belanda, Inggris maupun Portugis.

Sungguh sangat disayangkan, diakhir masa jabatannya, ia terpaksa membuka pintu untuk pedagang-pedagang asing dalam hal ini adalah Belanda. Hal itu terjadi karena kekalahan yang dideritanya ketika mengadakan serangan ke Malaka pada tahun 1629 akibatnya ia harus menjalin hubungan dengan Belanda sebagai mitra kerja menghadapi Portugis di Malaka.

Sistem Politiknnya

Berbicara mengenai sistem politik di kerajaan Aceh Darussalam bisa dikatakan terjadi dua periode; yaitu politik periode sebelum Sultan Iskandar Muda (1514-1607) dan politik periode semenjak bertahtanya Sultan Iskandar Muda ke

belakang. Pada politik periode awal, sebelum Iskandar Muda sistem perpolitikan Aceh Darussalam masih belum terorganisir secara baik dan rapi, hal ini tidak terlepas dari kondisi kerajaan Aceh Darussalam yang baru saja terlepas dari pengaruh kerajaan Pidie, sehingga konsentrasi politik lebih tercurahkan untuk pembenahan kekuatan militer dalam upaya mempertahankan keberadaannya dari berbagai kemungkinan bahaya yang datang dari dalam maupun dari luar (termasuk pengaruh Kolonialis). Hal ini didasari oleh ketakutan bahwa sebuah kerajaan yang baru berdiri merupakan kerajaan lemah yang dengan mudah dapat dikuasai oleh kerajaan lain. Disamping memperkuat kekuatan militer usaha ekspansi kedaerah sekitar terus dilakukan untuk memperluas wilayah.

Kebijakan politik ini berbeda ketika Sultan Iskandar Muda menduduki tahta kesultanan Aceh, selain masih melanjutkan menjalankan ekspansi seperti yang dilakukan pendahulunya, ia juga beusaha untuk menata rapi sistem politik dalam kerajaannya, terutama yang berkaitan dengan konsolidasi dan peletakan pengawasan terhadap wilayah-wilayah yang sudah dikuasainya.

Langkah Sultan Iskandar Muda ini ditempuh karena mempertimbangkan betapa pentingnya manfaat dari sistem pemerintahan yang mantap dan terkonsolidasi secara seksama, dari sistem yang demikian itulah akan menciptakan stabilitas yang sehat.

Sultan Iskandar Muda menciptakan dua sistem yang ditempuh dalam upaya mempertahankan stabilitas kesultanan Aceh pada saat itu: yaitu sistem politik internal (yang menyangkut kepentingan dalam negeri) dan sistem eksternal

(yang berhubungan dengan negeri Asing). Pemakaian sistem politik internal ini dapat dilihat dari telah tersusunnya struktur pemerintahan secara rapi yang secara koordinatif berhasil menghubungkan antara pusat dengan daerah-daerah yang dikuasainya. Dengan pembagian bahwa wilayah inti kerajaan Aceh adalah Aceh Raya, dan masih terbagi atas wilayah pusat kerajaan dan wilayah Sagoe. Tiap Sagoe terbagi lagi menjadi beberapa Mukim sagoe XX V mukim yang meliputi Aceh Barat. Sagoe XXII mukim berada di bagian Tengah sebelah Selatan dan sagoe XXVI mukim terletak di bagian Aceh Timur. Tiap-tiap sagoe dikepalai oleh Panglima Sagoe atau sering disebut dengan Hulubalang Besar yang bergelar Teuku. Masing-masing sagoe terbagi lagi menjadi wilayah yang lebih kecil setingkat distrik, untuk masing-masing distrik dikepalai oleh Hulubalang (Uleebalang) yang bergelar Datuk. Ada satu hulubalang yang mempunyai kedudukan lebih dibandingkan dengan hulubalang lainnya, yaitu hulubalang Pusa. Hulubalang Pusa mempunyai kekuasaan yang bersifat otonom, baik dalam mengatur tata pemerintahan wilayahnya sampai kepada pewarisan tahtanya. Kemudian masing-masing distrik terbagi atas mukim-mukim yang dikepalai oleh seorang imam, sedang masing-masing mukim ini terbagi lagi menjadi *gampong-gampong* yang dikepalai oleh seorang Keucik. Sedangkan posisi Sultan dalam strata tersebut hanya berfungsi sebagai simbol pemersatu dari masing-masing sagoe yang dikepalai langsung oleh para hulubalang.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, sultan dibantu oleh seorang Syahbandaar untuk mengurus dan mengepalai bagian keuangan istana, Kepala Krueng yang dibantu oleh Dawang Krueng untuk mengurus bagian lalu lintas di muara

sungai, Panglima Losot sebagai penarik cukai barang-barang eksport-import dan Krani sebagai sekretaris istana. Disamping itu raja juga dibantu oleh Mangkubumi yang membawahi empat mantri hari-hari (penasihat raja). Di abad ke-17 dan ke-18 lebih jabatan-jabatan tinggi istana disempurnakan lagi dengan ditambahkan beberapa jabatan, antara lain:

1. Hulubalang Rama Setia, sebagai Pengawal Pribadi Istana
2. Kerkum Katib al-Muluk, Sekretaris Istana
3. Raja Udah na Laila, sebagai Kepala bendaharawan istana dan perpajakan
4. Sri Maharaja Laila, sebagai Kepala Kepolisian; dan
5. Laksamana Panglima Paduka Sirana, sebagai Penangkapan.

Sedangkan sistem pergantian raja di Aceh pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan sistem di kerajaan-kerajaan lain ataupun pada masa raja sebelumnya. Hanya saja di kerajaan Aceh setelah pemerintahan Sultan Iskandar Muda sistem pergantian raja lebih sedikit longgar, pergantian tidak selalu terikat pada putra laki-laki saja tetapi kaum wanita juga diberikan hak yang sama untuk memimpin kerajaan jika dinilai layak dan mampu, kemenakan atau istri raja yang meninggal pun bisa naik menjadi raja.

Sedangkan sistem politik yang bersifat eksternal atau berkenaan dengan orang-orang/ bangsa Asing, Sultan Iskandar Muda memilih untuk mengambil sikap tegas dan mengadakan pengetatan terhadap kebebasan mereka dalam perdagangan

maupun politik di Aceh. Tetapi sangat disayangkan pewaris kerajaan sesudah beliau tidak lagi menempuh sitem politik yang beliau terapkan, para penerus Sultan Iskandar Muda cenderung lebih memilih kompromistis, walau ada kemungkinan langkah yang ditempuh karena adanya paksaan.

Partisipasi dan Peran serta Ulama

Ulama di masa kerajaan Aceh mempunyai posisi yang sangat terhormat. Hal ini dapat diterima karena kerajaan yang berpusat di Banda Aceh itu memakai Islam sebagai landasan Negara dan geraknya, disamping itu adanya perhatian yang serius dari para raja yang berkuasa di Aceh dalam memandang betapa pentingnya ulama dan ilmu yang dimilikinya, ulama dinilai mampu menjadi tokoh untuk mengendalikan atau sebagai media kontrol jalannya pemerintahan yang *Baidatun thayyibatim wa Rabbun Ghafir* serta mendapat ridla-Nya. Pengangkatan ulama menjadi kontrol masyarakat ini merujuk dari hadits Nabi yang menyatakan bahwa “ Terdapat dua golongan yang apabila keduanya baik maka menjadi baik pula manusia, akan tetapi apabila keduanya rusak maka rusaklah manusia, mereka itulah ulama dan umara’ (pemerintah) ”

Suatu bukti lain yang menunjukkan bahwa kerajaan memberikan perhatian yang lebih terhadap keberadaan para ulama adalah dengan ditempatkannya ulama pada teras kerajaan; baik menjabat sebagai Mangkubumi atau pejabat lainnya. Hal ini dapat dilihat dari sederetan nama pahlawan-pahlawan Nasional

yang berasal dari Propinsi Aceh, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Panglima Polim, Cik Di Tiro, mereka secara keseluruhan adalah pejabat-pejabat teras kerajaan, ada yang sebagai Mangkubumi seperti Habib Abdurrahman, sebagai Kepala sagi Hulubalang Besar seperti Teuku Umar dan sebagainya.

Bahkan ada anggapan bahwa sampai terdapat suatu wilayah di Aceh yang secara khusus diserahkan pengelolaan dan penguasaannya kepada ulama, yaitu Masjid Raya dan sekitarnya. Di wilayah tersebut Sultan tidak memerintah langsung tetapi kekuasaan dilimpahkan kepada Hakim tertinggi kerajaan Teuku Kadli Malikul Adil dan Panglima Masjid Raja. Ini menunjukkan betapa besar perhatian kerajaan terhadap keberadaan ulama dalam pemerintahan. Indikasi lain yang bisa kita jadikan titik pandang untuk melihat betapa penting peran ulama di Aceh Darussalam. ialah adanya lembaga-lembaga yang sengaja diberi restu oleh sultan untuk menghimpun para ulama dalam mendiskusikan berbagai masalah keagamaan, hal ini ditandai dengan didirikannya Balai Jama'ah Himpunan Ulama dan Balai Setia Hukama'.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa peranan dan partisipasi ulama sangat besar dalam sistem pemerintahan kerajaan Aceh sehingga wajar apabila di Aceh mendapatkan julukkan sebagai kota Serambi Mekkah, dan melahirkan ulama-ulama besar dengan berbagai karya ilmiahnya yang berbobot, seperti: Hamzah Fansuri, Nurrdin ar-Raniri, Syamsuddin as-Sumantrani dan Abdur Rauf as-Singkili.

Masa Kemunduran

Kemunduran kerajaan Aceh diawali masa ketika sepinggal Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, sepinggal Sultan Iskandar Muda tampuk kekuasaan digantikan oleh menantunya, yaitu Sultan Iskandar Tsani yang kemudian memerintah selama 5 tahun dalam kurun 1636-1641. Sultan Iskandar Tsani mempunyai sikap yang berbeda dengan Sultan Iskandar Muda dalam menanggapi kaum Kolonialis atau bangsa asing. Sultan Iskandar Tsani bersikap sangat terbuka dan kompromistis terhadap kaum Kolonialis atau bangsa asing, baik terhadap Belanda, Inggris ataupun Portugis.

Semenjak Aceh dipimpin oleh Sultan Iskandar Tsani, tanda-tanda kemunduran mulai tampak. Hal ini tak lepas dari adanya pengaruh campur tangan bangsa asing yang mendapat kesempatan dari sultan secara longgar dalam urusan perdagangan dan politik dengan pemerintahan Aceh. Kemunduran Aceh ini semakin terlihat setelah Sultan Iskandar Tsani wafat yang kemudian digantikan isterinya yaitu Sultanah Tajul Alam Syaftuddin Syah, yang memerintah pada tahun 1641-1675. Dalam pemerintahan yang cukup lama selama kurang lebih 34 tahun kekuasaan Aceh menjadi sangat lemah dimata daerah bawahannya. Wilayah Aceh yang meliputi daerah-daerah tidak dapat lagi dikuasai oleh Sultanah sehingga Nampak seolah-olah tidak ada lagi kekuatan untuk mempertahankannya. Hingga pada akhirnya banyak daerah bawahan yang melepaskan diri dari kekuasaan Aceh.

Masalah yang lain pun mulai bermunculan. Seperti halnya dalam masalah ekonomi yang semakin terpuruk akibat ulah pedagang-pedagang asing yang semakin berkuasa dan sudah mulai menerapkan politik adu dombanya. Sementara situasi dalam negeri sudah nampak tidak sehat karena para kapitalis semakin meraja lela dalam penguasaan di bidang materi tanpa ambil peduli suasana perekonomian kerajaan yang sedang dilanda resesi berat.

Terpaksa Sultanah mengambil tindakan menjalin kerja sama dengan Belanda. Langkah ini dilakukan semata-mata untuk mempertahankan Aceh dari gilasan dan serbuan kaum Kolonialis Portugis sebagaimana yang terjadi di Malaka. Tanpa diperhitungkan terlebih dahulu bahwa niat untuk memonopoli sudah bersarang di hati Belanda semenjak mereka menginjakkan kakinya di bumi Nusantara ini, maka sikap Sultanah tersebut dijadikan suatu momentum untuk lebih menancapkan cengkeraman kuku imperialisme Belanda yang dimulai di Aceh. hal ini terbukti dengan berbagai fasilitas dan kesempatan yang diberikan secara leluasa kepada mereka. maka akhirnya Belanda mendirikan kantor dagang mereka di Padang dan Salida.

Walaupun tindakan Belanda itu akhirnya diperingatkan oleh Sultanah, namun rupanya mereka sudah tidak menghiraukan peringatan tersebut. Sultanah Tajul Alam Syafiatuddin Syah wafat tahun 1675 dan digantikan oleh sultan wanita Nurul Alam Nakiatuddin (tak jelas asal usulnya) yang memerintah mulai tahun 1675-1678. Kehadirannya Sultanah belum bisa mengentaskan kerajaan Aceh dari berbagai kemelut

dan permasalahan internal maupun eksternal yang ada. Begitu pula ketika digantikan oleh puterinya Raja Sertia, Aceh tetap dirundung kemelut yang berkepanjangan. Baru setelah ulama-ulama dan tokoh masyarakat Aceh melancarkan perlawanan terhadap kompeni pada tahun 1873-1904, seperti Habib Abdurrahman, Teuku Umar dan isterinya, Cik Di Tiro. Panglima Polim dan lain-lain, kerajaan Aceh mulai naik lagi kharismanya.

Dari permasalahan yang terjadi setelah kematian dari Sultan Iskandar Muda dapat disimpulkan bahwa terdapat dua faktor penting yang mengakibatkan kemunduran kerajaan Aceh Darussalam: kedua faktor tersebut adalah faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, yang pertama diakibatkan oleh lemahnya sultan-sultan pengganti Sultan Iskandar Muda dalam mengendalikan jalannya pemerintahan, yang berimbas lepasnya daerah-daerah yang berada di bawah pengaruh Aceh dan berusaha berdiri sendiri-sendiri sehingga lebih memudahkan pihak luar untuk memecah belah persatuan. Kedua, banyaknya kaum kapitalis dalam negeri yang tidak peduli lagi kesulitan-kesulitan yang dialami oleh kerajaan terutama di bidang ekonomi akibat dan sistem perekonomian yang diterapkan kaum kolonial. Kenyataan ini kemudian menyeret Aceh mengambil sikap kompromi dengan Kompeni.

Faktor ekstern, adanya campur tangan dari pihak Asing ; baik secara langsung atau tidak langsung. hal ini berawal dari kegagalan kerajaan Aceh menyerang Portugis yang berkedudukan di Malaka pada masa akhir pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Sebagai akibatnya para penerus Sultan Iskandar Muda terpaksa

memberi kelonggaran kepada Belanda untuk berdagang di wilayah Aceh karena telah membantunya dalam penerangan Malaka. Campur tangan ini akhirnya berlanjut terus menerus tanpa bisa ditolakny oleh pewaris-pewaris tahta berikutnya.

KERAJAAN DEMAK

Sejarah Berdiri Kerajaan Demak

Demak sebelumnya adalah sebuah daerah yang dikenal dengan nama Bintoro atau Gelagahwangi yang merupakan daerah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit. Kerajaan Demak secara geografis terletak di Jawa Tengah dengan pusat pemerintahannya di daerah Bintoro di muara sungai, yang dikelilingi oleh daerah rawa yang luas di perairan Laut Muria.

Dalam bukunya yang berjudul *“Peranan Bangsa Indonesia dalam Sejarah Asia Tenggara”* (1963), Mohammad Ali menulis bahwa pada suatu peristiwa Raden Patah diperintahkan oleh gurunya, Sunan Ampel dari Surabaya, agar merantau ke barat dan bermukim di sebuah tempat yang terlindung oleh tanaman gelagah wangi. Tanaman gelagah yang rimbun tentu hanya subur di daerah rawa-rawa. Dalam perantauannya itu, Raden Patah sampai ke daerah rawa di tepi selatan Pulau Muryo (Muria), sebuah kawasan rawa-rawa besar yang menutup laut (atau lebih tepatnya sebuah selat) yang memisahkan Pulau Muryo dengan

daratan Jawa Tengah. Di situlah ditemukan gelagah wangi dan rawa; kemudian tempat tersebut dinamai Raden Patah sebagai “Demak.”

Berdirinya kerajaan Demak sendiri tidak bisa lepas dari sejarah kerajaan Majapahit yang berkuasa di pulau Jawa. Majapahit sebagai sebuah kerajaan besar di Nusantara yang memiliki Mahapatih Gajah Mada dengan sumpah Palapanya, sekitar akhir abad ke-15 mulai mengalami masa-masa keruntuhannya. Pada saat itulah secara praktis wilayah-wilayah kekuasaannya mulai memisahkan diri dari Majapahit. Wilayah-wilayah yang terbagi menjadi kadipaten-kadipaten tersebut kemudian saling serang dan saling mengklaim sebagai pewaris tahta Majapahit. Pada masa itu arus kekuasaan mengerucut pada dua adipati, yaitu Raden Patah yang mendapat dukungan dari Walisongo dan Ki Ageng Pengging mendapat dukungan dari Syekh Siti Jenar.

Menurut Slamet Muljana (2005), Raden Patah diangkat sebagai bupati oleh Prabu Brawijaya dan Gelagah Wangi diganti namanya dengan “Demak” dengan ibu kota bernama “Bintara.” Dari nama wilayah baru itulah Raden Patah kemudian dikenal sebagai Pangeran Bintara di kaki Gunung Muria.



Gambar 1.5. *Raden Patah*

Setelah merasa kuat karena memiliki daerah yang strategis dan mempunyai dukungan baik dari Walisongo dan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa, maka para wali memerintahkan agar Raden Patah menjadikan Demak sebagai kerajaan Islam dan memisahkan diri dari kerajaan Majapahit. Tekad untuk mendirikan kerajaan Demak yang merdeka menjadi semakin bulat mengingat daerah Demak mempunyai peluang untuk berkembang pesat menjadi kota besar dan pusat perdagangan.

Raden Patah kemudian mengumpulkan para pengikutnya, baik dari masyarakat Jawa maupun Cina, untuk melakukan perlawanan terhadap kerajaan Majapahit. Dalam perlawanan itu, Radeng Patah juga mendapat bantuan dari beberapa daerah lain di Jawa yang sudah memeluk agama Islam seperti Jepara, Tuban, dan Gresik. Setelah berhasil mengalahkan Majapahit, Raden Patah pun kemudian mendirikan kerajaan Islam Demak. Dalam cerita yang lain, setelah merobohkan Majapahit, Raden Patah kemudian memindahkan semua alat upacara kerajaan dan pusaka Majapahit ke Demak sebagai lambang tetap berlangsungnya kerajaan kesatuan Majapahit tetapi dalam bentuk baru di Demak.

Ada banyak versi tentang tahun berdirinya kerajaan Demak. Menurut Slamet Muljana dalam buku *“Runtuhnya Kerajaan Hindu Jawa dan Timbulnya Negara Negara Islam di Nusantara,”* kerajaan Demak berdiri pada tahun 1478 atau setahun sebelum berdirinya masjid Agung Demak. Sementara kebanyakan sejarawan berpendapat bahwa kerajaan Demak berdiri pada tahun 1500. Asumsi yang mereka bangun adalah bahwa perlu rentang waktu 21 tahun semenjak didirikannya

Masjid Demak untuk membangun fondasi kemasyarakatan dan menyusun kekuatan di Demak.

Raden Patah atau Jin Bun adalah salah seorang keturunan Raja Brawijaya dari salah seorang istrinya yang disebut Putri Cina. Dikisahkan bahwa pada awal abad ke-14, Kaisar Yan Lu dari Dinasti Ming mengirimkan seorang Putri yang cantik kepada Raja Brawijaya di kerajaan Majapahit sebagai tanda persahabatan antara kedua negara. Putri yang cantik dan pintar ini segera merebut perhatian dan mendapatkan tempat yang istimewa di hati Brawijaya. Semua kemauan yang diinginkan sang putri cantik ini dituruti oleh Raja Brawijaya.

Namun karena Ratu Dwarawati, sang permaisuri yang berasal dari Campa, merasa cemburu terhadap Putri Cina tersebut, terpaksa Raja Brawijaya memberikan Putri Cina yang sedang mengandung kepada Arya Damar yang kala itu menjabat sebagai adipati Palembang. Setelah Putri Cina melahirkan Raden Patah di Palembang, barulah Arya Damar menikahi Putri Cina tersebut dan melahirkan anak laki-laki yang kemudian diberi nama Raden Kusen. Dengan demikian maka Raden Patah dan Raden Kusen adalah saudara sekandung seibu tapi berlainan ayah.

Karena menolak untuk menjadi adipati di Palembang, maka Raden Patah dan Raden Kusen kemudian berlayar ke Jawa dengan menaiki kapal dagang yang menuju Surabaya dan menjadi santri di pesantren Ampel Denta (Ngampel Denta). Di sana, Raden Patah mempelajari ajaran Islam bersama murid-murid Sunan Ampel yang lainnya seperti Raden Paku (Sunan Giri), Maulana Ibrahim (Sunan Bonang), dan Raden Kasim

(Sunan Drajat). Sementara Raden Kusen kembali ke Majapahit dan diangkat menjadi adipati Terung oleh Prabu Brawijaya. Di Ngampel Denta, Raden Patah diangkat menjadi menantu oleh Sunan Ampel yang dinikahkan dengan cucu perempuannya, anak sulung dari Nyai Gede Waloka. Setelah menikah, Raden Patah pindah ke Jawa Tengah dan mendirikan pesantren yang diberi nama Glagahwangi, lalu mengajarkan agama Islam kepada penduduk sekitar.

Semakin lama pesantren Glagahwangi makin maju dan menyebabkan Prabu Brawijaya menjadi khawatir apabila Raden Patah memiliki niat untuk memberontak. Prabu Brawijaya akhirnya memutuskan memberi perintah terhadap Raden Kusen untuk memanggil Raden Patah datang ke Majapahit. Setelah Raden Patah setuju datang ke Majapahit, Prabu Brawijaya malah merasa terkesan dan mengakui kembali Raden Patah sebagai putranya.

Masa Kejayaan Kerajaan Demak

Saat sebelum memberontak kepada Majapahit, Jin Bun atau Raden Patah adalah bupati yang ditempatkan di Demak atau Bintara. Tahun 1500 Demak menyerang Majapahit lalu memenangkan pertempuran dan memindahkan pusat Pemerintahan ke Demak. Hal ini juga menegaskan bahwa kerajaan Demak adalah ahli waris dari kerajaan Majapahit sehingga seluruh kekuasaan Majapahit menjadi hak milik kerajaan Demak.

Dalam bidang Dakwah, Raden Patah mencoba untuk menerapkan Hukum Islam sebagai panduan aspek kehidupan maka didirikanlah Masjid Agung Demak yang merupakan salah satu masjid tertua yang pertama di Indonesia. Masjid ini juga mempunyai nilai sejarah yang tinggi bagi perkembangan Islam di tanah air, tepatnya pada masa Kesultanan Demak Bintara. Banyak masyarakat yang mempercayai masjid ini sebagai salah satu tempat berkumpulnya para walisongo (Wali Sembilan) penyebar agama Islam.

Raden Patah kemudian digantikan oleh Adipati Unus (1518-1521). Walau ia tidak memerintah lama, tetapi namanya cukup terkenal sebagai panglima perang yang berani. Ia berusaha membendung pengaruh Portugis jangan sampai meluas ke Jawa. Karena mati muda, Adipati Unus kemudian digantikan oleh adiknya, Sultan Trenggono (1521-1546).

Di bawah pemerintahannya, Demak mengalami masa kejayaan. Untuk menjadikan Demak sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam, Sultan Trenggana membantu penyebaran agama Islam dan pendirian kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggana,

Trenggono juga berhasil membawa Demak dalam memperluas wilayah kekuasaannya. Untuk menjadikan Demak sebagai pusat kekuasaan di Jawa, mula mula daerah-daerah di Jawa ditaklukan, kekuasaan Demak yang saat dipimpin oleh Sultan Trenggono akhirnya meliputi sebagian Jawa barat, Jayakarta, Jawa tengah, dan sebagian Jawa timur. Penaklukan

pesisir utara Jawa barat dilakukan oleh Fatahillah, yang turut merintis berdirinya kerajaan Banten dan Cirebon. Baru pada tahun 1527, Sunda Kelapa berhasil direbut oleh Demak. Dalam penyerangan ke Pasuruan pada tahun 1546, Sultan Trenggono gugur.

Perkembangan Sosial dan Politik

Demak terletak di wilayah yang sangat strategis yaitu di jalur perdagangan nusantara. Hal ini memungkinkan Demak berkembang menjadi kerajaan maritim. Demak mempunyai andil besar dalam kegiatan perdagangan, Demak berperan sebagai penghubung daerah penghasil rempah-rempah di wilayah Indonesia bagian timur dan penghasil rempah-rempah di Indonesia bagian barat. Maka dari itu tak heran jika Demak semakin berkembang. Kedudukan Demak semakin kuat berkat penguasaan terhadap pelabuhan-pelabuhan di daerah pesisir pantai pulau Jawa. Selain sebagai kerajaan maritim, Demak juga memiliki wilayah di pedalaman, maka tak mengherankan jika Demak juga memperhatikan permasalahan di bidang pertanian. Oleh karena itu hasil padi dari para petani sangat bagus sehingga Beras merupakan produk andalan dan menjadi komoditi dagang. Dengan demikian, kegiatan perdagangan yang didukung oleh hasil pertanian, yang mengakibatkan Demak memperoleh keuntungan di bidang ekonomi.

Karena demak merupakan basis awal penyebaran agama islam di Pulau Jawa maka dari itu kehidupan sosial dan budaya masyarakat Demak lebih berdasarkan pada agama dan budaya islam. Demak juga berperan sebagai pusat penyebaran dan studi Islam,ada beberapa wali yang berkumpul di Demak seperti Sunan Kalijaga, Sunan Muria, Sunan Kudus, dan Sunan Bonang.

Peranan para wali tersebut sangatlah penting pada masa perkembangan kerajaan Demak, misalnya seperti yang dilakukan oleh Sunan Kudus yang memberi saran kepada Raden Patah untuk membuat siasat_ menghancurkan kekuatan portugis dan membuat pertahanan yang kuat di Nusantara. Demikian pula di bidang budaya, banyak sekali peninggalan kerajaan Demak masih dapat kita lihat . Salah satunya adalah Masjid Demak, masjid ini tergolong unik karena salah satu tiang utamanya terbuat dari pecahan- pecahan kayu yang disebut dengan soko Tatal. Sunan Kalijaga lah yang memimpin sendiri pembangunan Masjid Agung Demak. Di serambi depan Masjid inilah Sunan Kalijaga menciptakan dan menyampaikan dasar- dasar perayaan Sekaten (Maulud Nabi Muhammad SAW) yang sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Cirebon dan Surakarta. Hal tersebut menunjukan adanya akulturasi kebudayaan Hindu dengan kebudayaan Islam.

Kemajuan Kerajaan Demak dalam berbagai bidang tidak bisa dilepaskan dari peran serta Islam dalam menyusun dan membentuk fondasi Kemasyarakatan Demak yang lebih Unggul, disamping itu peran serta para pemimpin dan para Wali juga turut membantu kejayaan Kerajaan Demak.

Tempat dimana kerajaan Demak didirikan sangat strategis untuk perdagangan Nasional karena karena menghubungkan indonesia bagian barat dan indonesia bagian timur, serta memiliki pelabuhan – pelabuhan penting, seperti Jepara, Tuban, Sedayu, Jaratan dan Gresik yang menjadi pelabuhan transito (penghubung) dan juga keadaan kerajaan Majapahit yang sudah hancur, yang menjadikan kerajaan Demak dapat menguasai jalur perdagangan indonesia dan dapat menjual produksi andalannya seperti beras, garam dan kayu jati. Selain menyebarkan agam islam, kesultanan Demak juga mempunyai peran penting dalam mengembangkan perekonomian, kesultanan ini juga mempunyai wilayah pertanian yang subur dan juga menjadi jalur transito yang menghubungkan pusat rempah-rempah yang berada di Maluku dengan pusat perdagangan dunia yang berpusat di selat Malaka.

Dengan demikian perdagangan di demak semakin berkembang pesat didunia maritim karena mendapat dukungan oleh penghasilan yang cukup besar dalam bidang agraris, dan mendapat dukungan dari pelabuhan-pelabuhan didaerah pesisir pantai pulau jawa. Sebagai suatu kerajaan islam yang terdapat dipedalaman, demak juga memperhatikan masalah pertanian, maka beras menjadi salah satu penghasilan yang menguntungkan bagi Demak yang memperoleh keuntungan dibidang ekonomi.

Tahun 1518 Raden Patah meninggal dunia dan di makamkan didekat masjid Demak. Raden Patah meninggalkan 3 orang putra, yaitu Pati Unus, Pangeran Trenggono, dan Pengeran

Sekar Seda Lepen yang juga mempunyai menantu yang bernama Fatahillah. Dalam masa pemerintahan Raden Patah, demak berhasil dalam berbagai bidang, diantaranya perluasan dan pertahanan kerajaan, perkembangan islam dan pengamalannya, serta penerapan musyawarah dan kerja sama dengan para ulama dan umara (penguasa). (Muljana :2005). Keberhasilan Raden Patah dapat dilihat disaat Raden Patah berhasil menaklukkan Girindra Wardhana yang kemudian merebut Tahta dari kerajaan Majapahit (1478).

Tahun 1522, karena kehadiran Portugis yang mendapat izin dari kerajaan Pajajaran yang dibolehkan untuk membuka kantor dagang dipelabuhan Sunda Kelapa, dan merupakan ancaman bagi kerajaan Demak karena kehancuran pelabuhan-pelabuhan Nusantara tinggal menunggu waktu, dan pada saat itu juga Demak dalam upaya untuk mengembangkan dan menguasai perdagangan nasional dan internasional, maka pada tahun 1513 demak melakukan penyerangan terhadap Portugis di Malaka, dan sebelum Raden Patah meninggal, beliau meninggalkan wasiat supaya Pati Unus diangkat sebagai Sultan Demak berikutnya.

Perjuangan beliau digantikan oleh putranya yang bernama Pati Unus (1518). Portugis yang telah menduduki Malaka, pada tahun 1512 giliran Samudra Pasai yang jatuh ke tangan Portugis. Hal ini segera mendesak Pati Unus untuk melakukan penyerangan terhadap Portugis. Demak dibawah kepemimpinan Pati Unus adalah Demak yang menjadi berwawasan Nusantara. Pati Unus memiliki visi yang besar terhadap Demak, yaitu

menjadikan kesultanan Demak sebagai kesultanan maritim yang besar. Pada tahun 1512, demak mempersiapkan armada besar sebanyak 375 kapal perang yang berada ditanah Gowa, Sulawesi yang masyarakatnya telah terkenal dengan pembuatan kapal. Setelah selesai pembuatan lalu Adipati Unus berangkat menuju Malaka. Namun setelah armada Demak telah sampai dipantai Malaka, armada pangeran adipati Unus ditembaki meriam oleh pasukan Portugis yang juga dibantu oleh menantu sultan Mahmud, yaitu sultan Abdullah yang berasal dari Kampar.

Setelah serangan pertama gagal, Adipati Unus mempersiapkan armadanya yang telah direnovasi dan telah disesuaikan dengan medan perang yang akan dihadapinya. Serangan kedua dilakukan pada tahun 1521 dan untuk penyerangan kali ini didukung oleh Raja Malaka yang bernama Sultan Mahmud Syah yang berhasil melarikan diri dari kejaran tentara Portugis, Adipati Unus yang mempunyai gelar Senapati Sarjawala yang telah menjadi Sultan Demak 2 dan dari sinilah sejarah kerajaan Demak akan berubah, akan tetapi penyerangan yang dilakukan kembali gagal yang membuat Adipati Unus gugur dimedan perang (1521).

Adipati Unus gugur sebagai Syahid karena kewajiban membela sesama muslim yang tertindas penjajah (portugis) yang berniat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Karena keberanian Adipati Unus, kemudian disebut masyarakat dengan gelar Pangeran sabrang Lor atau Pangeran yang gugur diseberang utara. Pimpinan Armada Gabungan Kesultanan

Banten, Demak dan Cirebon segera diambil alih oleh Fadhllullah Khan yang oleh Portugis disebut Falthehan, dan belakangan disebut Fatahillah yang telah mengusir Portugis dari Sunda Kelapa pada tahun 1527. Di ambil alihnya oleh Fadhllullah Khan adalah atas inisiatif Sunan Gunung Jati yang menjadi mertua karena putri beliau yang menjadi janda dari pernikahannya dengan Adipati Unus (Sabrang Lor) yang kemudian dinikahkan dengan Fadhlullah.

Karena Adipati Unus meninggal dunia tanpa memiliki anak, maka digantikan oleh adiknya yang bernama Pangeran Sekar Seda Lepen, akan tetapi Pangeran ini dibunuh karena keserakahannya sehingga tahta Demak digantikan oleh adik Adipati Unus yang lain yang bernama Pangeran Trenggono. Setelah beliau naik tahta Demak beliau berkunjung kepada Sunan Gunung Jati dan memperoleh gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Sultan Trenggono adalah sultan Kerajaan Demak yang ketiga, beliau adalah putra dari Raden Patah yang lahir dari permainsuri Ratu Asyikah putri dari Sunan Ampel (Muljana:2005).

Dibawah pemerintahan Sultan Trenggono (1521-1546), Kesultanan Demak mencapai puncak kejayaannya. Wilayah kekuasaannya yang sangat luas meliputi Jawa Barat (Banten, Jayakarta, dan Cirebon), Jawa Tengah dan sebagian Jawa Timur.

Sultan Trenggono juga melakukan tindakan-tindakan yang sangat penting bagi kerajaan Demak, yaitu menegakkan ajaran islam terhadap wilayah-wilayah yang telah dikuasai

beliau seperti Banten, Cirebon, dan Sunda Kelapa, (perluasan kewilayah Jawa Barat dipimpin oleh Fatahillah), juga membendung perluasan wilayah yang dilakukan oleh Portugis dan berhasil juga menakhlukkan kerajaan Mataram, Singasari, dan Blambangan. Keberhasilan Sultan Trenggono untuk memperkuat dan memperluas kekuasaan Demak, ditahun 1527, tentara demak berhasil menguasai tuban, dan setahun kemudian berhasil menduduki Wonosari, dan tahun 1529 berhasil menguasai Gagelang. Daerah kekuasaan Demak kemudian berlanjut menaklukkan medangkungan (Blora, 1530), Surabaya (1531), Lamongan (1542), dan juga wilayah gunung Penanggungan (1545), serta Blambangan yang merupakan kerajaan hindu terakhir di ujung timur pulau Jawa (1546).

Di dalam catatan seorang Portugis yang bernama Fernandez Mendez Pinto pada tahun 1546, Sultan Trenggono wafat pada saat menyerang Panarukan, Situbondo yang saat itu telah dikuasai Blambangan. Sunan Gunung Jadi juga ikut serta membantu dengan mengirimkan prajurit gabungan prajurit Cirebon, Banten, dan Jayakarta sebanyak 7.000 orang prajurit yang dipimpin langsung oleh Fatahillah. Mendez Pinto pada saat itu sedang bersama 40 orang temannya yang berada dalam pasukan Banten. Pada saat itu pula pasukan Demak telah mengepung Panarukan selama 3 bulan, akan tetapi belum juga bisa merebut kota tersebut. Suatu ketika pada saat Sultan Trenggono bermusyawarah dengan para adipati-adipati untuk meluncurkan serangan selanjutnya.

Putra dari bupati Surabaya yang berusia 10 tahun yang menjadi pelayan dari Sultan Trenggono tidak menjalankan perintah beliau, malah tertarik pada jalannya rapat sehingga yang membuat Sultan Trenggono marah dan memukul anak tersebut. Karena tidak terima dengan pukulan Sultan Trenggono, dengan spontan anak itu mengambil pisau dan menancapkannya didada Sultan Trenggono dan Sultan Demak tersebut tewas seketika.

Gugurnya sultan Trenggono di medan perang meninggalkan dua orang putra dan empat orang putri. Anak yang pertama perempuan dan menikah dengan Pangeran Langgar, anak yang kedua yaitu Sunan Prawoto yang menjadi Sultan Demak 4, anak yang ketiga perempuan yang menikah dengan Pangeran Kalinyamat, anak yang keempat perempuan menikah dengan pangeran yang berasal dari Cirebon, anak yang kelima perempuan yang menikah dengan Jaka Tingkir, dan anak yang terakhir adalah Pangeran Timur yang berkuasa didaerah Medion dengan gelar Ranga Jumena.

Raden Mukmin adalah putra dari Sultan Trenggono disaat masih hidup yang turut membantu ayahnya naik Tahta Kerajaan Demak dan turut menyingkirkan Pangeran Sekar Seda Lepen. Beliau memindahkan ibukota bintara kebukit prawoto yang kemudian ia dijuluki sebagai Sunan Prawoto. Raden Mukmin juga mempunyai niatan untuk meneruskan usaha ayahnya untuk menaklukkan Jawa, karena beliau kurang ahli dalam berpolitik dan lebih menyukai hidup sebagai ulama suci. Prawoto tewas dengan meninggalkan seorang putra yang bernama Arya Pangiri yang diasuh oleh bibinya yang bernama

Ratu Kalinyamat dari Jepara. Kemudian setelah dewasa, Arya Pangiri menjadi menantu dari Sultan Handawijaya, yaitu Raja Pajang, dan diangkat menjadi Bupati Demak.

Seketika setelah tewasnya Sultan Trenggono, membuat terjadinya perebutan kekuasaan didalam kerajaan Demak antara Pangeran Sekar Seda Lepen dan Sunan Prawoto untuk menjadi raja Demak. Pangeran Sekar Seda Lepen yang seharusnya menjadi pewaris tahta kerajaan Demak keturunan dari Raden Patih, yang menggantikan Sultan Trenggono malah dibunuh oleh Sultan Prawoto (anak dari Sultan Trenggono).

Putra dari Pangeran Sekar Seda Lepen yang bernama Arya Penangsang tidak terima ayahnya dibunuh, kemudian Arya Penangsang menyuruh anak buahnya yang bernama Rangkud untuk membunuh Sultan Prawoto (1561), disuatu malam Rangkud berhasil menyusup masuk kamar Sunan Prawoto lalu terbangunlah beliau, pada saat itu dengan spontan Sultan Prawoto mengakui kesalahannya membunuh Pangeran Sekar Seda Lepen, dan beliau rela dibunuh asalkan keluarganya diampuni. Rangkudpun setuju dan langsung menikam Sultan Prawoto dibagian dada sampai tembus dan tertanya istri Sultan Prawoto yang sedang berlindung dibelakang punggung beliau juga terluka karena pisau tersebut, melihat istrinya tewas seketika Sunan Prawoto marah dan sempat membunuh rangkud dengan sisa-sisa tenaganya.

Tidak Cuma itu, Arya Penangsang juga membunuh Pangeran Hadiri yang tidak lain adalah suami Ratu Kalinyamat, yang juga adik dari Sunan Prawoto, dengan kematian Pangeran

Kalinyamat, maka janda suami dari Pangeran Kalinyamat membuat sayembara “Siapa saja yang bisa membunuh Arya Penangsang, akan menjadi suamiku dan mendapatkan harta bendaku”. Pangeran Hadiri dibunuh karena diduga sebagai penghalang Arya Penangsang untuk menjadi sultan Demak. Setelah berhasil membunuh Sultan Prawoto dan pengikutnya, naiklah Arya Penangsang ke tahta kerajaan Demak.

Jaka Tingkir yang bergelar Sultan Handawijaya yang berkuasa di Pajang mendengar sayembara tersebut dan langsung menyanggupinya karena beliau juga adik ipar dari Sunan Prawoto dan Pangeran Kalinyamat.

Jaka Tingkir yang juga dibantu oleh Ki Ageng Penjawi dan Ki Ageng Pemanahan berhasil membunuh Arya penangsang dan menjatuhkan beliau serta pengikutnya dari tahta kerajaan Demak (1586). Sebagai rasa terima kasih karena membantu dalam pertempuran melawan Arya Penangsang, Jaka Tingkir memberi hadiah Ki Ageng Penjawi tanah di wilayah Pati serta Ki Ageng Pemanahan mendapat hadiah tanah wilayah Mataram, sedangkan Bupati Surabaya yang banyak menundukkan daerah-daerah wilayah Jawa Timur diangkat menjadi wakil raja dengan daerah kekuasaan Sedayu, Gresik, Surabaya dan Panarukan. Jaka Tingkir lalu memindahkan pusat kerajaan Demak ke Pajang.

Dinasti Kerajaan Demak berakhir pada tahun 1546, yang hanya bertahan selama 68 tahun sejak berdirinya kerajaan Demak. Secara berturut-turut, hanya tiga Raja Demak yang berhasil membawa Demak pada masa Kejayaannya, yaitu Raden

Patah sebagai raja pertama, Adipati Muhammad Yunus atau lebih dikenal dengan nama Pati Unus sebagai raja kedua, dan Sultan Trenggono sebagai Raja ketiga (1524-1546).

Faktor-faktor yang mendorong kemajuan Demak adalah :

1. Letaknya Strategis di daerah pantai
2. Pelabuhan Bergota di Semarang, merupakan pelabuhan ekspor-impor yang penting bagi Demak
3. Memiliki sungai sebagai penghubung dengan daerah pedalaman, sehingga membantu pengangkutan hasil pertanian berupa beras sebagai komoditas ekspor utama Demak
4. Runtuhnya kerajaan Majapahit oleh Demak membuat Demak berkembang pesat dengan leluasa tanpa ada ancaman dari kerajaan besar lainnya di pulau Jawa.

Keruntuhan Kerajaan Demak

Pemerintahan Raden Patah berlangsung pada akhir abad ke-15 hingga awal abad ke 16. Beliau wafat pada tahun 1518 ketika perjuangan Raden Patah melawan Portugis belum selesai, sepeninggalan Raden Patah kepemimpinan diserahkan kepada puteranya, Adipati Unus (Pangeran Sebrang Lor). Gelar Pangeran Sabrang Lor diberikan bukan tanpa alasan, gelar ini didapatkan oleh Adipati Unus karena karena beliau pernah menyeberang/ melakukan ekspedisi penyerangan ke utara untuk menyerang Portugis yang berada di sebelah utara (Malaka).

Selain mendapatkan gelar Pangeran Sabrang Lor, Adipati Unus juga diketahui memiliki julukan lain diantaranya adalah Cu Cu Sumangsang atau Harya Penangsang. Kepemimpinannya Adipati Unus ini hanya berlangsung selama tiga tahun sehingga usahanya sebagai negarawan tidak banyak diceritakan dalam sejarah kerajaan Demak, tetapi Adipati Unus tidak hilang begitu saja namanya bahkan terkenal karena keberanian dan kegagahan dalam ekspedisi penyerangan Portugis di Malaka. Dalam beberapa cerita dikatakan bahwa Harya Penangsang mempunyai armada laut yang terdiri dari 40 kapal juang yang berasal dari daerah-daerah taklukan, terutama yang diperoleh dari Jepara. Daerah yang memiliki kemampuan pembuatan kapal dengan bahan yang bagus dan aerodinamis dalam air yang baik pula.

Kemudian pemerintahan dari Adipati Unus diserahkan kepada saudaranya yaitu Sultan Trenggono/ Trangana. Dia memerintah kurang lebih selama 34 tahun yaitu antara tahun 1512-1546. Dimasa pemerintahannya, kerajaan telah diperluas ke barat dan ke hulu Sungai Brantas atau pada saat ini dikenal dengan kota Malang. Sebagai lambang kebesaran Islam, Masjid Demak pun dibangun kembali pada masa pemerintahannya.

Perjuangan Pangeran Trenggono tidak kalah oleh para pendahulunya jika ditinjau dari penjelasan tersebut diatas. Meskipun Pangeran Trenggono merasakan bahwa keberadaan orang-orang Portugis di Malaka sebagai ancaman dan bahaya. Akan tetapi Sultan Trenggono belum sanggup menggempur langsung bangsa Portugis tersebut. Mengetahui kondisi yang

tidak memungkinkan tersebut Pangeran Trenggono berusaha pelan-pelan memperluas daerah kekuasaannya dengan mencoba merebut daerah-daerah yang dikuasai oleh Portugis di Sumatra Utara, hal ini diharapkan dapat melemahkan dukungan baik dari posisi maupun bala bantuan yang akan membantu Portugis ketika suatu saat kerajaan Demak akan menyerang.

Sejarah kerajaan Demak juga tidak terlepas dari nama Fattahilah, Fattahilah adalah seorang ulama terkemuka dari Pasai yang sempat melarikan diri dari kepungan orang Portugis, dalam pelariannya ke Demak dia diterima baik oleh Trenggono dan kemudian dinikahkan dengan adiknya. Dalam sumbangsihnya di kerajaan Demak Fattahilah dapat menghalau kemajuan orang-orang Portugis dengan merebut kunci-kunci perdagangan Kerajaan Pejajaran di Jawa Barat yaitu Banten dan Cirebon. Yang dalam kelanjutan sejarahnya merupakan cikal bakal berdirinya kerajaan Banten dan Cirebon Islam.

Fattahilah yang berjuang dalam perluasan wilayah untuk mengurangi kekuatan daerah-daerah yang dikuasai oleh Portugis, Sultan Trenggono juga tidak mau kalah, bahkan terhitung memiliki prestasi yang bagus dengan berhasil menaklukan kerajaan Mataram kuno dipedalaman Jawa Tengah dan juga kerajaan Singasari Jawa Timur bagian selatan. Sedangkan Pasuruan dan Panukuan dapat bertahan dari gempuran pasukan Sultan Trenggono, untuk Kadipaten Blambangan menjadi bagian dari Kerajaan Bali yang tetap menganut Agama Hindu. Namun dalam usahanya untuk menyerang Pasuruan pada tahun 1546, Trenggono Wafat. setelah wafatnya Sultan Trenggono,

timbulah perselisihan yang hebat di Demak terkait siapa yang berhak menggantikannya.

Kekacauan lain yang terjadi akibat meninggalnya Sultan Trenggono bertambah parah dengan adanya pertempuran antara para calon pengganti Raja. Bahkan Ibukota Demak mengalami kerusakan yang cukup parah hancur karena perang saudara tersebut. Para calon pengganti raja yang bertikai itu antara lain anak Trenggono, Sunan Prawoto dan Arya Penangsang anak dari Pangeran Sekar Ing Seda Lepen, adik tiri sultan trenggono yang dibunuh oleh Sunan Prawoto ketika membantu ayahnya merebut tahta Demak. Arya penangsang mendapat dukungan dari gurunya Sunan Kudus untuk merebut takhta Demak, mengirim anak buahnya yang bernama Rangkud untuk membalas kematian ayahnya.

Pada tahun 1549 menurut *Babad Tanah Jawi*, diceritakan bahwa pada suatu malam Rangkud berhasil menyusup ke dalam kamar tidur Sunan Prawoto. Dihadapan Rangkud Sunan mengakui kesalahannya telah membunuh Pangeran Seda Lepen. Ia rela dihukum mati asalkan keluarganya diampuni, mendengar penjelasan tersebut Rangkud lalu menikam dada Sunan Prawoto yang pasrah tanpa perlawanan sampai tembus. Tanpa disadari ternyata istri Sunan sedang berlindung di balik punggungnya. Akibatnya ia pun tewas terkena tusukan dari Rangkud. Melihat istrinya meninggal, Sunan Prawoto marah dan dengan sisa tenaganya ia membunuh Rangkud.

Arya Penangsang tidak berhenti dengan membunuh Sunan Prawoto saja, dia juga membunuh adipati Jepara yang

sangat besar pengaruhnya di kerajaan yaitu Sultan Hadlirin, istri dari adipati Jepara yaitu Ratu Kalinyamat bersumpah akan membalaskan dendam suaminya terhadap Arya Penangsang. Kemudian Ratu Kalinyamat meminta bantuan kepada Hadiwijaya (Jaka Tingkir), menantu Sultan Trenggono yang berkuasa di Pajang (Boyolali). Akhirnya, Joko Tingkir dapat membuuh Arya Penangsang. Hingga Pada tahun 1586, Keraton Demak pun dipindah ke Pajang.

Runtuhnya Kerajaan Demak tak berbeda dengan cara dalam penaklukannya atas Majapahit. Peristiwa gugurnya tokoh-tokoh penting Demak saat menyerang Blambangan yang merupakan bekas kekuasaan kerajaan Majapahit, dan rongrongan dari dalam Demak sendiri membuat kerajaan makin lemah dan akhirnya runtuh dengan sendirinya. Sebuah pelajaran berharga dari sejarah cerai-berai yang akan membahayakan kesatuan dan persatuan.

Raja-Raja yang Memerintah Kerajaan Demak

Raja – raja yang memerintah di kerajaan Demak antara lain :

1. Raden Patah (1500 – 1518)

Nama kecil Raden Patah adalah Pangeran Jimbun dan setelah menjadi raja Raden Patah bergelar Sultan Alam Akbar al Fatah. Kerajaan Demak menjadi kerajaan besar dan menjadi pusat penyebaran agama Islam yang penting

Pada masa pemerintahan Raden Patah. Untuk itu atas perintah para wali, dibangunlah Masjid Agung Demak sebagai lambang kekuasaan Islam di daerah Demak.

Menjadi keuntungan tersendiri bagi Demak ketika jatuhnya Malaka ke tangan Portugis, dikarenakan posisi Demak menjadi semakin penting, baik dalam arti dan peranannya sebagai pusat penyebaran agama Islam maupun sebagai penghubung dalam perdagangan rempah-rempah yang sudah berlangsung ratusan tahun sebelumnya. Namun, di sisi lain berkembangnya Demak menjadi pusat perdagangan rempah-rempah juga merupakan ancaman bagi kekuasaan Demak karena pasti akan menjadi perhatian dari Portugis. Oleh karena itu sebelum Portugis datang ke Demak, pada tahun 1513 Demak terlebih dahulu mengirimkan armadanya untuk menyerang Portugis di Malaka dibawah pimpinan Pati Unus, putra Raden Patah. Serangan yang dibantu oleh Aceh dan Palembang itu gagal karena kualitas persenjataan yang kurang memadai.

2. Pemerintahan Pati Unus (1518 – 1521)

wafatnya Raden Patah Pada tahun 1518 menjadikan Pati Unus yang tidak lain adalah putra dari Raden Path itu sendiri menjadi penerus kerajaan. Pati Unus terkenal sebagai panglima perang yang gagah berani dan juga pemimpin perlawanan terhadap Portugis di Malaka dengan ratusan kapal dari Jawa. Karena keberaniannya

itulah ia mendapatkan julukan Pangeran Sabrang lor. Ia juga terbilang cerdik dalam strategi perang, Pati Unus mengirimkan Katir untuk mengadakan blokade terhadap Portugis di Malaka, sehingga mengakibatkan Portugis kekurangan bahan makan.

4. Pemerintahan Sultan Trenggono (1521 – 1546)

Pati Unus tidak memiliki putra. Ketika beliau wafat, sehingga tahta kerajaan digantikan oleh adiknya yang bernama Raden Trenggono. Di bawah pemerintahan Sultan Trenggono inilah Demak mencapai masa kejayaan. Ia dikenal sebagai raja yang bijaksana dan gagah berani seperti kakaknya Pati Unus. Wilayah kekuasaan yang berhasil ditaklukkannya bahkan terbilang sangat luas dibandingkan dengan masa pemerintahan Raden Patah yaitu meliputi Jawa Timur dan Jawa Barat.

Pada masa pemerintahan Raden Trenggono Portugis mulai memperluas pengaruhnya ke Jawa Barat dan merencanakan mendirikan benteng Sunda Kelapa untuk berlindung dari serangan yang mungkin dilakukan oleh Demak. Sesuai prediksi oleh Portugis akhirnya pada tahun 1522 Sultan Trenggono benar-benar mengirimkan tentaranya ke Sunda Kelapa dibawah pimpinan Fatahillah. Pengiriman pasukan Demak ke Jawa Barat bertujuan untuk mengusir bangsa Portugis. Tahun 1527 Fatahillah beserta para pengikutnya berhasil mengusir Portugis dari Sunda Kelapa. Dan mulai

saat itulah Sunda Kelapa diganti namanya menjadi Jayakarta yang artinya kemenangan yang sempurna, sekarang kota Jayakarta kita kenal dengan sebutan Jakarta.

Sultan Trenggono mempunyai cita-cita untuk menyatukan pulau Jawa di bawah kekuasaan kerajaan Demak. Untuk mewujudkan cita-citanya tersebut Sultan Trenggono mengambil langkah sebagai berikut :

- a. menyerang Jawa Barat (Banten, Sunda Kelapa, dan Cirebon) dipimpin Fatahillah
- b. menyerang daerah Pasuruan di Jawa Timur (kerajaan Hindu Supit Urang) dipimpin Sultan Trenggono sendiri, serangan ke Pasuruan tidak membawa hasil bahkan Sultan Trenggono sendiri meninggal dalam peperangan tersebut.
- c. mengadakan perkawinan politik. Misalnya :
 1. Fatahillah dijodohkan dengan adiknya
 2. Pangeran Hadiri dijodohkan dengan puterinya (adipati Jepara)
 3. Joko Tingkir dijodohkan dengan puterinya (adipati Pajang)
 4. Pangeran Pasarehan dijodohkan dengan puterinya (menjadi Raja Cirebon).

Sebuah pelajaran dari sejarah bahwa perebutan kekuasaan dan perpecahan dari dalam akan membahayakan kesatuan dan persatuan. Bangsa Indonesia harus belajar dari sejarah

Kerajaan Demak jika tidak ingin hancur, bukan tidak mungkin jika para penguasa negeri ini melakukan kesalahan yang sama maka nasib negeri ini akan seperti Kerajaan Demak.

Masjid Agung Demak

Masjid Agung Demak termasuk salah satu masjid tertua di Indonesia. Masjid ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting dalam peranan penyebaran Islam di tanah air, masjid ini dibangun tepatnya pada masa Kesultanan Demak Bintoro. Masjid ini dahulunya digunakan sebagai tempat berkumpulnya para wali syiar agama Islam, yang lebih dikenal dengan sebutan Walisongo (Wali Sembilan). Para wali ini sering berkumpul di Masjid Agung untuk beribadah, berdiskusi tentang penyebaran agama Islam, dan mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada penduduk sekitar. Maka dari itu, masjid ini bisa dianggap sebagai saksi bisu penyebaran Islam di Indonesia dan bukti salah satu kemegahan Kesultanan Demak Bintoro

Letak Masjid Agung Demak adalah di tengah kota dan menghadap ke alun-alun yang luas. Secara umum, pembangunan kota-kota di Pulau Jawa banyak kemiripannya, yaitu suatu bentuk satu-kesatuan antara bangunan masjid, keraton, dan alun-alun yang berada di tengahnya. Pembangunan model ini diawali oleh Dinasti Demak Bintoro.

Menurut legenda, pendirian masjid ini hanya dilakukan secara bersama-sama dalam tempo satu malam. Dalam cerita

Babad Demak menunjukkan bahwa masjid ini didirikan pada tahun Saka 1399 (1477) yang ditandai oleh candrasengkala “*Lawang Trus Gunaningjanmi*”, sedang adanya gambar bulus yang berada di mihrab masjid ini terdapat lambang tahun Saka 1401 yang menunjukkan bahwa masjid ini berdiri tahun 1479. Luas bangunan yang terbuat dari kayu jati ini memiliki ukuran 31 m x 31 m dengan bagian serambi berukuran 31 m x 15 m. Atap tengahnya ditopang menggunakan empat buah tiang kayu raksasa (saka guru), yang dibuat oleh empat wali di antara Wali Songo. Saka sebelah tenggara adalah buatan Sunan Ampel, sebelah barat daya buatan Sunan Gunung Jati, sebelah barat laut buatan Sunan Bonang, sedang sebelah timur laut yang tidak terbuat dari satu buah kayu utuh melainkan disusun dari beberapa potong balok yang diikat menjadi satu (saka tatal), merupakan sumbangan dari Sunan Kalijaga. Serambinya dengan delapan buah tiang boyongan merupakan bangunan tambahan pada zaman Adipati Yunus atau yang lebih dikenal sebagai Pati Unus atau pangeran Sabrang Lor, sultan Demak ke-2 pada tahun 1520.



Gambar.1.6. *Masjid Agung Demak*

Dalam proses pembangunannya, Sunan Kalijaga memegang peranan yang amat penting. Wali inilah yang berjasa membetulkan arah kiblat. Menurut riwayat, Sunan Kalijaga juga memperoleh wasiat antakusuma, yaitu sebuah bungkusan yang konon berisi baju “hadiah” dari Nabi Muhammad SAW, yang jatuh dari langit di hadapan para wali yang sedang bermusyawarah di dalam masjid itu.

Para wali sering berkumpul di masjid ini untuk beribadah, berdiskusi tentang penyebaran agama Islam, dan juga mengajarkan ilmu-ilmu Islam kepada penduduk sekitar. Oleh karenanya, masjid ini menjadi tempat bersejarah tentang penyebaran ajaran islam di indonesia dan bukti kemegahan Kesultanan Demak Bintara yang masih ada hingga sekarang ini dan sebagai tempat penyebaran islam pertama di Jawa, dan sebagai tempat para Wali berkumpul. Masjid Agung Demak mempunyai tiga tahap dalam pembangunannya.

Tahap pembangunan yang pertama adalah pada tahun 1466. Para wali tersebut juga mempunyai peranan penting pada masa kerajaan Demak dan juga sebagai penasehat dari Raja Demak. Yang menjadikan hubungan yang terjalin erat antara raja dan bangsawan, juga ulama dengan rakyat. Terjadinya hubungan yang erat tersebut karena sering diadakannya pembinaan di Masjid maupun di pondok pesantren sehingga terciptalah kebersamaan atau Ukhuwah islamiah (persaudaraan yang terjalin diantara orang-orang islam).

Ketika itu masjid Demak masih berupa bangunan Pondok Pesantren Glagahwangi yang berada di bawah asuhan Sunan Ampel. Pada tahun 1477, masjid Demak dibangun kembali

sebagai masjid Kadipaten Glagahwangi Demak. Pada tahun 1478, pada saat Raden Patah diangkat sebagai Sultan I Demak, masjid ini kembali direnovasi lagi dengan penambahan tiga trap. Raden Fatah bersama para Walisongo memimpin proses pembangunan masjid ini dengan dibantu masyarakat yang berada disekitarnya.

Para wali saling membagi tugas masing-masing. Secara umum, para wali membuat soko guru yang menjadi tiang penyangga utama dari masjid tersebut. Namun, juga ada empat wali yang secara khusus memimpin pembuatan soko guru lainnya, yaitu: Sunan Bonang memimpin pembuatan soko guru yang berada di bagian barat laut; Sunan Kalijaga membuat soko guru yang berada di bagian timur laut; Sunan Ampel membuat soko guru yang berada di bagian tenggara; dan Sunan Gunung jati membuat soko guru yang berada di sebelah barat daya.

Bangunan masjid juga ditopang dengan dengan jumlah 128 soko, empat di antaranya merupakan soko guru yang berperan sebagai penyangga utamanya masjid. Tiang penyangga bangunan masjid berjumlah 50 buah, tiang penyangga serambi berjumlah 28 buah, dan tiang kelilingnya berjumlah 16 buah. Mesjid ini juga mempunyai lima buah pintu yang saling menghubungkan, yang juga memiliki makna rukun islam, yaitu shahadat, zakat, shalat, puasa, dan haji. Juga 6 buah jendela yang mempunyai makna rukun iman, yaitu percaya kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, dan qadha-qadar-Nya. Masjid ini memiliki keistimewaan berupa arsitektur khas ala Nusantara. Masjid ini menggunakan atap limas bersusun tiga yang berbentuk segitiga sama kaki.

Atap limas ini berbeda dengan umumnya atap masjid di Timur Tengah yang lebih terbiasa dengan bentuk kubah. Ternyata model atap limas bersusun tiga ini mempunyai makna, yaitu bahwa seorang beriman perlu menapaki tiga tingkatan penting dalam keberagamaannya: iman, Islam, dan ihsan. Di samping itu, masjid ini memiliki lima buah pintu yang menghubungkan satu bagian dengan bagian lain, yang memiliki makna rukun Islam, yaitu syahadat, shalat, puasa, zakat, dan haji. Masjid ini memiliki enam buah jendela, yang juga memiliki makna rukun iman, yaitu percaya kepada Allah SWT, malaikat-malaikat-Nya, rasul-rasul-Nya, kitab-kitab-Nya, hari kiamat, dan qadha-qadar-Nya.

Bentuk bangunan masjid banyak menggunakan bahan dari kayu. Dengan bahan ini, pembuatan bentuk bulat dengan lengkung-lengkungan akan lebih mudah. Interior bagian dalam masjid juga menggunakan bahan dari kayu dengan ukir-ukiran yang begitu indah. Dan ada satu keistimewahan satu buah tiang yang tidak terbuat dari satu buah kayu utuh melainkan disusun dari beberapa potong balok yang diikat menjadi satu (saka tatal). Bentuk bangunan masjid yang unik tersebut ternyata hasil kreatifitas masyarakat pada saat itu.

Di samping banyak mengadopsi perkembangan arsitektur lokal ketika itu, kondisi alam yang mendukung ketersediaan kayu juga mempengaruhi proses pembangunan masjid. Arsitektur bangunan lokal yang berkembang pada saat itu, seperti joglo, memaksimalkan bentuk limas dengan ragam variasinya.

Mesjid Agung Demak juga sebagai lambang kekuasaan yang bercorak islam adalah suatu sisi yang tidak bisa dipisahkan dari Kesultanan Demak Bintara. Bangunan ini juga dijadikan salah satu markas para Wali untuk mengadakan Sekaten. Pada saat upacara sekaten dimulai, dibunyikanlah gamelan dan rebana di depan serambi masjid, sehingga masyarakat berbondong – bondong mendatangi dan memenuhi tempat diadakannya acara sekaten tersebut. Lalu para wali mengadakan semacam pengajian akbar, sehingga masyarakatpun dituntun untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat.

Alasan begitu cepatnya perkembangan Demak yang menjadi pusat perniagaan, serta pusat penyebaran islam, tidak terlepas dari berdirinya masjid Agung Demak. Jadi dari sinilah semua raja dari Kesultanan Demak dan para Walisongo memulai perluasan daerah kekuasaan yang dibarengi oleh kegiatan dakwah islam ke seluruh Jawa.

Wali Songo diantaranya: Sunan Bonang, Sunan Derajat adalah putra Sunan Ampel yang sebelumnya telah bertempat tinggal di kampung Ampel Denta (Surabaya), sunan Kalijaga yang disebut pula Jaka Sayid adalah putra seorang tumenggung Majapahit, Sunan Giri adalah hasil perkawinan antara seorang putri Blambangan dengan seorang Muslim. Sunan Gunung Jati putra Rara Santang atau Syarifah Modai'im, putri Prabu Siliwangi. Sunan Rahmat yang dalam babad dikatakan datang dari Campa, ia adalah saudara sepepu permaisuri Brawijaya.

Di Jawa berdasarkan cerita tradisional dan babad-babad, yang mendapat gelar wali dianggap sebagai pembawa dan penyebar Islam di daerah-daerah pesisir. Tidaklah semua wali yang tergolong Wali sanga atau wali sembilan berasal dari negeri luar. Bahkan sebagian besar dari wali sanga menurut cerita dalam babad-babad berasal dari Jawa sendiri.

KERAJAAN BANTEN

Sejarah Berdirinya Kerajaan Banten

Banten secara geografis terletak di bagian paling barat dari pulau Jawa, Banten memiliki luas sekitar 114 mil persegi. Kerajaan Banten menjadi penguasa jalur pelayaran dan perdagangan yang melalui Selat Sunda. Dengan posisi yang strategis ini Kerajaan Banten berkembang menjadi kerajaan besar di Pulau Jawa dan bahkan menjadi saingan berat bagi VOC di Batavia pada masanya. Dalam catatan sejarah Kesultanan Banten didirikan pada tahun 1520 oleh pendatang-pendatang dari kerajaan Demak di Jawa tengah, Kerajaan Banten daerah kekuasaannya meliputi wilayah-wilayah dari daerah pegunungan Banten, bagian barat Bogor dan Jakarta hingga Lampung di Sumatera bagian Selatan. Daerah yang oleh pelawat-pelawat Portugis dinamakan Sunda Bantam sejak zaman dulu merupakan sebuah pusat perdagangan lada, Sunda Bantam mulai mengalami kemajuan pesat setelah Malaka direbut oleh orang-orang Portugis. Perpindahan bandar utama

menjadi lebih menjorok kedalam menjadi berada di Banten karena Banten berada di pinggir laut dan dalam jalur perdangan, belum lagi bahwa Banten juga daerah yang juga menghasilkan rempah-rempah.

Dalam sebuah tulisan Sunda kuno, cerita Parahiyangan, disebut-sebut nama Wahanten Girang. Nama ini kemudian dihubungkan dengan Banten, sebuah kota pelabuhan di ujung barat pantai utara Jawa. Tetapi dalam sebuah catatan lain yaitu *Tambo Tulangbawang*, *Primbon Bayah*, dan berita Cina, dulu daerah Banten orang menyebutnya dengan nama *Medanggili*. Sebutan ini setidaknya berlaku hingga abad ke-13. Sementara itu, sumber yang berasal dari Cina yang berjudul *Shung Peng Hsiang Sung*, yang diperkirakan ditulis tahun 1430, memberitakan bahwa Banten merupakan suatu tempat yang berada dalam beberapa rute pelayaran Mao'Kun sekitar tahun 1421. Rute pelayaran yang dilakukan oleh Mao'Kun adalah Tanjung Sekong-Gresik-Jaratan; Banten-Timor; Banten Demak; Banten-Banjarmasing; Kreug (Aceh)-Barus-Pariaman-Banten. Sementara dalam buku *Ying-Yai-She-Lan* (1433) Banten disebut *Shut'a* yang sangat dekat pelafalannya dengan Sunda. Buku ini merupakan laporan ekspedisi dari Laksamana *Cheng Ho* dan *Ma Huan* ke beberapa tempat di Pulau Jawa.

Didukung tambahan adanya sumber dari orang Eropa yang diambil dari catatan laporan perjalanan *Tome Pires* (1513), Banten digambarkannya sebagai sebuah kota pelabuhan yang ramai dan berada di bawah kekuasaan Kerajaan Sunda. Catatan itu menjelaskan juga bahwa Banten terletak di sebuah teluk dan muara sungai sehingga menjadi sebuah kota niaga yang baik.

Kota ini dikepalai oleh seorang syahbandar dan wilayah niaganya tidak hanya menjangkau Sumatera melainkan juga sampai di Kepulauan Maldwipa. Barang dagangan utama yang diekspor dari pelabuhan ini ialah lada, beras, dan berbagai jenis makanan lainnya.

Selain dari sumber asing, ada juga sumber lokal yang menyebut-nyebut Banten. *Carita Parahiyangan* yang ditulis pada tahun 1518 menyebutkan adanya sebuah tempat yang bernama *Wahanten Girang* yang terletak agak ke pedalaman. *Wahanten Girang* dapat dihubungkan dengan nama Banten, bahkan oleh sebagian orang nama kota ini dipandang sebagai kata asal bagi nama Banten. Dalam *Purwaka Caruban Nagari*, dijelaskan bahwa Syarif Hidayatullah beserta 98 orang muridnya dari Cirebon, berusaha mengislamkan penduduk di Banten. Dengan kesabaran dan ketekunan, banyaklah yang mengikuti jejak Syarif Hidayatullah. Bahkan akhirnya Bupati Banten dan sebagian besar rakyatnya memeluk agama Islam.

Pada pertengahan abad ke-16, Banten bukan hanya menjadi pelabuhan dagang saja, melainkan juga telah tumbuh sebagai pusat kekuasaan (kerajaan). Kesultanan Banten yang sempat mengalami masa keemasan selama kurang lebih tiga abad. Menurut Babad Pajajaran, proses awal masuknya Islam di Banten mulai ketika Prabu Siliwangi, salah seorang raja Pajajaran, sering melihat cahaya yang menyala-nyala di langit.

Untuk mencari keterangan tentang arti cahaya itu, ia mengutus Prabu Kian Santang, penasihat kerajaan Pajajaran, untuk mencari berita mengenai hal ini. Akhirnya Prabu Kian

Santang sampai ke Mekah. Di sana ia memperoleh berita bahwa cahaya yang dimaksud adalah nur Islam dan cahaya kenabian. Ia kemudian memeluk agama Islam dan kembali ke Pajajaran untuk menyebarkan luaskan agama Islam ke masyarakat. Upaya yang dilakukan Kian Santang hanya berhasil mengislamkan sebagian masyarakat, sedangkan yang lainnya menyingkirkan diri. Akibatnya, Pajajaran menjadi berantakan. Legenda yang dituturkan dalam Babad Pajajaran ini merupakan sebuah refleksi akan adanya pergeseran kekuasaan dari raja pra-Islam kepada penguasa baru Islam.

Sumber lain menyebutkan bahwa ketika Raden Trenggono dinobatkan sebagai sultan Demak yang ketiga (1524) dengan gelar Sultan Trenggono, ia semakin gigih berupaya menghancurkan Portugis di Nusantara. Di lain pihak, Pajajaran justru menjalin perjanjian persahabatan dengan Portugis sehingga mendorong hasrat Sultan Trenggono untuk segera menghancurkan Pajajaran. Untuk itu, ia menugaskan Fatahillah, panglima perang Demak, menyerbu Banten (bagian dari wilayah Pajajaran) bersama dua ribu pasukannya.

Dalam perjalanan menuju Banten, mereka singgah untuk menemui mertuanya, Syarif Hidayatullah, di Cirebon. Pasukan Demak dan pasukan Cirebon bergabung menuju Banten di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah, Fatahillah, Dipati Keling, dan Dipati Canguang. Sementara itu, di Banten sendiri terjadi pemberontakan di bawah pimpinan Maulana Hasanuddin melawan penguasa Pajajaran. Gabungan pasukan Demak dengan Cirebon bersama lasar marinir Maulana Hasanuddin tidak banyak mengalami kesulitan dalam menguasai Banten.

Dengan demikian, pada tahun 1526 Maulana Hasanuddin dan Syarif Hidayatullah berhasil merebut Banten dari Pajajaran.

Pusat pemerintahan yang semula berkedudukan di Banten Girang dipindahkan ke Surosowan, dekat pantai. Dilihat dari sudut ekonomi dan politik, pemindahan pusat pemerintahan ini dimaksudkan untuk memudahkan hubungan antara pesisir Sumatra sebelah barat melalui Selat Sunda dan Selat Malaka.

Situasi ini berkaitan pula dengan situasi dan kondisi politik di Asia Tenggara. Pada masa itu, Malaka telah jatuh di bawah kekuasaan Portugis, sehingga pedagang-pedagang yang enggan berhubungan dengan Portugis mengalihkan jalur perdagangannya ke Selat Sunda. Sejak saat itulah semakin ramai kapal-kapal dagang mengunjungi Banten. Kota Surosowan (Banten Lor) didirikan sebagai ibu kota Kesultanan Banten atas petunjuk Syarif Hidayatullah kepada putranya, Maulana Hasanuddin, yang kelak menjadi sultan Banten yang pertama. Atas petunjuk Sultan Demak, pada tahun 1526 Maulana Hasanuddin diangkat sebagai bupati Kadipaten Banten. Pada tahun 1552 Kadipaten Banten diubah menjadi negara bagian Demak dengan tetap mempertahankan Maulana Hasanuddin sebagai sultannya.

Ketika Kesultanan Demak runtuh dan diganti Pajang (1568), Maulana Hasanuddin memproklamasikan Banten menjadi negara merdeka, lepas dari pengaruh Demak. Sultan Maulana Hasanuddin memerintah Banten selama 18 tahun (1552-1570). Ia telah memberikan andil terbesarnya dalam meletakkan fondasi Islam di Nusantara sebagai salah seorang

pendiri Kesultanan Banten. Hal ini telah dibuktikan dengan kehadiran bangunan berupa masjid dan sarana pendidikan islam seperti pesantren. Di samping itu, ia juga mengirim mubaligh ke berbagai daerah yang telah dikuasainya. Usaha yang telah dirintis oleh Sultan Maulana Hasanuddin dalam menyebarluaskan Islam dan membangun Kesultanan Banten kemudian dilanjutkan oleh sultan-sultan berikutnya.

Kesultanan Banten berdiri dengan ditopang oleh dua unsur utama, yaitu kekuatan politik dan kekuatan ekonomi. Kekuatan politik yang menjadi tonggak berdirinya Kesultanan Banten juga masih terbagi atas tiga kekuatan utama yaitu adanya kerajaan Demak, Cirebon, dan Banten itu sendiri dengan Sunan Gunung Jati, Fatahillah, dan Maulana Hasanuddin sebagai pelopornya.

Perintisan kerajaan Banten diawali dengan kegiatan dakwah/ penyebaran agama Islam, kemudian berkembang dengan pembentukan kelompok-kelompok masyarakat muslim, penguasaan daerah secara militer (1526), dan akhirnya berlanjut kearah penguasaan daerah secara politik sampai berdirinya suatu pemerintahan yang berdiri sendiri yang diberi nama Kerajaan Banten.

Kekuatan kedua yang menjadi pondasi kelahiran Kerajaan Banten yaitu para pedagang muslim, baik para pedagang setempat maupun para pedagang yang berasal dari daerah lainnya. Kenyataan ini didukung oleh suatu kenyataan bahwa sejak awal abad ke-15 Masehi di pesisir utara teluk Banten telah tumbuh kantong-kantong permukiman orang muslim yang sebagian besar bermata pencaharian sebagai pedagang.

Kesultanan Banten pada masa kejayaannya menguasai daerah yang meliputi Serang, Pandeglang, Lebak, dan Tangerang. Banten mempunyai arti dan peranan yang penting dalam penyebaran dan pengembangan Islam di Nusantara sejak abad ke-16 sampai abad ke-19, khususnya di daerah Jawa Barat, Jakarta, Lampung, dan Sumatra Selatan. Posisi kota Banten yang terletak di pesisir Selat Sunda dan merupakan pintu gerbang lalu lintas menuju pulau Sumatra ataupun pulau Jawa dinilai sangat strategis untuk menarik perhatian penguasa di Demak untuk menguasainya. Pada tahun 1525-1526 Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati berhasil menguasai Banten. Penguasaan dari Demak yang merupakan kerajaan Islam inilah yang menjadikan Banten tumbuh menjadi kerajaan Islam pula di tanah Jawa.

Sebelum Banten berwujud sebagai suatu kesultanan Islam, wilayah ini termasuk bagian dari kerajaan Sunda (Pajajaran) dengan Agama resmi kerajaan ketika itu adalah agama Hindu. Pada awal abad ke-16, yang berkuasa di Banten adalah Prabu Pucuk Umum dengan pusat pemerintahan Kadipaten di Banten Girang (Banten Hulu). Surosowan (Banten Lor) hanya berfungsi sebagai pelabuhan. Menurut berita Joade Barros (1516), salah seorang pelaut Portugis, di antara pelabuhan-pelabuhan yang tersebar di wilayah Pajajaran, pelabuhan Sunda Kelapa dan Banten merupakan pelabuhan yang besar dan ramai dikunjungi pedagang-pedagang dalam dan luar negeri. Dari sanalah sebagian lada dan hasil negeri lainnya di ekspor.

Oleh karena itu, Banten pada masa lalu adalah potret sebuah kota metropolitan dan menjadi pusat perkembangan pemerintahan pada Abad 16. Disamping itu keberadaan kesultanan Banten pada masa lalu dapat dilihat dari peninggalan sejarah seperti Masjid Agung Banten yang didirikan pada masa pemerintahan Sultan Maulana Hasanuddin. Seperti masjid-masjid lainnya, bangunan masjid ini pun berdenah segi empat, namun kelihatan antik dan unik. Bila diamati secara jelas, arsitekturnya merupakan perpaduan antara arsitektur asing dan Jawa.

Hal ini dapat dilihat dari tiang penyangga bangunan yang jumlahnya empat buah di bagian tengah, mimbar kuno yang berukir indah, atap masjid yang terbuat dari genteng tanah liat, melingkar berbetuk bujur sangkar yang disebut kubah berupa atap tumpang bertingkat lima. Di dalam serambi kiri yang terletak di sebelah utara masjid terdapat makam beberapa sultan Banten beserta keluarga dan kerabatnya.

Di halaman selatan masjid terdapat bangunan Tiamah, merupakan bangunan tambahan yang didirikan oleh *Hendrik Lucasz Cardeel*, dia adalah seorang arsitek berkebangsaan Belanda yang memeluk agama Islam dengan gelar Pangeran Wiraguna. Pada masa pemerintahan kerajaan Banten, gedung Tiamah ini digunakan sebagai majelis taklim serta tempat para ulama dan umara Banten mendiskusikan soal-soal agama. Sekarang gedung tersebut telah beralih fungsi sebagai tempat penyimpanan benda-benda purbakala. Selain bangunan Tiamah, peninggalan kerajaan Banten dapat ditemukan di Kasunyatan, peninggalan tersebut adalah Masjid Kasunyatan yang umurnya diperkirakan

lebih tua dari Masjid Agung Banten sendiri. Di masjid inilah tinggal dan mengajar Kiai Dukuh yang kemudian bergelar Pangeran Kasunyatan, ulama yang menjadi guru Maulana Yusuf, sultan Banten yang kedua.



Gambar.1.7. *Masjid Agung Banten*

Bangunan lain yang menunjukkan kebesaran dari Kesultanan Banten masa lampau adalah bekas Keraton Surosowan atau gedung kedaton Pakuwan. Keraton Surosowan ini letaknya berdekatan dengan Masjid Agung Banten. Sekarang keraton Surosowan hanya tinggal puing-puing bangunan saja dengan dikelilingi oleh tembok- tembok yang tebal, luas Keraton Surosowan itu sendiri kurang lebih mencapai 4 hektar, berbentuk empat persegi panjang. Benteng Keraton Surosowan

tersebut sekarang masih tegak berdiri, meskipun beberapa bagian kecil ada yang telah runtuh. Dalam situs (lahan) kepurbakalaan Banten masih banyak bangunan atau situs yang menjadi bukti kekuasaan dari kerajaan Banten, antara lain Menara Banten, Masjid Pacinan, Benteng Speelwijk, Meriam Kiamuk, Watu Gilang dan pelabuhan perahu Karangantu.

Perkembangan Kehidupan Sosial Kerajaan Banten

Pemerintahan Banten di Jawa Barat menggunakan aturan dan hukum Islam, sehingga kehidupan masyarakatnya hidup secara teratur. Banyak orang India, Arab, Cina, Melayu dan Jawa yang menetap di Banten. Mereka berkumpul dan membuat perkampungan sesuai dengan nama asalnya, misalnya Pekojan (perkampungan orang Arab), Pecinan (perkampungan orang Cina), Kampung Melayu, Kampung Jawa dan sebagainya.

Di Banten terdapat orang keturunan Madura. Mereka adalah pelarian dari Madura yang meminta perlindungan ke Banten karena tidak mau tunduk kepada Mataram. Kerajaan Banten merupakan salah satu kerajaan Islam di Pulau Jawa selain Kerajaan Demak, Kasepuhan Cirebon, Giri Kedaton, dan Mataram Islam. Kehidupan sosial rakyat Banten berlandaskan ajaran-ajaran yang berlaku dalam agama Islam. Pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa, kehidupan sosial masyarakat Banten semakin meningkat dengan pesat karena sultan memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Usaha yang ditempuh oleh Sultan Ageng Tirtayasa adalah menerapkan sistem perdagangan bebas dan mengusir VOC dari Batavia.

Menurut catatan sejarah Banten, Sultan Banten termasuk keturunan Nabi Muhammad SAW sehingga agama Islam benar-benar menjadi pedoman hidup rakyat. Meskipun agama Islam mempengaruhi sebagian besar kehidupan Kesultanan Banten, namun penduduk Banten telah menjalankan praktek toleransi terhadap keberadaan pemeluk agama lain. Hal ini dibuktikan dengan dibangunnya sebuah klenteng di pelabuhan Banten pada tahun 1673.

Perkembangan Kehidupan Politik Kerajaan Banten

pada tahun 1524 wilayah Banten berhasil dikuasai oleh Kerajaan Demak di bawah pimpinan Syarif Hidayatullah. Pada waktu Demak terjadi perebutan kekuasaan, Banten melepaskan diri dan tumbuh menjadi kerajaan besar. Setelah itu, kekuasaan Banten diserahkan kepada Sultan Hasanudin, putra Syarif Hidayatullah. Sultan Hasanudin dianggap sebagai peletak dasar Kerajaan Banten. Banten semakin maju di bawah pemerintahan Sultan Hasanudin karena didukung oleh faktor-faktor berikut ini:

1. Letak Banten yang strategis terutama setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, Banten menjadi bandar utama karena dilalui jalur perdagangan laut.
2. Banten menghasilkan rempah-rempah lada yang menjadi perdagangan utama bangsa Eropa menuju Asia.

Banten pun secara tak langsung berada di bawah kekuasaan Demak. Semasa Sunan Gunung Jati, Banten masih termasuk kekuasaan Demak. Pada tahun 1552, ia pulang ke Cirebon dan Banten diserahkan kepada anaknya, Maulana Hasanuddin. Sumber lain mengatakan bahwa pendiri Banten adalah Fatahillah (Faletahan menurut catatan Tome Pires) atau Fadhilah Khan atau Nurullah yang berasal dari Pasai. Ia merupakan panglima perang Demak dan juga menantu Sunan Gunung Jati. Keadaan Demak yang goncang karena adanya perebutan kekuasaan, mendorong Banten pada 1522 memutuskan untuk melepaskan diri. Dengan demikian, Hasanuddin adalah pendiri dan peletak cikal-bakal kerajaan Banten. Hasanuddin dinikahkan dengan putri Sultan Trenggana.

Hasanuddin memerintah selama 18 tahun, yaitu hingga tahun 1570. Ia digantikan Sultan Panembahan Maulana Yusuf. Ia sangat memperhatikan perkembangan perdagangan dan pertanian. Ia juga giat menyebarkan ajaran Islam. Pada masa pemerintahannya, tahun 1579 Banten berhasil menaklukkan Pakuan Pajajaran dan menyebarkan Islam lebih luas lagi di Jawa Barat. Panembahan Yusuf wafat karena sakit pada tahun 1580 setelah memerintah selama 10 tahun. Hasanuddin memiliki satu putra lagi, yaitu Pangeran Jepara. Pangeran Jepara menikah dengan putri penguasa Jepara, Ratu Kali Nyamat dan menjadi pengganti penguasa Jepara. Setelah Maulana Yusuf wafat tahun 1580, kekuasaan diberikan kepada Maulana Muhammad. Karena masih berumur sembilan tahun, maka yang menjalankan roda pemerintahan untuk sementara adalah Pangeran Arya Jepara, paman Maulana

Muhammad. Setelah dewasa Maulana Muhammad resmi memerintah Banten dengan gelar Kanjeng Ratu Banten.

Semasa pemerintahannya, Banten menyerang Palembang yang akan dijadiakannya batu loncatan untuk menguasai Selat Malaka. Serangan itu gagal dan Maulana Muhammad tewas dalam pertempuran pada tahun 1596. Kemudian, yang menjadi sultan Banten berturut-turut adalah Abu Ma'ali dan Abdul Qadir. Pada tahun 1638, Raja Abdul Qadir mendapatkan gelar “Sultan” dari Syarif Mekah. Gelar lengkapnya adalah Sultan Abu al-Mafakhir Abdul Qadir. Gelar ini diperoleh setelah Abdul Qadir mengirim utusan ke Mekah. Sebagai tanda gelar tersebut telah diterima olehnya, Sultan Abdul Qadir mendapatkan “bendera dan pakaian suci”.

Pada setiap hari raya Maulid Nabi, pemberian dari Syarif Mekah ini selalu diarak berkeliling Banten. Pada tahun 1651 Abdul Qadir mangkat dan tahta Banten diduduki oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Tirtayasa dan ayahnya begitu menyenangi ilmu pengetahuan. Keduanya sering mengirimkan pertanyaan kepada ulama terkemuka saat itu, di antaranya Nuruddin ar-Raniri di Aceh dan Syekh Yusuf dari Makassar. Para ulama ini biasanya kemudian menulis kitab-kitab khusus sebagai jawaban pertanyaan para sultan itu.

Kerajaan Banten mencapai puncak kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Hal-hal yang dilakukan oleh Sultan Ageng Tirtayasa terhadap kemajuan Kerajaan Banten adalah sebagai berikut:

1. Memajukan wilayah perdagangan. Wilayah perdagangan Banten berkembang sampai ke bagian selatan Pulau Sumatera dan sebagian wilayah Pulau Kalimantan.
2. Banten dijadikan sebagai tempat perdagangan internasional yang mempertemukan pedagang lokal dengan para pedagang asing dari Eropa.
3. Memajukan pendidikan dan kebudayaan Islam sehingga banyak murid yang belajar agama Islam ke Banten.
4. Melakukan modernisasi bangunan keraton dengan bantuan arsitektur Lucas Cardeel. Sejumlah situs bersejarah peninggalan Kerajaan Banten dapat kita saksikan hingga sekarang di wilayah Pantai Teluk Banten.
5. Membangun armada laut untuk melindungi perdagangan. Kekuatan ekonomi Banten didukung oleh pasukan tempur laut untuk menghadapi serangan dari kerajaan lain di Nusantara dan serangan pasukan asing dari Eropa.

Sultan Ageng Tirtayasa merupakan salah satu raja yang gigih menentang pendudukan VOC di Indonesia. Kekuatan politik dan angkatan perang Banten maju pesat di bawah kepemimpinannya. Namun akhirnya VOC menjalankan politik adu domba antara Sultan Ageng dan putranya, Sultan Haji. Berkat politik adu domba tersebut Sultan Ageng Tirtayasa kemudian berhasil ditangkap dan dipenjarakan di Batavia hingga wafat pada tahun 1629 Masehi.

Berikut ini daftar penguasa Kesultanan Banten menurut catatan sejarah Wikipedia:

1. Maulana Hasanuddin atau Pangeran Sabakingkin memerintah pada tahun 1552 – 1570
2. Maulana Yusuf atau Pangeran Pasareyan memerintah pada tahun 1570 – 1585
3. Maulana Muhammad atau Pangeran Sedangrana memerintah pada tahun 1585 – 1596
4. Sultan Abu al-Mafakhir Mahmud Abdulkadir atau Pangeran Ratu memerintah pada tahun 1596 – 1647
5. Sultan Abu al-Ma'ali Ahmad memerintah pada tahun 1647 – 1651
6. Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abu al-Fath Abdul Fattah memerintah pada tahun 1651-1682
7. Sultan Haji atau Sultan Abu Nashar Abdul Qahar memerintah pada tahun 1683 – 1687
8. Sultan Abu Fadhl Muhammad Yahya memerintah pada tahun 1687 – 1690
9. Sultan Abul Mahasin Muhammad Zainul Abidin memerintah pada tahun 1690 – 1733
10. Sultan Abul Fathi Muhammad Syifa Zainul Arifin memerintah pada tahun 1733 – 1747
11. Ratu Syarifah Fatimah memerintah pada tahun 1747 – 1750

12. Sultan Arif Zainul Asyiqin al-Qadiri memerintah pada tahun 1753 – 1773
13. Sultan Abul Mafakhir Muhammad Aliuddin memerintah pada tahun 1773 – 1799
14. Sultan Abul Fath Muhammad Muhyiddin Zainussalihin memerintah pada tahun 1799 – 1803
15. Sultan Abul Nashar Muhammad Ishaq Zainulmutaqin memerintah pada tahun 1803 – 1808
16. Sultan Muhammad bin Muhammad Muhyiddin Zainussalihin memerintah pada tahun 1809 – 1813

Perkembangan Agama Islam Kerajaan Banten

Banten adalah salah satu pusat perkembangan Islam, karena Banten mempunyai peranan penting dalam tumbuh dan berkembangnya Islam, khususnya di daerah Jakarta dan Jawa Barat. Dikarenakan letak geografisnya yang sangat strategis sebagai kota pelabuhan. Di Banten telah berdiri satu kerajaan Islam yang lebih dikenal oleh masyarakat Banten dan sekitarnya dengan sebutan Kesultanan Banten.

Sebelum Agama Islam berkembang di Banten, masyarakat Banten masih hidup dalam tata cara kehidupan tradisi prasejarah dan dalam abad-abad permulaan masehi ketika agama Hindu berkembang di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari peninggalan purbakala dalam bentuk prasasti arca-arca yang bersifat Hinduistik dan bangunan keagamaan lainnya. Sumber naskah kuno dari

masa pra Islam menyebutkan tentang kehidupan masyarakat yang menganut Hindu. Sekitar permulaan abad ke 16, di daerah pesisir Banten sudah ada sekelompok masyarakat yang menganut agama Islam. Penyebarannya dilakukan oleh salah seorang pemimpin Islam yang dikenal sebagai wali berasal dari Cirebon yakni Sunan Gunung Jati dan kemudian dilanjutkan oleh putranya Maulana Hasanudidin untuk menyebarkan secara perlahan-lahan ajaran agama Islam di Banten.

Perkembangan Dan Masa Keemasan Kerajaan Banten

Pada abad ke-17 ini, Belanda telah menguasai beberapa daerah kerajaan besar seperti: Mataram, Maluku, Batavia dan Makasar. Sedangkan dalam bidang ekonomi, Belanda telah memegang monopoli perdagangan rempah-rempah secara luas, bahkan Belanda pun berhasil memperoleh monopoli di Sumatera Tengah yakni di Palembang (1642) dan Jambi (1643). Di pihak lain, rakyat nusantara sebagian besar berada dalam kemiskinan dan penindasan akibat keserakahan Belanda ini.

Setelah Sultan Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir wafat, Pangeran Adipati Anom dinobatkan menjadi Sultan Banten ke-5 pada tanggal 10 Maret 1651. Untuk memperlancar sistem pemerintahannya Sultan mengangkat beberapa orang yang dianggap cakap sebagai pembantunya. Jabatan Patih atau Mangkubumi dipercayakan kepada Pangeran Mandura dan wakilnya Tubagus Wiratmaja, sebagai Kadhi atau Hakim Agung diserahkan kepada Pangeran Jayasentika, tapi karena Pangeran Jayasentika meninggal tidak lama setelah pengangkatan itu

dalam perjalanan menunaikan ibadah haji, maka jabatan Kadhi diserahkan kepada Entol Kawista yang kemudian dikenal dengan nama Faqih Najmuddin.

Pangeran Mandura dan Pangeran Jayasentika adalah Putra Sultan 'Abulmafakhir Mahmud Abdul Kadir, jadi masih terhitung paman, sedangkan Faqih Najmuddin adalah menantu Sultan Abulmufakhir yang menikah dengan Ratu Lor. Untuk memudahkan pengawasan daerah-daerah yang tersebar luas seperti Lampung, Solebar, Bengkulu, dan lainnya, diangkatlah ponggawa-pongawa dan nayaka-nayaka di bawah pengawasan dan tanggung jawab Mangkubumi. Dalam waktu tertentu nayaka-nayaka ini diharuskan datang ke Banten dan berkumpul di kediaman Mangkubumi di Kemuning, di seberang sungai, untuk melaporkan keadaan daerahnya masing-masing.

Biasanya setelah itu para ponggawa dan nayaka ini dibawa menghadap Sultan di istana Surosowan, untuk menerima petunjuk-petunjuk dan pesan-pesan yang harus disampaikan kepada rakyat di daerahnya masing-masing. Di Mangkubumi Pangeran Mandura disertai tugas mengatur dan mengawasi kesejahteraan prajurit kerajaan, baik tentang perumahannya di Kanari maupun tentang persenjataannya. Rumah-rumah senopati dan ponggawa ditempatkan sedemikian rupa sehingga, di samping mereka dapat cepat mengetahui keadaan prajurit-prajuritnya, tetapi dengan mudah mereka pun dapat segera menerima instruksi sultan.

Memang Pangeran Surya yang bergelar Pangeran Ratu Ing Banten adalah seorang ahli strategi perang yang dapat diandalkan. Hal ini dibuktikan sewaktu masih menjabat Putra

Mahkota, Pangeran Surya-lah yang mengatur gerilya terhadap pendudukan Belanda di Batavia. Seperti juga kakeknya, Pangeran Ratu tidaklah melepaskan jalur hubungan dengan kekhalifahan Islam yang berpusat di Mekah, yang biasanya dilakukan sambil menunaikan ibadah haji.

Persiapan untuk mengadakan pertemuan dengan pusat kekhalifahan di Mekah itu, Sultan mengadakan musyawarah dengan beberapa pembesar kerajaan yang antara lain: Pangeran Mandura, Pangeran Mangunjaya dan Mas Dipaningrat; yang selanjutnya diputuskan supaya Santri Betot beserta tujuh orang lainnya diutus ke Mekah. Delegasi ini ditugaskan untuk melaporkan penggantian Sultan di Banten, juga menceritakan keadaan nusantara dan Kesultanan Banten khususnya dalam hubungannya dengan kompeni Belanda. Di samping itu pula, untuk memperdalam pengetahuan rakyat Banten kepada agama Islam, dimintakan supaya Khalifah mengirimkan guru agama ke Banten.

Setiba kembali utusan ini dari Mekah, Khalifah Makkah menyampaikan sepucuk surat untuk Sultan bersama tiga orang utusan yang bernama Sayid Ali, Abdunnabi, dan Haji Salim. Dari khalifah Mekah pula Pangeran Ratu Ing Banten mendapat gelar Sultan 'Abulfath Abdulfattah. Santri Betot kemudian diberi nama Haji Fattah dan mendapat hadiah-hadiah dari sultan, demikian juga ketujuh orang pengiringnya.

Dalam masalah politik kenegaraan, Sultan 'Abulfath Abdulfattah dengan tegas menentang segala bentuk penjajahan bangsa asing atas negaranya. Mengembalikan Jayakarta ke pangkuan Banten merupakan cita-cita utama dan karenanya

Sultan tidak akan pernah mau berbaikan dengan kompeni Belanda. Sultan melihat bahwa perjanjian damai antara Sultan Abulmufakhir dengan kompeni pada tahun 1645 sudah tidak lagi dipatuhi kompeni. Kompeni Belanda masih selalu mencegat kapal-kapal dagang asing yang hendak berlabuh dan mengadakan transaksi dagang di bandar Banten, sehingga pelabuhan Banten mengalami banyak penurunan, karena pedagang-pedagang asing segan berlabuh di Banten takut diserang kapal-kapal kompeni, baik waktu datang maupun setelah mereka meninggalkan Banten.

Membalas tindakan kompeni ini Sultan pun memerintahkan tentaranya untuk selalu mengadakan perusuhan pada intalasi milik kompeni, di mana saja diharapkan orang-orang Belanda itu segera meninggalkan Banten. Sultan pun memperkuat pasukannya di Tangerang dan Angke, yang telah lama dijadikan benteng pertahanan terdepan dalam menghadapi kompeni Belanda. Dari daerah ini pula pada tahun 1652 pasukan Banten mengadakan penyerangan ke Batavia. Melihat situasi yang semakin panas itu, kompeni mengirimkan utusan ke Banten untuk menyampaikan usulan pembaharuan perjanjian tahun 1645. Dibawanya hadiah-hadiah yang menarik untuk melunakkan hati Sultan, tapi Sultan 'Abulfath menolak usulan tersebut. Utusan kedua dikirimnya pula pada bulan Agustus 1655, tapi seperti utusan yang pertama, Sultan pun menolaknya. Banten bertekad hendak meleyapkan penjajah Belanda walau apapun resikonya.

Sehingga pada tahun 1656 pasukan Banten yang bermarkas di Angke dan Tangerang mengadakan gerilya besar-

besaran, dengan mengadakan pengrusakan kebun-kebun tebu dan penggilingan-penggilingannya, pencegatan serdadu-serdadu patroli Belanda, pembakaran markas patroli, dan beberapa pembunuhan orang-orang Belanda, yang semuanya dilakukan pada malam hari.

Di samping itu perahu-perahu ramping prajurit Banten sering mencegat kapal kompeni, dan membunuh semua tentara Belanda dan merampas semua senjata serta kapalnya. Sehingga kapal kompeni yang hendak melewati perairan Banten haruslah dikawal pasukan yang kuat. Untuk menghadapi kompeni dalam pertempuran yang lebih besar, Sultan 'Abulfath memperkuat pertahanannya baik dalam jumlah maupun kualitasnya.

Diadakanlah hubungan yang lebih baik dengan negara-negara lain seperti Cirebon, Mataram dan lain-lain. Bahkan dari Kerajaan Turki, Inggris, Perancis, dan Denmark, banyak didapatkan bantuan berupa senjata-senjata api yang sangat dibutuhkan. Diadakanlah kesatuan langkah dan penyatuan pasukan di daerah kuasa Banten seperti di Lampung, Bangka, Solebar, Indragiri, dan daerah lainnya mengirimkan pasukan perangnya untuk bergabung dengan pasukan Surosowan.

Demikian juga keadaan kompeni di Batavia, pasukan perang kompeni diperkuat dengan serdadu-serdadu sewaan dari Kalasi, Ternate, Bandan, Kejawen, Melayu, Bali, Makasar dan Bugis. Memang serdadu yang berasal negeri Belanda sendiri sangat sedikit, mereka sengaja mengambil penduduk pribumi untuk menghadapi orang pribumi lainnya. Dalam pertempuran itu pun, orang Belanda selalu berada di belakang sedangkan yang maju perang selalu serdadu pribumi. Diperkuatnya penjagaan-

penjagaan dan benteng-benteng di perbatasan Angke, Pesing, Tangerang, tapi karena kompeni sedang sibuk berperang dengan Makasar, mereka tidak bisa banyak menyiapkan pasukan.

Setelah terjadi beberapa kali pertempuran yang banyak merugikan kedua belah pihak, maka sekitar bulan November dan Desember 1657 Kompeni mengajukan usul gencatan senjata. Perjanjian gencatan senjata ini tidak segera dapat disepakati, karena syarat-syarat perjanjian itu belum semuanya disepakati,. Karena kepentingan Belanda dan kepentingan Banten selalu berbeda.

Tanggal 29 April 1658 datanglah utusan Belanda ke Banten membawa surat dari Gubernur Jendral Kompeni yang berisi rancangan perjanjian persahabatan. Usul perdamaian ini terdiri dari 10 pasal:

1. Kedua belah pihak harus mengembalikan tawanan perangnya masing-masing.
2. Banten harus membayar kerugian perang berupa 500 ekor kerbau dan 1500 ekor sapi.
3. Blokade Belanda atas Banten akan dihentikan setelah Sultan Banten menyerahkan pampasan perang.
4. Kantor perwakilan Belanda di Banten harus diperbaiki atas biaya dari Banten.
5. Sultan Banten harus menjamin keamanan dan kemerdekaan perwakilan kompeni di Banten.

6. Karena banyaknya barang-barang kompeni dicuri dan diselapkan oleh orang Banten, maka kapal-kapal kompeni yang datang di Banten dibebaskan dari pemeriksaan.
7. Setiap orang Banten yang ada di Batavia harus dikembalikan ke Banten, demikian juga sebaliknya.
8. Kapal-kapal kompeni yang datang ke pelabuhan Banten dibebaskan dari bea masuk dan bea keluar.
9. Perbatasan Banten dan Batavia ialah garis lurus dari Untung Jawa hingga ke pedalaman dan pegunungan.
10. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan, warga kedua belah pihak dilarang melewati batas daerahnya masing-masing.

Dari rancangan naskah perjanjian yang diajukan kompeni ini Sultan 'Abulfath dapat melihat kecurangan dan ketidaksungguhan kompeni atas pedamaian. Kompeni hanya mengharapkan keuntungan sendiri tanpa memperhatikan kepentingan rakyat Banten. Oleh karenanya pada tanggal 4 Mei 1658, Sultan mengirimkan utusan ke Batavia untuk mengajukan perubahan atas rancangan naskah perjanjian itu antara lain :

1. Rakyat Banten dibolehkan datang ke Batavia setahun sekali untuk membeli senjata, meriam, peluru, mesiu, besi, cengkeh dan pala.
2. Rakyat Banten dibebaskan berdagang di Ambon dan Perak tanpa dikenakan pajak dan cukai.

Usul Sultan ini dengan serta merta ditolakny, kompeni hanya menginginkan supaya orang Banten membeli rempah-rempah dari kompeni dengan harga yang ditentukan dan harus membayar pajak. Monopoli rempah-rempah di Ambon dan Maluku adalah suatu yang sangat menguntungkan kompeni, sehingga apabila Banten dibolehkan berdagang di sana, hapuslah monopoli ini. Demikian juga apabila orang Banten dibolehkan membeli alat-alat perang, ini akan memungkinkan Banten memperkuat diri dan dengan mudah akan merebut kembali Batavia.

Penolakan Gubernur Kompeni atas usul ini membuat Sultan sadar bahwa tidaklah mungkin akan ada persesuaian pendapat antara dua musuh yang berbeda kepentingan ini, bahkan dengan perdamaian ini kompeni berkesempatan untuk menyusun kekuatan. Karena berpikiran demikian maka pada tanggal 11 Mei 1658 dikirimnya surat balasan yang menyatakan bahwa Banten dan kompeni Belanda tidak akan mungkin bisa berdamai. Tiada jalan lain yang harus ditempuh kecuali perang. Sejak itulah Sultan Abulfath Abdulfattah mengumumkan “perang sabil” menghadapi kompeni Belanda. Seluruh kekuatan angkatan perang Banten dikerahkan ke daerah-daerah perbatasan, maka terjadilah pertempuran besar di darat dan laut. Pertempuran ini berlangsung tanpa henti-hentinya sejak bulan Mei 1658 sampai dengan tanggal 10 Juli 1659.

Pergolakan Dan Keruntuhan Kerajaan Banten

Pada masa era kepemimpinan Sultan Ageng Tirtayasa diwarnai konflik antara Banten dengan VOC yang semakin memuncak. Pada awalnya, Sultan Ageng Tirtayasa berusaha mengajak Mataram untuk secara bersama-sama menghadapi VOC. Akan tetapi, usaha tersebut gagal dilakukan seiring dengan lemahnya kepemimpinan Sunan Amangkurat II yang telah menandatangani perjanjian dengan VOC yang sangat merugikan Mataram. Dengan adanya perjanjian Sultan Ageng Tirtayasa tidak bisa memutuskan hubungan Mataram dengan VOC sehingga perhatiannya ditujukan terhadap Cirebon. Ia berupaya membangkitkan perlawanan rakyat Cirebon terhadap VOC, meskipun tetap mengalami kegagalan. Dengan demikian, Sultan Ageng Tirtayasa harus berhadapan sendiri dengan VOC.

Bersamaan dengan itu, Banten mengalami perpecahan dari dalam, putra mahkota Sultan Abu Nasr Abdul Kahar yang dikenal dengan Sultan Haji diangkat jadi pembantu ayahnya mengurus urusan dalam negeri. Sedangkan urusan luar negeri dipegang oleh Sultan Ageng Tirtayasa dan dibantu oleh putra lainnya, yaitu Pangeran Arya Purbaya. Pemisahan urusan pemerintahan ini tercium oleh wakil Belanda di Banten, W. Caeff yang kemudian mendekati dan menghasut Sultan Haji. Karena termakan hasutan VOC, Sultan Haji menuduh pembagian tugas ini sebagai upaya menyingkirkan dirinya dari tahta kesultanan. Agar tahta kesultanan tidak jatuh ke tangan Pangeran Arya Purbaya, Sultan Haji kemudian bersekongkol dengan VOC

untuk merebut tahta kekuasaan Banten. Persekongkolan ini dilakukan oleh Sultan Haji setelah Sultan Ageng Tirtayasa lebih banyak tinggal di keraton Tirtayasa.

VOC, yang sangat ingin menguasai Banten, bersedia membantu Sultan Haji untuk mendapatkan tahta kesultanan. Untuk itu, VOC mengajukan empat syarat yang mesti dipenuhi oleh Sultan Haji. Pertama, Banten harus menyerahkan Cirebon kepada VOC. Kedua, VOC akan diizinkan untuk memonopoli perdagangan lada di Banten dan Sultan Banten harus mengusir para pedagang Persia, India, dan Cina dari Banten. Ketiga, apabila ingkar janji, Kesultanan Banten harus membayar 600.000 ringgit kepada VOC. Keempat, pasukan Banten yang menguasai daerah pantai dan pedalaman Priangan harus segera ditarik kembali.

Oleh karena dijanjikan akan segera menduduki tahta Kesultanan Banten, persyaratan tersebut diterima oleh Sultan Haji. Dengan bantuan pasukan VOC, pada tahun 1681 Sultan Haji melakukan kudeta kepada ayahnya dan berhasil menguasai istana Surosowan. Istana Surosowan tidak hanya berfungsi sebagai tempat kedudukan Sultan Haji, tetapi juga sebagai simbol telah tertanamnya kekuasaan VOC atas Banten. Melihat situasi politik tersebut, pada tanggal 27 Pebruari 1682 pasukan Sultan Ageng Tirtayasa Istana Surosowan untuk mengepung Sultan Haji dan VOC yang telah menduduki Istana Surosowan. Serangan itu dapat menguasai kembali Istana Surosowan dan Sultan Haji segera dibawa ke loji VOC serta mendapat perlindungan dari Jacob de Roy.

Mengetahui bahwa Sultan Haji telah berada di bawah perlidungan VOC, pasukan Sultan Ageng Tirtayasa bergerak menuju loji VOC untuk menghancurkannya. Di bawah pimpinan Kapten Sloot dan W. Caeff, pasukan Sultan Haji bersama-sama dengan pasukan VOC mempertahankan loji itu dari kepungan pasukan Sultan Ageng Tirtayasa. Akibat perlawanan yang sangat kuat dari pasukan Sultan Ageng Tirtayasa, bantuan militer yang dikirim dari Batavia tidak dapat mendarat di Banten. Akan tetapi, setelah ada kepastian bahwa VOC akan diberi izin monopoli perdagangan di Banten oleh Sultan Haji, pada 7 April 1682 bantuan dari Batavia itu memasuki Banten di bawah komando Tack dan De Saint Martin. Dengan kekuatan yang besar, pasukan VOC menyerang Keraton Surosowan dan Keraton Tirtayasa serta berhasil membebaskan loji VOC dari kepungan Sultan Ageng Tirtayasa.

Meskipun demikian, Sultan Ageng Tirtayasa terus melakukan perlawanan hebat yang dibantu oleh orang-orang Makassar, Bali, dan Melayu. Markas besar pasukannya ada di Margasama yang diperkuat oleh sekitar 600 sampai 800 orang prajurit di bawah komando Pangeran Suriadiwangsa. Sementara itu, Pangeran Yogya mempertahankan daerah Kenari dengan kekuatan sekitar 400 orang, Kyai Arya Jungpati dengan jumlah pasukan sekitar 120 orang mempertahankan daerah Kartasana. Sekitar 400 orang mempertahankan daerah Serang, 400 sampai 500 orang mempertahankan daerah Jambangan, sebanyak 500 orang berupaya untuk mempertahankan Tirtayasa, dan sekitar 100 orang memperkuat daerah Bojonglopang.

Serangan hebat yang dilakukan oleh pasukan VOC berhasil mendesak barisan Banten sehingga Margasana, Kacirebonan, dan Tangerang dapat dikuasai juga oleh VOC. Sultan Ageng kemudian mengundurkan diri ke Tirtayasa yang dijadikan pusat pertahanannya. Tanara dan Pontang juga diperkuat pertahanannya. Di Kademangan ada pasukan sekitar 1.200 orang di bawah pimpinan Arya Wangsadiraja. Mereka cukup lama dapat bertahan, tetapi pada tanggal 2 Desember 1682 Kademangan akhirnya jatuh juga setelah terjadi pertempuran sengit antara kedua pasukan. Dalam serangkaian pertempuran ini di kedua belah pihak banyak yang gugur. Sebagian pasukan Banten mengungsi ke Ciapus, Pagutan, dan Jasinga. Dengan jatuhnya pertahanan Kademangan, tinggal Tirtayasa yang menjadi bulan-bulanan VOC. Serangan umum dimulai dari daerah pantai menuju Tanara dan Tangkurak. Pada tanggal 28 Desember 1682 pasukan Jonker, Tack, dan Miichielsz menyerang Pontang, Tanara, dan Tirtayasa serta membakarnya. Ledakan-ledakan dan pembakaran menghancurkan keraton Tirtayasa. Akan tetapi Sultan Ageng Tirtayasa berhasil menyelamatkan diri ke pedalaman. Pangeran Arya Purbaya juga berhasil lolos dengan selamat dengan terlebih dahulu membakar benteng dan keratonnya.

Pihak VOC berusaha beberapa kali untuk mencari Sultan Ageng Tirtayasa dan membujuknya untuk menghentikan perlawanan dan turun ke Banten. Untuk menangkap Sultan Ageng Tirtayasa, VOC memerintahkan Sultan Haji untuk menjemput ayahnya. Ia kemudian mengutus 52 orang keluarganya ke Ketos dan pada malam menjelang tanggal 14

Maret 1683 iring-iringan Sultan Ageng Tirtayasa memasuki Istana Surosowan. Setibanya di Istana Surosowan, Sultan Haji dan VOC segera menangkap Sultan Ageng Tirtayasa dan dipenjarakan di Batavia sampai ia meninggal tahun 1692. Penangkapan itu telah mengakhiri peperangan Banten melawan VOC sehingga berkibarliah kekuasaan VOC di wilayah Banten.

Meskipun demikian, rakyat Banten masih melakukan perlawanan walaupun semuanya tidaklah begitu berarti. Tidak lama setelah itu, dengan restu VOC, Sultan Haji dinobatkan menjadi Sultan Banten (1682-1687). Penobatan ini disertai beberapa persyaratan sehingga Kesultanan Banten tidak lagi memiliki kedaulatan. Persyaratan tersebut kemudian dituangkan dalam sebuah perjanjian yang ditandatangani pada 17 April 1684 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa semua pasal serta ayat yang tercantum pada perjanjian 10 Juli 1659 mendapat pembaharuan, dan pasal yang masih dipercayai dan menguntungkan bagi kedua belah pihak akan dipelihara baik-baik tanpa pembaharuan. Di samping itu kedua belah pihak menganggap sebagai kedua kerajaan yang bersahabat yang dapat memberikan keuntungan bagi kedua belahnya. Tambahan bahwa Sultan Banten tidak boleh memberikan bantuan apa pun kepada musuh-musuh VOC, baik berupa senjata, alat perang atau bahan perbekalan, demikian pula halnya kepada sahabat VOC dan terutama *sunan* atau *susuhunan* atau putra-putra mahkota Cirebon tidak boleh mencoba melakukan penyerangan atau permusuhan karena ketenangan dan perdamaian di Jawa bagaimanapun harus terlaksana.

2. Dan oleh karena penduduk kedua belah pihak harus ada ketenangan dan bebas dari segala macam pembunuhan dan perampokan yang dilakukan oleh orang-orang jahat di hutan-hutan dan pegunungan, maka orang Banten dilarang mendatangi daerah termasuk Jakarta baik di sungai-sungainya maupun di anak-anak sungainya. Sebaliknya juga bagi orang Jakarta tidak boleh mendatangi daerah dan sungai ataupun anak sungainya yang ternasuk Banten. Kecuali kalau disebabkan keadaan darurat masing-masing diperbolehkan memasuki daerah tersebut tetapi dengan surat izin jalan yang sah, dan kalau tidak maka akan dianggap sebagai musuh yang dapat ditangkap atau dibunuh tanpa memutuskan perjanjian perdamaian itu.
3. Dan karena harus diketahui dengan pasti sejauh mana batas daerah kekuasaan yang sejak jaman lampau telah dimaklumi, maka tetap ditentukan daerah yang dibatasi oleh Sungai Untung Jawa (Cisadane) atau Tangerang dari pantai laut hingga pegunungan sejauh aliran sungai tersebut dengan kelokannya dan kemudian menurut garis lurus dari daerah selatan hingga utara sampai di lautan selatan. Bahwa semua tanah di sepanjang Sungai Untung Jawa atau Tangerang akan menjadi milik atau ditempati VOC.
4. Dalam hal itu setiap kapal VOC atau kepunyaan warganya, begitu pula kepunyaan Sultan Banten dan warganya, jika terdampar atau mendapat kecelakaan di laut Jawa dan

sumatera, harus mendapat pertolongan baik penumpangnya atau pun barang-barangnya.

5. Bahwa atas kerugian, kerusakan yang terjadi sejak perjanjian tahun 1659 yang diakibatkan oleh Sultan dan kesultanan Banten sebagaimana telah jelas dinyatakan pada tahun 1680 oleh utusan Banten dan demikian pula akibat pembunuhan dan perampokan oleh Pangeran Aria Sura di loji VOC sehingga ada pembunuhan kepala VOC Jan van Assendelt, dan segala kerugian-kerugian lainnya harus diganti oleh Sultan dengan uang sejumlah 12.000 ringgit kepada VOC.
6. Setelah perjanjian ditandatangani dan disahkan oleh kedua belah pihak maka baik tentara pengawal, pembunuh atau pelanggar hukum VOC atau juga orang partikelir yang bersalah tanpa membedakan golongan atau kebangsaan dari sini atau dari tempat lainnya di daerah VOC, jika datang ke daerah Banten atau tempat lain yang ada di bawah daerah hukum VOC akan segera ditahan dan kemudian diserahkan kembali kepada perwakilan VOC.
7. Bahwa karena Banten tidak merupakan satu-satunya penguasa terhadap Cirebon maka harus dinyatakan bahwa kekuasaan raja-raja Cirebon dapat ditinjau kembali sebagai sahabat yang bersekutu di bawah perlindungan VOC yang juga di dalam ikatan perdamaian dan persahabatan ini telah dimengerti oleh kedua belah pihak.

8. Bahwa berkenaan dengan isi perjanjian tahun 1659 pasal empat dimana dinyatakan bahwa VOC tidak perlu memberikan sewa tanah atau rumah untuk loji, maka menyimpang dari hal itu VOC akan menentukan pembayaran kembali dengan cara debet.
9. Sultan berkewajiban untuk di waktu yang akan datang tidak mengadakan perjanjian atau persekutuan atau perserikatan dengan kekuatan atau bangsa lain karena bertentangan dengan isi perjanjian ini.
10. Karena perjanjian ini harus tetap terpelihara dan berlaku terus hingga masa yang akan datang, maka Paduka Sri Sultan Abdul Kahar Abu Nasr beserta keturunannya harus menerima seluruh pasal dalam perjanjian ini, dan dimaklumi, dianggap suci, dipercayai dan benar-benar akan dilaksanakan dan kemudian oleh segenap pembesar kerajaan tanpa penolakan sebagaimana pula dari pihak VOC yang diwakili oleh misi komandan dan Presiden Francois Tack, Kapten Herman Dirkse Wanderpoel, pedagang Evenhart van der Schuer, dan kapten bangsa Melayu Wan Abdul Bagus dari atas nama Gubernur Jenderal VOC dan Dewan Hindia juga atas nama Dewan Jenderal VOC Belanda.

Perjanjian ini ditandatangani oleh kedua belah pihak, dari pihak Banten diwakili oleh Sultan Abdul Kahar, Pangeran Dipaningrat, Kiyai Suko Tajuddin, Pangeran Natanagara, dan

Pangeran Natawijaya, sementara dari pihak Belanda diwakili oleh Komandan dan Presiden Komisi Francois Tack, Kapten Herman Dirkse Wonderpoel, Evenhart van der Schuere, serta kapten bangsa Melayu Wan Abdul Bagus.

Perjanjian itu sangat jelas meniadakan kedaulatan Banten karena dengan perjanjian itu segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan dalam dan luar negeri harus atas persetujuan VOC. Dengan ditandatanganinya perjanjian itu, selangkah demi selangkah VOC mulai menguasai Kesultanan Banten dan sebagai simbol kekuasaannya, pada tahun 1684-1685 VOC mendirikan sebuah benteng pertahanan di bekas benteng kesultanan yang dihancurkan. Selain itu, didirikan pula benteng Speelwijk sebagai bentuk penghormatan kepada Speelman yang menjadi Gubernur Jenderal VOC dari tahun 1682 sampai dengan 1685. Demikian pula Banten sebagai pusat perniagaan antarbangsa menjadi tertutup karena tidak ada kebebasan melaksanakan politik perdagangan, kecuali atas izin VOC.

Penderitaan rakyat semakin berat bukan saja karena pembersihan atas pengikut Sultan Ageng Tirtayasa serta pajak yang tinggi karena sultan harus membayar biaya perang, tetapi juga karena monopoli perdagangan VOC. Rakyat dipaksa untuk menjual hasil pertaniannya terutama lada dan cengkeh kepada VOC dengan harga yang sangat rendah. Pedagang-pedagang bangsa Inggris, Perancis, dan Denmark diusir dari Banten dan pindah ke Bangkahulu, karena banyak membantu Sultan Ageng Tirtayasa.

Dengan kondisi demikian, sangatlah wajar kalau masa pemerintahan Sultan Haji banyak terjadi kerusuhan, pemberontakan, dan kekacauan di segala bidang yang ditimbulkan oleh rakyat. Selain menghadapi penentangan dari rakyatnya sendiri, Sultan Haji pun menghadapi suatu kenyataan bahwa VOC merupakan tuan yang harus dituruti segala kehendaknya. Karena tekanan-tekanan itu, akhirnya Sultan Haji jatuh sakit hingga meninggal dunia pada tahun 1687.

Jenazahnya dimakamkan di sebelah utara mesjid agung Banten, sejajar dengan makam ayahnya. Sepeninggal Sultan Haji terjadilah perebutan kekuasaan di antara anak-anaknya. Pertingkaian itu dapat diselesaikan setelah Gubernur Jenderal VOC van Imhoff turun tangan dengan mengangkat anak pertama, Pangeran Ratu menjadi Sultan Banten dengan gelar Sultan Abu'l Fadhl Muhammad Yahya (1687-1690). Ternyata Sultan Abu'l Fadhl termasuk orang yang sangat membenci Belanda. Ditanya kembali Banten yang sudah porak poranda itu. Akan tetapi baru berjalan tiga tahun, ia jatuh sakit yang mengakibatkan kematiannya. Jenazahnya dimakamkan di samping kanan makam Sultan Hasanuddin di Pasarean Sabakingkin.

Oleh karena Sultan Abu'l Fadhl Muhammad Yahya tidak mempunyai anak, tahta kesultanan diserahkan kepada adiknya Pangeran Adipati dengan gelar Sultan Abu'l Mahasin Muhammad Zainul Abidin juga biasa disebut Kang Sinuhun ing Nagari Banten yang menjadi gelar sultan-sultan Banten berikutnya. Ia memerintah dari tahun 1690 sampai 1733.61 Putra Sultan Abu'l Mahasin yang sulung meninggal dunia dibunuh orang

sehingga yang menggantikan tahta kesultanan pada tahun 1733 adalah putra keduanya yang kemudian bergelar Sultan Abulfathi Muhammad Shifa Zainul Arifin (1733-1747).

Pada masa pemerintahan Sultan Zainul Arifin ini sering terjadi pemberontakan rakyat yang tidak senang dengan perlakuan VOC yang sudah di luar batas kemanusiaan. Memang pada awal abad ke-18 terjadi perubahan politik VOC dalam pengelolaan daerah yang dikuasainya. Monopoli rempah-rempah dianggapnya sudah tidak menguntungkan lagi karena Inggris sudah berhasil menanam cengkeh di India sehingga harga cengkeh di Eropa pun turun. Oleh karena itu, VOC mengalihkan usahanya dengan menanam tebu dan kopi di samping rempah-rempah yang kemudian hasilnya harus dijual kepada VOC dengan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh VOC.

Untuk keperluan penanaman tebu dan kopi itu, VOC banyak membutuhkan tanah yang luas dan tenaga kerja murah. Maka mulailah penaklukan daerah-daerah pedalaman. Raja yang menguasai daerah itu diharuskan menanam tebu atau kopi yang kemudian hasilnya harus dijual kepada VOC dengan harga yang sudah ditentukan. Rakyat dipaksa menanami sebagian tanahnya dengan tebu atau kopi yang hasilnya harus dijual kepada raja, yang kemudian menjualnya kembali kepada VOC.

Sering terjadi, VOC membeli kopi dari raja seharga 21 ringgit per pikul, sedangkan raja membayar hanya 5 ringgit kepada petani. Demikian pula cara penimbangan yang semberono, jenjang birokrasi perdagangan yang berbelit-belit, menyebabkan kerugian pada rakyat petani. Sebagai

gambaran dapatlah dikemukakan sebagai berikut: Sultan menjual lada kepada VOC seharga 15 mat Spanyol per bahar (375 pon), sedangkan sultan sendiri membelinya dari pejabat yang ditunjuknya seharga 7,8 atau 9 mat Spanyol, dan pejabat tersebut membeli dari rakyat seharga 4 mat Spanyol yang dibayarnya dengan cara penukaran barang kebutuhan sehari-hari seperti garam, kain, beras, dan lauk-pauk yang diperhitungkan dengan harga tinggi, sehingga si petani hampir tidak mendapat apa-apa dari hasil buminya itu.

Sementara itu, di keraton pun terjadi keributan dan kekacauan pemerintahan. Sultan Zainul Arifin tidak mampu melepaskan diri dari pengaruh Ratu Syarifah Fatimah, seorang janda seorang letnan Melayu di Batavia yang dinikahi dan dijadikan permaisurinya. Ketidakberdayaan itu terlihat dari keputusan Sultan Zainul Arifin yang membatalkan penunjukan Pangeran Gusti sebagai putra mahkota. Atas pengaruh Ratu Syarifah Fatimah dan persetujuan VOC, Sultan Zainul Arifin mengangkat Pangeran Syarif Abdullah, menantu Ratu Fatimah dari suaminya yang terdahulu, menjadi putra mahkota.

Setelah dibatalkan sebagai putra mahkota, atas suruhan Ratu Syarifah Fatimah, Pangeran Gusti disuruh pergi ke Batavia dan di tengah perjalanan ditangkap tentara VOC dan diasingkan ke Sailan pada tahun 1747. Tidak lama setelah menantunya diangkat menjadi putra mahkota, Ratu Syarifah Fatimah memfitnah suaminya gila sehingga sultan ditangkap oleh VOC dan diasingkan ke Ambon sampai meninggal. Sebagai gantinya Pangeran Syarif Abdullah dinobatkan sebagai Sultan Banten pada tahun 1750 dengan gelar Sultan Syarifuddin Ratu Wakil.

Meskipun demikian, Ratu Fatimah-lah yang memegang kuasa atas pemerintahan di Kesultanan Banten.

Kecurangan yang dilakukan Ratu Fatimah ini bagi rakyat dan sebagian pembesar negeri merupakan suatu penghinaan besar dan penghianatan yang sudah tidak bisa diampuni lagi sehingga rakyat pun melakukan perlawanan bersenjata. Di bawah pimpinan Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang, mereka menyerbu Surosowan. Strategi yang diterapkan oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang adalah membagi pasukannya menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin oleh Ratu Bagus Buang diberi tugas untuk melakukan penyerangan ke Kota Surasowan.

Sementara itu, Ki Tapa memimpin kelompok kedua dengan tugas mencegat bantuan pasukan VOC dari Batavia. Hanya dengan bantuan tambahan yang didatangkan langsung dari Negeri Belanda, VOC dapat memukul mundur pasukan Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang. Untuk melanjutkan perjuangannya, Ki Tapa menyingkir ke daerah pedalaman Banten dan menjadikan Sajira yang terletak di Lebak sebagai salah satu pusat pertahanannya.

Untuk menenangkan rakyat Banten, Gubernur Jenderal VOC Jacob Mossel, memerintahkan wakilnya di Banten untuk menangkap Ratu Syarifah Fatimah dan Sultan Syarifuddin yang dianggapnya sebagai sumber kekacauan. Keduanya kemudian diasingkan ke daerah Maluku, Ratu Fatimah ke Saparua dan Sultan Syarifuddin ke Banda. Tidak lama setelah itu, tepatnya pada 1752, VOC mengangkat Pangeran Arya Adisantika, adik

Sultan Zainul Arifin, menjadi Sultan Banten dengan gelar Sultan Abulma'ali Muhammad Wasi' Zainal 'Alimin. Selain itu, Jacob Mossel pun segera mengembalikan Pangeran Gusti dari tempat pengasingannya dan ditetapkan sebagai putra mahkota.⁶⁶ Akan tetapi dengan pengangkatan itu, Sultan Abulma'ali harus menandatangani perjanjian dengan VOC yang isinya semakin memperkuat dan mempertegas kekuasaan VOC atas Banten. Isi perjanjian itu selengkapnya berbunyi sebagai berikut.

1. Banten di bawah kuasa penuh VOC Belanda walaupun pemerintahan tetap di tangan Sultan.
2. Sultan akan mengirim utusan ke Batavia setiap tahun sambil membawa upeti berupa lada yang jumlahnya ditetapkan VOC.
3. Hanya VOC Belanda yang boleh mendirikan benteng di Banten.
4. Banten hanya boleh menjual kopi dan tebu kepada VOC saja.
5. Sejalan dengan bunyi pasal 4, banyaknya produksi kopi dan tebu di Banten haruslah ditentukan VOC.

Perjanjian itu sangat merugikan Banten sehingga Pangeran Gusti, beberapa pangeran, dan pembesar keraton lainnya menjadi gusar. Rakyat kembali mengadakan hubungan dengan Ki Tapa di Sajira, Lebak. Di bawah kepemimpinan Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang kembali mengangkat senjata menentang VOC.

Sementara itu, para pangeran dan pembesar keraton melakukan pengacauan di dalam kota. Dengan susah payah

VOC akhirnya dapat melumpuhkan serangan-serangan tersebut. Perlawanan rakyat yang dipimpin oleh Ki Tapa dan Ratu Bagus Buang, mengakibatkan Sultan Abulma'ali Muhammad Wasi'zainul 'Alamin menyerahkan kekuasaannya kepada Pangeran Gusti. Pada tahun 1753 Pangeran Gusti dinobatkan menjadi sultan dengan gelar Abu'l Nasr Muhammad 'Arif Zainul 'Asiqin (1753-1773).

Perlawanan rakyat Banten terhadap hegemoni VOC terus berlangsung. Bahkan setelah Pemerintah Kerajaan Belanda mengambil alih kekuasaan dari tangan VOC, perlawanan rakyat tersebut tidaklah menjadi menurun. Sepanjang abad ke-19, daerah Banten terus menerus dilanda konflik senjata antara pasukan Banten dengan Pemerintah Hindia Belanda. Untuk mengatasi perlawanan ini, pada 1809 Gubernur Jenderal Daendels menghapus Kesultanan Banten dan bekas wilayahnya dibagi dua menjadi Caringin dan Serang. Ketika kekuasaan berpindah ke tangan Sir Stamford Raffles terjadi lagi perubahan wilayah di bekas Kesultanan Banten. Sejak tahun 1813, daerah ini dibagi menjadi empat kabupaten yaitu :

1. Kabupaten Banten Lor (Banten Utara) yang dipimpin oleh Pangeran Suramenggala;
2. Kabupaten Banten Kulon (Banten Barat) diperintah oleh Tubagus Hayudin;
3. Kabupaten Banten Tengah yang diperintah oleh Tubagus Ramlan; dan
4. Kabupaten Banten Kidul (Banten Selatan) yang diperintah oleh Tumenggung Suradilaga.

KERAJAAN MATARAM ISLAM

Asal Usul Kerajaan Mataram Islam

Kerajaan Mataram berdiri pada tahun 1582 dan berpusat di Kotagede, Yogyakarta. Sejarah kerajaan Mataram Islam dalam sebuah cerita bermula dari keluarga petani. Dikisahkan, ketika seorang petani bernama Ki Ageng Giring sedang menggarap sawahnya di pinggiran Kali Opak, tiba-tiba sebuah kelapa yang jatuh dan terdengar suara “Barang siapa meminum air kelapa ini, maka ia dan keturunannya akan berkuasa di tanah Jawa.” Mendengar suara demikian, Ki Ageng Giring lalu membawa kelapa itu pulang tapi tidak langsung meminumnya sebab ia sedang tirakat berpuasa. Sesampainya di rumah, Ki Ageng Giring membersihkan kelapa itu dan meletakkannya di meja. Beberapa saat berselang, sahabatnya yang bernama Ki Gede Pemanahan datang ke rumahnya. Melihat ada kelapa muda yang tergeletak di atas meja, Ki Gede Pemanahan yang sedang kehausan pun meminumnya sampai habis. pada saat tetesan terakhir lalu Ki

Ageng Gede datang dan melihat bahwa kelapa muda tersebut telah dihabiskan oleh sahabatnya. Melihat hal itu, Ki Ageng Giring merasa menyesal dan kecewa. Ia pun meminta kepada Ki Gede Pemanahan agar suatu saat keturunannya yang ketujuhlah yang menguasai tanah Jawa.

Dalam versi yang lain, sejarah berdirinya Kerajaan Mataram Islam dikaitkan dengan kerajaan yang sudah ada sebelumnya yaitu Demak dan Pajang. Dalam salah satu versinya disebutkan bahwa pada saat Kerajaan Demak mengalami kemunduran, ibukotanya langsung di pindahkan ke Pajang dan dimulailah pemerintahan Pajang sebagai kerajaan. Kerajaan pajang terus mengadakan ekspansi ke Jawa Timur dan juga terlibat konflik dengan keluarga Arya Penangsang dari kadipaten Jipang Panolan (berada di sekitar daerah Cepu, Blora, Jawa Tengah). Setelah berhasil menaklukkan Arya Penangsang, Ki Jaka Tingkir atau Sultan Hadiwijaya (1550-1582) memberikan hadiah kepada dua orang yang dianggap berjasa dalam menaklukkan Arya Penangsang, yaitu Ki Ageng Pemanahan dan Ki Penjawi.

Ki Ageng Pemanahan mendapatkan jatah wilayah tanah di hutan Mentaok (berada di tenggara Kota Yogyakarta dan di selatan Bandara Adisucipto) dan Ki Penjawi mendapatkan jatah wilayah tanah di Pati. Ki Ageng Pemanahan berhasil menjadikan tanah mentaok menjadi desa yang makmur dan kemudian menjadi kerajaan yang mau bersaing dengan Kerajaan Pajang yang menjadi atasannya. Pada tahun 1575, Pemanahan meninggal dan digantikan oleh putranya Danang Sutawijaya (Raden ngabehi Loring Pasar). Sutawijaya kemudian berhasil memberontak pada Pajang. Setelah Sultan Hadiwijaya meninggal

pada tahun 1586, Pangeran Benowo naik tahta menggantikan Hadiwijaya. Namun karena tidak mampu mengatasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh para bupati yang berada pada pesisir pantai, Pangeran Benowo menyerahkan kekuasaan kerajaannya kepada Sutawijaya. Sejak itu, maka berdirilah Kerajaan Mataram dengan Danang Sutawijaya sebagai raja pertamanya dengan gelar Panembahan Senopati (1586-1601).

Kehidupan Politik dan Pemerintahan

Dalam menjalankan pemerintahannya, Panembahan Senopati selaku raja Mataram menghadapi banyak rintangan. Di mana para bupati di pantai utara Jawa seperti Demak, Jepara, dan Kudus yang dulunya tunduk kepada Pajang masih terus melakukan pemberontakan karena ingin melepaskan diri dari Pajang dan menjadi kerajaan yang merdeka.

Panembahan Senopati yang bercita-cita menguasai tanah Jawa, terus melakukan berbagai persiapan di daerah dengan memperkuat pasukan Mataram. Pada saat Panembahan Senopati mengadakan perluasan wilayah kerajaan dan menduduki daerah-daerah pesisir pantai Surabaya, adipati Surabaya menjalin persekutuan dengan Madiun dan Ponorogo untuk menghadapi Mataram. Sayangnya, Ponorogo dan Madiun justru dapat dikuasai oleh Mataram. Tidak berselang lama, Pasuruan, Kediri, dan akhirnya Surabaya juga berhasil direbut. Dalam waktu yang cukup singkat, Mataram berhasil merebut semua wilayah yang berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di masa pemerintahan selanjutnya yang dipimpin oleh Mas Jolang (1602-1613 M),

Kerajaan Mataram semakin diperluas dengan mengadakan pendudukan terhadap daerah-daerah di sekitarnya.

Pada tahun 1613 M, Mas Jolang wafat di desa Krapyak kemudian dimakamkan di pasar Gede dan diberi gelar Pangeran Seda ing Krapyak. Yang menggantikan Mas Jolang setelah wafat adalah Mas Martapura. Namun karena kesehatan Mas Martapura sering sakit-sakitan, ia turun dari tahta kerajaan dan digantikan oleh Mas Rangsang yang bergelar Sultan Agung Senopati ing alogo Ngabdurrahman. Mas Rangsang adalah raja pertama di Mataram yang menggunakan gelar Sultan sehingga ia lebih dikenal dengan sebutan Sultan Agung. Pada masa pemerintahan Sultan Agung (1613-1645 M) inilah Kerajaan Mataram mencapai masa kejayaannya.

Selain menjabat sebagai seorang raja, Sultan Agung juga sangat tertarik dengan filsafat, kesusastraan, dan seni. Ia pun kemudian menulis buku filsafat yang berjudul *Sastro Gending*. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Mataram sudah dua kali melakukan penyerangan ke Batavia (tahun 1628 M dan 1629 M), namun semua serangan itu gagal. Alasan penyerangan itu adalah karena Sultan Agung memiliki tujuan untuk mempertahankan seluruh tanah Jawa dan mengusir orang-orang Belanda yang berada di Batavia. Dengan demikian, beliau adalah salah satu penguasa yang secara besar-besaran memerangi VOC yang kala itu telah menguasai Batavia. Setelah mengalami kegagalan itu, Sultan Agung kemudian memperketat penjagaan di daerah perbatasan-perbatasan yang dekat dengan Batavia agar pihak Belanda sulit untuk menembus daerah Mataram.

Pada saat pemerintahan Sultan Agung, wilayah Kerajaan Mataram hampir meliputi seluruh pulau Jawa. Wilayah kerajaan pun dibagi menjadi dua: Wilayah Pusat dan Mancanegara.

1. Wilayah pusat dibagi lagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Kutanegara atau Kutagara sebagai pusat pemerintahan dengan pusatnya adalah istana atau keraton yang berkedudukan di ibukota kerajaan.
 - b. Negara Agung, merupakan wilayah yang mengitari Kutanegara. Menurut *Serat Pustaka Raja Purwa*, wilayah Negara Agung di bagi menjadi empat daerah dan masing-masing daerah dibagi menjadi dua bagian:
 1. Daerah Kedu, dibagi menjadi Siti Bumi dan Bumiyo yang terletak di sebelah barat dan timur sungai Progo,
 2. Daerah Siti Ageng atau Bumi Gede, dibagi menjadi Siti Ageng Kiwa dan Siti Ageng Tengen,
 3. Daerah Bagelen, dibagi menjadi Sewu yang terletak antara sungai Bogowonto dan Sungai Donan di Cilacap dan Numbak Anyar yang terletak antara sungai Bogowonto dan sungai Progo,
 4. Daerah Pajang, dibagi menjadi Panumpin yang meliputi daerah Sukowati dan Panekar.

2. Wilayah Mancanegara adalah daerah yang berada di luar wilayah Negara Agung tapi tidak termasuk daerah pantai. Mancanegara meliputi Jawa Tengah dan Jawa Timur sehingga dibagi menjadi Mancanegara Timur (Mancanegara Wetan) dan Mancanegara Barat (Mancanegara Kilen). Sedangkan wilayah kerajaan yang terletak di tepi pantai disebut Pasisiran yang kemudian dibagi lagi menjadi Pesisir Timur (Pasisiran Wetan) dan Pesisir Barat (Pasisiran Kilen). Sebagai batas kedua daerah pasisiran adalah sungai Tedunan atau sungai Serang yang mengalir di antara Demak dan Jepara.

Setelah Sultan Agung meninggal pada tahun 1645 M, kekuasaan dipegang oleh putranya yang bergelar Amengkurat I (1645-1677 M). Berbeda dengan ayahnya yang sangat membenci orang-orang Belanda, Amengkurat I justru membiarkan orang-orang Belanda masuk ke daerah Kerajaan Mataram. Bahkan Amengkurat I menjalin hubungan yang sangat erat dengan Belanda dan mereka diperkenankan untuk membangun benteng di Kerajaan Mataram.

Setelah diizinkan membangun benteng di wilayah Kerajaan Mataram, ternyata tindakan Belanda semakin sewenang-wenang. Akhirnya muncullah pemberontakan yang dipimpin oleh pangeran Trunajaya dari Madura. Berbekal koneksi dengan bupati di daerah pesisir pantai, Pangeran Trunajaya hampir menguasai ibu kota Mataram. Namun karena perlengkapan persenjataan pasukan Belanda jauh lengkap, pemberontakan itu berhasil dipadamkan.

Pada saat terjadi pertempuran di pusat Ibukota Kerajaan Mataram, Amengkurat I menderita luka-luka dan dilarikan oleh putranya ke Tegalwangi dan meninggal dunia di sana. Amengkurat II pun menggantikan ayahnya memimpin Mataram (1677-1703 M). Ternyata di bawah pemerintahannya, Mataram menjadi semakin rapuh sehingga wilayah yang dikuasainya semakin sempit karena sudah dikuasai oleh Belanda. Karena merasa bosan tinggal di ibu kota kerajaan, Amengkurat II kemudian mendirikan sebuah ibu kota baru di Desa Wonokerto yang diberi nama Kartasura.

Di Kartasura, Amengkurat II menjalankan pemerintahannya dengan sisa-sisa Kerajaan Mataram dan meninggal di sana pada tahun 1703 M. Setelah Amengkurat II meninggal, Kerajaan Mataram menjadi semakin suram dan sudah tidak mungkin untuk merebut kembali wilayah-wilayah yang telah direbut oleh Belanda. Naik menggantikan Amengkurat II, Sunan Mas (Sunan Amengkurat III) menuruni sifat kakeknya yang sangat menentang kegiatan VOC. Karena mendapat pertentangan dari Amengkurat III, VOC tidak menyetujui pengangkatan Sunan Amengkurat III sebagai Raja Mataram sehingga VOC mengangkat Pangeran Puger yang merupakan adik dari Amangkurat II (Paku Buwono I) sebagai calon Raja tandingan. Maka pecahlah perang saudara (memperebutkan mahkota I) antara Amangkurat III dengan Pangeran Puger dan akhirnya dimenangkan oleh Pangeran Puger. Pada tahun 1704, Pangeran Puger dinobatkan sebagai Raja Mataram dengan gelar Sunan Paku Buwono I.

Paku Buwono I meninggal tahun 1719 dan diganti oleh Sunan Prabu (Amangkurat IV) pada tahun 1719-1727 M. Di masa pemerintahan Amangkurat IV terjadi banyak pemberontakan terhadap pemerintahannya yang dilakukan oleh para bangsawan. Di sini, lagi-lagi VOC ikut campur sehingga kembali terjadi perang antar saudara (memperebutkan mahkota II). Sepeninggal Sunan Amangkurat IV pada tahun 1727, Kerajaan Mataram dibagi menjadi dua wilayah melalui Perjanjian Giyati. Wilayah pertama adalah Daerah Kesultanan Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat) dengan Mangkubumi yang bergelar Sultan Hamengkubuwono I sebagai rajanya. Mangkubumi menjabat sebagai raja di Ngayogyakarta Hadiningrat dari tahun 1755-1792 M. Sedangkan wilayah yang kedua adalah Daerah Kesuhunan Surakarta yang diperintah oleh Susuhunan Pakubuwono pada tahun 1749-1788 M.

Struktur birokrasi Kerajaan Mataram disusun secara hirarki mengikuti sistem pembagian wilayah kerajaan. Adapun sistem pemerintahannya dibedakan sebagai berikut:

1. Pemerintahan Dalam Istana (Peprintahan Lebet). Tugasnya adalah mengurus pemerintahan dalam istana dan diserahkan pada empat orang pejabat Wedana Dalam (Wedana Lebet) yang terdiri dari Wedana Gedong Kiwa, Wedana Gedong Tengen, Wedana Keparak Kiwa, dan Wedana Keparak Tengen. Adapun tugas Wedana Gedong adalah mengurus masalah keuangan dan perbendaharaan istana, sedangkan tugas Wedana Keparak adalah mengurus keprajuritan dan pengadilan.

Gelar yang digunakan oleh para wedana adalah Tumenggung, atau Pangeran jika pejabat itu merupakan keturunan raja. Masing-masing Wedana Lebet dibantu oleh seorang Kliwon (Papatih atau Lurah Carik) yang memakai gelar Ngabehi. Di bawahnya lagi terdapat Kebayan dan 40 orang Mantri Jajar. Sebelum tahun 1744, di atas jabatan Wedana terdapat jabatan Patih Dalam (Patih Lebet) dengan tugas untuk mengoordinasikan wedana-wedana tersebut. Namun sejak tahun 1755 jabatan Patih Dalam (Patih Lebet) dihapus.

Pemerintahan di Kutagara diurus oleh dua orang Tumenggung yang langsung mendapat perintah dari raja. Kedudukan Tumenggung bersama empat Wedana Lebet cukup penting, yaitu sebagai anggota Dewan Tertinggi Kerajaan. Berbeda dengan Kartasura yang pada tahun 1744 menugaskan 4 orang pejabat untuk mengurus daerah Kutagara, di mana salah satu diantaranya diangkat sebagai kepala.

Wilayah Negara Agung termasuk bagian dari pusat kerajaan, di mana setiap daerah dipimpin oleh Wedana Luar (Wedana Jawi). Sesuai dengan nama daerah masing-masing, maka terdapat sebutan: Wedana Bumi, Wedana Bumija, Wedana Sewu, Wedana Numbak Anyar, Wedana Siti Ageng Kiwa, Wedana Siti Ageng Tengen, Wedana Panumping dan Wedana Panekar. Para wedana ini juga dibantu oleh Kliwon, Kebayan dan 40 orang Mantra Jajar. Sedangkan yang mengoordinasi para wedana ini adalah seorang Patih Luar (Patih Jawi) dengan tugas mengurus wilayah Negara

Agung dan Wilayah Daerah (Mancanegara). Sedangkan di tanah-tanah lungguh (tanah garapan), para bangsawan mengangkat seorang Demang atau Kayi Lurah.

2. Pemerintahan Luar Istana (Pemerintahan Jawi). Tugasnya adalah mengurus daerah-daerah di wilayah mancanegara baik Mancanegara Timur (Mancanegara Wetan) maupun Mancanegara Barat (Mancanegara Kilen). Untuk mengurus daerah Mancanegara ini, raja mengangkat seorang Bupati yang dipimpin oleh Wedana Bupati. Adapun tugas Wedana Bupati adalah mengoordinasi dan mengawasi semua bupati yang menjadi kepala di daerah masing-masing, serta bertanggung jawab langsung kepada raja atas pemerintahan daerah dan kelancaran pengumpulan hasil-hasil daerah yang harus diserahkan pada pusat.

Untuk daerah pesisir, wilayah Pesisir Timur (Pesisiran Wetan) dipimpin oleh Wedana Bupati yang berkedudukan di Jepara, sementara wilayah Pesisir Barat (Pesisiran Kilen) dipimpin oleh Wedana Bupati yang berkedudukan di Tegal. Dalam bidang kemiliteran (keprajuritan) juga disusun gelar kepangkatan secara hierarkis dari atas ke bawah: Senapati, Panji, Lurah, dan Bekel Prajurit. Selain itu juga terdapat petugas mata-mata (telik sandi) dan semacam petugas kepolisian untuk menjaga keamanan umum dalam kerajaan.

Berikut ini adalah raja-raja yang pernah memimpin Kerajaan Mataram Islam ialah:

1. Danang Sutawijaya (Raden ngabehi Loring Pasar) atau Panembahan Senopati (1586-1601 M).
2. Mas Jolang atau Seda Ing Krapyak (1602- 1613 M)
3. Mas Rangsang yang bergelar Panembahan Hanyakrakusuma atau Sultan Agung Senopati ing alogo Ngabdurrahman (1613-1646 M)
4. Amangkurat I (1646- 1676 M)
5. Amangkurat II dikenal juga sebagai Sunan Amral (1677-1703 M)
6. Sunan Mas atau Amangkurat III pada 1703 M
7. Pangeran Puger yang bergelar Paku Buwono I (1703-1719 M)
8. Sunan Prabu atau Amangkurat IV (1719-1727 M)
9. Paku Buwono II (1727-1749 M)
10. Paku Buwono III pada 1749 M pengangkatannya dilakukan oleh VOC
11. Sultan Agung.

Aspek Kehidupan Sosial

Antara tahun 1614 sampai 1622, Sultan Agung mendirikan keraton baru di Kartasura, sekitar 5 km dari Keraton Kotagede. Di sana, ia memperkuat militer serta mengembangkan kesenian dan pertukangan. Selain itu, ia pun membangun kompleks pemakaman raja-raja Mataram di Bukit Imogiri. Kalender Jawa ia ganti dengan sistem kalender Hijriah. Pada tahun 1639, Sultan Agung mengirim utusannya ke Mekkah. Setahun kemudian, utusan Mataram itu membawakan gelar baru bagi Sultan Agung dari syarif di Mekah. Gelar baru itu adalah Sultan Abdullah Muhammad Maulana Matarani.

Seperti halnya ibu kota kerajaan Islam lainnya, ibu kota Mataram memiliki ciri khas kota dengan memakai arsitektur gaya Islam. Posisi istana atau keraton sengaja didekatkan dengan bangunan masjid dan letak keraton biasanya dikelilingi benteng dengan beberapa pos pertahanan di berbagai penjuru angin. Di luar pagar benteng terdapat parit buatan yang berfungsi sebagai barikade pertahanan ketika menghadapi lawan. Parit buatan ini berfungsi juga sebagai kanal, tempat penampungan yang memasok air ke dalam kota.

Sebagai kerajaan yang bersifat agraris, masyarakat Mataram disusun berdasarkan sistem feodal (dikuasai oleh kaum bangsawan) sehingga raja adalah pemilik tanah kerajaan beserta isinya. Kehidupan masyarakat di Kerajaan Mataram tertata dengan baik berdasarkan hukum Islam namun tanpa meninggalkan norma-norma lama begitu saja. Dalam

pemerintahan Kerajaan Mataram Islam, raja merupakan pemegang kekuasaan tertinggi, kemudian diikuti oleh sejumlah pejabat kerajaan yang mendapatkan upah atau gaji berupa tanah lungguh (tanah garapan). Tanah lungguh tersebut dikelola oleh kepala desa (bekel) dan digarap atau dikerjakan oleh rakyat atau petani penggarap dengan membayar pajak/sewa tanah. Dengan adanya sistem feodalisme tersebut, maka lahirlah para tuan tanah di Jawa yang sangat berkuasa terhadap tanah-tanah yang dikuasainya.

Selain memiliki kedudukan yang tinggi, Sultan juga dikenal sebagai penatagama, yaitu pengatur kehidupan keagamaan. Di bidang keagamaan terdapat penghulu, khotib, naid, dan surantana yang bertugas memimpin upacara-upacara keagamaan. Sementara dalam bidang pengadilan, di istana terdapat jabatan jaksa yang bertugas menjalankan pengadilan istana. Untuk menciptakan ketertiban di seluruh kerajaan, maka diciptakanlah peraturan yang harus dipatuhi oleh penduduk di kerajaan Mataram yang dinamakan *angger-angger*. *Angger-angger* disusun bersama oleh Kasultanan Yogyakarta & Kasunanan Surakarta pada tahun 1817. Kitab ini terdiri dari lima/ enam buku yaitu Angger Aru-biru, Angger Sadoso, Angger Gunung, Angger Nawolo Pradoto Dalem, Angger Pradoto Akhir, dan Angger Ageng. Khusus untuk Angger Pradoto Akhir hanya diberlakukan di Kasultanan Yogyakarta. Angger-angger tersebut di kemudian hari digantikan oleh *Burgerlijk Wetboek & Wetboek van Strafrecht* seiring dengan berdirinya landraad Yogyakarta.

Kehidupan Ekonomi

Posisi ibu kota Mataram di Kotagede yang berada di pedalaman menyebabkan Mataram sangat tergantung kepada hasil pertanian. Kehidupan masyarakat yang agraris telah membentuk tatanan masyarakat feodal. Di mana bangsawan, priyayi dan kerabat kerajaan yang memerintah suatu wilayah diberi tanah garapan yang luas, sedangkan rakyat bertugas untuk mengurus tanah tersebut.

Kehidupan kerajaan Mataram mengandalkan pasokan dari hasil agraris, sedangkan daerah pesisir pantai di wilayah yang dikuasai tidak dimanfaatkan. Dengan mengandalkan pertanian, Mataram melakukan penaklukan ke beberapa kerajaan di Jawa Timur dan Jawa Barat. Penarikan upeti dari wilayah-wilayah penghasil beras menyebabkan perekonomian berkembang dengan cepat. Keadaan tersebut tentu saja tidak menguntungkan bagi rakyat, sebab mereka seakan-akan diperlakukan tidak benar oleh penguasa. Maka tidak mengherankan kalau kemudian banyak yang melarikan diri dari wilayah kekuasaan Mataram dan melakukan pemberontakan.

Perlawanan Untung Suropati (1686–1706)

Untung Suropati, demikianlah nama pejuang pada masa Mataram di bawah pemerintahan Amangkurat II. Nama itu berawal dari sikap benci Untung kepada VOC yang sudah muncul sejak di Batavia. Untung kemudian melarikan diri ke Cirebon dan terjadi perkelahian dengan Suropati sehingga

namanya menjadi Untung Suropati. Dari Cirebon, Untung kemudian melanjutkan perjalanan ke Kartasura dan di sana ia disambut dengan baik oleh Amangkurat II.

Setelah menjadi raja, Amangkurat II merasakan betapa beratnya perjanjian yang telah ditandatangani dan berusaha untuk melepaskan diri. Pada tahun 1686 datang utusan dari Batavia di bawah pimpinan Kapten Tack dengan maksud merundingkan soal hutang Amangkurat II dan menangkap Untung Suropati. Amangkurat II menghindari pertemuan ini dan terjadilah pertempuran. Kapten Tack beserta pengikutnya berhasil dihancurkan oleh pasukan Untung Suropati. Untung Suropati kemudian melanjutkan perjalanan ke Jawa Timur dan sampailah ke Pasuruan. Di sinilah akhirnya Untung mendirikan istana dan mengangkat dirinya sebagai bupati dengan gelar Adipati Wironagoro.

Untung Suropati juga mendirikan perbentengan di daerah Bangil. Usaha Untung Suropati ini mendapat dukungan dari para bupati di seluruh Jawa Timur sehingga kedudukan Untung Suropati semakin kuat. Seperti yang sudah ditulis di awal, pada saat Sunan Mas dengan gelar Sultan Amangkurat III yang anti kepada Belanda naik tahta menggantikan Amangkurat II, Pangeran Puger (adik Amangkurat II) ternyata juga berambisi ingin menjadi raja di Mataram. Maka ia pun pergi ke Semarang untuk mendapatkan dukungan dari VOC. Akhirnya VOC dan Pangeran Puger menyerang Kartasura dan berhasil mendudukinya. Amangkurat III kemudian melarikan diri ke Jawa Timur dan bergabung dengan Untung Suropati.

Pihak Belanda menyiapkan pasukan besar-besaran untuk menggempur pasukan Untung di Pasuruan. Di bawah pimpinan Herman de Wilde, pasukan kompeni berhasil mendesak perlawanan Untung. Dalam pertempuran di Bangil, Untung terluka dan akhirnya gugur pada 12 Oktober 1706, sementara Sunan Mas tertangkap dan dibuang ke Sailan/Sri Lanka (1708). Pada tahun 1719, Sunan Paku Buwono I wafat dan digantikan oleh Amangkurat IV (Sunan Prabu) di bawah mandat VOC. Semakin eratnya hubungan dengan VOC membuat para bangsawan benci kepada kompeni dan kemudian sepakat untuk mengadakan perlawanan. Di antara yang melakukan perlawanan itu adalah Pangeran Purboyo (adik Sunan Prabu) dan Pangeran Mangkunegoro (putra Sunan Prabu).

Perlawanan terhadap Kompeni dapat dipadamkan dan para pemimpinnya ditangkap serta dibuang ke Sailan dan Afrika Selatan, kecuali Pangeran Mangkunegoro yang diampuni ayahnya. Pada masa pemerintahan Paku Buwono II (1727–1749) Mataram kembali diguncang oleh perlawanan yang dipimpin oleh Mas Garendi (cucu Sunan Mas). Perlawanan ini di dukung oleh orang-orang Tionghoa yang gagal mengadakan pemberontakan terhadap VOC di Batavia. Mas Garendi berhasil menduduki ibu kota Kartasura, sementara Paku Buwono II melarikan diri ke Ponorogo. Akhirnya setelah beberapa kali terjadi perlawanan di Kartasura, Kartasura dianggap tidak layak lagi dijadikan ibu kota kerajaan sehingga pusat pemerintahan dipindahkan ke Surakarta.

Puncak Kejayaan Kerajaan Mataram Islam

Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Agung Haryokrokusumo (1613-1646 M). Daerah kekuasaannya mencakup pulau Jawa (kecuali daerah Banten dan Batavia karena waktu itu Batavia masih dikuasai oleh VOC Belanda), pulau Madura, dan Sukadana di Kalimantan Barat. Kekuatan militer Mataram juga sangat besar dan mencapai puncaknya pada zaman Sultan Agung berkuasa, sehingga Sultan Agung yang sangat anti kolonialisme pernah menyerang VOC di Batavia pada 1628 dan 1629.

Namun, kemerosotan tajam terjadi pada saat Mataram Islam dipegang oleh Sunan Paku Buwono II (1727-1749 M). Pada mulanya, Paku Buwono II menyerahkan Semarang, Jepara, Rembang, Surabaya, dan Madura kepada VOC. Kemudian pada tahun 1743 Demak dan Pasuruan juga diserahkan pada VOC. Puncaknya, sebelum Paku Buwono II mangkat, ia menyerahkan seluruh Mataram kepada VOC Belanda. Akhirnya Belanda pun menguasai pelayaran orang Jawa yang berpusat di Tegal, Pekalongan, Kendal, Tuban, dan Juwana.

Pangeran Mangkubumi yang tidak terima dengan semua itu, mulai bangkit melawan penjajah. Usaha yang dilakukannya ternyata tidak sia-sia, ia memperoleh sebagian Mataram melalui Perjanjian Giyanti (1755). Meskipun nama kerajaan baru yang didirikannya bukan lagi Mataram melainkan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat, bangkitnya kerajaan baru ini sebenarnya melanjutkan kejayaan Mataram. Kasultanan Yogyakarta adalah pewaris sah kerajaan Mataram.

Keruntuhan Mataram

Keruntuhan Mataram dimulai sepeninggalan Sultan Agung, Putra mahkota diangkat menjadi raja bergelar Amangkurat I (1646-1677). Amangkurat I ini memiliki sifat yang bertolak belakang dengan sang ayah. Gaya pemerintahannya cenderung lalim, tidak suka bergaul dan terlalu curiga dengan semua orang. Para pejabat di zaman pemerintahan Sultan Agung dihabisi dengan bengis, entah dengan hukuman cekik sampai mati atau dengan cara dikorbankan menjadi memimpin armada perang ke luar Mataram. Kebengisan Amangkurat I dapat dilacak dari catatan pejabat Belanda maupun dalam Babad Tanah Jawa. Disebutkan bahwa Amangkurat I mengatur pembunuhan adiknya, yaitu pangeran Alit, karena melakukan kudeta terhadap tahta kerajaan. Bahkan Amangkurat I pernah melakukan *genocide* atau pembunuhan masal terhadap lima ribu ulama.

Selain itu, hal tersebut diperburuk dengan hubungan antar kerabat yang tidak berjalan baik. Amangkurat I terlibat persaingan dalam urusan memilih wanita sebagai istri. Amangkurat I didukung oleh kakeknya, pangeran Pekik untuk menikahi seorang gadis cantik bernama Rara Oyi, putri Ngabehi Mangunjaya dari tepi Kali Mas Surabaya. Kejadian ini memunculkan tragedi berupa tewasnya beberapa kerabat kerajaan.

Pemerintahan Amangkurat I ini menimbulkan sikap antipati dan ketakutan pada rakyatnya. Lambat laun, rakyat bersatu padu menyerang kerajaan, dipimpin oleh pangeran

Trunajaya dari Madura. Serbuan ini membuat Amangkurat I terdesak dan tersingkir hingga akhirnya meninggal dalam pelariannya di Wanayasa, Banyumas utara. Konon, untuk mempercepat kematiannya, putra mahkota yang kelak bergelar menjadi Amangkurat II memberi sebutir pil racun pada sang Ayah. Amangkurat I dimakamkan di Tegalwangi, dekat dengan gurunya yaitu Tumenggung Danupaya.

Dengan wafatnya Amangkurat I, putra mahkota membubarkan pemberontakan Trunajaya dengan meminta dukungan VOC. Pemberontakan ini berhasil dibubarkan setelah terbunuhnya pangeran Trunajaya oleh VOC dibawah pimpinan kapten Tack. Putra mahkota kemudian naik tahta dengan gelar Amangkurat II (1677-1703). Ibu kota Mataram dipindah ke Kartasura, karena terdapat perebutan tahta antara Amangkurat II dengan adiknya, pangeran Puger. Pangeran Puger berpendapat bahwa dirinya berhak atas tahta Mataram sehingga tetap bersikukuh berdiam di istana Plered. Pada akhirnya pangeran Puger mengakui kekuasaan Amangkurat II di Kartasura tahun 1680 setelah terjadi pertikaian alot. Pemerintahan Amangkurat II di Kartasura dibangun dengan dukungan penuh VOC sehingga dirinya terikat dengan segala macam permintaan dan aturan VOC. Tetapi di sisi lain, Amangkurat II sangat melindungi para pejuang dalam melakukan perlawanan terhadap VOC. Salah satu dari pejuang tersebut adalah Untung Suropati. Ia merupakan mantan perwira VOC yang akhirnya memusuhi resimennya karena tindakan sewenang-wenang kepada rakyat pribumi.

Ambivalensi Amangkurat II muncul ketika VOC meminta sang raja untuk menyambut Kapten Tack di Kartasura.

Meskipun Kapten Tack ini sangat berjasa dengan berhasil membunuh pangeran Trunajaya di Kediri, namun Amangkurat II sangat membenci sifatnya yang arogan. Untuk menutupi sikap ambivalensinya, Amangkurat II menyambut baik kedatangan Kapten Tack di depan istana Kartasura. Namun, beliau telah mengatur siasat dengan pasukan Suropati untuk menyamar sebagai prajurit Mataram. Huru hara terjadi di saat Kapten Tack datang di istana yang menyebabkan dirinya terbunuh pada tahun 1686. Sayangnya, tindakan tersebut diketahui oleh pangeran Puger yang kemudian menunjukkan bukti-bukti kuat kepada VOC soal keterlibatan Amangkurat II dalam peristiwa itu. Inilah senjata ampuh pangeran Puger dalam mendongkel tahta Amangkurat II.

Setelah Amangkurat II wafat, tahta Mataram masih diteruskan oleh putra mahkota yang bergelar Amangkurat III (1703-1708). Amangkurat III juga menggalang persahabatan dengan Untung Suropati, seperti ayahnya. Sementara itu, konflik lama yaitu usaha perebutan tahta oleh pangeran Puger tetap terjadi. Berbekal bukti-bukti kuat soal keterlibatan Amangkurat II dalam peristiwa terbunuhnya Kapten Tack, maka pangeran Puger dinaikkan tahta sebagai raja Mataram oleh VOC, bergelar Paku Buwono I (1704-1719) dan bertahta di Semarang. Amangkurat III diserang oleh VOC dan Paku Buwono I sehingga melarikan diri ke Jawa Timur. Pada tahun 1708, Amangkurat III akhirnya ditawan oleh VOC kemudian diasingkan ke Sri Lanka.

Paku Buwono I kemudian bertahta di Kartasura. Masa-masa pemerintahannya dibayar dengan menyerahkan daerah-daerah pesisir kepada VOC. Hal ini merupakan suatu kesalahan

besar karena dengan demikian sumber pendapatan Mataram berkurang drastis. Inilah yang memancing konflik intern berkepanjangan di antara kerabat kerajaan. Akibat hal tersebut, kondisi kerajaan tidak pernah stabil sehingga memancing terjadinya beberapa pemberontakan. Keadaan ini berlangsung terus menerus, bahkan hingga wafatnya Paku Buwono I. Paku Buwono I digantikan oleh putranya yang bergelar Amangkurat IV (1719-1726). Catatan Belanda menunjukkan bahwa Amangkurat IV banyak ditinggalkan rakyatnya. Kondisi kerajaan sangat rapuh, potensi perpecahan dan konflik intern merebak, dan berlangsung terus menerus hingga wafatnya Amangkurat IV.

Kondisi tersebut masih berlangsung ketika Paku Buwono II (1726-1749) memegang tampuk pemerintahan pada usia 16 tahun. Karena hal itulah Ratu Amangkurat IV yang mendukung VOC melakukan intervensi pada pemerintahannya. Sementara patihnya, Danurejo, sangat anti terhadap VOC. Sebagaimana sang ayah yang mewarisi kondisi kerajaan tidak solid, Paku Buwono II pun dirongrong oleh hutang-hutang yang harus dibayarkan kepada VOC.

Dalam masa pemerintahannya, kerajaan mengalami pergolakan besar, yaitu pemberontakan orang-orang Cina yang semula terjadi di Batavia (1740) kemudian merembet hingga Kartasura. Perang yang dikenal sebagai Geger Pacinan ini telah membuat Paku Buwono II bersama gubernur pesisir van Hohendorff harus melarikan diri ke Jawa Timur karena istana Mataram diduduki kaum pemberontak. Pada tahun 1742, VOC berhasil menyusun kekuatan dan menduduki kembali

Kartasura. Namun kondisi istana sudah poranda dan tidak layak sebagai ibukota kerajaan. Ada sebuah paham Jawa mengatakan bahwa istana yang sudah diduduki musuh, tidak lagi suci sebagai ibukota. Berbekal paham tersebut dan dengan dukungan dari VOC, Paku Buwono II membangun keraton baru di sebuah desa yang bernama Sala yang kemudian dikenal dengan nama Surakarta Hadiningrat.

Harga mahal yang harus dibayar Paku Buwono II kepada VOC karena berhasil memadamkan Geger Pacinan adalah kesepakatan bahwa VOC memperoleh daerah pesisir, yaitu Madura, Sumenep dan Pamekasan. Selain itu, VOC berhak menentukan pejabat patih Mataram serta penguasa pesisir. Akibat jatuhnya pesisir ke tangan VOC, muncullah para pemberontak yang merongrong keraton Surakarta Hadiningrat. Salah satu pemberontakan yang terkenal adalah pasukan yang dipimpin Raden Mas Said (1746), keponakan Paku Buwono II. Untuk memadamkan pemberontakan itu, diadakan sayembara berupa pemberian tanah Sokawati. Dengan iming-iming tersebut, pangeran Mangkubumi, adik Paku Buwono II, mengatur strategi perang sehingga gerakan Raden Mas Said dapat ditumpas. Paku Buwono II memberikan pengampunan terhadap Raden Mas Said.

Masalah timbul ketika niat Paku Buwono II untuk menyerahkan tanah Sokawati kepada pangeran Mangkubumi dihalang-halangi oleh patihnya, Pringgalaya dan gubernur van Imhoff. Menurut gubernur VOC tersebut, pangeran Mangkubumi tidak layak mendapat hadiah 4000 cacah karena seakan-akan hendak menandingi kekuasaan raja. Pangeran

Mangkubumi kecewa telah dipermalukan di depan umum. Pada 19 Mei 1746, pangeran Mangkubumi memberontak pada VOC dengan keluar dari Surakarta, lalu mendiami Sokawati dengan kekuatan 2500 kavaleri (pasukan berkuda) serta 13.000 anak buah dan punggawa yang mendukungnya. Pangeran Mangkubumi meluncurkan serangan kepada VOC di Grobogan, Juwana, Demak, dan Jipang (Bojonegoro). Pasukannya bertambah kuat dengan bergabungnya Raden Mas Said, sang keponakan yang sempat ditundukkannya. Sinergi antara keduanya ini bahkan hampir menguasai keraton Surakarta pada tahun 1748.

Kondisi kerajaan yang tidak stabil membuat Paku Buwono II jatuh sakit. Seakan pasrah, beliau menyerahkan Mataram kepada gubernur Baron von Hohendorff pada 11 Desember 1749. Inilah kesalahan terbesar yang dilakukan Paku Buwono II. Keputusan tersebut menyulut pangeran Mangkubumi untuk bergerak, agar dapat menarik kembali kerajaan tetap dalam pangkuan dinasti Mataram. Beliau mengangkat dirinya sebagai Paku Buwono di desa Bering, Yogyakarta pada 12 Desember 1749. Tindakan ini dilakukan sebagai langkah mendahului keponakannya yaitu putra mahkota Paku Buwono II yang baru berusia 16 tahun, yang akan dinaikkan tahta oleh VOC sebagai Sunan Paku Buwono III. Inilah babak baru periode kerajaan Mataram terbagi dua. Pangeran Mangkubumi sebagai raja didampingi Raden Mas Said sebagai patihnya. Kedua tokoh ini merupakan dwi tunggal kekuatan yang sulit ditembus VOC maupun Surakarta Hadiningrat dibawah Paku Buwono III. Sayangnya, persekutuan ini akhirnya pecah di tahun 1753 akibat benturan konflik pribadi soal tahta Mataram yang masih dipegang Paku Buwono III.

VOC yang sudah lelah dengan panjangnya peperangan, mulai menempuh jalur perundingan. Bahkan Raden Mas Said pernah menulis surat ke VOC bersedia berunding dengan syarat diangkat sebagai raja. Rupanya VOC tidak mengindahkannya, namun justru melirik pada pangeran Mangkubumi. VOC mendekatinya bahkan mengganti pejabatnya yang tidak disukai pangeran Mangkubumi dalam upaya perundingan, yaitu van Hohendorff. VOC menggantikannya dengan Nicolaas Hartingh, seorang Belanda yang sangat mengerti tata krama Jawa. Kesepakatan tercapai melalui Perjanjian Giyanti yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 1755. Perjanjian ini menyatakan bahwa Mataram dibagi dua. Paku Buwono III tetap bertahta di Surakarta Hadiningrat dengan kekuasaan meliputi : Ponorogo, Kediri, dan Banyumas. Sedangkan pangeran Mangkubumi yang bergelar Hamengku Buwono I bertahta di desa Bering yang lebih dikenal dengan Ngayogyakarta Hadiningrat, dengan wilayah meliputi Grobogan, Kertasana, Jipang, Jepara, dan Madiun. Sementara Pacitan dibagi untuk keduanya, termasuk Kotagede dan makam kerajaan yaitu Imogiri.

Paku Buwono III yang tidak diikutkan dalam perundingan tersebut tidak dapat berbuat banyak, hanya bisa menerimanya. Sementara itu, Raden Mas Said semakin kecewa karena tidak mendapatkan kekuasaan. Oleh karena itu, dirinya semakin gencar melakukan perlawanan baik kepada Hamengku Buwono I, Paku Buwono III, dan VOC. Merasa tidak mampu menanganinya, VOC pun menawarkan jalan damai melalui perundingan Salatiga pada tahun 1757. Dalam perundingan tersebut Raden Mas

Said menyatakan kesetiaannya pada raja Surakarta Hadiningrat dan VOC. Paku Buwono III memberikan tanah 4000 cacah dengan wilayah meliputi Nglaroh, Karanganyar, dan Wonogiri. Sementara, Hamengku Buwono I tidak memberikan apa-apa. Raden Mas Said dinobatkan sebagai adipati Mangkunegara I. Wilayah kekuasaannya disebut dengan Mangkunegaran.

Demikianlah kerajaan Mataram resmi terbagi dalam 3 kekuasaan yang diperintah Sunan Paku Buwono III, Sultan Hamengku Buwono I, dan Mangkunegara I. Konflik intern mulai mereda, keamanan relatif stabil. Satu kelemahan dalam kedua perundingan yang telah disepakati tersebut adalah tidak dicantumkannya hal pengganti tahta sehingga masih terbuka peluang untuk menyatukan tahta Mataram. Mangkunegara I berharap akan mendapatkan tahta Surakarta sehingga putranya, Prabu Widjojo, dinikahkan dengan putri Paku Buwono III, GKR Alit. Meskipun dari perkawinan tersebut lahir seorang putra, harapan Mangkunegara I pupus karena Paku Buwono III kemudian mempunyai putra mahkota. Kelak putra Ratu Alit dan Prabu Widjojo bertahta sebagai Mangkunegara II. Demikian pula upaya Mangkunegara I menikah dengan GKR Bendera, putri sulung Hamengku Buwono I gagal. Hal ini disebabkan oleh GKR Bendera menceraikannya pada tahun 1763, kemudian menikah dengan pangeran Diponegara dari Yogyakarta. Oleh karena itu, terputuslah harapan Mangkunegara I untuk merajut tahta Mataram dalam satu kekuasaan tunggal.

Peninggalan Sejarah Kerajaan Mataram Islam

Dalam perkembangan kerajaan Mataram meninggalkan bekas-bekas peradabannya, baik dalam bentuk bangunan maupun kasusastraan. Dalam peninggalan bangunan dapat ditemukan di Surakarta maupun di Yogyakarta sendiri, peninggalan bangunan yang dapat ditemui di Surakarta adalah Benteng Vastenburg Pasar Gedhe Hardjonagoro Rumah Sakit Kadipolo Masjid Agung Kraton Surakarta Masjid Laweyan Dalem Poerwadiningratan Taman Sriwedari dan masih banyak lagi, untuk peninggalan peninggalan sejarah kerajaan Mataram Islam di Yogyakarta dapat ditemui bangunan seperti Taman sari, banteng Vredeburg, Kota Gede, Bank Indonesia, Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dan masih banyak lagi. Berikut uraian singkat tentang bangunan peninggalan sejarah dari kerajaan Mataram Islam baik di Surakarta maupun di Yogyakarta.

▪ Benteng Vastenburg

Di kota Surakarta terdapat bekas peninggalan kolonial Belanda yaitu Benteng Vastenburg, letak bangunan ini berada di selatan dari keraton Kasunanan Surakarta, bangunan ini dibangun oleh Gubernur Jenderal Baron van Imhoff pada tahun 1745. Bangunan benteng ini dikelilingi oleh tembok batu bata setinggi enam meter dengan konstruksi *bearing wall* serta parit dengan jembatan angkat sebagai penghubung. Bangunan di dalam benteng dipetak-petak untuk rumah tinggal para prajurit dengan keluarganya. Dulu sebelum bernama benteng Vastenburg bangunan ini bernama "*Grootmoedigheid*" dengan fungsi

untuk pertahanan rumah Gubernur Belanda juga digunakan sebagai pusat pengawasan kolonial Belanda untuk mengawasi gerak-gerik Keraton Kasunanan, Setelah kemerdekaan bangunan ini beralih fungsi sebagai kawasan militer dan asrama bagi Brigade Infanteri 6/ Trisakti Baladaya/ Kostrad.

▪ **Pasar Gedhe Hardjonagoro**

Pasar Gedhe dulunya merupakan sebuah pasar “kecil” yang didirikan di area seluas 10.421 meter persegi, berlokasi di persimpangan jalan dari kantor gubernur yang sekarang digunakan sebagai Balaikota Surakarta. Bangunan Pasar Gedhe terdiri dari dua bangunan yang terpisah, masing masing terdiri dari dua lantai. Pintu gerbang di bangunan utama terlihat seperti atap singgasana yang bertuliskan ‘PASAR GEDHE.

Ir. Thomas Karsten adalah Arsitek Belanda yang mendesain Pasar Gede Hardjanagara dan diperkirakan pasar gede tersebut selesai pembangunannya pada tahun 1930. Arsitektur Pasar Gedhe kemudian dilakukan perpaduan antara gaya Belanda dan gaya tradisional pada tahun 1947. Sedangkan pemberian nama Pasar gede dikarenakan terdiri dari atap yang besar (*Gedhe* artinya besar dalam bahasa Jawa). Seiring perkembangan waktu dank arena letaknya yang berdekatan dengan Balai kota dan Keraton Kasunanan Surakarta pasar ini menjadi pasar terbesar dan termegah di Surakarta.

Abdi dalem Kraton Surakarta mula-mula adalah personil yang ditugaskan untuk memungut pajak (retribusi) di Pasar Gede yang kemudian pungutan pajak akan diberikan ke Keraton Kasunanan. Pemungutan retribusi dilakukan dengan mengenakan pakaian tradisional Jawa berupa jubah dari kain (lebar dan panjang dari bahan batik dipakai dari pinggang ke bawah), beskap (semacam kemeja), dan blangkon (topi tradisional).

Pasar Gedhe pernah mengalami kerusakan karena serangan Belanda. Dan direnovasi kembali pada tahun 1949 oleh Pemerintah Indonesia. Perbaikan atap selesai pada tahun 1981. Pemerintah Indonesia mengganti atap yang lama dengan atap dari kayu. Bangunan kedua dari pasar gedhe, digunakan untuk kantor DPU yang sekarang digunakan sebagai pasar buah.

▪ **Rumah Sakit Kadipolo**

Pada masa pemerintahan Sunan Paku Buwono X didirikanlah sebuah rumah sakit. Yang kemudian dikenal dengan Rumah Sakit Kadipolo, bangunan rumah sakit tersebut memiliki luas lahan sekitar 2,5 Ha dan terletak di jalan Dr. Radjiman

Pada mulanya bangunan ini dibangun khusus untuk poliklinik para abdi dalem kraton. Kemudian pada tahun 1948 pengolahannya diserahkan kepada Pemda Surakarta disatukan dengan pengolahan Rumah Sakit

Mangkubumen dan Rumah Sakit Jebres. Perpindahan pengelolaan ini disebabkan oleh karena masalah biaya, perpindahan tersebut memiliki sarat bahwa keluarga kraton dan pegawai kraton yang dirawat di rumah sakit tersebut mendapat keringanan pembiayaan. Dan baru pada tahun 1960 pihak kraton menyerahkan Rumah Sakit Kadipolo sepenuhnya termasuk investasi bangunan berikut seluruh pegawai dan perawatnya kepada Pemda Surakarta.

Tanggal 1 Juli 1960 mulai dirintis penggabungan Rumah Sakit Kadipolo dengan Rumah Sakit Jebres dan Rumah Sakit Mangkubumen di bawah satu direktur yaitu dr. Sutedjo. Kemudian masing-masing rumah sakit mengadakan spesialisasi, RS. Jebres untuk anak-anak, RS. Kadipolo untuk penyakit dalam dan kandungan serta RS. Mangkubumen untuk korban kecelakaan. Seiring berjalannya waktu bangunan rumah sakit tersebut mengalami kerugian dan akhirnya pada tahun 1985 bangunan tersebut menjadi milik klub sepak bola Arseto sebagai tempat tinggal dan *mess* bagi para pemain Arseto Solo. Namun kini sebagian besar bangunan dibiarkan kosong tak terawat.

▪ **Masjid Agung Kraton Surakarta**

Masjid Ageng Karaton Surakarta Hadiningrat adalah nama resmi dari Masjid Agung Kraton Surakarta, Masjid Agung dibangun oleh Sunan Pakubuwono III tahun 1763 dan selesai pada tahun 1768. Menempati lahan seluas 19.180

meter persegi, kawasan masjid dipisahkan dari lingkungan sekitar dengan tembok pagar keliling setinggi 3,25 meter. Di masjid inilah kegiatan festival tahunan Sekaten dipusatkan.

Pada masa prakemerdekaan merupakan Masjid Agung Kerajaan (Surakarta Hadiningrat). Semua pegawai mesjid tersebut merupakan abdi dalem keraton, dengan gelar seperti Kanjeng Raden Tumenggung Penghulu Tafsiranom (penghulu) dan Lurah Muadzin.

▪ **Taman sari**

Taman Sari Yogyakarta atau Taman Sari Keraton Yogyakarta adalah situs bekas taman atau kebun istana milik Keraton Yogyakarta, Kebun ini dibangun pada zaman Sultan Hamengku Buwono I (HB I) pada tahun 1758-1765/9. Taman Sari dibangun di bekas keraton lama, Pesanggrahan Garjitawati. Sebagai pimpinan proyek pembangunan Taman Sari ditunjuklah Tumenggung Mangundipuro. Seluruh biaya pembangunan ditanggung oleh Bupati Madiun, Tumenggung Prawirosentiko, beserta seluruh rakyatnya. Oleh karena itu daerah Madiun dibebaskan dari pungutan pajak. Di tengah pembangunan pimpinan proyek diambil alih oleh Pangeran Notokusumo, setelah Mangundipuro mengundurkan diri. Walaupun secara resmi sebagai kebun kerajaan, namun beberapa bangunan yang ada mengindikasikan Taman Sari berfungsi sebagai benteng pertahanan terakhir jika istana diserang oleh musuh.

Taman yang mendapat sebutan “*The Fragrant Garden*” ini memiliki luas lebih dari 10 hektare dengan sekitar 57 bangunan antara lain berupa gedung, kolam pemandian, jembatan gantung, kanal air, maupun danau buatan beserta pulau buatan dan lorong bawah air. Kebun dalam Taman Sari yang membentang dari barat daya kompleks Kedhaton sampai tenggara kompleks Magangan digunakan secara efektif hanya antara 1765-1812. Namun saat ini, sisa-sisa bagian Taman Sari yang dapat dilihat hanyalah yang berada di barat daya kompleks Kedhaton saja. Dulunya kebun tersebut memiliki keindahan dan dapat dibandingkan dengan Kebun Raya Bogor sebagai kebun Istana Bogor.

▪ **Benteng Vredeburg**

Museum Benteng Vredeburg adalah sebuah benteng yang terletak di depan Gedung Agung dan istana Kesultanan Yogyakarta. Sejarah berdiri Benteng Vredeburg Yogyakarta terkait erat dengan lahirnya Kasultanan Yogyakarta. Perjanjian Giyanti pada tanggal 13 Februari 1755 yang berhasil menyelesaikan perseteruan antara Susuhunan Pakubuwono III dengan Pangeran Mangkubumi yang menjadi Sultan Hamengku Buwono I kelak adalah merupakan hasil politik Belanda yang selalu ingin ikut campur urusan dalam negeri raja-raja Jawa waktu itu.

Melihat kemajuan yang sangat pesat akan keraton yang didirikan oleh Sultan Hamengku Buwono I, rasa kekhawatiran dari pihak Belanda mulai muncul. Pihak

Belanda mulai mendekati sultan dan mengusulkan kepada sultan agar diijinkan membangun sebuah benteng di dekat kraton. dengan dalih agar Belanda dapat menjaga keamanan kraton dan sekitarnya. Akan tetapi dibalik dalih tersebut maksud Belanda sebenarnya adalah untuk memudahkan dalam mengontrol segala perkembangan yang terjadi di dalam kraton. Besarnya kekuatan yang tersembunyi dibalik kontrak politik yang dilahirkan dalam setiap perjanjian dengan pihak Belanda seakan-akan menjadi kekuatan yang sulit dilawan oleh setiap pemimpin pribumi pada masa kolonial Belanda. Dalam hal ini termasuk pula Sri Sultan Hamengku Buwono I. Oleh karena itu permohonan izin Belanda untuk membangun benteng dikabulkan.

Letak benteng yang hanya satu jarak tembak meriam dari kraton dan lokasinya yang menghadap ke jalan utama menuju kraton menjadi indikasi bahwa fungsi benteng dapat dimanfaatkan sebagai benteng strategi, intimidasi, penyerangan dan blokade. Dapat dikatakan bahwa berdirinya benteng tersebut dimaksudkan untuk berjaga-jaga mengantisipasi apabila sewaktu-waktu Sultan memalingkan muka memusuhi Belanda.

▪ **Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat**

Beberapa bulan pasca Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 Sultan Hamengku Buwono I membangun Keraton Yogyakarta. Sebelum membangun dan pada akhirnya menempati Keraton Yogyakarta, Sultan Hamengku Buwono

I berdiam di *Pesanggrahan Ambar Ketawang* yang sekarang termasuk wilayah Kecamatan Gamping Kabupaten Sleman.

Lokasi tempat keraton ini didirikan konon adalah bekas sebuah pesanggrahan yang bernama *Garjitawati*. Pesanggrahan ini dulunya digunakan untuk istirahat iring-iringan jenazah raja-raja Mataram yang akan dimakamkan di Imogiri, waktu itu Mataram masih di Kartasura dan Surakarta saja. Sedangkan dari versi lain menyebutkan lokasi keraton Yogyakarta merupakan sebuah mata air, *Umbul Pacethokan*, yang ada di tengah hutan Beringan.

Secara fisik istana para Sultan Yogyakarta memiliki tujuh kompleks inti yaitu *Siti Hinggil Ler* (Balairung Utara), *Kamandhungan Ler* (Kamandhungan Utara), *Sri Manganti*, *Kedhaton*, *Kamagangan*, *Kamandhungan Kidul* (Kamandhungan Selatan), dan *Siti Hinggil Kidul* (Balairung Selatan). pada tahun 1995 Komplek Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat dicalonkan untuk menjadi salah satu Situs Warisan Dunia UNESCO karena selain memiliki berbagai warisan budaya baik yang berbentuk upacara maupun benda-benda kuno dan bersejarah Keraton Yogyakarta juga merupakan suatu lembaga adat lengkap dengan pemangku adatnya. Dengan nilai-nilai filosofi yang masih dipangku dengan sungguh-sungguh oleh penghuni dalam keraton, belum lagi dengan mitologi-mitologi yang menyelubungi dalam Keraton Yogyakarta yang membuat masyarakat tetap mengenal tentang kearifan lokal mereka.

▪ **Kasusastraan**

Pada masa Paku Buwono II, di istana Surakarta terdapat seorang pujangga bernama Yasadipura I (1729-1803). Yasadipura I dipandang sebagai sastrawan besar Jawa. Ia menulis empat buku klasik yang disadur dari bahasa Jawa Kuno (Kawi), yakni *Serat Rama*, *Serat Bharatyudha*, *Serat Mintaraga*, serta *Arjuna Sastrabahu*. Selain menyadur sastra-sastra Hindu-Jawa, Yasadipura I juga menyadur sastra Melayu, yakni *Hikayat Amir Hamzah* yang digubah menjadi *Serat Menak*. Ia pun menerjemahkan *Dewa Ruci* dan *Serat Nitisastra Kakawin*. Untuk kepentingan Kasultanan Surakarta, ia menerjemahkan *Taj al-Salatin* ke dalam bahasa Jawa menjadi *Serat Tajusalatin* serta *Anbiya*. Selain buku keagamaan dan sastra, ia pun menulis naskah bersifat kesejarahan secara cermat, yaitu *Serat Cabolek* dan *Babad Giyanti*.

KARAJAAN MAKASSAR

Sejarah Berdiri Kerajaan Makassar

Sulawesi selatan adalah salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki catatan sejarah tentang kerajaan Islam kuno, cerita tentang keberanian rakyat Makassar atau suku Bugis, atau tentang sosok Sultan Hasanuddin yang begitu disegani oleh Belanda, sehingga tidak salah jika Belanda memberikan julukan *De Haantjes van Het Oosten* atau Si Ayam Jantan dari Timur. Lahirnya kehidupan besar di Sulawesi Selatan tidak lepas dari geografis daerah Sulawesi Selatan itu sendiri yang memiliki posisi yang sangat strategis, karena letaknya yang berada di jalur pelayaran perdagangan Nusantara, sebuah posisi antara perjalanan dari Jawa untuk menuju ke Maluku ataupun Manila, sebuah tempat transit yang berada antara sumber dagang dan tempat Bandar-bandar besar di Jawa, Makassar pun menjadi pusat persinggahan para pedagang baik yang berasal dari Indonesia bagian Timur maupun yang berasal dari Indonesia bagian Barat.

Dengan posisi strategis tersebut maka kerajaan Makassar cepat berkembang menjadi kerajaan besar dan berkuasa atas jalur perdagangan Nusantara.

Di Sulawesi Selatan terdapat salah satu kerajaan Islam terbesar, yaitu kerajaan Makassar, kerajaan yang merupakan afiliasi dari kerajaan Gowa dan Tallo, sebelum bahas lebih jauh tentang kerajaan Makassar maka alangkah lebih baiknya kita membahas kerajaan Gowa dan Tallo yang pada akhirnya nanti akan menjadi kesatuan dan membentuk kerajaan Makassar. Kesultanan Gowa atau kadang ditulis Goa, pada awalnya di daerah Gowa terdapat sembilan komunitas, yang dikenal dengan nama Bate Salapang atau Sembilan Bendera, yang kemudian menjadi pusat kerajaan Gowa: Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bissei, Sero dan Kalili. Melalui berbagai cara, baik damai maupun paksaan, komunitas lainnya bergabung untuk membentuk Kerajaan Gowa. Cerita dari pendahulu di Gowa dimulai oleh Tumanurung sebagai pendiri Istana Gowa, tetapi tradisi Makassar lain menyebutkan empat orang yang mendahului datangnya Tumanurung, dua orang pertama adalah Batara Guru dan saudaranya.

Menurut mitologi awal mula kerajaan Gowa diceritakan sebagai berikut, mula-mula sebelum kedatangan Tomanurung di suatu wilayah yang nantinya akan menjadi bagian dari kerajaan Gowa, sudah terbentuk sembilan pemerintahan otonom yang disebut dengan Bate Salapang atau Kasuwiyang Salapang yang merupakan gabungan atau federasi dari suatu kelompok. Kesembilan nama pemerintahan otonom tersebut adalah Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agang Jekne, Bissei,

Kalling dan Serro. Pada mulanya kesembilan pemerintahan otonom tersebut hidup berdampingan dengan damai, namun seiring dengan berjalannya waktu munculah perselisihan dan persaingan karena adanya kecenderungan untuk menunjukkan siapa yang lebih perkasa dan siapa yang paling banyak melakukan ekspansi kedaerah-daerah. Hingga akhirnya karena dirasakan berdampak buruk pada hubungan yang sudah terjalin lama, maka disepakatilah untuk mengatasi perselisihan ini, kesembilan pemerintahan otonom tersebut kemudian sepakat untuk memilih seorang menjadi pemimpin di antara mereka. Pemimpin yang akan memimpin mereka diberi gelar Paccallaya. Setelah adanya Paccalaya yang menjadi pemimpin ditengah-tengah mereka pun ternyata tidak membuat rivalitas dalam menunjukkan siapa diantara mereka yang paling hebat berakhir, karena masing-masing wilayah berambisi untuk menjadi ketua Bate Selapang.

Pada saat terjadi keributan antara kesembilan daerah tersebut, tersiarlah kabar bahwa di suatu tempat yang bernama Taka Bassia di Bukit Tamalate, muncul seorang putri yang memancarkan cahaya dengan memakai dokoh yang indah. Mendengar adanya kabar tersebut, Paccallaya dan Bate Salapang bergegas mendatangi tempat itu, alkisah kedua orang tersebut setelah sampai ditujuan tidak mendapati putri tersebut, kemudian mereka melihat sebuah cahaya di bukit Tamalame, mereka kemudian duduk tafakkur mengelilingi cahaya tersebut. Lama-kelamaan, cahaya tersebut menjelma menjadi wanita cantik yang tak lain adalah putri yang mereka cari, seorang putri yang tidak diketahui nama dan asal-usulnya.

Oleh karena itu, mereka akhirnya sepakat untuk menyebutnya dengan Tomanurung. Lalu, Paccallaya bersama Bate Salapang berkata pada Tomanurung tersebut, “kami semua datang kemari untuk mengangkat engkau menjadi raja kami, sudilah engkau menetap di negeri kami dan sombaku lah yang merajai kami”. Oleh Tomanurung permohonan mereka dikabulkan, Paccallaya bangkit dan berseru, “*Sombai Karaeng Nu To Gowa*” yang artinya kurang lebih adalah sembahlah rajamu wahai orang-orang Gowa.

Tidak lama kemudian datanglah dua orang pemuda yang bernama Karaeng Bayo dan Laki Padada, masing-masing membawa sebilah kelewang. Paccallaya dan kasuwiyang yang masih bersama Tomanurung kemudian mengutarakan maksud dan tujuan mereka dengan menghadirkan kedua pemuda tersebut, yaitu agar Karaeng Bayo dan Tomanurung dapat dinikahkan dengan harapan keturunan mereka bisa melanjutkan pemerintahan kerajaan Gowa. Kemudian semua pihak di situ membuat suatu ikrar yang pada intinya mengatur tentang hak, wewenang dan kewajiban orang yang memerintah dan diperintah. Ketentuan tersebut berjalan hingga saat Tomanurung dan Karaeng Bayo menghilang, yaitu pada saat Tumassalangga Baraya lahir. Tumassalangga Baraya adalah anak tunggal dari Tomanurung dan Karaeng Bayo.

Tumassalangga Baraya inilah yang selanjutnya mewarisi kerajaan Gowa. Hingga berjalannya waktu kerajaan Gowa mencapai puncak keemasannya pada abad ke XVI yang pada saat itu lebih populer dengan sebutan kerajaan kembar “Gowa-Tallo” atau disebut pula dengan *zusterstaten* (kerajaan bersaudara) oleh Belanda. Dimulainya menjadi kerajaan Dwi-Tunggal ini pada

masa pemerintahan Raja Gowa IX, Karaeng Tumaparissi Klonna (1510-1545), dan persatuan kekuatan kedua kerajaan ini sangat sulit dipisahkan karena kedua kerajaan telah menyatakan ikrar untuk saling bersama, ikrar tersebut terkenal dalam pribahasa “*Rua Karaeng Na Se're Ata*” yang artinya “Dua Raja tetapai satu rakyat”. Semakin berkembang kerajaan tersebut di daerah Makassar akhirnya kesatuan dua kerajaan itu disebut dinamai Kerajaan Makassar.

Gowa merupakan kerajaan terbesar setelah Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit yang pernah berdiri dan berkuasa di wilayah nusantara. Pernyataan tersebut didasarkan pada fakta-fakta sejarah yang ada. Kerajaan Gowa diperkirakan sudah berdiri sejak awal abad ke-13 M, di mana masyarakat dan penguasa Kerajaan Gowa menganut kepercayaan animisme. Seiring dengan berkembangnya Gowa menjadi pusat perdagangan di kawasan timur nusantara, para saudagar Muslim mulai berniaga ke wilayah itu. Perlahan tapi pasti, interaksi yang cukup sering antara pedagang Arab dan Pribumi membuat pengetahuan tentang agama Islam secara perlahan mulai dipahami oleh pribumi sampai akhirnya ajaran Islam pun mulai bersemi di daerah kekuasaan Kerajaan Gowa.

Dari sudut pandang terminologi, belum ada kesempatan (konsensus) arti kata *Goway* yang menjelaskan secara utuh asal-usul kata serapan *Gowa*. Arti yang ada hanyalah asumsi dan perkiraan antara lain: pertama, kata *Gowa* berasal dari “*goari*”, yang berarti kamar atau bilik/ perhimpun; kedua, berasal dari kata “*gua*”, yang berarti liang yang berkait dengan tempat kemunculan awal *Tomanurung ri Gowa* (Raja Gowa I) di gua/ perbukitan

Taka Bassia, Tamalate (dalam bahasa Makassar artinya tidak layu) yang kemudian secara politik kata *Gowa* dipakai untuk mengintegrasikan kesembilan *kasuwiang* (*Bate Salapang*) yang bersifat federasidi bawah *paccallaya*, yang kemudian menjadi kekuasaan tunggal *Tomanurung*, sehingga leburlah *Bate Salapang* menjadi Kerajaan “Gowa” yang diperkirakan berdiri pada abad XIII(1320).

Penyebaran Islam di Sulawesi Selatan sendiri dilakukan oleh Datuk Ri Bandang yang berasal dari Sumatera. Sampai akhirnya pada abad 17 agama Islam sudah berkembang pesat di Sulawesi Selatan. Kala itu, agama Islam ternyata tak hanya menarik minat masyarakat tapi juga para penguasa kerajaan. Menurut *Ensiklopedi Islam* (diterbitkan oleh penerbit Ichtiar Baru Van Hoeve), penguasa Gowa pertama yang memeluk Islam adalah I Manga’rangi Daeng Manra’bia (raja Gowa ke-14) dengan gelar Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna (1593-1639 M) yang kemudian diikuti oleh Raja Tallo Daeng Manrabia yang bergelar Sultan Abdullah.

Sejak 1605 M (8 tahun setelah Sultan Alauddin Tumenanga ri Gaukanna menjabat sebagai raja Kerajaan Gowa), Islam dijadikan sebagai agama resmi dan akhirnya Kerajaan Gowa bermetamorfosis menjadi sebuah kesultanan. Setelah Sultan Alauddin wafat pada 1639, tahta Kesultanan Gowa dilanjutkan oleh I Mannuntungi Daeng Mattola yang bergelar Sultan Malikussaid. Sultan Malikussaid merupakan penguasa Gowa ke-15. Ia wafat pada 1653 setelah memerintah selama 14 tahun (1639-1653).

Di samping Kerajaan Tallo, Bone, Sopeng, Wajo dan Sidenreng yang berdiri di daerah Sulawesi Selatan, Kerajaan Gowa adalah salah satu kerajaan besar dan paling sukses yang terdapat di daerah Sulawesi Selatan pada abad ke 16. Mayoritas rakyat dari kerajaan Gowa berasal dari Suku Makassar yang berdiam di ujung selatan dan pesisir barat Sulawesi. Dari sejumlah kerajaan itu, akhirnya kerajaan Gowa dan Tallo membentuk persekutuan pada tahun 1528, yang pada akhirnya melahirkan kerajaan yang lebih dikenal dengan nama Kerajaan Makassar dengan raja yang paling terkenal adalah Sultan Hasanuddin.



Gambar.1.8. *Istana Kerajaan Gowa*

Masa Perkembangan Kerajaan Gowa Tallo

Kehidupan Ekonomi

Kerajaan Makassar merupakan kerajaan maritim yang berkembang sebagai pusat perdagangan di Indonesia bagian Timur. Selain karena ditunjang oleh letaknya yang strategis, juga karena Kerajaan Makassar memiliki pelabuhan yang baik serta didukung oleh jatuhnya Malaka ke tangan Portugis pada tahun 1511 yang menyebabkan banyak pedagang pindah ke Indonesia Timur.

Dengan banyaknya bandar dagang di sana, Makassar kemudian berkembang sebagai pelabuhan internasional yang banyak disinggahi oleh pedagang-pedagang asing seperti Portugis, Inggris, Denmark dan sebagainya yang datang untuk berdagang di Makassar.

Pelayaran dan perdagangan di Makassar diatur berdasarkan hukum niaga yang disebut dengan *Ade' Aloping Loping Bicaranna Pabbalue*. Dengan adanya hukum niaga tersebut, diharapkan perdagangan di Makassar menjadi teratur dan mengalami perkembangan yang pesat. Selain perdagangan, Makassar juga mengembangkan kegiatan pertanian karena Makassar juga menguasai daerah-daerah yang subur di bagian Timur Sulawesi Selatan.

Kehidupan Sosial Budaya

Kerajaan Makassar dikenal sebagai negara Maritim, dikarenakan sebagian besar penduduk masyarakat Makassar hidup tergantung oleh laut menjadi nelayan dan pedagang antar pulau. Para penduduk Makassar ini begitu giat berusaha untuk meningkatkan taraf kehidupannya, dan tidak sedikit sebagian dari penduduk yang merantau untuk menambah kemakmuran hidupnya, hal ini biasanya terjadi pada masyarakat yang hidup di daerah dalam yang tanahnya tidak subur.

Sejak Kerajaan Makassar menjadi pusat perdagangan laut internasional, kerajaan ini mulai menjalin hubungan dengan Ternate yang sebelumnya sudah menerima ajaran agama Islam dari Gresik di Jawa Timur. Raja Ternate saat itu Baabullah mengajak raja Makassar untuk ikut memeluk agama Islam, tetapi usaha raja Ternate tersebut gagal. Baru ketika Raja Datu Ri Bandang datang ke Kerajaan Gowa Tallo agama Islam mulai masuk dan berkembang di kerajaan ini. Setahun kemudian dengan cepat hampir seluruh penduduk Gowa Tallo memeluk agama Islam. Sedangkan Mubaligh yang berjasa membantu dalam menyebarkan Islam di kerajaan Makassar adalah Abdul Qodir Khotib Tunggal yang berasal dari Minangkabau.

Pengaruh Islamnya raja Makassar sangat berdampak besar dalam peranan tersebarnya agama Islam, dengan Islamnya raja maka bukan rakyat saja yang terpengaruh untuk memeluk agama Islam tetapi kerajaan-kerajaan disekitarnya juga mengikuti untuk masuk agama Islam, seperti kerajaan Luwu, Wajo, Soppeg, dan

Bone. Kerajaan-kerajaan tersebut mulai menerima Islam pada tahun 1610 M. Raja Bone yang pertama memeluk agama Islam bergelar dengan Sultan Adam.

Dalam kehidupannya masyarakat Makassar sangat terikat dengan norma adat yang mereka anggap sakral. Norma kehidupan masyarakat Makassar diatur berdasarkan adat dan agama Islam yang disebut *Pangadakkang*. Dan masyarakat Makassar sangat percaya terhadap norma-norma tersebut. Walaupun demikian tidak menghalangi mereka untuk memiliki kebebasan berusaha dalam mencapai kesejahteraan hidupnya,

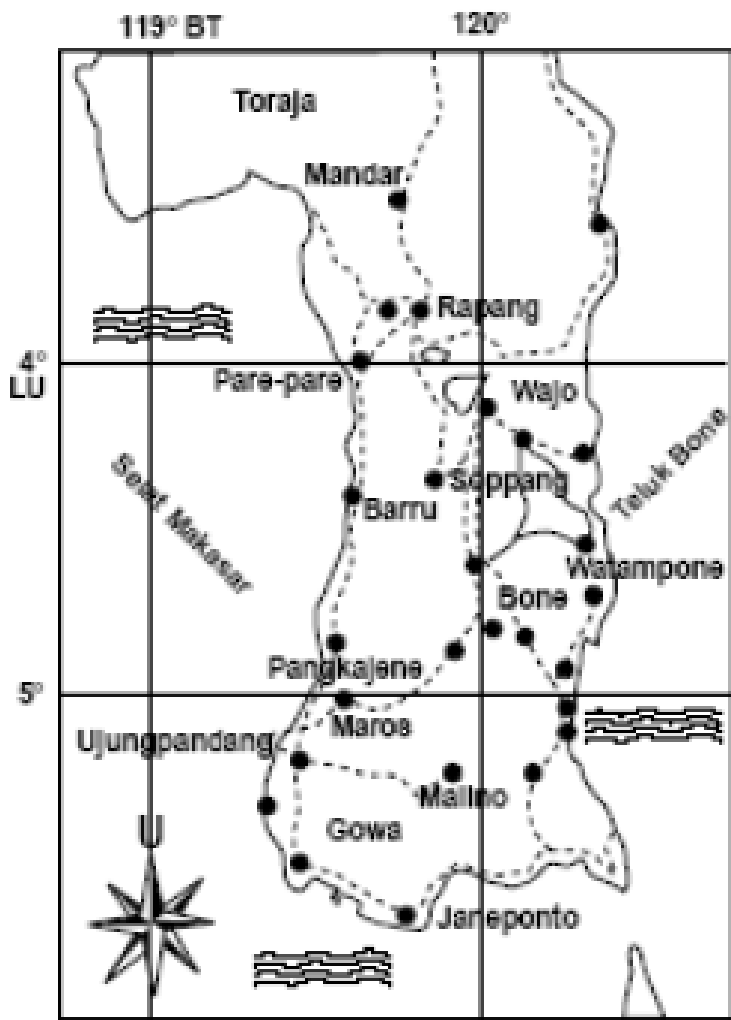
Masyarakat Makassar juga mengenal pelapisan sosial dalam kehidupannya, lapisan masyarakat ini terdiri dari lapisan atas yang merupakan golongan bangsawan dan keluarganya disebut dengan “Anakarung/ Karaeng”, sedangkan rakyat kebanyakan disebut “to Maradeka” sedangkan masyarakat lapisan bawah adalah para hamba-sahaya disebut dengan golongan “Ata”.

Dari segi kebudayaan, masyarakat Makassar banyak menghasilkan benda-benda budaya yang berkaitan dengan dunia pelayaran hal ini disebabkan bahwa kerajaan Makassar merupakan kerajaan Maritim. Hasil kebudayaan dalam dunia pelayaran ini disebutkan bahwa masyarakat Makassar terkenal sebagai pembuat kapal, merancang kapal. dan jenis kapal yang dibuat oleh orang Makassar dikenal dengan sebutan Pinisi dan Lombo. Kapal Pinisi dan Lombo adalah kebanggaan dari rakyat Makassar dan terkenal hingga ke mancanegara karena keunikan dan diakui sebagai salah satu model kapal modern pada jamannya.

Kehidupan Politik Dan Masa Kemunduran kerajaan Gowa -Tallo

Kejayaan Kerajaan Gowa tidak terlepas dari peran yang dimainkan oleh Karaeng Patingalloang, memiliki nama lengkap I Mangadicinna Daeng Sitaba Sultan Mahmud, putra Raja Tallo VII, Mallingkaang Daeng Nyonri Karaeng *Matowaya*. Karaeng Patingalloang adalah seorang Mangkubumi Kerajaan yang berkuasa tahun 1639-1654. Sewaktu Raja Tallo I Mappaijo Daeng Manyuru diangkat menjadi raja Tallo, usianya baru menginjak satu tahun. untuk sementara diangkatlah Karaeng Pattingalloang untuk menjalankan kekuasaan sampai I Mappoiyo cukup usia. Oleh karena itu dalam beberapa catatan disebutkan bahwa Karaeng Pattingalloang termasuk dalam silsilah raja Tallo sebagai Raja Tallo IX.

Karaeng Pattingalloang diangkat menjadi sebagai Mengkubumi Kerajaan Gowa-Tallo pada tahun 1639-1654, mendampingi Sultan Malikus said, yang memerintah pada tahun 1639-1653. Karaeng Pattingalloang, dilantik menjadi *Tumabbicara Butta* Kerajaan pada hari Sabtu, tanggal 18 Juni 1639. Jabatan itu didapatkannya setelah ia menggantikan ayahnya Karaeng *Matowaya*.



Gambar.1.9. Peta Lokasi Kerajaan Gowa dan Tallo

Pada saat Karaeng Pattingalloang menjabat sebagai Mangkubumi, Kerajaan Makassar telah menjadi sebuah kerajaan terkenal dan banyak mengundang perhatian negeri-negeri lainnya. Karaeng Pattingalloang adalah putra Gowa yang kepandaianya atau kecakapannya melebihi orang-orang Bugis Makassar pada umumnya. Dalam usia yang relatif muda 18 tahun Karaeng Pattingalloang telah menguasai banyak bahasa, di antaranya bahasa Latin, Yunani, Itali, Perancis, Belanda, Arab, dan beberapa bahasa lainnya. Selain mampu menguasai bahasa asing Karaeng Pattingalloang juga memperdalam ilmu falak. Hingga sampai pemerintah Belanda melalui wakil wakilnya di Batavia menghadiahkan sebuah bola dunia (globe) yang khusus dibuat di negeri Belanda pada tahun 1652, yang diperkirakan harga globe tersebut sampai f 12.000.

Karaeng Pattingalloang adalah juga seorang pengusaha internasional, beliau bersama dengan Sultan Malikussaid berkongsi dengan beberapa para pengusaha besar Pedero La Matta, dengan konsultan dagang Spanyol di Bandar Somba Opu, serta dengan seorang pelaut ulung Portugis yang bernama Fransisco Viera dengan Figheiro. Dalam perdagangan di dalam negeri. Karaeng Pattingalloang berhasil mengembangkan/meningkatkan perekonomian perdagangan Kerajaan Gowa. Dengan banyaknya barang yang diperjualbelikan dikota Raya Somba Opu, antara lain kain sutra, keramik Cina, kain katun India, kayu Cendana Timor, rempah-rempah Maluku, dan Intan Berlian Borneo.

Para pedagang Eropa yang datang ke Makassar biasanya membawakan buah tangan kepada para pembesar dan bangsawan-bangsawan di Kerajaan Gowa. Buah tangan itu kerap juga disesuaikan dengan pesanan yang dititipkan ketika para pedagang Eropa kembali ketempat asalnya. Pada saat

diminta buah tangan apa yang Karaeng Pattingalloang inginkan, Karaeng Pattingalloang menjawab bahwa yang diinginkannya adalah buku. Darisitulah tidak mengherankan jika Karaeng Pattingalloang memiliki banyak koleksi buku dari berbagai bahasa.

Karaeng Pattingalloang merupakan cendikiawan yang dimiliki oleh Kerajaan Makassar. Kecendikiawannya ia dapatkan karena begitu besar rasa peduli terhadap ilmu pengetahuan, bahkan sampai seorang penyair berkebangsaan Belanda yang bersama Joost van den Vondel, sangat memuji kecendikiawan dari Karaeng Pattingalloang dan membahasakannya dalam sebuah syair sebagai berikut:

“Wiens aldoor snuffelende brein

Een gansche werelt valt te klein”

Yang artinya sebagai berikut:

“Orang yang pikirannya selalu dan terus menerus mencari sehingga seluruh dunia rasanya terlalu sempit baginya”.

Karaeng Pattingalloang yang saat itu tampil sebagai seorang cendekiawan dan negarawan di masanya. Bahkan sebelum beliau meninggal dunia, beliau meninggalkan pesan untuk generasi yang ditinggalkan antara lain sebagai berikut:

Ada lima hal yang menyebabkan runtuhnya suatu kerajaan besar, yaitu:

1. *Punna taenamo naero nipakainga' Karaeng Mangguka,*
2. *Punna taenamo tumanggngaseng ri lalang Pa'rasangnga,*
3. *Punna taenamo gau lombo ri lalang Pa'rasangnga,*
4. *Punna angngallengasemmi soso' Pabbicaraya, dan*
5. *Punna taenamo nakamaseyangi atanna Mangguka.*

Yang artinya sebagai berikut :

1. Apabila raja yang memerintah tidak mau lagi dinasehati atau diperingati,
2. Apabila tidak ada lagi kaum cerdik cendikia di dalam negeri,
3. Apabila sudah terlampau banyak kasus-kasus di dalam negeri,
4. Apabila sudah banyak hakim dan pejabat kerajaan suka makan sogok, dan
5. Apabila raja yang memerintah tidak lagi menyayangi rakyatnya.

Karaeng Pattingalloang meninggal pada tanggal 17 September 1654 di Kampung Bonto biraeng. Sebelum meninggal Karaeng Pattingalloang telah mempersiapkan sekitar 500 buah kapal yang setiap kapal dapat memuat 50 awak untuk

menyerang Ambon. Beliau wafat ketika ikut dalam barisan Sultan Hasanuddin melawan Belanda. Setelah wafatnya, ia kemudian mendapat sebutan "*Tumenanga ri Bonto Biraeng*".

Kerajaan Makassar mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasannudin (1653 – 1669 M). Pada masa pemerintahannya, Makassar berhasil memperluas wilayah kekuasaannya dengan menguasai daerah-daerah subur serta daerah-daerah yang dapat menunjang keperluan perdagangan Makassar. Perluasan daerah Makassar tersebut bahkan sampai ke Nusa Tenggara Barat dan hampir menguasai seluruh jalur perdagangan di Indonesia Timur.

Sultan Hasannudin adalah sosok raja yang sangat anti kepada dominasi asing. Oleh karena itu, ia menentang kehadiran dan monopoli yang dipaksakan oleh VOC yang kala itu sudah berkuasa di Ambon. Kebencian Sultan Hasanuddin ini dengan sendirinya menjadi pemutus hubungan antara Batavia (pusat kekuasaan VOC di Hindia Timur) dan Ambon. Kondisi ini pun akhirnya memunculkan pertentangan antara Sultan Hasannudin dengan VOC yang pada akhirnya melahirkan peperangan yang terjadi di daerah Maluku.

Dalam peperangan tersebut, Sultan Hasannudin memimpin langsung pasukannya dan berhasil memporak-porandakan pasukan Belanda di Maluku. Menyadari kedudukannya semakin terdesak, Belanda yang berupaya untuk mengakhiri peperangan itu akhirnya mencoba melakukan politik adu-domba antara Makassar dengan Kerajaan Bone (daerah kekuasaan Makassar). Raja Bone yaitu Aru Palaka yang

merasa dijajah oleh Makassar akhirnya bersekutu dengan VOC untuk menghancurkan Makassar. Perang inilah yang kemudian dikenal dengan nama Perang Makassar (1666-1669).

Politik adu-domba yang dijalankan Belanda ini terbukti ampuh. Sebab akibat dari persekutuan itu Belanda akhirnya bisa menguasai ibu kota Kerajaan Makassar. Secara terpaksa, Kerajaan Makassar pun harus mengakui kekalahannya dan menandatangani perjanjian Bongaya tahun 1667 yang isinya sangat merugikan kerajaan Makassar. Adapun isi dari perjanjian Bongaya itu di antaranya adalah:

1. VOC memperoleh hak monopoli perdagangan di Makassar,
2. Belanda dapat mendirikan benteng di Makassar,
3. Makassar harus melepaskan daerah-daerah jajahannya seperti Bone dan pulau-pulau di luar Makassar,
4. Aru Palaka diakui sebagai raja Bone, dan lain-lain.

Walaupun perjanjian sudah dibuat, tapi perlawanan Makassar terhadap Belanda tetap berlangsung. Berselang dua hari setelah perjanjian Bongaya, Sultan Hasanuddin menyerahkan tahta kekuasaannya kepada putra mahkotanya yang masih sangat belia yaitu Mapasomba yang bergelar Sultan Amir Hamzah. Meski terbilang masih muda (13 tahun), tapi semangat juang Mapasomba untuk mengusir penjajah tidaklah kecil. Dengan semangat yang diturunkan sang ayah, Sultan Amir Hamzah meneruskan perlawanan melawan Belanda.

Belum lama memerintah menggantikan ayahnya, Sultan Amir Hamzah wafat pada 7 Mei 1674 dan digantikan oleh saudaranya, I Mappaosong Daeng Mangewai Karaeng Bisei yang bergelar Sultan Ali. Sultan Ali hanya berkuasa selama tiga tahun (1674-1677).

Sesudah mengalami kekalahan hebat pada 1669, raja-raja Gowa sesudah masa pemerintahan Sultan Hasanuddin bukanlah raja-raja yang merdeka dalam penentuan politik kenegaraan. Mereka juga tidak lagi mempunyai kekuatan tentara maupun armada kapal. Sejak saat itu, kekuasaan Belanda mulai dipusatkan di Kota Makassar. Untuk menghadapi perlawanan rakyat Makassar, Belanda mengerahkan pasukannya secara besar-besaran. Akhirnya Belanda dapat menguasai sepenuhnya kerajaan Makassar, dan Makassar pun mengalami kehancurannya.

Salah satu peninggalan sejarah kerajaan Gowa-Tallo yang menjadi ikon sejarah kota Makassar adalah Benteng Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang (Jum Pandang) yang sekarang lebih dikenal dengan nama Benteng Makassar.. Benteng Rotterdam dibangun pada tahun 1545 oleh Raja Gowa ke-9 yaitu *I Manrigau Daeng Bonto Karaeng Lakiung Tumapa'risi' Kallonna*.

Sebelumnya dibangunnya benteng ini menggunakan bahan dasar tanah liat, namun pada masa pemerintahan Raja Gowa ke-14 Sultan Alauddin, konstruksi benteng ini diganti menjadi batu padas yang diambil dari Pegunungan Karst di daerah Maros. Kalau dilihat dari atas, arsitektur benteng ini mirip seperti seekor penyu (*panynyua*) yang seolah merangkak

menuju ke lautan di sebelah baratnya. Adapun secara filosofis, bentuk penyu ini merupakan simbol bahwa Kerajaan Gowa yang mampu berjaya di daratan maupun di lautan, seperti halnya penyu yang dapat hidup di darat maupun di laut.

Namun pada tahun 1667, dalam Perjanjian Bongaya sebagaimana sudah disinggung di atas, salah satu isinya adalah mewajibkan Kerajaan Gowa untuk menyerahkan benteng ini kepada Belanda. Oleh gubernur Hindia Belanda saat itu, Cornelis Speelman, nama benteng itu kemudian diubah menjadi Fort Rotterdam (dengan maksud untuk mengenang daerah kelahirannya di Rotterdam, Belanda) dan penggunaannya dialihfungsikan menjadi tempat penyimpanan rempah-rempah sebelum dikirim ke Eropa.

Dalam kompleks Benteng Rotterdam itu terdapat 13 bangunan yang masih berdiri kokoh. Salah satu bangunan itu kemudian digunakan sebagai Museum La Galigo yang menampung banyak referensi tentang sejarah kebesaran Makassar (Gowa-Tallo) dan daerah-daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Selain itu, ada juga tempat yang digunakan sebagai ruang tahanan Pangeran Diponegoro pada tahun 1834 oleh Belanda.

Peninggalan lain dari Kerajaan Makassar adalah Masjid Katangka yang didirikan pada tahun 1605 M. Masjid Katangka ini sudah mengalami beberapa kali pemugaran sejak pertama kali berdiri. Pemugaran itu berturut-turut dilakukan oleh Sultan Mahmud (1818), Kadi Ibrahim (1921), Haji Mansur Daeng Limpo, Kadi Gowa (1948), dan Andi Baso, Pabbicarabutta Gowa

(1962) sangat sulit mengidentifikasi bagian paling awal atau bentuk asli bangunan mesjid tertua Kerajaan Gowa ini. *Di RK 4 Lingkungan Tallo, Kecamatan Tallo, Kota Madya Ujungpandang terdapat Makam raja-raja.???*

Tallo adalah sebuah kompleks makam kuno yang dipakai sejak abad XVII sampai abad XIX M. Lokasi makam ini terletak di pinggir barat muara sungai Tallo atau di sudut timur laut dalam wilayah benteng Tallo. Berdasarkan hasil penggalian (*excavation*) yang dilakukan oleh lembaga Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala sejak 1976 sampai 1982, ditemukan gejala bahwa kompleks makam itu memiliki struktur tumpang-tindih. Sejumlah makam terletak di atas fondasi bangunan dan kadang ditemukan fondasi di atas bangunan makam.

Kompleks makam raja-raja Tallo ini sebagian ditempatkan di dalam bangunan kubah, jirat semu dan sebagian tanpa bangunan pelindung. Jirat semu dibuat dari balok-balok hamparan pasir. Bangunan kubah yang berasal dari pasir ternyata memiliki keawetan dengan kurun waktu yang lebih cepat, kemudian dibuat dari batu bata. Penempatan balok batu pasir itu semula tanpa mempergunakan perekat. Perekat digunakan Proyek Pemugaran. Bentuk bangunan jirat dan kubah pada kompleks ini kurang lebih serupa dengan bangunan jirat dan kubah dari kompleks makam Tamalate, Aru Pallaka, dan Katangka. Pada kompleks ini bentuk makam dominan berciri abad XII Masehi.

KERAJAAN TERNATE

Sejarah Berdiri Kerajaan Ternate

Kata Ternate berasal dari tiga suku kata: *Tara*, *No*, dan *Ate* yang artinya “*Turun ke bawah dan pikatlah*”, bisa juga diartikan “(*Turunlah dari dataran tinggi ke dataran rendah*) atau (*Dari Formadiyahi ke Limau Jore-Jore*) untuk memikat para pendatang agar mau menetap di tempat negeri (*pantai*) ini”. *Tara* juga berarti Selatan yang mungkin dimaksudkan karena letak atau posisi kota Ternate berada di selatan pulau Ternate. Kota yang memiliki luas daratan sekitar 250,85 km² dan luas lautan 5.547,55 km² ini secara geografis berada pada posisi 0°-2° Lintang Utara dan 126°-128° Bujur Timur dengan semua wilayahnya berbatasan dengan laut (sebelah barat berbatasan dengan laut Maluku - sebelah timur berbatasan dengan selat Halmahera - sebelah utara berbatasan dengan laut Maluku - sebelah selatan berbatasan dengan laut Maluku).

Kota Ternate termasuk kota yang terhitung tua karena sudah berdiri sebelum abad pertengahan dan menjadi pusat peradaban Islam terbesar di Nusantara Timur pada zamannya. Kota ternate juga pernah mendapatkan julukan “*Al Mullukiah*” karena selain menjadi pusat peradaban Islam juga menjadi pusat pemerintahan dan pusat perdagangan.

Ternate juga dikenal sebagai kota penghasil rempah-rempah. Para petani yang tinggal di kawasan perbukitan menanam cengkih, pala, kayu manis dan kenari, sementara yang tinggal di daerah yang agak rendah menanam kelapa. Adapun masyarakat yang bermukim dipinggir pantai sebagian besarnya berprofesi sebagai nelayan.

Ternate merupakan sebuah pulau gunung berapi seluas 40 km persegi yang terletak di Maluku Utara, Indonesia. Penduduk Ternate berasal dari Halmahera yang datang ke Ternate dalam suatu migrasi. Awalnya, ada empat kampung di Ternate, di mana masing-masing kampung dikepalai oleh seorang Kepala Marga (*Momole*). Lambat laun, empat kampung ini kemudian bergabung membentuk sebuah kerajaan yang kemudian diberi nama Ternate. Selain Kerajaan Ternate, di kawasan Maluku Utara juga ada kerajaan lain Tidore, Jailolo, Bacan, Obi dan Loloda.

Nama sebenarnya dari Kerajaan Ternate, yang merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam di Maluku, adalah Kerajaan Gapi, tapi kemudian berubah menjadi Kesultanan Ternate karena mengikuti nama ibu kotanya. Kesultanan atau Kerajaan Ternate didirikan oleh Baab Mashur Malamo pada 1257 dan

memainkan peran penting di kawasan timur Nusantara antara abad ke-13 hingga abad ke-17. Masa kejayaan Kesultanan Ternate terjadi pada paruh abad ke-16 berkat perdagangan rempah-rempah dan kekuatan militernya. Ketika itu, kekuasaan Kerajaan membentang mulai wilayah Maluku, Sulawesi Utara, Sulawesi Timur, Sulawesi Tengah, bagian selatan kepulauan Filipina, hingga Kepulauan Marshall di pasifik.

Kerajaan Ternate pada mulanya bukan kesultanan yang menganut agama Islam. Ia adalah kerajaan yang raja dan rakyatnya belum diketahui dengan jelas agama dan kepercayaannya. Mereka diasumsikan beragama animisme atau percaya kepada kekuatan-kekuatan ghaib, terutama gunung berapi Gamalama yang berada di pulau Ternate. Hanya dapat dipastikan bahwa keluarga kerajaan Ternate resmi memeluk Islam pertengahan abad ke-15.

Aktivitas perdagangan yang semakin ramai ditambah adanya ancaman yang sering datang dari para perompak yang mengganggu stabilitas perdagangan maka atas prakarsa Momole Guna pemimpin Tobona diadakan musyawarah untuk membentuk suatu organisasi yang lebih kuat dan mengangkat seorang pemimpin tunggal sebagai raja. Setelah Sultan atau Raja sebagai pemimpin tertinggi, ada jabatan Jogugu (perdana menteri) dan Fala Raha sebagai para penasihat. Fala Raha atau Empat Rumah, Empat Rumah adalah empat klan bangsawan yang menjadi tulang punggung kesultanan sebagai representasi para momole pada masa lalu, masing – masing Empat Rumah dikepalai seorang Kimalaha. Mereka antara lain ; Marasaoli,

Tomagola, Tomaito dan Tamadi. Pejabat – pejabat tinggi kesultanan umumnya berasal dari ke empat klan ini. Bila seorang sultan tidak memiliki pewaris maka penerusnya dipilih dari salah satu klan ini. Selanjutnya ada jabatan – jabatan lain yaitu Bobato Nyagimoi se Tufkange (Dewan 18), Sabua Raha, Kapita Lau, Salahakan, Sangaji dll.

Tahun 1257 Momole Ciko pemimpin klan Sampalu terpilih dan diangkat sebagai Kolano dalam bahasa setempat yang berarti Raja Gapi pertama dengan gelar Baab Mashur Malamo (1257-1272). Kerajaan Gapi berpusat di kampung Ternate, yang dalam perkembangan selanjutnya semakin besar dan ramai kota Ternate dalam perdagangan, kemudian orang lebih suka mengatakan kerajaan Ternate daripada kerajaan Gapi.

Ada banyak versi tentang sejarah awal berdirinya kerajaan Ternate, baik dalam bentuk catatan maupun yang berasal dari hikayat. Sebagaimana yang dicatat oleh Ariendonika, Francois Valentijn, seorang pendeta missionaris yang bertugas pada masa penjajah Portugis di Maluku, mengatakan bahwa sejarawan atau pencatat peristiwa pada awal zaman Maluku adalah seorang muslim yang bernama Ridjali. Ridjali hidup pada abad ke-17 di Ambon yang pada saat itu berada di bawah pemerintahan kolonialisme Portugis.

Dalam hikayat mitosnya, Ridjali mengisahkan bahwa asal mula berdirinya kerajaan Ternate diawali dengan sebuah cerita tentang seseorang yang bernama Guna. Pada suatu ketika dia ingin menyadap nira sagu untuk diminum dan menyegarkan badan layaknya minum bir pada saat ini. Di tengah-tengah

menyadap nira, tanpa sengaja Ridjali menemukan lumpang emas. Karena penemuan yang tidak biasa itulah kemudian rakyat mengangkatnya sebagai penguasa di daerah pulau Ternate.

Di samping hikayat di atas, ada juga hikayat lain yang mengisahkan bahwa pendiri Kesultanan Ternate adalah Ja'far Shadiq yang tidak lain adalah cucu Saiyida Ali r.a. yang pergi merantau ke daerah Ternate untuk melakukan dakwah dan menyebarkan agama Islam. Dari putra-putri Ja'far inilah yang kelak akan menjadi sultan-sultan Islam di Ternate. Putra yang tertua, Mashur Malamo, menjadi sultan di daerah Ternate, sementara adik-adiknya: Syahadaty menjadi sultan di Tidore; Kaicil Buka menjadi sultan di Pulau Bacan dan Darajati menjadi sultan di daerah Jailolo atau Halmahera sekarang. Di bawah pimpinan beberapa generasi penguasa berikutnya, Ternate yang awalnya hanya sebuah kerajaan yang berwilayahkan sebuah pulau kecil akhirnya berkembang menjadi kerajaan yang berpengaruh dan terbesar di bagian timur Indonesia, khususnya Maluku.

Kehidupan Sosial dan Politik

Selain di Ternate, terdapat beberapa kerajaan lain yang juga memiliki pengaruh, masing-masing kerajaan bersaing untuk menjadi kekuatan hegemonik di Maluku. Dalam perkembangannya, Ternate lebih berhasil menjadi kekuatan hegemonik di wilayah tersebut dibandingkan dengan kerajaan-kerajaan lain, kemajuan perdagangan dan kekuatan militer yang Ternate miliki menjadi alasan kemanangan tersebut. Selanjutnya,

Ternate mulai melakukan ekspansi wilayah guna menambah wilayah kekuasaan dan meningkatkan daerah dagang, atas sikap inilah menimbulkan kebencian kerajaan lainnya. Dan pada akhirnya berlanjut pada peperangan untuk menghentikan kekuasaan Ternate.

Untuk menghentikan konflik yang berlarut-larut, Raja Ternate ke-7, yaitu Kolano Cili Aiya (1322-1331) mengundang setiap raja-raja di wilayah Maluku yang lain untuk berdamai. Dalam pertemuan tersebut akhirnya menghasilkan kesepakatan untuk membentuk suatu persekutuan yang kemudian dikenal sebagai Persekutuan Moti atau *Motir Verbond*. Hasil lain dalam pertemuan tersebut adalah disepakatinya penyeragaman bentuk lembaga kerajaan di Maluku. Pertemuan itu diikuti oleh 4 raja terkuat di Maluku, dan pada akhirnya persekutuan tersebut disebut juga sebagai Persekutuan *Moloku Kie Raha* (Empat Gunung Maluku) dan dengan demikian diharapkan terjadi perdagangan antar kerajaan dengan system yang baik dan bersih sehingga meminimalisasi terjadinya perebutan dominasi.

Mulai munculnya hubungan ekonomi dan perdagangan masyarakat Ternate dengan dunia luar yaitu hubungan dengan para saudagar dikarenakan daerah Ternate dan kepulauan Maluku pada umumnya termasuk penghasil rempah-rempah; cengkeh dan pala yang terbaik kualitasnya di dunia. Kedua hasil bumi tersebut mempunyai kualitas ekspor kelas satu, sehingga menarik minat dari negara-negara Eropa dan saudagar-saudagar Arab untuk berdatangan ke daerah tersebut, biasanya para saudagar asing yang datang ke Ternate membeli cengkeh dan pala sebagai bahan obat-obatan, pengawet, dan campuran rokok. Hubungan

yang saling menguntungkan terjadi di Ternate dengan ramainya daerah mereka setelah kedatangan bangsa Asing dari berbagai benua yaitu berbaur dalam bentuk transaksi dan berintegrasi dengan penduduk setempat.

Hubungan yang telah terjadi baik antara para saudagar asing dengan penduduk setempat tersebut berlanjut dengan hubungan religio politik dan intelektual keagamaan. Hubungan ekonomi-perdagangan yang diteruskan dengan hubungan keagamaan dan politik menciptakan manifestasi terjadinya proses islamisasi dan konversi agama dari penduduk asing yang beragama Islam kepada pribumi. Sebagai konsekuensi terjadinya proses islamisasi kerajaan adalah wujudnya intensifikasi kesadaran keislaman para sultan yang kemudian diikuti oleh rakyatnya. Pada tahapan intensifikasi inilah hubungan intelektual-keagamaan menjadi marak. Hal itu diawali oleh apa yang Sultan Zainal Abidin (1500-1522) lakukan, yaitu dengan belajar agama Islam hingga sampai ke daerah Jawa. Dan pada abad ke-16 M setelah kepulangan Zainal Abidin dari “*ngangsu kaweruh*” (menuntut ilmu) akhirnya berimplikasi banyak pada akselerasi cara-cara penyebaran Islam di kepulauan Maluku.

Raja Ternate yang diketahui pertama memeluk Islam adalah Kolano Marhum (1465-1486) yang berkuasa di Ternate pada abad ke-18 yang kemudian digantikan oleh putranya, **Zainal Abidin** (1486-1500). Beberapa langkah besar **yang diambil Zainal Abidin** selama ia memimpin di antaranya adalah: 1) Meninggalkan gelar Kolano dan menggantinya dengan Sultan; 2) Islam diakui sebagai agama resmi kerajaan; 3) Memberlakukan Syariat Islam; dan 4) Membentuk lembaga

kerajaan sesuai hukum Islam dengan melibatkan para ulama. Sikap dan arahan dari **Zainal Abidin** ini kemudian diikuti secara total oleh kerajaan-kerajaan lain di Maluku. Selain itu, **Zainal Abidin** juga mendirikan madrasah Islam pertama di Ternate. Sultan Zainal Abidin yang pernah mendalami ajaran Islam secara langsung kepada Sunan Giri di pulau Jawa itu pernah **mendapatkan julukan** sebagai “Sultan Bualawa” atau “Sultan Cengkih.”



Gambar.1.10. *Istana Kerajaan Ternate*

Perkembangan Agama Islam

Situasi politik ketika kedatangan Islam di kepulauan Maluku tidak seperti di Jawa. Di sana orang-orang Muslim tidak menghadapi kerajaan-kerajaan yang sedang mengalami perpecahan karena perebutan kekuasaan negara. Mereka datang dan mengembangkan Islam dengan melalui perdagangan, dakwah dan melalui perkawinan. A. Hasymi, seorang cendekiawan dan sejarawan asal Aceh, menyatakan bahwa proses masuknya agama Islam di suatu wilayah tidak akan melenceng jauh dari tiga teori berikut:

Yang dimaksud dengan masuknya Islam ke suatu daerah adalah apabila terdapat seseorang atau beberapa orang asing yang menganut agama Islam yang bermukim di daerah yang didatangi atau dengan kata lain Islam telah masuk ke daerah itu.

Mengartikan Islam masuk ke suatu daerah adalah bila terdapat seseorang atau beberapa orang dari penduduk pribumi telah menganut agama Islam.

Menjelaskan bahwa Islam masuk ke suatu daerah, bila sudah terdapat komunitas Muslim dan secara sosiologis Islam telah melembaga dalam kehidupan masyarakat.

Berangkat dari tiga teori di atas, maka dapat dipaparkan bagaimana proses Islamisasi di daerah Kedaton Kesultanan Ternate. Jika mengacu pada teori yang pertama, maka kedatangan orang Islam ke Ternate bisa dikatakan dimulai pada abad 11 sampai dengan abad 12 M. Karena saat itu Ternate sudah menjadi jalur lintasan perdagangan rempah-rempah

dunia, bukan hanya dari penduduk Nusantara saja yang ikut meramaikan perdagangan tersebut, tetapi termasuk kedatangan para saudagar Muslim Arab dan India ke sana.

Sementara dengan mengacu pada teori yang kedua, bisa dilihat dari masuk Islamnya Sultan Mashur Maloma (1257 M), Kaicil Gapi Baguna (1432-1465), dan Zainal Abidin (1500-1522M). Tolok ukur teori kedua ini adalah pemakaian nama Arab yang disematkan ke dalam gelar kehormatan atau penguasa. Adapun kalau mengacu pada teori yang ketiga, teori yang banyak dianut sarjana Barat untuk meneliti sejarah kemunculan Islam di Nusantara, Islam telah melembaga dalam kehidupan sosial pada sekitar akhir abad ke 15-16 M. Hal ini dibuktikan dengan adanya perlawanan sultan-sultan terhadap para penjajah Portugis.

Selanjutnya, untuk menentukan siapa dan dari mana asal pembawa Islam ke daerah Ternate, dapat diketahui dari sejarah di atas, adalah para saudagar Arab, Melayu, dan mubaligh-mubaligh dari Jawa. Sedangkan daerah yang pertama kali disentuh oleh ajaran Islam adalah pulau Ternate, baru kemudian diikuti oleh Ambon pada 1440 M dan Banda 1460 M. Percepatan dari penyebaran Islam ke wilayah-wilayah lainnya dikarenakan adanya satu kesatuan kesultanan “Moloku Kie Raha” dan kesepakatan sultan Ternate dengan sultan Hitu di Ambon untuk bertekad menyebarkan Islam sampai hari kemudian.

Sebelum masuknya bangsa Portugis dan bangsa Eropa lainnya, penduduk kepulauan Ternate, Tidore, Jailolo, dan Bacan telah menganut agama Islam, dengan Zainal Abidin

sebagai orang yang memeluk Islam yang pertama. Tetapi Sultan Ternate yang ke-43 berpendapat lain, beliau menuturkan bahwa yang pertama masuk Islam adalah Sultan Ternate yang pertama, Mashur Malamo. Menurut pendapat dari Sultan Ternate ke-43 ini, pada saat kepemimpinan dari Mashur Malamo inilah proses Islamisasi negara mulai dilakukan. Hal itu terjadi kurang lebih pada tahun 1257 M., dan sekaligus dianggap sebagai tahun dari berdirinya kota Ternate sekarang. Tindakan Sultan Mashur Malamo yang memeluk agama Islam itu kemudian diikuti oleh seluruh rakyatnya.

Tidak hanya oleh rakyat, ternyata keislaman Sultan Ternate itu diikuti juga oleh Sultan Tidore, Jailolo, dan Bacan. Dari Sultan-sultan yang sudah memeluk Islam itulah kemudian Islam tersebar dengan cepat di kepulauan Maluku, bahkan hingga meliputi daerah Sulawesi bagian Utara dan Irian Jaya.

Dalam sumber yang lain dijelaskan bahwa tatkala Sultan Zainal Abidin pergi ke Jawa untuk menuntut ilmu agama, dia bertemu dengan Pati Tuban, penguasa daerah Hitu atau Ambon pada masa sekarang. Mereka berdua kemudian berjanji untuk bertekad bersama-sama menyiarkan agama Islam hingga hari kemudian. Penggambaran ini memberikan penjelasan secara singkat bagaimana Sultan Ternate memiliki kekuasaan dan kemampuan ekonomi yang kuat. Dia mempunyai jaringan kerjasama dengan penguasa-penguasa di sekitar Maluku dan daerah-daerah lainnya, baik di bidang perdagangan, politik, dan terutama keilmuan dalam gerakan penyebaran agama Islam.

Sedangkan hasil dari kepergian Sultan Zainal Abidin ke Jawa menuntut ilmu agama Islam adalah terjadinya intensifikasi ajaran keislaman di daerah Ternate. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya peninggalan sejarah berupa mushaf al-Qur'an yang ditulis tangan dan masjid yang dibangun pada abad ke-15 M.

Sistem Pemerintahan

Sumber resmi yang diperoleh dari tahta Kesultanan Ternate menyebutkan bahwa sejak tahun 1257 M Islam secara resmi telah menjadi agama negara, yaitu sejak raja pertama Baab Mashur Maloma. Sejak saat itulah istilah Kesultanan telah digunakan di Ternate. Masalah agama menjadi prioritas dalam setiap kesempatan. Agama diurus oleh seorang qadhi dan dibantu oleh empat orang imam Rubuha Raha di bawah pimpinan imam Sadaha.

Lembaga tertinggi pemerintahan adalah Bobato 18, yang memegang kedaulatan dan menjalankan kedaulatan rakyat. Bobato 18 inilah yang mengangkat sultan dari putra-putra sultan maupun selain putra sultan. Sementara itu, pemerintahan harian dilaksanakan oleh komisi empat atau Dopolu Ngaruha yang diketuai oleh seorang Jogugu. Anggota komisi empat itu terdiri dari Hukum Sangaji, Hukum Sosio, dan Hukum Tuli Lamo. Dopolu Ngaruha juga bertugas memimpin sidang Bobato 18 dan bertanggung jawab atas politik dan pemerintahan negara.

Perkembangan dan Massa Keemasan

Ternate semakin berkembang di masa pemerintahan Sultan Bayanullah (1500-1521) yang mewajibkan rakyatnya untuk berpakaian secara Islami. Kemajuan dalam teknik pembuatan perahu dan senjata yang diperoleh dari orang Arab dan Turki juga digunakan pada masa ini untuk memperkuat pasukan Ternate. Di masa ini pula datang orang Eropa pertama di Maluku, Loedwijk de Bartomo (Ludovico Varthema) tahun 1506. Di tahun 1512, Portugal untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ternate di bawah pimpinan **Fransisco Serrao**. Karena menganggap bahwa kedatangan Portugal itu untuk berdagang, maka Sultan mengizinkan Portugal untuk mendirikan pos dagang di Ternate. Tetapi ternyata kedatangan Portugal bukan semata-mata untuk berdagang, melainkan juga ingin menguasai perdagangan rempah-rempah Pala dan cengkih di Maluku.

Pada saat Sultan Bayanullah wafat, beliau meninggalkan para pewaris yang masih sangat belia. Janda sultan, permaisuri Nukila, dan adik almarhum sultan (Pangeran Taruwese) akhirnya bertindak sebagai wali. Permaisuri Nukila yang berasal dari Tidore bermaksud menyatukan Ternate dan Tidore di bawah satu mahkota yakni salah satu dari kedua puteranya, pangeran Hidayat (kelak menjadi Sultan Dayalu) dan pangeran Abu Hayat (kelak menjadi Sultan Abu Hayat II). Sementara pangeran Tarruwese menginginkan tahta bagi dirinya sendiri. Di masa-masa perebutan kekuasaan internal inilah Portugal kemudian memanfaatkannya dengan mengadu domba keduanya hingga

terjadi perang saudara. Kubu permaisuri Nukila didukung oleh kerajaan Tidore sedangkan pangeran Taruwese didukung Portugal. Namun setelah meraih kemenangan atas saudaranya sendiri, Pangeran Taruwese justru dikhianati dan dibunuh Portugal.

Gubernur Portugal yang akhirnya bertindak sebagai penasihat kerajaan, berhasil membujuk dewan kerajaan untuk mengangkat pangeran Tabariji sebagai sultan. Tetapi ketika Sultan Tabariji mulai menunjukkan sikap bermusuhan, ia difitnah dan dibuang ke Goa, India. Di sana ia dipaksa Portugal untuk menandatangani perjanjian agar menjadikan Ternate sebagai kerajaan Kristen dan vasal kerajaan Portugal, namun perjanjian itu ditolak mentah-mentah oleh putra Sultan Bayanullah, Sultan Khairun (1534-1570).

Melihat perlakuan Portugal terhadap saudara-saudaranya membuat Sultan Khairun geram dan bertekad mengusir Portugal dari Maluku. Perilaku yang semena-mena dari Portugal itu juga menimbulkan kemarahan rakyat yang akhirnya berdiri di belakang Sultan Khairun. Sejak masa Sultan Bayanullah, Ternate telah menjadi salah satu dari tiga kesultanan terkuat dan pusat Islam utama di Nusantara abad ke-16 selain Aceh dan Demak setelah kejatuhan kesultanan Malaka tahun 1511. Ketiganya sepakat untuk membentuk *Aliansi Tiga* untuk membendung sepak terjang Portugal di Nusantara.

Tak ingin mengalami nasib seperti Malaka, Sultan Khairun akhirnya mengobarkan perang pengusiran terhadap Portugal. Kedudukan Portugal kala itu sudah sangat kuat, selain memiliki benteng dan kantong kekuatan di seluruh Maluku mereka

juga telah memiliki sekutu-sekutu dari suku pribumi yang bisa dikerahkan untuk menghadang Ternate. Dengan adanya Aceh dan Demak yang terus mengancam kedudukan Portugal di Malaka, Portugal di Maluku kesulitan mendapat bala bantuan hingga terpaksa memohon damai kepada Sultan Khairun.

Secara licik Gubernur Portugal, Lopez de Mesquita mengundang Sultan Khairun ke meja perundingan. Tanpa berburuk sangka dan berpikir bahwa Portugal akan menyerah, maka didatangilah perundingan tersebut. Namun ternyata di sana Sultang yang datang tanpa pengawalnya dibunuh dengan kejam. Pembunuhan Sultan Khairun membuat rakyat semakin terbakar amarahnya dan akhirnya mendorong rakyat Ternate untuk menyingkirkan Portugal, bahkan seluruh Maluku kini mendukung kepemimpinan dan perjuangan Sultan Baabullah (1570-1583) karena merasa Portugal telah melewati batas kemanusiaan. Pos-pos Portugal di seluruh Maluku dan wilayah timur Indonesia pun digempur dan setelah peperangan selama 5 tahun, akhirnya Portugal meninggalkan Maluku untuk selamanya di tahun 1575. Kemenangan rakyat Ternate dalam menyingkirkan Portugal tercatat sebagai kemenangan pertama putra-putra nusantara atas kekuatan barat.

Di bawah kepemimpinan Sultan Baabullah, Ternate mencapai puncak kejayaan dengan wilayah yang membentang dari Sulawesi Utara dan Tengah di bagian barat hingga kepulauan Marshall di bagian timur dan dari Filipina (Selatan) di bagian utara hingga kepulauan Nusa Tenggara di bagian selatan. Bahkan karena luasnya daerah yang dikuasai oleh Sultan Baabullah, dengan wilayah yang terdiri dari kepulauan-kepulauan besar

dan kecil, Sultan Baabullah dijuluki dengan “*Penguasa 72 Pulau*” yang semuanya berpenghuni. Sejarawan asal Belanda, Valentijn, menuturkan secara rinci nama-nama ke-72 pulau tersebut dan menganggap kesultanan Ternate sebagai kerajaan Islam terbesar di Indonesia timur, di samping Aceh dan Demak yang menguasai wilayah barat dan tengah nusantara kala itu. Periode keemasaan tiga kesultanan ini selama abad 14 dan 15 adalah pilar pertama yang membendung kolonialisme barat.

Sepeninggal Sultan Baabullah, Ternate mulai melemah. Spanyol yang telah bersatu dengan Portugal pada tahun 1580 kembali mencoba menguasai Maluku dengan menyerang Ternate. Dengan kekuatan baru, Spanyol memperkuat kedudukannya di Filipina. Sementara di tempat lain, untuk menghadapi aliansi dari Spanyol dan Portugal yang kembali menyerang, Ternate pun menjalin aliansi dengan Mindanao yang merupakan musuh dari Spanyol. Sayangnya, serangan yang dilakukan oleh Ternate dan Mindanao gagal, bahkan Sultan Said Barakati (1583-1606) berhasil ditawan Spanyol dan dibuang ke Manila.

Kekalahan yang terus-menerus melanda itu memaksa Ternate untuk meminta bantuan dari Belanda tahun 1603. Ternate akhirnya sukses menahan Spanyol tapi dengan imbalan yang sangat mahal, yaitu berupa kontrak untuk memberikan kebebasan Belanda dalam menguasai sebagian hasil rempah-rempah. Perlahan-lahan Belanda pun akhirnya menguasai Ternate dan pada 26 Juni 1607, Sultan Ternate terpaksa menandatangani kontrak monopoli VOC di Maluku sebagai imbalan bantuan Belanda melawan Spanyol seperti yang

telah dijanjikan sebelumnya. Pada tahun 1607 pula Belanda membangun benteng *Oranje* di Ternate, yang menjadi benteng pertama yang didirikan Belanda di nusantara.

Sejak awal, hubungan yang tidak sehat dan tidak seimbang antara Belanda dan Ternate menimbulkan ketidakpuasan rakyat, para penguasa dan bangsawan Ternate. Pangeran Hidayat, seorang raja muda Ambon yang juga merupakan mantan wali raja kerajaan Ternate akhirnya memimpin oposisi yang menentang kedudukan sultan dan Belanda. Ia mengambil langkah berani dengan mengabaikan perjanjian monopoli dagang Belanda dengan nekat menjual rempah-rempah kepada pedagang Jawa dan Makassar.

Semakin lama cengkeraman dan pengaruh Belanda terhadap sultan-sultan Ternate semakin kuat, di mana dengan leluasa Belanda bisa mengeluarkan peraturan yang merugikan rakyat lewat perintah sultan. Sikap Belanda yang kurang ajar ditambah sikap dari sultan yang penurut menimbulkan kekecewaan semua kalangan. Sepanjang abad ke-17, setidaknya ada 4 pemberontakan yang dikobarkan bangsawan Ternate dan rakyat Maluku:

- Tahun 1635, berawal dari *Hongi Tochten* (penebangan besar-besaran pohon cengkeh dan pala di seluruh Maluku yang dilakukan oleh Belanda demi memudahkan pengawasan dan mengontrol harga rempah yang merosot), rakyat mengobarkan perlawanan. Tahun 1641, dipimpin oleh raja muda Ambon Salahakan Luh, puluhan ribu pasukan gabungan Ternate-Hitu-Makassar menggempur berbagai

kedudukan Belanda di Maluku Tengah. Salahakan Luhu kemudian berhasil ditangkap dan dieksekusi mati bersama seluruh keluarganya pada 16 Juni 1643. Perjuangan lalu dilanjutkan oleh saudara ipar Luhu, kapita Hitu Kakiali dan Tolukabessi hingga 1646.

- Tahun 1650, para bangsawan Ternate mengobarkan perlawanan di Ternate dan Ambon karena dipicu oleh sikap Sultan Mandarsyah (1648-1650 dan 1655-1675) yang terlampau akrab dan dianggap cenderung menuruti kemauan Belanda. Para bangsawan berkomplot untuk menurunkan Mandarsyah. Tiga pemberontak yang utama di antaranya adalah Pangeran Saidi (Kapita Laut atau panglima tertinggi pasukan Ternate), Pangeran Majira (raja muda Ambon), dan Pangeran Kalumata (adik sultan Mandarsyah). Saidi dan Majira memimpin pemberontakan di Maluku tengah, sementara Kalumata bergabung dengan raja Gowa, Sultan Hasanuddin, di Makassar. Mereka bahkan sempat berhasil menurunkan sultan Mandarsyah dari tahta dan mengangkat Sultan Manila (1650–1655). Namun berkat bantuan Belanda, kedudukan Mandarsyah kembali dipulihkan. Setelah 5 tahun pemberontakan Saidi dan kelompoknya berhasil dipadamkan oleh Belanda. Pangeran Saidi disiksa secara kejam hingga mati sementara pangeran Majira dan Kalumata menerima pengampunan Sultan dan hidup dalam pengasingan.

- Pemberontakan yang ketiga dilakukan oleh Sultan Muhammad Nurul Islam atau yang lebih dikenal dengan nama Sultan Sibori (1675-1691) yang merasa gerah dengan tindakan Belanda yang semena-mena. Sultan Sibori pun menjalin persekutuan dengan Datuk Abdulrahman, penguasa Mindanao. Namun upayanya untuk menggalang kekuatan menjadi kurang maksimal karena daerah-daerah strategis yang bisa diandalkan untuk basis perlawanan terlanjur jatuh ke tangan Belanda oleh berbagai perjanjian yang dibuat para pendahulunya. Sultan Sibori kalah dan terpaksa menyingkir ke Jailolo. Kemudian pada 7 Juli 1683 Sultan Sibori terpaksa menandatangani perjanjian yang intinya menjadikan Ternate sebagai kerajaan dependen Belanda. Perjanjian inilah yang mengakhiri masa kerajaan Ternate sebagai negara berdaulat.

- Pemberontakan terakhir terjadi tahun 1914 dan dipimpin oleh Sultan Haji Muhammad Usman Syah (1896-1927) yang menggerakkan perlawanan rakyat di wilayah-wilayah kekuasaannya. Bermula di wilayah Banggai di bawah pimpinan Hairuddin Tomagola, namun pemberontakan tersebut gagal dikarenakan masih terlalu lemah dan tidak matangnya serangan yang dilancarkan oleh Hairuddin Tomagola. Kemudian di Jailolo, rakyat Tudowongi, Tuwada dan Kao di bawah pimpinan Kapita Banau berhasil menimbulkan kerugian besar di pihak Belanda, di mana banyak prajurit Belanda yang tewas termasuk Coentroleur Belanda Agerbeek, markas dan pos-pos penjagaan mereka

berhasil diobrak-abrik. Pemberontakan oleh Kapita Banau ini tidak berlangsung lama karena keunggulan militer dan persenjataan Belanda lebih lengkap. Akhirnya perlawanan tersebut berhasil dipatahkan dan kapita Banau ditangkap serta dijatuhi hukuman gantung.

Karena Sultan Haji Muhammad Usman Syah terbukti terlibat dalam pemberontakan ini, maka berdasarkan keputusan pemerintah Hindia Belanda tanggal 23 September 1915 no. 47, Sultan Haji Muhammad Usman Syah dicopot dari jabatan sultan, seluruh hartanya disita, dan beliau dibuang ke Bandung tahun 1915 hingga akhir hayatnya pada tahun 1927. Pasca penurunan Sultan Haji Muhammad Usman Syah, sempat terjadi kekosongan jabatan sultan selama 14 tahun dan pemerintahan adat dijalankan oleh Jogugu serta dewan kesultanan.

Sempat muncul keinginan pemerintah Hindia Belanda untuk menghapus kesultanan Ternate namun niat itu urung dilaksanakan karena khawatir akan reaksi keras yang bisa memicu pemberontakan baru, sementara letak Ternate yang berada jauh dari pusat pemerintahan Belanda di Batavia.

Sementara dalam hal warisan, sebenarnya peninggalan Ternate tidak sebanding dengan kebesaran namanya. Tidak ada warisan intelektual, arsitektur ataupun seni berkualitas tinggi yang ditinggalkannya. Satunya-satunya warisan sastra yang ditinggalkan hanyalah *Dolo Bololo Sedalil Moro*. Sastra ini berbentuk puisi, peribahasa, dan ibarat (perumpamaan-perumpamaan) yang kebanyakan berisi pendidikan moral

tradisional. Padahal, sebagai bandar utama rempah-rempah di Maluku, Ternate sudah berhubungan dengan peradaban yang lebih maju seperti Jawa, Melayu, Cina, Arab dan Eropa. Namun, sepertinya hal itu tidak meninggalkan pengaruh.

Berkaitan dengan absennya kebudayaan tulis, mungkin disebabkan karena Ternate selalu sibuk dengan urusan peperangan dan konflik. Sebelum Eropa datang, Ternate berkonflik dengan kerajaan sekitarnya karena memperebutkan hegemoni dan setelah bangsa Eropa datang, konflik terjadi dengan bangsa Eropa. Implikasinya, orang Ternate mencurahkan segenap energinya hanya untuk mempertahankan diri. Karena alasan-alasan inilah maka seni budaya seperti tarian cakalele, memiliki watak militer.

Berikut ini adalah urutan dari beberapa kolano dan sultan yang pernah berkuasa di Ternate. Data berikut belum lengkap, karena masih banyak nama sultan yang belum tercantum. Penulisan nama-nama sultan ini diurutkan berdasarkan dengan urutan tahun dia menjadi sultan.

1. Kolano Baab Mashur Malamo (1257-1272)
7. Kolano Cili Aiya (1322-1331)
17. Kolano Marhum (1465-1486)
18. Sultan Zainal Abidin (1486-1500)
19. Sultan Bayanullah (1500-1521)
20. Pangeran Taruwese
21. Pangeran Tabarij

22. Sultan Khairun (1534-1570)

23. Sultan Baabullah (1570-1583)

-- Sultan Mandar Syah (1648-1650)

-- Sultan Manila (1650-1655)

-- Sultan Mandar Syah (1655-1675)

-- Sultan Sibori (1675-1691)

-- Sultan Muhammad Usman (1896-1927)

KERAJAAN TIDORE

Sejarah Berdirinya Kerajaan Tidore

Tidore merupakan salah satu pulau kecil yang terdapat di gugusan kepulauan Maluku Utara, yang lokasi persisnya berada di sebelah barat pantai pulau Halmahera. Sebelum Islam datang ke bumi Nusantara, pulau Tidore dikenal dengan nama *Limau Duko* atau *Kie Duko* yang berarti “pulau yang bergunung api.” Penamaan ini disesuaikan dengan kondisi topografi pulau Tidore yang memiliki gunung api—bahkan merupakan gunung tertinggi di gugusan kepulauan Maluku—yang oleh penduduk asli, gunung tersebut mereka namakan gunung *Kie Marijang*. Saat ini, gunung Marijang sudah tidak aktif lagi. Sedangkan untuk nama Tidore sendiri berasal dari gabungan dari tiga rangkaian kata bahasa Tidore, yaitu : *To ado re* (*aku telah sampai*).

Disebabkan karena letak geografisnya yang berada di antara pulau Sulawesi dan pulau Irian jaya, Kerajaan Tidore menjadi salah satu kerajaan besar yang berada di kepulauan Maluku sekaligus memiliki posisi yang sangat strategis dan penting dalam dunia perdagangan masa itu. Ditambah lagi bahwa kepulauan Maluku merupakan penghasil rempah-rempah terbesar sehingga di juluki sebagai “*The Spicy Island*.”

Pada saat itu, rempah-rempah menjadi komoditas utama dalam dunia perdagangan, sehingga setiap pedagang maupun bangsa-bangsa yang datang dan bertujuan ke sana akan melewati rute perdagangan tersebut. Para pedagang dari Arab dan India yang beragama Islam dan berperan dalam perdagangan internasional juga banyak yang berdagang dan menetap disana. Berwal dari situ, syiar agama Islam akhirnya sampai dan meluas di Maluku, seperti Ambon, Ternate, dan Tidore. Agama Islam yang masuk ke Kerajaan Tidore dibawa oleh *Ciriliati*, Raja Tidore yang kesembilan. Ciriliati atau Sultan Jamaluddin bersedia masuk Islam berkat dakwah Syekh Mansur dari Arab. Keadaan seperti ini, telah mempengaruhi aspek-aspek kehidupan masyarakatnya, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya.

Kesultanan Tidore merupakan satu dari empat kerajaan besar yang berada di Maluku, tiga lainnya adalah Ternate, Jailolo dan Bacan. Dari keempatnya, hanya Tidore dan Ternate-lah yang memiliki ketahanan politik, ekonomi dan militer. Keduanya pun bersifat ekspansionis, di mana Ternate menguasai wilayah barat Maluku sedangkan Tidore mengarah ke timur yang wilayahnya meliputi Halmahera Tengah, Halmahera Timur, Maba, Patani,

Seram Timur, Rarakit, Werinamatu, Ulisiwa, Kepulauan Raja Empat, Papua daratan dan sekitarnya. Sejak awal berdirinya hingga raja yang ke-4, letak pusat kerajaan Tidore belum bisa dipastikan berada di kota mana. Baru pada era *Jou Kolano Balibunga*, beberapa informasi mengenai pusat kerajaan Tidore mulai sedikit terkuak meski masih dalam perdebatan. Tempat yang menjadi pusat pemerintahan terdahulu Kerajaan Tidore tersebut adalah Balibunga. Namun para pemerhati sejarah berbeda pendapat dalam menentukan di mana sebenarnya letak Balibunga ini. Ada yang mengatakannya di Utara Tidore dan ada pula yang mengatakannya di daerah pedalaman Tidore selatan.



Gambar1.11. *Lambang Kesultanan Tidore.*

Pada tahun 1495 M, saat Kerajaan Tidore dipimpin oleh **Sultan Ciriliati**, letak pusat kerajaan berada di *Gam Tina* dan ketika *Sultan Mansyur* naik tahta pada tahun 1512 M, pusat kerajaan dipindahkan dengan mendirikan perkampungan baru

di *Rum* Tidore Utara. Perpindahan posisi ibu kota baru ini berdekatan langsung dengan kerajaan Ternate dan hanya diapit oleh *Tanjung Mafugogo* dan pulau Maitara. Dengan keadaan laut yang indah dan tenang serta dekat dengan Kerajaan Ternate yang juga merupakan salah satu kerajaan besar, akhirnya lokasi ibukota yang baru ini cepat berkembang dan menjadi pelabuhan yang ramai.

Dalam sejarah kerajaan Tidore, tercatat sudah terjadi beberapa kali perpindahan ibukota karena sebab yang beraneka ragam. Tahun 1600 M misalnya, ibukota dipindahkan oleh Sultan ke 17 kerajaan Tidore yaitu Mole Majimu (Ala ud-din Syah) dari Rum ke Toloa di selatan Tidore. Perpindahan ini disebabkan karena meruncingnya hubungan dengan Ternate, sementara posisi ibukota sangat dekat, sehingga sangat rawan mendapat serangan. Pendapat lain menambahkan bahwa, perpindahan didorong oleh keinginan untuk berdakwah membina komunitas Kolano Toma Banga yang masih menjadi animis agar memeluk Islam. Perpindahan ibu kota yang terakhir adalah ke Limau Timore di masa Sultan ke 33 yaitu Sultan Saif ud-din (1857 – 1865). Limau Timore ini kemudian berganti nama menjadi Soa-Sio hingga saat ini.

Selain Kerajaan Ternate, Kerajaan Tidore juga merupakan salah satu Kerajaan besar di jazirah Maluku Utara yang berhasil mengembangkan kekuasaannya terutama ke wilayah selatan pulau Halmahera dan kawasan Papua bagian barat. Sejak 600 tahun yang lalu Kerajaan ini sudah mempunyai hubungan kekuasaan hingga sampai ke Irian Barat (Pesisir Tanah Papua).

Waktu itu, yang memegang kendali kekuasaan pemerintahan di Kerajaan Tidore adalah Sultan Mansyur, Sultan Tidore yang ke 12.

Menurut (almarhum) Sultan Zainal Abidin “Alting” Syah (Sultan Tidore yang ke 36) yang dinobatkan di Tidore pada 27 Februari 1947 / 26 Rabiulawal 1366 H, bahwa Kerajaan Tidore terdiri dari 2 bagian, yaitu:

1. *Nyili Gam*

- a. Yade Soa-Sio se Sangadji se Gimelaha
- b. Nyili Gamtumdi
- c. Nyili Gamtufkange
- b. Nyili Lofo-Lofo

2. *Nyili Papua (Nyili Gulu-Gulu)*

- a. Kolano Ngaruha (Raja Ampat)
- b. Papua Gam Sio
- c. Mavor Soa Raha

Disebutkan dalam catatan beliau, bahwa bukan Irian Barat melainkan Papua. Kerajaan Tidore juga pernah menaklukkan pulau-pulau di sekitarnya seperti pulau Gebe, pulau Patani, Kepulauan Kei, Kepulauan Tanimbar, Sorong, Gorong, Maba,

Weda dan Papua. Ketika *Sultan Mansyur* yang merupakan Sultan Tidore pernah mengadakan ekspedisi sampai ke pulau Halmahera bagian selatan sampai di “Papua” dan pulau-pulau sekitarnya dicatat dalam sebuah sejarah dengan menggunakan bahasa Tidore. Yang kurang lebih seperti ini.

“Madero toma jaman yuke ia gena e jaman “Jou Kolano Mansyur” Jou Lamo yangu moju giraa2 maga i tige Jou Kolano una Mantri una moi2 lantas wocatu idin te ona: Ni Kolano Jou Ngori ri nyinga magaro ngori totiya gam enareni, tiya Mantri moi2 yo holila se yojaga toma aman se dame madoya.

Ngori totagi tosari daerah ngone majoma karena daerah ngone enareni yokene foli, kembolau gira toma saat enarige ona jou Mantri moi-moi yo marimoi idin enarige, lantas Jou Kolano una rigee wotagi wopane oti isa toma Haleyora (Halmahera) wodae toma rimoi maronga Sisimaake wouci kagee lalu wotagi ine toma Akelamo lantas kagee wotomake jarita yowaje coba Jou Kolano mau hoda ngolo madomong kataa, gena e lebe laha Jou Kolano nowako koliho mote toma lolinga madomong kataa, gena e lebe laha Jou Kolano nowako koliho mote toma lolinga karena kagee seba foloi.

Lantas gaitige Jou Kolano wowako sewolololi ino toma lolinga majiko wotagi ia toma Bobaneigo lantas gaitige womaku tomake se Jou Kolano Ternate, “Jou Kolano Komala” Gira Jou Kolano ona ngamalofo rigee yo maku yamu rai se yo maku sawera sewowaje, Jou Kolano Ternate tagi turus ia toma Kao, Jou Kolano Tidore woterus toma Lolobata, Bicoli, Maba se Patani.

Lantas kagee Jou Kolano wolahi Kapita2 kagee toma Maba, Buli, Bicoli se Patani ona yomote una terus toma Gebe la supaya yohoda kiye mega yoru-ruru, yo bapo ino uwa, toma Gebe madulu se I ronga “Papua”.

Gira2 tigeo ona Kapita moi2 yomote Jou Kolano ine toma Gebe lalu terus toma Salawati, Waigeo, Waigama, Misowol (Misol), terus ine toma Papua Gam Sio, se Mavor Soa-Raha. Raisi karehe Jou Kolano se ona Kapita ona rigee yowako rora tulu toma Salawati, wotia Kapita hamoi se woangkat una wodadi Kolano kagee, hamoi yali toma Waigeo, hamoi yali toma Waigama, se hamoi yali toma Masowol (Misol). Kapita-kapita ngaruha onarigee Jou Kolano woangkat ona yodai Kolano teuna ipai maalu gena e mangale Kolano Ona Ngaruha rigee ngapala Kapita Patani, ona ngaruha yoparentah yodo toma Papua Gam Sio se Mavor Soa Raha”.

Yang jika diterjemahan memiliki arti sebagai berikut :

“Bahwa pada masa dahulu kala, masa kekuasaan Sultan Tidore yang bernama “*Mansyur*“, dimana daerah kekuasaannya belum/tidak luas, maka beliau berfikir, bahwa wilayah Kerajaan di Tidore pada masa itu memang terlalu kecil yakni hanya di pulau Tidore. Beliau menetapkan untuk keluar mencari daerah tambahan. Para Menteri beliau berhadap dan titah beliau, bahwa atas maunya sendiri bertolak nanti dari Tidore untuk maksud yang utama dan kepada Menteri2 beliau tinggalkan kerajaannya untuk dijalankan oleh para Menteri, menjaga agar supaya

berada aman dan damai. Menteri bersatu dan menerima baik yang dititahkan.

Lalu dengan sebuah perahu biduk beliau beserta beberapa pengawal dan pengikutnya bertolak dari pulau Tidore ke Halmahera tengah dan selatan, tiba pada sebuah tempat namanya Sismaake. Di sana Beliau turun dan berjalan kaki ke Akelamo. Di Akelamo beliau mendapat keterangan/ceritera dan mendapat saran dari orang di Akelamo, katanya jika beliau hendak melihat lautan sebelah (lautan di teluk Kao Halmahera), maka sebaiknya beliau melewati jalan di Dodinga, karena di Dodinga sangat dekat dengan lautan sebelah. Sri Sultan Mansyur kembali dari Akelamo menuju Dodinga dan dari Dodinga berjalan kaki ke Bobaneigo.

Di Bobaneigo *Sultan Ternate yang ke XVI* bertemu dengan Sri Sultan Ternate Bernama “*Komala*“, Kedua Sultan tersebut kemudian saling bertanya dan akhirnya menyepakati untuk membagi pulau Halmahera menjadi dua wilayah kekuasaannya, dari Dodinga ke utara menjadi kekuasaan dari Sultan Ternate sedangkan wilayah dari Dodinga ke selatan Sultan Tidore yang menjadi penguasanya.

Pembagian kekuasaan di Halmahera ini menjadikan pulau Halmahera tepatnya di daerah Dodinga menjadi batas wilayah kultur antara kedua Kerajaan ini, bahkan masih bias dilihat dan ditemui sampai sekarang bakas pembagian tersebut, bahkan pembagian daerah dengan cara pembagian yang seperti Sultan Ternate dan Tidore lakukan sampai saat

ini dijadikan dasar oleh Pemerintah untuk menetapkan batas wilayah Kabupaten sejak jaman Indonesia merdeka.

Kemudian dalam perjalanan selanjutnya Sultan Mansyur berkelana menuju kedaerah Lolobata, Bicoli, Maba, Buli dan Pulau Patani. Di sana Sultan Mansyur minta supaya Kapitan-kapitan dari Maba, Buli, Bicoli dan Patani turut dengan beliau ke pulau Gebe untuk menyelidiki pulau-pulau apa yang terapung di belakang pulau Gebe, dalam pengamatan Sultan Mansyur terlihat antara pulau yang satu dengan lain tidak berdekatan. Dalam hal ini yang dimaksudkan oleh Sultan Mansyur saat itu adalah pulau “Papua”.

Kapitan-kapitan yang diajak oleh Sultan Mansyur tersebut akhirnya turut dengan beliau ke Gebe, terus berlanjut ke Salawati, Waigeo, Waigama, Misowol hingga pada daerah yang disebut sebagai Papua Gam Sio (Negeri Sembilan di tanah Papua) dan Mavor Soa Raha Empat Soa/ Klan di Mavor). Sesudah berhasil sampai di pulau Papua tersebut Sultan Mansyur dan Kapitan-kapitannya kembali, singgah di Salawati, Waigeo, Waigama dan Misowol, dan disana Sultan Mansyur mengangkat keempat kapitan tadi menjadi Raja setempat yang bergelar seperti dirinya (Kolano), mereka berempat disebut sebagai “Raja Empat” sebuah raja yang masih dibawah naungan payung kekuasaan Sultan Mansyur Raja dari kerajaan Tidore yang mengangkat mereka menjadi raja, dengan pengertian tersebut, dipahami bahwa mereka berempat menjadi Raja tetapi masih tunduk dan harus mendengar perintah

dari Sultan Tidore. Kekuasaan ke-empat Raja itu sampai di daerah yang disekitarnya yang kemudian disebut Papua Gam Sio dan daerah Mavor Soa-Raha”.

Namun sumber/ referensi tentang pengangkatan raja empat bila dikaji lebih jauh dengan menggunakan Analisa Historiografi, maka masih terdapat beberapa kelemahan, diantaranya :

1. *Tidak dijelaskan tahun berapa atau kurun waktunya kapan dari kejadian yang diuraikan dalam sumber ini.*
2. *Tokoh sentral yang dijelaskan dalam sumber ini adalah “Sultan Mansyur”, namun dalam cerita ini Sultan Mansyur yang mana? Karena dalam silsilah kerajaan Tidore terdapat empat Sultan yang memakai nama Mansyur.*

Terlepas dari itu semua, sejarah telah mencatat bahwa beberapa daerah diluar pulau Tidore, mulai dari Papua barat hingga pulau-pulau di selatan Pasifik pernah menjadi bagian dalam historis kerajaan Tidore.

Berikut ini adalah nama-nama Kolano / Sultan kerajaan Tidore yang diurutkan berdasarkan tahun berkuasa dalam pemerintahannya, penyusunan ini didasarkan dari beberapa sumber baik lokal maupun sumber asing yang menjadi referensi kajian kerajaan Tidore,

Dan silsilahnya adalah sebagai berikut :

1. (..... –) Kolano Sah Jati
2. (..... –) Kolano Bosamuangi
3. (..... –) Kolano Subu
4. (..... –) Kolano Balibunga
5. (..... –) Kolano Duku Madoya
6. (1317 –) Kolano Kie Matiti
7. (..... –) Kolano Sele
8. (..... –) Kolano Metagena
9. (1334 – 1372) Kolano Nur ud-din
10. (1373 – ...?...) Kolano Hasan Syah
11. (1495 – 1512) Sultan Ciriliati *alias* Jamal ud-din
12. (1512 – 1526) Sultan Mansyur
13. (1529 – 1547) Sultan Amir ud-din Iskandar Zulkarnain
14. (1547 – 1569) Sultan Kie Mansyur
15. (1569 – 1586) Sultan Miri Tadu Iskandar Sani Amir ul-Muzlimi, *kawin dengan Boki Randan Gagalo, seorang puteri dari Sultan Babu'llah Datu Syah ibni Sultan Khair ul-Jamil.*
16. (1586 – 1599) Sultan Gapi Maguna alias Sultan Zainal Abidin Siraj ud-din *alias* Kaecil Siraj ul-Arafin, *yang kawin dengan Boki Filola pada tahun 1585 seorang puteri dari sultan*

*Ternate Sultan Said ud-din Barakat Syah ibni al-Marhum
Sultan Babullah Datu Syah*

17. (1599 – 1626) Sultan Mole Majimu *alias* Molemgini Jamal ud-din alias 'Ala ud-din Syah
18. (1626 – 1633) Sultan Ngora Malamo *alias* Sultan 'Ala ud-din ibni Sultan Jamal ud-din
19. (1633 – 1653) Sultan Gorontalo alias Kaicil Sehe
20. (1653 – 1657) Sultan Magiau *alias* Sultan Said ud-din ibni Sultan 'Ala ud-din *alias* Kaicil Saidi
21. (1657 – 1689) Sultan Syaif ud-din *alias* Kaicili Golofino
22. (1689 – 1700) Sultan Hamzah Fakhr ud-din ibni al-Marhum Sultan Syaif ud-din
23. (1700 – 1708) Sultan Abul Falal al-Mansyur
24. (1708 – 1728) Sultan Hasan ud-din
25. (1728 – 1756) Sultan Amir Muhid-din Bi-fallil-ajij *alias* Kaicil Bisalalihi
26. (1756 – 1780) Sultan Jamal ud-din
27. (1780 – 1784) Sultan Patra Alam
28. (1784 – 1797) Sultan Kamal ud-din
29. (1797 – 1805) Sultan Nuku *alias* Sultan Said-ul Jihad Muhammad al-Mabus Amir ud-din Syah *alias* Kaicil Paparangan alias Jou Barakati

30. (1805 – 1810) Sultan Mohammad Zain al-Abidin
31. (1810 – 1822) Sultan Mohammad Tahir (*Wafat : 17 November 1821*)
32. (1822 – 1856) Sultan Akhmad-ul Mansyur (*Dinobatkan 19 April 1822, wafat 11 Juli 1856*)
33. (1857 – 1865) Sultan Akhmad Safi ud-din *alias* Khalifat ul-Mukarram Sayid-din Kaulaini ila Jaabatil Tidore *alias* Jou Kota (*Dinobatkan April 1857*)
34. (1867 – 1894) Sultan Johar Alam (*Dinobatkan Agustus 1867*)
35. (1894 – 1905) Sultan Akhmad Kawi ud-din Alting *alias* Kaicil Syahjoan, (*Dinobatkan Juli 1849*) *Pada masa ini Keraton Tidore dibumihanguskan sebagai sikap protes terhadap kebijakan pihak Belanda yang merugikan Tidore*).
36. (1947 –) Sultan Zain al-Abidin “Alting” Syah (*Dinobatkan di Tidore pada tgl. 27 Perbruari 1947, bertepatan dengan tgl. 26 Rabiulawal 1366-H*).
37. (Sekarang) Sultan Djafar “Dano Yunus” Syah, (*Dinobatkan ————— hingga sekarang*).

Masa Kejayaan Kerajaan Tidore

Kejayaan Kesultanan Tidore terjadi pada masa pemerintahan Sultan Nuku yang pada masa kekuasaannya antara tahun 1797 – 1805, Sultan Nuku memiliki nama lain

seperti Sultan Said-ul Jihad Muhammad al-Mabus Amir ud-din Syah alias Kaicil Paparangan yang oleh kawula Tidore dikenal dengan sebutan Jou Barakati. Pada masa pemerintahannya wilayah Kerajaan Tidore mencakup kawasan yang cukup luas bahkan mencapai Tanah Papua di selatan samudra pasifik. Wilayah sekitar pulau Tidore yang menjadi bagian wilayahnya adalah Papua, gugusan pulau-pulau Raja Ampat dan pulau Seram Timur. Menurut beberapa tulisan di berbagai situs internet, dituliskan bahwa kekuasaan Tidore sampai ke beberapa kepulauan di pasifik selatan, diantaranya; Mikronesia, Melanesia, kepulauan Solomon, kepulauan Marianas, kepulauan Marshal, Ngulu, Fiji, Vanuatu dan kepulauan Kapita Gamrange. Disebutkan pula bahwa hingga hari ini beberapa pulau atau kota masih menggunakan identitas nama daerah dengan embel-embel Nuku, antara lain; kepulauan Nuku Lae-lae, Nuku Alova, Nuku Fetau, Nuku Haifa, Nuku Maboro, Nuku Wange, Nuku Nau, Nuku Oro dan Nuku Nono.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut di atas tidaklah mudah. Perlu penelitian tersendiri. Hal ini juga dibantah oleh salah satu Dosen Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Khairun Ternate yang tidak mau menyebutkan namanya. Lebih lanjut dikatakan bahwa “*agak mustahil*” kekuasaan Sultan Nuku bisa sampai ke ke kawasan pasific.

Alasan bantahan terhadap hal ini didasarkan pada argumennya bahwa :

1. Pasifik Selatan terlalu jauh dari Tidore.

2. Tidak adanya pengakuan dari penduduk setempat di Pasific Selatan bahwa mereka mempunyai kaitan sejarah dengan Sultan Nuku.
3. Tidak ada bukti-bukti dan catatan tertulis tentang kapan dan bagaimana Sultan Nuku datang dan memberi nama pulau-pulau tersebut.
4. Masyarakat Pasific Selatan saat ini mayoritas beragama Kristen. Jika memang kekuasaan Sultan Tidore telah sampai ke sana tentu ada jejak-jejak Islam ditemukan di sana.
5. Sultan Nuku hidup ketika penjajah Eropa sudah berdatangan ke wilayah Timur dan wilayah Pasific Selatan diduduki oleh mereka.
6. Masa hidup Sultan Nuku lebih banyak digunakan untuk berjuang melawan Belanda.
7. Adanya nama Nuku di depan nama kota atau tempat di sana bukanlah bukti yang bermakna kuat karena bisa saja kata “Nuku” di sana mempunyai arti yang berbeda.

Argumentasi ini sangat beralasan, karena tidak ditemukan catatan sejarah tempat-tempat dimaksud yang menjelaskan bahwa mereka mempunyai kaitan sejarah dengan Kesultanan Tidore dengan Sultan Nuku-nya. Juga tidak ditemukan jejak-jejak hadirnya orang-orang Tidore di daerah ini.

Walaupun demikian, terlepas dari “perdebatan” permasalahan ini, fakta sejarah mencatat bahwa di masa Sultan Nuku yang hanya berkuasa sekitar delapan tahun inilah, Kerajaan Tidore mencapai masa kegemilangan dan menjadi kerajaan besar yang wilayahnya paling luas dan disegani di seluruh kawasan itu, termasuk oleh kolonial Eropa.

Struktur Pemerintahan di Kerajaan Tidore

Sistem kesultanan Tidore pada masa awal merupakan sistem yang masih sederhana, karena kerajaan Tidore pada awalnya merupakan kumpulan-kumpulan *soa-soa* atau kelompok-kelompok masyarakat yang mendiami suatu wilayah yang berkumpul di bawah satu pimpinan dan kemudian diangkat menjadi sultan, sehingga semboyan filosofis kesultanan pada masa itu yaitu *Kolano se i rakyat* yang artinya Sultan dengan Rakyatnya. Kemudian diubah menjadi *Kolano Se i Bobato Dunia* (adat) *Se i Bobato Akherat* (Agama) *Se i Rakyat* pada masa Sultan ke delapan.

Dan pada akhirnya dari sejarrah terbentuknya kerajaan Tidore ini menjadi kerajaan yang memiliki sistem pemerintahan yang sangat unik, dibandingkan dengan sistem kerajaan Islam lainnya yang pernah ada di Nusantara. Kerajaan ini menganut sistem pemerintahan yang sangat Demokrasi serta Monarki secara bersamaan dalam suatu sistem pemerintahan kesultanan.

Seperti yang sudah diutarakan sebelumnya bahwa sistem pemerintahan Tidore sangat demokratis, hal ini ditunjukkan

saat dalam pengangkatan seorang sultan muda (putra mahkota) bukan diambil dari putra raja itu saja akan tetapi segenap keturunan-keturunan kerajaan lainya yang kemudian diseleksi dan selanjutnya dipilih oleh bobato-bobato yang disertai tugasnya masing-masing. Sistem pemerintahan kesultanan Tidore mulai berkembang dengan baik adalah pada masa kesultanan Nuku ada tambahan bobato yaitu dewan wazir, dan adanya sistem pelimpahan kewenangan yang cukup jelas dan memberikan otonomi khusus kepada setiap daerah kecamatannya. Olehnya dalam sistem pemerintahan kesultanan Nuku membagi 3 wilayah kekuasaannya yaitu pemerintahan Ibukota Kesultanan, Pemerintahan dalam pulau Tidore.

Sistem pemerintahan ketika Tidore mencapai masa kejayaan di era Sultan Nuku telah ditata dengan baik. Saat itu, Sultan (Kolano) dibantu oleh suatu Dewan Wazir, dalam bahasa Tidore disebut Syaraa, adat se Nakudi. Dewan ini dipimpin oleh Sultan dan pelaksana tugasnya diserahkan kepada Joujau (Perdana Menteri). Anggota Dewan wazir terdiri dari Bobato Pehak Raha (Bobato empat pihak) dan wakil dari wilayah kekuasaan. Bobato ini bertugas untuk mengatur dan melaksanakan keputusan Dewan Wazir.

Sistem dan Struktur Pemerintahan yang dijalankan di Kerajaan Tidore pada masa lampau cukup mapan dan berjalan dengan baik. Struktur tertinggi kekuasaan berada di tangan Sultan. Menariknya, di keempat Kerajaan di Jazirah Maluku Utara yang dikenal dengan "*Moloku Kie Raha*" yaitu; kerajaan Jailolo, kerajaan Bacan, kerajaan Ternate dan termasuk di kerajaan Tidore tidak mengenal sistem putra mahkota yang

dijadikan sebagai penerus kekuasaan ketika sang Raja meninggal sebagaimana sistem regenerasi kerajaan-kerajaan lainnya di kawasan Nusantara. Penerus kerajaan Tidore dipilih dengan model Seleksi, proses seleksi seseorang untuk dipilih menjadi Sultan dilakukan melalui mekanisme seleksi calon-calon yang diajukan dari pihak Dano-dano Folaraha (wakil-wakil marga dari Folaraha), yang terdiri dari Fola Yade, Fola Ake Sahu, Fola Rum dan Fola Bagus. Dari nama-nama ini, kemudian dipilih satu di antaranya untuk menjadi Sultan Tidore tentunya dengan pemenuhan sarat-sarat yang telah ditentukan oleh hokum adat.

Selanjutnya mengenai Struktur Pemerintahan Kerajaan Tidore sejak Sultan Tidore yang pertama yaitu Sultan Syah Jati alias Mohammad Nakel baru kemudian mengalami perubahan-perubahan bentuk pemerintahan di jaman Sultan Ciriliati, dalam beberapa sumber menyebutkan Sultan ini yang pertama kali mulai masuk Islam, mungkin karena pengaruh masuknya agama Islam inilah yang menyebabkan perlunya perubahan sistem kekuasaan dari sebelumnya dan kemudian disempurnakan pada jaman Sultan Syafi ud-din yang bergelar Khalifat ul-mukarram Sayid-din Kaulaini ila Jaabatil Tidore, perubahan sistem tersebut dapat diuraikan sebagai berikut : *Kolano Sei Bobato Pehak Raha*, artinya : Sultan dan 4 Kementeriannya dengan pegawai, yang terdiri dari :

1. *Pehak Bobato*, Urusan Pemerintahan dikepalai oleh Jogugu. Anggota2nya :
 - a. Hukum
 - b. Sangadji

- c. Gimalaha
- d. Fomanyira

2. *Pehak Kompania*, Urusan Pertahanan dikepalai oleh Kapita2/Mayor :

- a. Leitenan
- b. Alfiris
- c. Jodati
- d. Serjanti
- e. Kapita Kie
- f. Jou Mayor, dan
- g. Kapita Ngofa

3. *Pehak Jurutulis*, Urusan Tata-Usaha dikepalai oleh Tullamo (Sekneg). Anggota2nya :

- a. Jurutulis Loaloa
- b. Beberapa Menteri Dalam, yaitu:
 - 1). Sadaha, (Kepala Rumah Tangga Kerajaan)
 - 2). Sowohi Kiye, (Protokoler Kerajaan Bidang Kerohanian),
 - 3). Sowohi Cina, (Protokoler Khusus Urusan Orang Cina),

4). Sahabandar, (Urusan Administrasi Pelayaran).

5). Fomanyira Ngare, (Public Relation Kerajaan)

4. *Pehak Lebee*, urusan Agama/Syari'ah dikepalai oleh seorang Kadhi. Anggota2nya :

a. Imam.

b. Khotib.

c. Modin.

Selain struktur tersebut di atas masih terdapat Jabatan lain yang membantu menjalankan tugas pemerintahan, seperti Gonone yang membidangi intelijen dan Surang Oli yang membidangi urusan propaganda.

Masuknya Bangsa Eropa ke Kerajaan Tidore

Sultan kedua Tidore yaitu Almansur yang naik takhta pada tahun 1512 kemudian ia menetapkan Mareku sebagai pusat pemerintahan. Almansur adalah Sultan yang pertama menerima kedatangan bangsa Spanyol di Tidore, Spanyol tiba di Tidore pada tanggal 8 November 1521, turut serta dalam rombongan kapal armada Magellan, Pigafetta, seorang etnolog dan sejarawan Italia. Kedatangan Spanyol ke Tidore adalah untuk mengajak kerajaan Tidore beraliansi secara strategis sebagai jawaban atas aliansi yang dibangun oleh Ternate dan Portugis sebelumnya.

Untuk mendukung kemajuan perdagangan di Tidore dengan tangan terbuka, ditambah lagi melihat kerajaan Ternate yang terlebih dahulu bekerja sama dengan Bangsa Portugis maka tidak ada kecurigaan sama sekali akan adanya tindakan buruk dari bangsa Spanyol mengakibatkan Sultan Almansur memberikan tempat spesial bagi Spanyol untuk melakukan perdagangan di Tidore. Waktu awal datang bangsa Spanyol menukar sepotong kain merah dengan cengkih satu bahar (550 pon), 50 pasang gunting dengan satu bokor cengkih, tiga buah gong dengan dua bokor cengkih. Dengan cepat cengkih di seluruh Tidore ludes, sehingga memaksa sultan Almansur harus mencari rempah-rempah di tempat lain seperti Moti, Makian dan Bacan. Demikianlah awal mula kerjasama antara Tidore dan Spanyol, hubungan perdaganganpun semakin berkembang, tidak hanya di bidang perekonomian tetapi juga sampai bidang militer.

Pada tahun 1524 mulai terjadi persaingan ekonomi berupa penguasaan wilayah perdagangan rempah-rempah antara pasukan kerajaan Ternate dan Tidore, saat itu pasukan gabungan Ternate dan Portugis yang berjumlah 600 orang menyerbu kerajaan Tidore dan berhasil masuk ke ibukota Mareku. Hal yang menarik adalah dalam penyerangan tersebut meskipun serangan gabungan antara Ternate dan Portugis berhasil mencapai ibukota Tidore, mereka tidak dapat menguasai Tidore sepenuhnya dan berhasil dipukul mundur beberapa waktu kemudian. Berselang dua tahun berikutnya pada tahun 1526 Sultan Almansur wafat tanpa meninggalkan pengganti. Kegagalan serangan dan perselisihan antara Ternate dengan bantuan dari Portugis dan Tidore dengan bantuan dari Spanyol berujung dilakukannya

perjanjian Zaragosa antara Raja Portugis, John III dan Raja Spanyol, Charles V pada tahun 1529. Dengan isi bahwa Portugis harus mengganti imbalan sebesar 350.000 ducats pada Spanyol maka Charles V sebagai raja Spanyol kala itu bersedia melepaskan klaimnya atas Maluku, namun setelah disepakatinya perjanjian tersebut tidak serta merta membuat seluruh armada Spanyol keluar dari Maluku.

Putra bungsu Sultan Almansur, Amiruddin Iskandar Zulkarnaen, dilantik sebagai Sultan Tidore Pada tahun yang sama saat Perjanjian Zaragosa disepakati, dengan dibantu oleh Kaicil Rade seorang bangsawan tinggi Kesultanan Tidore sebagai Mangkubumi. Dimasanya terjadi *tribulasi*, pada saat Gubernur Portugis di Ternate, Antonio Galvao, memutuskan untuk kembali meyerang Tidore, hal ini tentunya mengkhianati perjanjian Zaragosa yang telah disepakati oleh kedua raja Portugis maupun Spanyol. Dalam penyerangan itu pasukan Portugis mendapatkan kemenangan atas Tidore pada tanggal 21 Desember 1536 dan mengakibatkan Tidore harus menjual seluruh rempah-rempahnya kepada Portugis dengan imbalan Portugis akan meninggalkan Tidore.

Sultan Amiruddin Iskandar Zulkarnaen wafat pada tahun 1547 dan digantikan oleh Sultan Saifuddin, dalam perjalanan tongkat estafet kesultanan berikutnya berturut-turut Kie Mansur, Iskandar Gani dan Gapi Baguna hingga tahun 1599. Pada era tersebut tidak terjadi sesuatu yang luar biasa di Kesultanan Tidore, kecuali pada tahun 1578 Portugis membangun Benteng “*Dos Reis Mogos*” di Tidore. Namun demikian benteng tersebut tidak mencampuri urusan internal kesultanan. Kejadian penting

lainnya yang patut dicatat adalah terjadinya unifikasi kekuatan Portugis dan Spanyol di Maluku di bawah pimpinan Raja Spanyol pada tahun 1580. Sehingga demikian semua benteng Portugis dan Spanyol di seluruh kepulauan Maluku dapat digunakan oleh kedua belah pihak. Unifikasi ini sebenarnya didahului oleh kejadian sebelumnya pada tanggal 26 Desember 1575, yaitu Sultan Babullah, Sultan Ternate terbesar berhasil menaklukkan benteng Portugis-Gamlamo di Ternate oleh. Menyerahnya Gubernur Portugis terakhir di Maluku, Nuno Pereira de Lacerda, menunjukkan berakhirnya kekuasaan Portugis di Nusantara. Kondisi yang lemah dan terdesak inilah yang mengakibatkan mau tidak mau armada perang Portugis harus membentuk persekutuan dengan Spanyol di kepulauan Maluku.

Pada tanggal 26 Maret 1606, Don Pedro da Cunha Gubernur Jenderal Spanyol di Manila, mulai membaca gerak-gerik VOC-Belanda yang mencoba memperluas wilayah dagangnya hingga Maluku. Mulai merasa terancam dengan kehadiran armada dagang VOC-Belanda di Maluku, ditambah bahwa VOC-Belanda mulai menjalin kerjasama dengan Kesultanan Ternate untuk memperkuat posisinya dalam kancah perdagangan di Maluku maka Don Pedro da Cunha memimpin pasukan untuk menggempur Benteng Gamlamo tempat yang menjadi basis kekuatan VOC-Belanda di Ternate, penyerangan yang dilakukan Spanyol tentu saja dengan bantuan dari Tidore bekas kerajaan yang pernah menjadi aliansinya, pada waktu itu dipimpin oleh Sultan Mole Majimu kerajaan Tidore dengan senang hati membantu Spanyol dalam mengusir VOC-Belanda di Ternate. Spanyol berhasil menguasai Benteng Gamlamo di

Ternate, tetapi tidak lama setelah itu VOC Belanda berhasil pula membuat benteng yang kemudian disebut sebagai “*Fort Oranje*” pada tahun 1607 di sebelah timur laut Benteng Gamlamo serta membangun garis demarkasi militer dengan Spanyol. Dan sebagai Gubernur Belanda pertama di Kepulauan Maluku diangkatlah Paulus van Carden.

pada tahun 1663 Gubernur Jenderal Spanyol yang berada Manila, Manrique de Lara, membutuhkan semua kekuatan untuk mempertahankan Manila dari serangan bajak laut Cina, Coxeng. secara mengejutkan Spanyol bahkan menarik seluruh kekuatannya dari Ternate, Tidore dan Siau yang berada di Sulawesi Utara ke Filipina. Gubernur Spanyol di Maluku, Don Francisco de Atienza Ibanez, Nampak juga meninggalkan kepulauan Maluku pada bulan Juni 1663. Maka berakhirilah kekuasaan Spanyol di Kepulauan Maluku. Ketika itu kerajaan Tidore diperintah oleh Sultan Tidore ke 12 yaitu Sultan Saifudin, Dengan tiadanya dukungan militer dari Spanyol, otomatis kekuatan Tidore melemah dan akhirnya VOC-Belanda menjadi kekuatan militer terbesar satu-satunya di kepulauan yang kaya dengan rempah-rempah itu.

Menghindari kerusakan dan kerugian yang lebih besar pada akhirnya Sultan Saifudin melakukan perjanjian dengan Laksamana Speelman dari VOC-Belanda pada tanggal 13 Maret 1667 yang mana isinya adalah :

1. VOC mengakui hak-hak dan kedaulatan Kesultanan Tidore atas Kepulauan Raja Empat dan Papua daratan

2. Kesultanan Tidore memberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah dalam wilayahnya kepada VOC.

Batavia kemudian mengeluarkan Ordinansi untuk Tidore yang membatasi produksi cengkeh dan pala hanya pada Kepulauan Banda dan Ambon. Di luar wilayah ini semua pohon rempah diperintahkan untuk dibasmi. Pohon-pohon rempah yang ‘berlebih’ ditebang untuk mengurangi produksi rempah sampai seperempat dari masa sebelum VOC-Belanda memegang kendali perdagangan atas Maluku.

Apa yang dilakukan oleh VOC-Belanda tersebut, yaitu memusnahkan atau eradikasi pohon-pohon cengkih di Kepulauan Maluku, disebut sebagai “*Hongi Tochten*”. “*Hongi Tochten*” dilakukan akibat banyaknya penyelundup yang memasarkan cengkih ke Eropa sehingga harga cengkih menjadi turun drastis. “*Hongi Tochten*” ini sebenarnya sudah pernah diterapkan pada Kesultanan Ternate pada tahun 1652 kemudian disusul oleh Tidore beberapa waktu berikutnya setelah Tidore mengakui kekuatan ekonomi-militer Belanda di Maluku. Dengan memberikan imbalan tertentu (*recognitie penningen*) pada kerajaan oleh VOC akibat operasi ini.

Kesultanan Tidore semakin melemah sepeninggal Sultan Saifudin. Banyaknya pertentangan dan pemberontakan di kalangan istana, dengan kondisi kerajaan yang lemah menyebabkan Belanda dengan begitu mudah mencaplok sebagian besar wilayah kerajaan Tidore. Puncak dari kekacauan

ini terjadi hingga pemerintahan Sultan Kamaluddin (1784-1797), dimana sejarawan mencatat bahwa Sultan Kamaluddin memiliki perangai yang kurang baik sehingga mengakibatkan terjadinya banyak kerusuhan baik diluar dan didalam istana. Namun demikian lambat laun situasi mulai berubah ketika Tidore memiliki Sultan Nuku, seorang Sultan yang akan menjadikan kerajaan Tidore bangkit dari keterpurukan dan menjadikan kerajaan Tidore menjadi kerajaan terbesar di Maluku.

Pada tahun 1780, Sultan Nuku membuat gebrakan dengan memproklamasikan dirinya sebagai Sultan dari kerajaan Tidore dan menyatakan bahwa kesultanan-nya sebagai wilayah yang merdeka lepas dari kekuasaan VOC-Belanda. Kesultanan Tidore yang dimaksudkan olehnya meliputi semua wilayah Tidore yang utuh yaitu : Halmahera Tengah dan Timur, Makian, Kayoa, Kepulauan Raja Ampat, Papua Daratan, Seram Timur, Kepulauan Keffing, Geser, Seram Laut, Kepulauan Garang, Watubela dan Tor.

Penghujung abad ke-18 dan permulaan abad ke-19 adalah era keemasan Tidore di bawah Nuku. Setelah berjuang beberapa tahun, Sultan Nuku memperoleh kemenangan yang gemilang dengan berhasil membebaskan Kesultanan Tidore dari kekuasaan Belanda dan mengembalikan pamornya. Pada titik ini bahkan kebesaran Sultan Nuku dapat dibandingkan dengan keagungan Sultan Babullah yang telah mengusir Portugis dari Ternate.

Kemenangan-kemenangan yang diraih Sultan Nuku atas VOC-Belanda juga tidak lepas dari kondisi politik yang terjadi di Eropa terlebih negeri Belanda. Pada tahun 1794,

Napoleon Bonaparte menyerbu Belanda yang mengakibatkan Raja Willem V mengungsi ke Inggris. Selama menetap di Inggris, ia mengeluarkan instruksi ke seluruh Gubernur Jenderal daerah jajahannya agar menyerahkan daerahnya ke Inggris supaya tidak jatuh ke tangan Perancis. Tahun 1796, Inggris menduduki daerah-daerah yang dikuasai oleh Belanda. Ditambah dengan bubarnya VOC pada Desember 1799, maka hal ini semakin memperlemah kedudukan Belanda di Kepulauan Maluku dan hal inilah yang dimanfaatkan oleh Sultan Nuku untuk merebut kembali kekuasaan yang diambil oleh VOC-Belanda.

Pada tanggal 14 November 1805, akhirnya Tidore kehilangan seorang sultan yang pada masa hidupnya dikenal sebagai “*Jou Barakati*” atau di kalangan orang Inggris disapa dengan “*Lord of Forrtune*”. Wafatnya Sultan Nuku dalam usia 67 tahun tidak hanya membawa kesedihan bagi rakyat Maluku, tetapi juga memberikan kedukaan bagi rakyat Tobelo, Galela dan Lolada yang telah bergabung ke dalam barisan Nuku sejak awal perjuangannya.

Hal yang diingat oleh rakyat Maluku, Tobelo, Galela dan Lolada tentang Sultan Nuku adalah sifatnya yang memiliki kecerdasan dan karisma yang kuat, Sultan Nuku juga terkenal akan keberanian dan kekuatan batinnya. Sultan Nuku-lah seorang Sultan dari kerajaan Tidore yang berhasil mentransformasi masa lalu Maluku yang kelam ke dalam era baru yang didalamnya terdapat kemauan dan kemampuan untuk bangkit dan melepaskan diri dari segala bentuk keterikatan, ketidakbebasan dan penindasan.

KERAJAAN CIREBON

Sejarah Berdirinya Kerajaan Cirebon

Cirebon adalah salah satu kota besar yang ada di provinsi Jawa Barat. Cirebon mempunyai luas wilayah \pm 3735,8 hektar dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Menurut cerita yang berkembang Cirebon berasal dari kata caruban berarti campuran. Hal ini didasari oleh mayoritas masyarakat Cirebon dulunya merupakan campuran dari kelompok pedagang pribumi dengan keluarga-keluarga Cina yang telah menganut Islam. Menurut buku Sadjarah Banten, satu rombongan keluarga Cina pada awalnya mendarat dan menetap di Gresik. Di Gresik mereka kemudian masuk Islam. Pada saat itu di Gresik dakwah Islam disebarkan oleh sunan Gresik. Dalam rombongan keluarga Cina tersebut terdapat seorang yang paling terkemuka ialah Cu-cu yang juga disebut Arya Sumangsang atau Prabu Anom. Keluarga Cu-cu ternyata dapat mencapai kedudukan dan kehormatan tinggi di Kesultanan Demak sehingga mendapat

kepercayaan pemerintah untuk mendirikan perkampungan di daerah barat. Atas kesungguhan dan ketekunan mereka bekerja, maka berdirilah sebuah perkampungan yang disebut Cirebon.

Akan tetapi, dalam satu versi lain nama Cirebon berasal dari kata *cai* yang berarti air dan *rebon* yang berarti udang. Jika diartikan keseluruhan Cirebon adalah air udang. Pengambilan nama tersebut mempunyai sejarah tentang mayoritas penduduk asli Caruban yang berprofesi sebagai petani tambak dan penghasil ataupun pedagang terasi juga udang. Dalam perkembangannya kita ketahui bahwa penduduk asli Caruban berprofesi sebagai nelayan dan pedagang, tetapi seiring waktu mereka mulai beralih profesi sebagai pembuat petis yang bahannya berasal dari udang rebon yang dicampur dengan air. Dengan demikian, daerah Caruban berganti nama menjadi padukuhan Cirebon yang kemudian kota ini berkembang pesat dan menjadi salah satu Bandar dagang yang terkenal di Jawa Barat, di kota Cirebon ini pada masa lalu juga berdiri kesultanan Cirebon yang merupakan kesultanan Islam terbesar selain kesultanan Banten.

Sejarah berdirinya kesultanan Cirebon sebagian para ahli sejarah ada yang berpendapat bahwa kesultanan Cirebon berdiri pada tahun 1479 yang didirikan oleh Syarif Hidayatullah atau yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Pada awalnya Cirebon adalah daerah hutan yang berpotensi menjadi kota besar. Sunan Gunung Jati yang melihat bahwa daerah tersebut sangat berpotensi untuk menjadi sebuah daerah yang maju dan besar kemudian memerintahkan Walangsungsang yang merupakan murid kesayangannya untuk membuat padukuhan di daerah

tersebut. Walangsungsang dalam cerita-cerita lain kemudian dikenal dengan Ki Cakrabuana. Penunjukan Ki Cakrabuana bukan tanpa alasan, Syekh Idhofi memilihnya karena beliau merupakan anak dari Prabu Siliwangi yang sedang menjabat sebagai Raja Sunda Padjajaran.

Ki Cakrabuana memberi nama daerahnya menjadi Tegal Alang-alang setelah mengubah daerah hutan itu menjadi sebuah padukuhan kecil, lambat laun Tegal Alang-alang berubah nama menjadi padukuhan Caruban. Selain itu didukung letak strategis padukuhan Caruban yang berada di daerah pesisir membuat daerah itu banyak disinggahi oleh para pedagang dan Caruban sendiri sebagai sentral penghasil udang dan terasi hingga akhirnya para pendatang menetap di Caruban. Padukuhan Caruban yang tadinya sepi berubah menjadi padukuhan yang ramai, hal itu juga menyebabkan agama Islam berkembang pesat di Caruban, setelah bertahun-tahun Ki Cakrabuana menjadi kepala Padukuhan atau Kuwu Caruban, Ki Cakrabuana akhirnya memberi jabatan kepala Padukuhan pada anak Rara Santang sekaligus menantunya yang bernama Syarif Hidayatullah. Saat itu Syarif Hidayatullah baru saja kembali dari Mesir mengikuti ayahnya seorang Raja Mesir, namun setelah ayahnya wafat beliau kembali ke Caruban. Setelah menjabat sebagai kepala padukuhan Caruban, Syarif Hidayatullah membentuk pemerintahan Cirebon yang berbentuk kesultanan. Dalam perkembangannya, Cirebon selalu menjalin hubungan erat dengan Demak, terutama dalam bidang perdagangan.

Perkembangan Ajaran Islam di Cirebon

Para Ulama memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di Indonesia, begitu pula yang terjadi dalam penyebaran Islam di Cirebon. Ulama atau Syekh yang terkenal menyebarkan Islam pertama kali di Cirebon salah satunya adalah Syekh Quro. Dalam sebuah cerita Syekh Qura datang ke Kerajaan Sunda Padjajaran tahun 1418, yang kemudian beliau mendirikan pesantren di Karawang.

Kedatangan Syekh Qura mendapat sambutan yang baik dari penduduk daerah Sunda Padjajaran yang saat itu masih menganut kasta dalam lapisan sosialnya. Syekh Qura mengajarkan Islam yang tidak menganut sistem kasta dalam hubungan sosial. Hingga pada suatu saat Raja dari kerajaan Padjajaran yaitu Prabu Siliwangi jatuh cinta dengan santriwati Nyi Mas Subang Rancang putri dari Ki Gede Tapa dari Singapura yang sedang menuntut agama Islam di pesantren Syekh Qura. Nyi Mas Subang Rancang kemudian menikah dengan Prabu Siliwangi dengan cara Islam, walau pada akhirnya Prabu Siliwangi kembali ke agama nenek moyang setelah Nyi Subang meninggal dunia.

Penyebaran agama Islam di Cirebon juga tidak dapat dilepaskan dari nama Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah adalah raja pertama yang memerintah kesultanan Cirebon, pada masa pemerintahannya beliau banyak menaklukkan tempat untuk menyebarkan agama Islam. Beliau juga banyak mengelana ke seluruh pelosok Jawa untuk mengajarkan agama Islam sesuai dengan cita-citanya, menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Pada saat pemerintahannya pula beliau membentuk Dewan

Wali Sembilan atau yang kemudian dikenal dengan Walisanga. Syarif Hidayatullah juga ikut andil dalam pengadilan Syekh Siti Jenar di masjid Agung Sang Ciptarasa Cirebon. Syekh Siti Jenar saat itu dianggap sesat karena mengajarkan ajaran tasawuf Hulul yang belum pantas untuk diajarkan dan disebarakan kepada orang awam.

Munculnya kesultanan Cirebon sebagai pusat kegiatan ekonomi dan agama Islam di Jawa Barat telah menyurutkan Kerajaan Pajajaran yang Hindu. Namun, Kerajaan Pajajaran tidak pernah berkonfrontasi dengan Cirebon, karena masih ada hubungan kekerabatan di antara keduanya.

Perkembangan dan Masa Keemasan

Bukan kesultanan atau kerajaan jika tidak menaklukkan suatu daerah dan menjadikan daerah itu masuk dalam daerah kekuasaan. Begitu pula dengan apa yang dilakukan oleh kesultanan Cirebon. Pada awal pemerintahan Syarif Hidayatullah kesultanan Cirebon sering menaklukkan daerah-daerah yang ada di Pulau Jawa. Tujuan dari penaklukan yang dilakukan oleh Syarif Hidayatullah bukan semata-mata untuk memperluas daerah kesultanan Cirebon, tapi juga untuk menyebarkan agama Islam. Daerah pertama yang berhasil ditaklukkan oleh kesultanan Cirebon adalah penaklukan atas Banten pada tahun 1525, kemudian Sunda Kelapa pada tahun 1527 yang dipimpin oleh panglima perang Fatahillah. Penaklukan Banten dan Sunda Kelapa merupakan penaklukan kerjasama antara dua kerajaan yaitu Kerajaan Demak dan kesultanan Cirebon yang

bertujuan untuk mengusir Portugis dari tanah Sunda Kelapa. Sunda Kelapa setelah dikuasai oleh Syarif Hidayatullah diganti nama dari Sunda Kelapa menjadi Jayakarta dan kemudian beliau menjadikan Fatahillah sebagai Bupati Jayakarta.

Selain ketiga daerah tersebut penaklukan diperluas di daerah Rajagaluh pada tahun 1528, Rajagaluh merupakan daerah kekuasaan kerajaan Galuh. Pada mulanya, padukuhan Cirebon yang belum menjadi sebuah kesultanan memberikan upeti berupa petis kepada Rajagaluh dalam rangka tunduk pada penguasa Galuh. Namun hal itu berhenti setelah Syarif Hidayatullah menjadi Raja di Kesultanan Cirebon, pemberian upeti tersebut diberhentikan sebagai wujud penolakan dan mengukuhkan diri sebagai kesultanan yang merdeka lepas dari bayang-bayang kerajaan Galuh. Sikap demikian akhirnya memicu peperangan antara Kerajaan Galuh dan Kesultanan Cirebon, dalam perang tersebut dimenangkan oleh Kesultanan Cirebon yang ditandai dengan masuknya para pemimpin Rajagaluh ke Islam.

Penaklukan lainnya adalah penaklukan Talaga yang terjadi pada tahun 1529. Akan tetapi, sebagian ahli sejarah tidak sependapat bahwa hal ini dinamakan penaklukan karena sebenarnya hanya terjadi kesalahpahaman di antara Prabu Pucuk Umum Mantri selaku penguasa Talaga dan utusan Demak yang diutus oleh Syarif Hidayatullah. Saat itu Kerajaan Demak sudah menjalin hubungan diplomasi dengan Kesultanan Cirebon. Berawal dari utusan Demak yang bersuku Jawa kurang memahami pertanyaan dari Raja Talaga, akhirnya utusan tersebut salah dalam menjawab pertanyaan dari Raja Talaga hingga

membuat marah. Namun, kemarahan karena kesalahpahaman tersebut bisa diredam oleh Syarif Hidayatullah dan Kesultanan Cirebon disambut baik bahkan Raja Talaga akhirnya memeluk agama Islam.

Pergolakan dan Runtuhnya Kerajaan

Runtuhnya Kesultanan Cirebon terjadi pada tahun 1666. Penyebab keruntuhan tersebut dilatarbelakangi atas fitnah yang dilakukan oleh mertua Panembahan Ratu II yang tak lain adalah penguasa Mataram Sultan Amangkurat I. berawal dari Sultan Amangkurat I yang memanggil Panembahan Ratu II untuk datang ke keraton Kartasura. Panembahan Ratu II datang dengan ditemani oleh kedua putranya yang bernama Pangeran Martawijaya dan Pangeran Kartawijaya memenuhi panggilan dari koleganya yang juga mertuanya tanpa perasaan curiga, namun setiba di Kartasura Sultan Amangkurat I memfitnah beliau, Sultan Amangkurat I mengatakan bahwa Kesultanan Cirebon telah bersekongkol dengan Banten untuk menjatuhkan kekuasaan dirinya di Mataram. Tuduhan itu terjadi didasari oleh terbunuhnya selir kesayangan Sultan Amangkurat I yaitu Ratu Malang.

Atas dasar itu Sultan Amangkurat I dengan licik tega menangkap dan mengasingkan Panembahan Ratu II, Panembahan Ratu II kemudian diasingkan di sebuah rumah yang berada di komplek Keraton Kertasura. Tepat setahun diasingkan di komplek Keraton Kertasura Pada tahun 1667 Panembahan Ratu II akhirnya wafat. Beliau dimakamkan di bukit Girilaya.

Selama kekosongan pemerintahan karena Panembahan Ratu II diasingkan, Mataram mengambil alih kekuasaan atas Kesultanan dengan menempatkan Tumenggung Martadipa.

Pengambilalihan kekuasaan sepihak atas Cirebon dengan cara yang licik oleh Kerajaan Mataram memancing amarah dari penguasa Banten saat itu Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa sangat marah terhadap perlakuan Raja Mataram, Sultan Amangkurat I kepada Panembahan Ratu II yang dianggap telah mengkhianati menantunya sendiri. Kemudian Sultan Agung Tirtayasa mengajak para pejuang Madura pengikut Trunajaya untuk menyerang Keraton Cirebon yang saat itu dikuasai oleh Mataram untuk membebaskan putra Panembahan Ratu II. Setelah pembebasan itu terjadi, Tumenggung Martadipa diusir keluar dari Keraton Cirebon. Putera Panembahan Ratu II yang bernama Wangsekerta yang masih berada di Cirebon kemudian diamankan ke Banten mengingat masih terbukanya peluang untuk Mataram melancarkan serangan balasan. Sedangkan kedua putera Panembahan Ratu II yang diasingkan selama sepuluh tahun akhirnya dibebaskan dari Mataram.

Setelah kebebasan yang didapatkan para putra Panembahan Ratu II, mereka dibawa ke Banten guna bertemu oleh Sultan Ageng Tirtayasa. Sultan Ageng Tirtayasa kemudian menetapkan mereka menjadi penguasa Cirebon dengan pembagian bahwa Pangeran Martawijaya sebagai Sultan Sepuh sedangkan Pangeran Kartawijaya sebagai Sultan Anom. Mulai saat itulah kesultanan Cirebon terpecah. Pecahnya Kesultanan menjadi penanda runtuhnya kesultanan Cirebon. Masalah pecahnya Kesultanan

Cirebon juga diperkeruh dengan adanya politik adu domba yang dilakukan oleh VOC dengan membuat perjanjian pada 7 Januari 1681 dimana isinya mengakui kebangsaan ketiga raja di Cirebon.

KERAJAAN BONE

Sejarah Berdirinya Kerajaan Bone

Mencari tahu tentang sejarah berdirinya kerajaan Bone hampir tidak ada bukti fisik yang dapat ditelusuri sebagai penentu kapan sejarah awal Kerajaan Bone didirikan, sejarah kerajaan Bone ditelusuri dengan mengandalkan tulisan-tulisan kuno yang terdapat dalam lontara'. Tetapi hanya sedikit informasi yang didapatkan dari penggalian sejarah melalui lontara' yang dianggap sebagai sebuah fakta, bahkan mengenai asal-usul Manurung-é (mnuruGE) disinyalir sebagai *mitos* yang berkembang atau sebuah dongeng yang bersumber dari “suré La Galigo” (suer l gligo) dan budaya tutur masyarakat Bone. Namun, setelah era kepemimpinan Manurung-é kesadaran akan perlunya pencatatan sejarah kerajaan Bone sepertinya mulai mendapat perhatian khusus yang ditandai dengan keinginan pihak kerajaan maupun masyarakat luas melakukan penulisan

silsilah dan keturunan raja-raja, hal ini terbukti dengan adanya lontara' yang ditulis dengan cermat sehingga kesahihannya dapat dipertanggungjawabkan.

Sebagai *cross check* untuk menentukan tahun kapan berdiri kerajaan Bone dari lontara', maka perlu juga melihat singkronya peristiwa-peristiwa alam yang tertulis dalam *pararaton* atau prasasti di bekas reruntuhan kerajaan Majapahit di Jawa Timur dengan kejadian yang terjadi di kerajaan Bone. Hal ini setidaknya memberikan gambaran untuk membuat sejumlah asumsi untuk mengungkap masa awal kerajaan Bone.

Sejarah mencatat bahwa Bone merupakan salah satu kerajaan besar di nusantara pada masa lalu. Kerajaan Bone yang dalam catatan sejarah didirikan oleh ManurungngE Rimatajang pada tahun 1330. Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matinroe ri Bontoala, pertengahan abad ke-17. Raja Bone pertama yang masuk Islam adalah raja Bone ke-XI yang bernama Latenri Rawe Bongkang. Setelah masuk Islam beliau bergelar Sultan Adam. Sejarah masuk Islamnya raja Bone diawali dari telah didahuluinya kerajaan Gowa dalam memeluk agama Islam. Saat raja Bone belum masuk Islam kerajaan Bone belum dianggap sederajat oleh kerajaan Gowa yang tak lain adalah kerajaan tetangga di daerah Sulawesi. Maka untuk menyikapi sikap demikian diutuslah seorang menteri dari Bone untuk menyampaikan hal tersebut kepada rajanya bahwa kerajaan Bone tidak dianggap setara oleh kerajaan Gowa yang telah memeluk Islam dan mengajak kerajaan Bone untuk ikut

bersama memeluk agama Islam. Raja Bone dengan tegas menolak ajakan dari raja Gowa. Penolakan tersebut akhirnya berujung pada peperangan antara kerajaan Bone dan Gowa. Peperangan ini menurut pandangan raja Gowa adalah peperangan antara Islam dan kaum Kafir. Dalam peperangan itu kerajaan Bone menyerah kalah karena tak mampu menghadapi serangan dari kerajaan Gowa, selanjutnya raja Bone memeluk Islam yang diikuti oleh rakyatnya.

Perkembangan Ajaran Islam di Bone

Raja Bone terhitung sangat giat mengajak rakyatnya untuk memeluk Islam bahkan sampai penduduk di pelosok desa pun. Raja-raja Bone yang telah masuk Islam terkenal keras dalam melaksanakan agama Islam.

Dalam bidang politik dan tata kerajaan Bone pada masa lalu sangat menjunjung tinggi nilai demokrasi atau kedaulatan rakyat. Sistem demokrasi ini dibuktikan dengan penerapan representasi kepentingan rakyat melalui lembaga perwakilan mereka di dalam dewan adat yang disebut dengan “*Ade Pitue*” atau tujuh orang pejabat adat yang bertindak sebagai penasihat raja. Segala sesuatu yang terjadi dalam kerajaan dimusyawarahkan oleh Ade Pitue dan hasil keputusan musyawarah tersebut kemudian disampaikan kepada raja untuk dilaksanakan. Ade Pitue ini pada masa sekarang seperti halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Selain itu di dalam penyelenggaraan pemerintahan kerajaan sangat mengedepankan azas kemanusiaan dan musyawarah. Prinsip ini berasal dari pesan Kajaolaliddong seorang cerdik cendikia di kerajaan Bone yang hidup pada tahun 1507-1586, pesan Kajaolaliddong pernah disampaikan kepada Raja Bone seperti yang dikemukakan oleh Wiwiek P . Yoesoep (1982 : 10) bahwa terdapat empat faktor yang membesarkan suatu kerajaan yaitu:

1. *Seuwani, Temmatinroi matanna Arung MangkauE mitai munrinna gauE* = Mata Raja tak terpejam memikirkan akibat segala perbuatan.
2. *Maduanna, Maccapi Arung MangkauE duppai ada'* = Raja harus pintar menjawab kata-kata.
3. *Matellunna, Maccapi Arung MangkauE mpinru ada'* = Raja harus pintar membuat kata-kata atau jawaban.
4. *Maappa'na, Tettakalupai surona mpawa ada tongeng* = Duta tidak lupa menyampaikan kata-kata yang benar.

Pesan Kajaolaliddong ini mempunyai makna yang mendalam bagi seorang raja, bahwa betapa pentingnya perasaan, pikiran dan kehendak rakyat untuk dipahami dan disikapi dengan baik oleh seorang pemimpin atau raja.

Kerajaan Bone dalam pandangan kerjasama dengan daerah lain, dan pendekatan diplomasi dianggap sebagai bagian penting dalam usaha untuk membangun kebesaran negeri agar menjadi lebih baik. Pengaplikasian terhadap pandangan tentang

kerjasama ini terlihat dari sejarah bahwa dulu kerajaan Bone, Wajo dan Soppeng melakukan perjanjian dan ikrar bersama yang dikenal sebagai *Tellum Poccoe* atau dengan istilah lain "*LaMumpatue Ri Timurung*" yang bertujuan untuk memperkuat posisi kerajaan-kerajaan tersebut dalam menghadapi tantangan dari luar Sulawesi.

Kerajaan Bone juga banyak memetik sari pati ajaran Islam dalam menghadapi kehidupan, menjawab tantangan pembangunan dan dalam menghadapi perubahan-perubahan yang semakin cepat. Namun yang terpenting adalah bahwa semangat religiusitas orang Bone dapat menjawab perkembangan zaman dengan segala bentuk perubahan dan dinamikanya.

Perkembangan Dan Masa Keemasan

Kerajaan Bone mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Latenritatta Towappatunru Daeng Serang Datu Mario Riwawo Aru Palakka Malampee Gemmekna Petta Torisompae Matinroe ri Bontoala, pertengahan abad ke-17, pada masa pemerintahannya kerajaan Bone yang memiliki potensi yang besar dapat memanfaatkannya bagi pembangunan demi kemakmuran rakyat. Dengan potensi yang beragam seperti dalam bidang pertanian, perkebunan, kelautan kerajaan Bone berhasil memakmurkan rakyatnya ditambah dengan kekuatan militer yang semakin kuat setelah belajar dari lemahnya pertahanan saat kalah menghadapi kerajaan Gowa.

Pergolakan Dan Runtuhnya Kerajaan

Kesultanan Bone menjadi yang terkuat di seantero Sulawesi setelah jatuhnya Kesultanan Gowa, dengan kondisi yang demikian kerajaan Bone kembali ketujuan awal ingin menjadi kerajaan yang dan menyebarkan pengaruh ke seluruh Sulawesi, akhirnya kerajaan Bone berhasil mengajak Kesultanan Luwu, Kesultanan Soppeng dan sejumlah negara kecil lain untuk bersekutu dengan Bone. Setelah peralihan kekuasaan dari Inggris ke Belanda, suasana masih tetap damai, namun keadaan ini berubah ketika Sultan Bone meninggal pada tahun 1823, dan digantikan oleh saudaranya Aru Datu yang bergelar I-Maneng Paduka Sri Ratu Sultana Salima Rajiat ud-din,

Pada masa pemerintahan Aru Datu kerajaan Bone mencoba merevisi Perjanjian Bongaya. GubJend. G.A.G.Ph. van der Capellen antara tanggal 8 Maret sampai 21 September 1824 mengadakan lawatan ke Sulawesi dan Kepulauan Maluku, semua penguasa datang memberikan penghormatan juga termasuk perwakilan Ratu Bone, kecuali penguasa Suppa dan Tanete. Van der Capellen melihat bahwa perundingan dengan negara-negara tersebut tidak akan membawa keuntungan apapun dan memutuskan untuk kembali ke Batavia, sekembalinya ke Batavia, sebuah ekspedisi dipersiapkan untuk menghukum Bone dengan sekitar 500 prajurit diberangkatkan membawa 4 meriam, 2 howitzer, beserta 600 prajurit pembantu dari pribumi.

Letnan kolonel Hubert Joseph Jean Lambert de Stuers kala itu menjadi pimpinan pasukan yang dikirim untuk menghukum Bone, Meskipun pasukan tersebut telah mendekati kerajaan,

pasukan tersebut masih saja gagal ketika akan mendarat karena adanya gerakan perlawanan dari Tanete dengan harapan dapat memukul mundur sebelum penyerbuan ke ibukota dilakukan oleh pasukan Belanda, Hubert de Stuers akhirnya berhasil menduduki kerajaan dengan susah payah, karena kalah dalam pertempuran Aru Datu kemudian menyerahkan diri dan diasingkan dipedalaman oleh Belanda. Meskipun demikian Aru Datu tetap melancarkan aksi serangan walau dalam pengasingan walau akhirnya serangan –serangan yang dibangun selalu dapat ditumpaskan oleh pasukan Belanda.

KERAJAAN ISLAM DI PONTIANAK

Sejarah Berdirinya Kerajaan Islam di Pontianak

Sejarah berdirinya kerajaan Pontianak tidak bisa dipisahkan dari Syarif Abdurrahman yang memimpin dan menebas hutan diujung delta sungai Kapuas dan sungai Landak. Dalam satu minggu pekerjaan Syarif Abdurrahman dan pasukannya berhasil mendirikan rumah sederhana dan tempat beribadah, yang kemudian tempat itu dinamakan Pontianak. Asal usul penamaan Pontianak atau dalam bahasa daerah yang berarti hantu wanita pengganggu/ Kuntilanak berasal dari cerita bahwa pada sore hari Jumat 9 Rajab 1185, 18 oktober 1771 Pangeran Syarif Abdurrahman beserta rombongannya dalam perjalanan menyusuri sungai Kapuas pada malam harinya mendapat gangguan. Menurut kisahnya gangguan tersebut berasal dari hantu yang mendiami Pulau Batu Layang, gangguan yang ditafsirkan sebagai hantu jahat, membuat takut anak buah perahu rombongan. Hingga pada

keesokan harinya mereka tidak meneruskan perjalanan, sambil memerhatikan situasi sekitarnya Syarif Abdurrahman memerintahkan anak buahnya untuk mengusir hantu tersebut dengan menembakkan meriam ke arah sumber suara tersebut. Itulah asal-usul cerita tentang penamaan kota Pontianak.

Pangeran Syarif Abdurrahman setelah berhasil menghilangkan gangguan suara hantu yang ternyata adalah suara manusia yang mencoba menakuti para pendatang kemudian meneliti daerah disepanjang sungai Landak dan sungai Kapuas, pesisir kedua sungai tersebut ternyata sudah didiami oleh penduduk suku Dayak dan orang-orang Melayu. Kedatangan rombongan Syarif Abdurrahman itu pun menarik perhatian orang yang lalu lintas di daerah itu. Akhirnya pada tanggal 8 bulan sya'ban 1192 H, bertepatan dengan hari Senin dengan dihadiri oleh Raja Muda Riau, raja Mempawah, Landak, Kubu dan Matan, Syarif Abdurrahman akhirnya dinobatkan sebagai Sultan Pontianak dengan gelar Syarif Abdurrahman Ibnu Al-Habib Al-Kadrie.

Syarif Abdurrahman dikukuhkan menjadi Sultan pada kesultanan Pontianak pada tahun 1192 H, berdirinya pemerintahan Syarif Abdurrahman di Pontianak ini ditandai dengan berdirinya Masjid Jami' Sultan Abdurrahman Al-Kadrie dan Keratin Kadariah, yang terletak di Kelurahan Bugis Kecamatan Pontianak Timur. Usaha untuk membesarkan kerajaan Pontianak dilakukan dengan bantuan dari Sultan Pasir, Syarif Abdurrahman, mereka membajak kapal Belanda di dekat Bangka, kapal Inggris dan Prancis di Pelabuhan Passir. Hasil tersebut membuat Abdurrahman menjadi seseorang

kaya dan kemudian mengembangkan daerahnya menjadi pusat perdagangan yang makmur, dan mulailah Pontianak berdiri.

Perkembangan Ajaran Islam di Pontianak

Perkembangan Islam di Kalimantan Barat seperti di daerah-daerah lainnya di Nusantara melalui jalur ekonomi dan perdagangan. Islam juga disebarkan oleh pedagang-pedagang muslim dan da'i-da'i yang datang berkelana dengan misi berdagang atau menyebarkan agama Islam.

Sultan Syarif Abdurrahman adalah bangsawan Arab yang selain sebagai raja pertama di kerajaan Pontianak juga merupakan seorang pendakwah yang menyebarkan agama Islam. Perkembangan Islam di Kalimantan dapat dikatakan masuk melalui Pontianak. Masuknya Islam di Kalimantan ini juga tidak luput dari perjuangan ayahnya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie yaitu Habib Husein Al-Qadrie.

Sebelum wafat pada tanggal 3 Zulhijah 1184 H, Habib Husein Al-Qadrie beliau menikahkan putranya Syarif Abdurrahman Al-Qadrie dengan Utin Cendramidi yang taklain adalah putri dari Raja Mempawah. Ketika beliau berada di Banjar, oleh Sultan Banjar diangkat menjadi pangeran Sayid Abdurrahman Nur Alam yang kemudian menjadi Raja Pontianak dengan gelar Sri Sultan Syarif Abdurrahman bin Habib Husein Al-Qadrie.

Umat Islam di Kalimantan pada masa Syarif Husein bin Ahmad Al-Qadrie masih sedikit. Akan tetapi, setelah berdirinya kerajaan Islam Pontianak agama Islam berubah menjadi agama yang mayoritas hal ini karena kesungguhan dari rajanya Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie untuk meneruskan perjuangan dakwah dari ayahnya. Bahkan Sultan Syarif Abdurrahman Al-Qadrie mengundang guru mengaji khusus untuk menjadi guru ngaji di lingkungan Keraton Kadariyah Pontianak. Guru ngaji tersebut bernama Djafar. Pada zaman tersebut dia adalah salah seorang yang termasyhur di daerah Kampung Kapur.

Nuansa Islam sangat kental jika kita datang ke Kampung Bansir, di Kampung Kapur, Kampung banjar Serasan dan Kampung Saigon sangat kental dengan pengaruh agama Islam. Hal ini membuktikan bahwa Islam pada masa itu sudah menyebar luas ke wilayah Pontianak.

Perkembangan dan Masa Keemasan

Masa pemerintahannya, sultan telah mengadakan hubungan luas dengan raja-raja di dalam dan luar Kalimantan Barat. Hubungan kerjasama ini menjadi faktor menarik perdagangan di Pontianak. Kedatangan para pedagang bumi putra seperti Bugis, Tambelan, Banjar, Serasan, Sampit, Bangka-Belitung, Kuantan, Kamboja, Saigon telah memberi nuansa pada perkembangan Kota Pontianak. Setelah diberi tempat

oleh sultan, para pedagang bermukim dengan membentuk perkampungan di tepian Sungai Kapuas—letaknya paralel sebelah timur keraton. Tidak mengherankan di Pontianak banyak dijumpai perkampungan pedagang yang sesuai daerah asalnya, kondisi ini juga telah membentuk heterogenitas etnis sebagai ciri utama komposisi penduduk.

Cepat tumbuhnya Pontianak menjadi kerajaan yang besar adalah bahwa Pontianak dinilai sebagai daerah yang strategis, membawa kemajuan dalam pelayaran dan perdagangan. Belum lagi dengan adanya jaminan dari Sultan Pontianak atas pelayaran dan perdagangan di kawasan Sungai Landak dan Sungai Kapuas Kecil, membuat lalu lintas perdagangan di Pontianak semakin ramai. Berawal dari keadaan tersebut membuat kerajaan Pontianak tumbuh besar dan kuat baik dari segi ekonomi dan militer sebagai implementasi pasukan penjaga keamanan perdagangan.

Dengan kedudukannya yang cukup kuat Abdurrahman berusaha melakukan ekspansi, dengan target pertama adalah menaklukkan Kerajaan Sanggau. Merasa terancam dengan sikap dari kerajaan Pontianak, kerajaan Sanggau selaku *vazal* (negeri bawahan) kerajaan Banten meminta bantuan agar dapat dibantu dalam menghadapi serangan kerajaan Pontianak. Akan tetapi, dari kerajaan Banten sudah tidak berdaya lagi untuk membantu kerajaan Sanggau, akhirnya memilih untuk menyerahkan kekuasaan Sanggau kepada Sultan Pontianak.

Pergolakan dan Runtuhnya Kerajaan

Sebenarnya kelahiran Pontianak ini bersamaan dengan periode bercokolnya imperialisme Barat yang menyebabkan kehidupan kesultanan ini tertekan di bawah eksploitasi kekuasaan imperialisme tersebut. Hal ini berarti bahwa hubungan kesultanan Pontianak dan sultan serta para kerabat istana dan rakyatnya di satu pihak, dengan pemerintah kolonialisme Belanda bersama pejabatnya di lain pihak, bersifat tidak seimbang, imperialistis dan eksploitatif yang kentara sekali. Menghadapi kenyataan itu, sultan, sebagian kerabat sultan dan para pembantunya tampaknya menerima perlakuan tidak adil itu tanpa banyak reaksi dan oposisi, sehingga terkesan Kesultanan Pontianak bersekutu dengan pemerintahan penjajahan Belanda. Padahal ketundukan itu merupakan keterpaksaan dan strategi menghindari konflik militer langsung antara kedua pihak yang berakibat kehancuran bagi kesultanan ini, karena tidak memiliki kelengkapan perang yang memadai.

Campur tangan VOC dalam soal-soal intern kerajaan membawa Pontianak terlibat dalam pertikaian politik dan ekonomi antar kerajaan. Perebutan kekuasaan di wilayah Kalimantan Barat menjadi kompleks dengan adanya konflik perbatasan antara Mempawah dan Sambas. Meskipun konflik itu dapat diselesaikan melalui perantaraan Syarif Abdurrahman Al Qadri Sultan Pontianak, tetapi pertentangan antara Panembahan Mempawah dan Abdurrahman meningkat. Faktor ini yang menyebabkan kemuduran dari kerajaan Pontianak.

KERAJAAN INDRAPURA

Sejarah Berdirinya Kerajaan Kutai Kartanegara

Kesultanan Inderapura atau Kerajaan Islam Malayu yang diperkirakan berdiri dari tahun 1100 M – 1911 M berada dalam Kabupaten Pesisir Selatan, sekarang Sumatra Barat. Karena posisinya di pesisir laut sebagai kota pantai, mengakibatkan kerajaan Indrapura menjadi pusat perdagangan, dengan komoditi unggulan emas dan lada, memiliki pelabuhan Samudrapura yang luas dan jauh dari ombak besar, dan juga ditambah dengan basis armada laut yang kuat. Kerajaan Indrapura menjadi sebuah kerajaan yang ramai dan menjadi daerah rebutan kerajaan-kerajaan di sekitarnya.

Sebenarnya Kesultanan Indrapura berdiri dari keruntuhan Kerajaan Indrapura lama yakni Kerajaan Teluk Air Pura yang berdiri pada abad 9 M – 12 M.

Perkembangan dan Masa Keemasan

Pengaruh kerajaan Indrapura terhitung sangat luas. Hal ini terjadi pada masa kepemimpinan Raja terakhir yaitu Sultan Muhammad Bakhi yang bergelar Sultan Firmansyah, memerintah pada 1860-1891. Sejak awal berdirinya tercatat abad IX sampai akhir abad ke XIX, berarti sejak kerajaan ini berdiri mampu mempertahankan kejayaannya selama 10 Abad sebagai sebuah kerajaan Kesultanan Islam di Nusantara ini.

Faktor kesejarahan ditambah dengan letak geografisnya yang langsung berbatasan dengan negara jiran (Malaysia dan Singapura), dan masih ditambah lagi dengan berada di sekitar jalur perdagangan dan atau pelayaran internasional (Selat Malaka), maka pada gilirannya membuat orang Melayu terbiasa mengadakan kontak dengan unsur dan atau pendukung kebudayaan asing. Kontak-kontak itulah yang kemudian menjadikan kerajaan Indrapura menjadi kerajaan Melayu terbesar saat itu.

Sebagai kerajaan bahari terbesar dan jaya, pernah menjadi ajang percaturan imperialisme asing berebut pengaruh, di antaranya secara kronologis dapat dicatat:

1. Aceh pada tahun 1521 berhasil menguasai perdagangan lada dan emas di perairan Indrapura. Tahun 1625 Aceh menempatkan seorang wakilnya/ panglima di bandar Indrapura, dan secara de facto berakhir pada tahun 1632, tetapi hal ini tidak membuat Aceh meninggalkan Indrapura dan bertahan sampai abad ke-17 di Pantai Barat Sumatra.

2. Pada tahun 1602 Belanda mulai memasuki wilayah Indrapura. Coen (VOC) kemudian meminta kerajaan Belanda untuk mengirim kapal dagang ke Indrapura pada tahun 1616 untuk merebut lada dan emas dari Aceh dan Inggris, bahkan sampai berhasil dan memungut pajak lada dari tiap transaksi di Indrapura, setiap 1200 bahar lada dikeluarkan 1 bahar. Belanda juga berhasil menguasai wilayah kantong-kantong dagang Aceh, kerajaan Indrapura akhirnya terpaksa ke meja perundingan damai di Sungai Bungin untuk membahas soal perdagangan lada Indrapura (1660). Salah satu hasil perundingan tersebut adalah kebebasan Belanda untuk mendirikan Loji VOC 1662 di Pulau Cingkuk, Tahun 1682 Air Haji Raja yang saat itu berkuasa di Indrapura memberontak terhadap VOC. Januari 1685 Indrapura dinyatakan darurat oleh Belanda atas serangan yang dilancarkan oleh Air Haji, melihat hal demikian VOC yang berpusat di Batavia kemudian menyuruh untuk menghancurkan lada Indrapura untuk mematikan perdagangan dan ekonomi kerajaan. Tindakan VOC memancing kemarahan rakyat dengan berimbas lonji VOC di Indrapura diserbu rakyat pada 6 Juni 1701, kemenangan untuk kerajaan Indrapura dengan semua pegawai VOC dibunuh, disisakan satu orang untuk mengadu ke kantor pusat VOC di Padang.
3. Inggris pada Juni 1684 mendirikan Loji di Indrapura. Pendirian Loji ini mendapat dukungan dari Raja Ibarahim yang merupakan bekas penghulu Pariaman, di Indrapura

Inggris juga mendapat dukungan dari keponakan raja Minangkabau yaitu Sultan Abdul Jalil Saruaso. Pada Juni 1685 Inggris mulai mendirikan kantor perwakilan *East India Company* (EIC) settlement di Indrapura, Majunto, Taluk dan daerah lain di daerah perdagangan Indrapura. Hal ini mengakibatkan kemarahan Belanda yang juga ingin mengambil alih kekuasaan perdagangan, perang antara Inggris dan Belanda pun tidak terelakkan dan baru reda pasca Perjanjian Paris pada tahun 1763. Perjanjian tersebut membagi wilayah dagang antara Inggris dan Belanda, Inggris menguasai Indrapura ke selatan dari Majunto sampai Silebar, sedangkan VOC ke utara dari Indrapura, Tiku, Air Bangis, Natal. Tahun 1687 kantor dagang Inggris diserang oleh rakyat Indrapura, banyak korban dari pihak Inggris dan bahkan pasukan Indrapura berhasil merampas meriam, melumpuhkan 5 kapal yang datang dari Eropa, penyerangan ini dibantu oleh Sri Sultan Ahmadsyah raja Pagaruyung.

Pergolakan Dan Runtuhnya Kerajaan

Kesultanan Aceh memiliki kebijakan untuk memerangi negeri-negeri penghasil lada di Semenanjung Malaya dan juga berusaha memperkuat cengkramannya atas monopoli lada dari pantai barat Sumatra pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Penjualan lada di Tiku dan Pariaman mendapatkan kendali ketat dari wakil Aceh yang berada di daerah tersebut, para wali tersebut mendapat julukan sebagai *panglima*. Dengan adanya pengawasan ketat dari Aceh dalam perdagangan, ini

merupakan gangguan perdagangan Inderapura di pelabuhan utara. Indrapura kemudian memilih mengembangkan bandarnya di daerah selatan, Silebar, yang biasanya digunakan untuk mengekspor lada lewat Banten.

Indrapura membuat penguasa Aceh marah karena berusaha mengelak dari membayar cukai pada para panglima Aceh. Atas tindakan tersebut Aceh pada tahun 1633 mengirim armadanya untuk menghukum Inderapura. Dalam peperangan Indrapura kalah dan Raja Puti yang memerintah Inderapura saat itu dihukum mati beserta beberapa bangsawan lainnya, dan banyak orang ditawan dan dibawa ke Kotaraja. Kemudian kedudukan Raja Puti digantikan oleh Raja Malfarsyah atas perintah Raja Aceh, belum cukup demikian Aceh juga menempatkan panglima pengawas perdagangan di Indrapura.

Sultan Iskandar Tsani kendali Aceh sebagai pengganti dari Iskandar Muda, menjadikan kekuatan Aceh melemah dan pada masa pemerintahan Ratu Tajul Alam pengaruh Aceh di Inderapura mulai digantikan Belanda (VOC). Pada tahun 1662 dimulailah dominasi VOC di Indrapura. Hal ini diawali ketika Sultan Muhammad Syah meminta bantuan kepada VOC untuk membantu memadamkan pemberontakan di Inderapura. Pemberontakan Indrapura ini dipicu oleh tuntutan Raja Adil yang merasa mempunyai hak atas tahta Inderapura berdasarkan sistem Matrilineal. Akan tetapi, sayang pemberontakan dari Indrapura ini berlangsung tidak seimbang, Indrapura kewalahan dalam melawan kekuatan gabungan Aceh dan VOC yang mengakibatkan Sultan Inderapura melarikan diri beserta ayah dan kerabatnya.

Tahun 1663 Sultan Mansur Syah kemudian dikirim ke Batavia oleh VOC untuk menanda-tangani perjanjian yang di dalam isinya memberikan VOC hak monopoli pembelian lada, dan hak pengerjaan tambang emas. Pada Oktober 1663 pemerintahan Inderapura kembali pulih, dan Sultan Inderapura mengakui Raja Adil sebagai wakilnya yang berkedudukan di Manjuto.

Sultan Muhammad Syah kemudian digantikan oleh putranya yaitu Sultan Mansur Syah (1691-1696), pada masa pemerintahan Sultan Mansur Syah bibit ketidakpuasan rakyatnya atas penerapan cukai yang tinggi serta dominasi monopoli dagang VOC kembali muncul. Pada tahun 1696 Sultan Mansur Syah meninggal dunia dan digantikan oleh Raja Pesisir, yang baru berusia 6 tahun dan pemerintahannya berada dibawah perwalian neneknya. Puncak perlawanan rakyat Inderapura berhasil menghancurkan pos VOC di Pulau Cingkuak. VOC yang tidak terima atas penyerangan tersebut memberikan reaksi dengan mengirim pasukan besar tanggal 6 Juni 1701, serangan VOC ini berhasil menguasai keadaan di Inderapura kembali. Pada tahun 1792 akhirnya Inderapura benar-benar runtuh ketika garnisun VOC di Air Haji menyerbu Inderapura karena masalah pertengkaran komandannya dengan Sultan Inderapura, kemudian Sultan Inderapura mengungsi ke Bengkulu dan meninggal di sana pada tahun 1824.

BANJAR

Banjar merupakan kerajaan yang berdiri pada tahun 1520, dengan ibu kota terakhir di Kayu Tangi yang dikenal saat ini sebagai Martapura, Kalimantan Selatan. Banjar dapat dikatakan sebagai penerus dari kerajaan bercorak Hindu di pulau Kalimantan, yaitu Negara Daha, Kuripan atau Amuntai, Gagelang, Pudak Sategal, dan Pandan Arum.

Terbentuknya kerajaan Banjar tidak terlepas dari Negara Daha sebagai kerajaan yang pernah berkuasa saat itu. Raja Negara Daha, Raden Sukarama, mewasiatkan tahta kerajaan kepada cucunya yaitu Raden Samudera. Akan tetapi, anak Raden Sukarama, Pangeran Tumenggung, merebut tahta tersebut sehingga Raden Samudera melarikan diri dan bersembunyi di daerah hilir sungai Barito. Dalam pelariannya tersebut, Raden Samudera dilindungi oleh komunitas orang Melayu, yang selanjutnya mengangkat Raden Samudera sebagai raja. Bagi Raden Samudera, hal ini merupakan upaya merebut kembali

takhtanya di Negara Daha. Bagi komunitas Melayu, hal ini dilakukan supaya mereka tidak perlu membayar upeti kepada Negara Daha.

Untuk melakukan penyerangan terhadap Negara Daha, Patih Masih menganjurkan Raden Samudera meminta bantuan Kerajaan Demak. Sultan Demak menyanggupi permintaan tersebut dengan syarat bahwa Raden Samudera beserta pengikutnya harus memeluk agama Islam. Penyerangan pun dilakukan, diakhiri dengan kemenangan Raden Samudera. Pada tahun 1526, Raden Samudera memindahkan rakyat Negara Daha ke Kuin, Banjarmasin, sebagai pusat pemerintahan dan mengukuhkan dirinya sebagai penguasa Kesultanan Banjar dengan gelar Sultan Suriansyah.

Sultan Suriansyah wafat pada tahun 1545. Kesultanan Banjar diteruskan sampai tahta ke-19. Penerus tahta Kesultanan Banjar secara berturut-turut adalah Sultan Rahmatullah (1545-1570), Sultan Hidayatullah (1570-1595), Sultan Mustakinbillah (1595-1620), Sultan Inayatullah (1620-1637), Sultan Saidullah (1637-1642), Adipati Halid (1642-1660), Amirullah Bagus Kesuma (1660-1663), Sultan Agung (1663-1679), Sultan Tahlilullah (1679-1700), Sultan Hamidullah atau Sultan Kuning (1700-1734), Sultan Tamjidullah (1734-1759), Sultan Aliuddin Aminullah (1759-1761), Pangeran Nata Dilaga atau Sultan Tahmidullah (1761-1801), Sultan Suleman Al Mutamidullah (1801-1825), Sultan Adam Al Wasyibillah (1825-1857), Sultan Tamjidillah (1857-1859), Pangeran Antasari atau Panembahan Amiruddin Khalifatul Mukmina (1859-1862), dan Sultan Seman (1862-1905).

Kesultanan Banjar memiliki pola lapisan masyarakat berdasarkan status sosial menurut keturunan. *Tutus* adalah sebutan bagi golongan keturunan raja, dan berhak untuk memegang jabatan penting dalam kerajaan serta memiliki wilayah kekuasaan. Gelar kebangsawanan bagi keturunan raja yang berkuasa secara berturut-turut adalah Pangeran/Ratu, Gusti, Antung/Raden, Nanang/Anang. Gelar kebangsawanan bagi keturunan raja yang tidak berkuasa secara berturut-turut adalah Pangeran/Ratu, Andin, Rama. Sedangkan *jaba* adalah golongan rakyat biasa. *Jaba* memiliki kesempatan mendapatkan jabatan atau gelar dari sultan apabila dianggap berjasa atau memiliki pengabdian terhadap kerajaan. Gelar tersebut dapat disandang seumur hidup, tetapi tidak dapat diwariskan. Apabila seorang lelaki *jaba* ingin menikahi wanita *tutus*, maka diadakan suatu ritual penebusan yang disebut dengan manabus purih, dengan konsekuensi bahwa wanita *tutus* ini kehilangan hak waris gelar untuk anak-anaknya kelak.

Sistem pemerintahan Kesultanan Banjar masih mengikuti sistem pemerintahan pendahulunya, Negara Daha. Jabatan raja diturunkan kepada golongan *tutus* sebagai keturunan atau pewaris yang sah, sedangkan jabatan tertinggi setelah raja, yaitu perdana menteri yang disebut dengan gelar *mangkubumi*, ditempati oleh golongan *jaba* yang memiliki jasa besar terhadap kerajaan. Dalam menjalankan tugasnya, *mangkubumi* dibantu oleh bawahannya yaitu *penganan*, *pengiwa*, *gumpiran*, dan *panumping* yang memiliki wewenang setara hakim dan jaksa. Di bawahnya ada jabatan *mantri bumi*, 40 *mantri sikap*, dan beberapa jabatan lain yang memiliki kewenangan dalam lingkup

yang lebih sempit seperti perdagangan, seni, keagamaan, dan logistik. Saudara raja diperbolehkan menjadi penguasa di daerah taklukan dengan gelar *adipati*. Akan tetapi, kekuasaannya berada di bawah *mangkubumi*. Kesultanan Banjar tetap menggunakan pedoman hukum *Kutara* yang disusun oleh Aria Taranggana, *mangkubumi* Negara Daha.

Pengaruh agama Islam dalam Kesultanan Banjar sangat dominan dan tidak terlepas dari pengaruh Khatib Dayan dari Kesultanan Demak. Hal ini terbukti dari peninggalan Kesultanan Banjar berupa masjid yang memiliki ragam arsitektur menyerupai masjid agung Demak dengan atap meru dan tiang guru. Ketiga masjid ini adalah masjid Kuin, masjid Jami, dan masjid Basirih. Selain itu, terdapat *Undang-Undang Sultan Adam* yang semuanya didasarkan pada hukum Islam.

Masa kejayaan Kesultanan Banjar berada pada dekade pertama abad ke-17. Adanya perang Makassar menyebabkan para pedagang dari Somba Opu, Kesultanan Gowa, pindah ke Banjarmasin sehingga menjadi bandar perdagangan besar. Komoditas perdagangan utamanya adalah lada hitam, madu, rotan, emas, intan, damar, dan kulit binatang. Pada masa ini pula, Kesultanan Banjar tidak lagi membayar upeti kepada Kesultanan Demak sejak diteruskan menjadi Kesultanan Pajang. Kesultanan Banjar juga telah berhasil memperluas wilayah dengan mengklaim Sambas, Lawai, Sukadana, Kotawaringin, Pembuang, Sampit, Mendawai, Kahayan Hilir, Kahayan Hulu, Kutai, Pasir, Pulau Laut, Satui, Asam-Asam, Kintap, dan Swarangan. Setelahnya, terjadi migrasi besar-besaran dari pulau Jawa yang disebabkan oleh agresi politik yang dilakukan oleh

Sultan Agung. Hal ini menyebabkan pelabuhan-pelabuhan di pulau Kalimantan menjadi pusat difusi kebudayaan Jawa.

Pada abad ke-18 terjadi perpindahan kekuasaan kepada dinasti Sultan Tamjidullah dengan mengangkat Pangeran Nata Dilaga sebagai sultan. Hal ini menyebabkan perpecahan di dalam kerajaan. Pangeran Amir, putera Sultan Aliuddin Aminullah, meminta bantuan pamannya, Arung Tarawe, untuk menyerang Kesultanan Banjar dengan pasukan orang Bugis. Untuk mempertahankan takhtanya, Pangeran Nata Dilaga meminta bantuan pada VOC. Pasukan orang Bugis ini berhasil ditumpas oleh VOC yang dipimpin oleh Kapten Hoffman. Sebagai konsekuensi dari hal tersebut, dibuatlah suatu perjanjian antara Kesultanan Banjar dengan VOC dimana tanah yang dikuasai Kesultanan Banjar menjadi milik VOC meskipun raja tetap memegang tahta. Pada tahun 1826, perjanjian tersebut diperbarui berdasarkan perjanjian terdahulu. Perjanjian ini terdiri atas 28 pasal, antara lain adalah bahwa Kesultanan Banjar hanya boleh mengadakan hubungan dengan Belanda, wilayah kekuasaan Kesultanan Banjar menjadi lebih sempit, serta pengangkatan sultan dan *mangkubumi* harus mendapat persetujuan Belanda.

Pada tahun 1857, Belanda secara sepihak mengangkat Sultan Tamjidillah sebagai raja Kesultanan Banjar. Kerabat Kesultanan Banjar keberatan dengan hal tersebut karena Sultan Tamjidillah merupakan anak dari selir raja terdahulu sehingga dianggap tidak layak mewarisi tahta sementara Pangeran Hidayatullah sebagai pewaris tahta yang sah masih hidup. Akibat kudeta ini, Sultan Tamjidillah melarikan diri sehingga

kekosongan tahta diisi oleh residen Belanda, von Bertheim. Gesekan ini menimbulkan gerakan *Muning*, yang menjadi pemicu perang Banjar pada tahun 1859.

Pangeran Antasari diberi kepercayaan oleh Pangeran Hidayatullah untuk menghimpun kekuatan mengusir Belanda dari Kesultanan Banjar, serta sebagai penghubung antara kerajaan, pemimpin perlawanan, dan rakyat. Perlawanan demi perlawanan terjadi hingga akhirnya Pangeran Hidayatullah menyerah, kemudian diasingkan ke Cianjur, Jawa Barat. Dengan demikian secara otomatis, Pangeran Antasari diangkat sebagai pimpinan tertinggi perlawanan sekaligus sultan bagi Kesultanan Banjar. Pada tahun 1862, Pangeran Antasari dikabarkan meninggal dunia karena penyakit cacar dan dimakamkan di desa Bayan Bengkok, daerah hulu sungai Teweh. Penerus tahta adalah Sultan Seman yang melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Akan tetapi pada tahun 1905, Sultan Seman meninggal dunia dalam suatu pertempuran sehingga berakhirlah riwayat Kesultanan Banjar selama 379 tahun. Belanda memutuskan untuk memasukkan Kesultanan Banjar beserta seluruh daerah kekuasaannya ke dalam *Residentie Zuider en Ooster Afdeeling van Borneo*.

GOWA

Gowa, atau dikenal sebagai Goa adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Sulawesi Selatan. Apabila membicarakan Kerajaan Gowa tentunya tidak dapat dipisahkan dengan Kerajaan Tallo. Kedua kerajaan ini disebut-sebut sebagai kerajaan kembar dan memiliki sinergi dalam kekerabatan dan hubungan kerjasama. Konon, beberapa sumber menyebutkan bahwa kedua kerajaan ini awalnya merupakan tanah kekuasaan kerajaan kuno di Sulawesi Selatan, yaitu Kerajaan Siang.

Tak diketahui secara pasti kapan kerajaan Gowa terbentuk, tetapi diperkirakan raja Gowa pertama, Tumanurunga, mulai memerintah pada abad ke-13. Awal mulanya, di daerah Gowa terdapat sembilan komunitas yang disebut *Bate Salapang* atau Sembilan Bendera, yaitu Tombolo, Lakiung, Parang-Parang, Data, Agangjene, Saumata, Bissei, Sero, dan Kalili. *Bate Salapang* ini kemudian bergabung secara damai untuk membentuk Kerajaan Gowa.

Kerajaan Gowa bersifat maritim, dengan dua kegiatan utama yaitu pelayaran dan perdagangan. Posisinya yang strategis, mendukung Gowa menjadi bandar utama perdagangan di wilayah timur dengan komoditas rempah-rempah. Kerajaan Gowa dikenal memiliki pelaut-pelaut yang tangguh terutama dari wilayah Bugis, bahkan memiliki sebuah tata hukum niaga yang disebut *Ade'Allapiang Bicarana Pabbalri'e*.

Rakyat Gowa menerapkan pola lapisan sosial dalam kehidupannya. Golongan keturunan raja dan bangsawan disebut dengan *Anakarung/Karaeng*, sedangkan rakyat biasa disebut dengan *to maradeka* dan golongan hamba disebut dengan *ata*. Dalam pemerintahan, Raja merupakan pemegang kekuasaan absolut. Dalam menjalankan pemerintahannya, raja dibantu oleh bawahan-bawahannya. *Pabbicarabutta* atau dikenai pula dengan sebutan *Baliempona Sombayya ri Gowa* adalah kedudukan tertinggi di bawah raja, setara dengan perdana menteri, serta memiliki kewenangan menjadi pemangku jabatan raja apabila putra mahkota belum cukup umur untuk memerintah. *Tumailalang Towa* adalah pejabat yang berwenang menyampaikan dan meneruskan perintah raja kepada *Dewan Adat Bate Salapanga*. *Tumailalang Lolo* adalah pejabat yang menerima usul dan permohonan yang disampaikan kepada raja. *Anrongguru Lompona Tumakkajannang-nganga* adalah pejabat yang memiliki kewenangan menjadi panglima pada masa perang, atau menjaga rakyat menaati perintah raja pada masa damai. *Bate Anak Karaeng* adalah sebutan untuk raja-raja kecil pada tanah kekuasaan Gowa. Terdapat pula beberapa jabatan yang tidak tergolong sebagai pejabat tinggi Kerajaan Gowa, antara lain adalah *Lomo Tukakajannang-nganga*, *Anronggurunna*

Tumakkajannang-nganga, Anrongguru Lompona Tu Bontoalaka, Sabannara', Karaengta, Gallarrang, Anrongguru, Jannang, Pabbicara, Matowa, dan Daengta.

Kerajaan Gowa mulai berkembang pesat ketika Tumapa'risi' Kallonna menjadi raja Gowa ke-9 dengan gelar *Daeng Matanre Karaeng*. *Daeng Matanre Karaeng* membuat undang-undang perang, mengatur jabatan dalam kerajaan, mengadakan pungutan bea untuk kas kerajaan, serta menaklukkan kerajaan-kerajaan kecil seperti Selayar, Bulukumba, Cempaga, dan Maros. Pada pemerintahannya pula, ibu kota kerajaan dipindahkan dari Tamalate ke Somba Opu serta dibangun benteng sebagai basis pertahanan kerajaan. Daeng Matanre Karaeng juga membuat suatu sumpah perjanjian dengan penguasa Kerajaan Tallo yang menyebutkan bahwa kedua kerajaan tersebut tidak boleh saling melawan (*ampasiewai*).

Pada mulanya, penguasa dan rakyat Gowa maupun Tallo adalah penganut animisme. Agama Islam mulai masuk di Sulawesi Selatan karena adanya dakwah dari Datuk Ri Bandang dan Datuk Sulaiman dari Minangkabau. Pada tahun 1605, I Mangari Daeng Manrabbia, raja Gowa memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Alauddin. Sedangkan raja Tallo, Kraeng Mantoaya, bergelar Sultan Abdullah. Dua tahun setelahnya, raja kedua kerajaan menetapkan Islam sebagai agama resmi rakyatnya.

Setelah menjadi kesultanan Gowa yang bercorak Islam, rakyat sangat terikat pada norma adat yang dianggap sakral. Norma adat ini kemudian didasarkan pada ajaran agama Islam yang disebut dengan *pangadakkang*. Dengan masuknya Islam

pula, jabatan dalam struktur pemerintahan ditambah dengan *syara'* yang dikepalai seorang *qadhi* yang memiliki kewenangan dalam urusan-urusan yang berkaitan dengan ibadah, seperti penyelenggaraan sholat Jumat, hari-hari besar keagamaan, dan ritual-ritual lainnya.

Sultan Alauddin wafat pada tahun 1639, digantikan oleh I Mannuntungi Daeng Mattola yang bergelar Sultan Malikussaid (1639-11653), kemudian digantikan lagi oleh puteranya yang bernama I Mallombasi Daeng Mattawang yang bergelar Sultan Hasanuddin. Pada masa pemerintahannya, Belanda berusaha menguasai kerajaan-kerajaan di Sulawesi, termasuk Gowa dan Tallo, yang telah bergabung menjadi Kerajaan Makassar. Sultan Hasanuddin memimpin perlawanan terhadap Belanda, dan atas kegigihannya tersebut ia mendapat julukan “Ayam Jantan dari Timur”. Untuk menguasai Kerajaan Makassar, Belanda menjalin kerjasama dengan Kerajaan Bone di bawah pimpinan Aru Palaka. Pada tahun 1667, Sultan Hasanuddin terdesak, dan harus mengakui kemenangan Belanda dengan menyetujui Perjanjian *Bongaya* atau *Bungayya*. Isi dari perjanjian tersebut antara lain adalah bahwa VOC berhak menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi, Kerajaan Makassar harus melepaskan seluruh daerah kekuasaannya dan benteng pertahanannya, Aru Palaka diangkat sebagai raja Bone, serta Kerajaan Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC.

Sepeninggal Sultan Hasanuddin, tahta Kerajaan Makassar masih berlanjut sampai 20 keturunan. Akan tetapi, dengan adanya Perjanjian Bongaya tersebut, raja tidak lagi memiliki kewenangan dalam bidang politik, pemerintahan, ekonomi, dan

militer sehingga sering disebut dengan istilah ‘raja boneka’. Raja hanya sebatas simbol dari kebudayaan. Raja terakhir Kerajaan Makassar adalah Andi Ijo Daeng Mattawang Karaeng Lalolang yang bergelar Sultan Muhammad Abdul Kadir Aidudin (1956-1960).

Peninggalan Kerajaan Gowa yang masih dapat ditemui adalah benteng-benteng yang dibangun pada masa kejayaannya. Benteng-benteng tersebut adalah Somba Opu, Tallo, Sanrobone, Ujung Pandang atau sekarang dikenal dengan *Fort Rotterdam*, Panakkukang, Barombong, Mariso, Bontomarannu, Garassi, dan Bayoa. Selain itu peninggalan yang menjadi bukti bahwa Kerajaan Gowa memiliki maritim yang tangguh adalah jenis kapal yang khas, yaitu *Pinisi* dan *Lombo*.

PAJANG

Pajang adalah sebuah kerajaan yang terletak di daerah Kartasura, Jawa Tengah. Nama Pajang sebenarnya telah disebutkan dalam kitab Negarakertagama sebagai bagian dari tanah kekuasaan Majapahit pada abad ke-14. Penguasa Pajang adalah adik Hayam Wuruk, Dyah Nertaja yang bergelar Bharata I Pajang. Pada masa itu, meskipun di Demak mulai muncul kerajaan-kerajaan kecil bercorak Islam, kewibawaan raja Majapahit masih sangat dihormati.

Babad Banten menyebutkan bahwa Pengging sebagai kerajaan kuno yang dipimpin oleh Anglingdriya merupakan cikal bakal kerajaan Pajang. Ketika Brawijaya menjadi raja Majapahit, putrinya yaitu Retno Ayu Pembayun diculik oleh raja Blambangan, Menak Daliputih. Jaka Sengsara berhasil merebut kembali sang putri, sehingga Brawijaya mengangkatnya sebagai bupati Pengging dengan gelar Andayaningrat. Andayaningrat wafat ketika terjadi perang antara Majapahit dan Demak.

Meskipun Majapahit mengalami kehancuran pada tahun 1625, Pengging masih berdaulat hingga pertengahan abad ke-16 di bawah pemerintahan putera mahkota Andayaningrat, Kebo Kenanga yang bergelar Ki Ageng Pengging.

Kesultanan Demak berniat untuk menaklukkan Pengging dengan bantuan Ki Wanapala dan Sunan Kudus karena Ki Ageng Pengging dianggap melakukan pemberontakan terhadap Kesultanan Demak. Ki Ageng Pengging akhirnya terbunuh, sedangkan adiknya yaitu Kebo Kanigara berhasil melarikan diri. Ki Ageng Pengging meninggalkan seorang putera yaitu Mas Karebet yang diambil sebagai anak angkat Nyi Ageng Tingkir sepeninggal kedua orang tuanya. Mas Karebet atau yang lebih dikenal dengan nama Jaka Tingkir memutuskan untuk mengabdikan pada Kesultanan Demak. Kesultanan Demak mengutus Jaka Tingkir mendirikan Kerajaan Pajang sekaligus menjadi raja dengan sebutan Hadiwijaya.

Sementara itu, sepeninggal Sultan Trenggana, Kesultanan Demak dan kerajaan-kerajaan Islam di pesisir utara pulau Jawa mengalami kemunduran. Pada tahun 1549, Arya Penangsang, bupati Jipang, berusaha merebut tahta dan menyebabkan terbunuhnya Sunan Prawoto, pewaris tahta Kesultanan Demak. Arya Penangsang juga berusaha untuk membunuh Hadiwijaya, akan tetapi gagal. Hadiwijaya dengan dukungan dari bupati Jepara, Ratu Kalinyamat, berhasil memukul mundur pasukan Arya Penangsang. Hadiwijaya menjadi pewaris tahta Kesultanan Demak, kemudian memindahkan ibu kotanya ke Pajang. Pada tahun 1568, adipati kerajaan-kerajaan di Jawa Timur meliputi Jipang, Wirasaba/Maja Agung, Kediri, Pasuruan, Madiun,

Sedayu, Lasem, Tuban, Pati, dan Surabaya mengakui kedaulatan Kerajaan Pajang. Hal ini ditandai dengan pernikahan politik antara Panji Wiryakrama, putera adipati Surabaya, dengan puteri Hadiwijaya.

Hadiwijaya menghadiahkan tanah Mataram kepada Ki Ageng Pamanahan dan tanah Pati kepada Ki Penjawi atas jasanya dalam menumpas pasukan Arya Penangsang. Sunan Prapen meramalkan bahwa Mataram akan menjadi kerajaan yang lebih besar daripada Kerajaan Pajang. Di kemudian hari, Mataram benar-benar semakin besar di bawah kepemimpinan Sutawijaya, putera Ki Ageng Pamanahan. Pada tahun 1582 terjadi perang antara Pajang dan Mataram karena Tumenggung Mayang, adik ipar Sutawijaya diasingkan ke Semarang oleh Hadiwijaya. Perang ini dimenangkan oleh Mataram, sementara Hadiwijaya jatuh sakit dan meninggal dunia.

Sepeninggal Hadiwijaya, terjadi perebutan tahta Kerajaan Pajang. Putera mahkota, Pangeran Benawa merelakan tahta Kerajaan Pajang kepada Arya Panggiri, putera Sunan Prawoto dari Kesultanan Demak. Arya Panggiri menjadi raja Kerajaan Pajang dengan gelar Sultan Ngawantipura, sedangkan Pangeran Benawa menjadi bupati Jipang. Pemerintahan Arya Panggiri hanya berorientasi pada usaha balas dendam terhadap Mataram sehingga kesejahteraan rakyat terabaikan. Arya Panggiri juga berupaya menggeser kedudukan para pejabat Pajang dengan mendatangkan orang-orang Demak. Akibatnya, banyak rakyat Pajang yang pindah ke Jipang dan mengabdikan pada Pangeran Benawa.

Pada tahun 1586, Pangeran Benawa mengajak Sutawijaya bersekutu untuk menyerbu Pajang. Perang berakhir dengan kekalahan Arya Panggiri, yang kemudian dipulangkan ke Demak. Pangeran Benawa diangkat menjadi raja Pajang dengan gelar Prabuwijaya. Pemerintahan Prabuwijaya hanya berlangsung singkat, karena Prabuwijaya lebih memilih menjadi penyebar agama Islam. Atas kebijakan Sutawijaya, Kerajaan Pajang dijadikan negeri bawahan Mataram dengan Pangeran Gagak Baning, adik Sutawijaya, sebagai bupatinya. Pada tahun 1591, Gagak Bening meninggal dunia dan digantikan oleh putranya. Riwayat Pajang berakhir pada tahun 1618 setelah dihancurkan oleh pasukan Mataram di bawah Sultan Agung.

Pajang merupakan kerajaan bercorak Islam yang berada di pedalaman pertama di Jawa. Berbeda dengan kerajaan-kerajaan sebelumnya yang bersifat maritim, Pajang bersifat agraris, yakni mengandalkan hasil pertanian dan perkebunan sebagai tulang punggung perekonomian. Pajang mengalami kemajuan pesat di bidang pertanian karena berada di daratan rendah yang mempertemukan sungai Pepe dan Dengkeng, sehingga menjadi lumbung beras utama di pulau Jawa.

Sistem pemerintahan dan struktur sosial masyarakat Pajang tak jauh beda dengan Kesultanan Demak. Raja dianggap sebagai pusat yang memiliki kekuasaan absolut, dan tahtanya diturunkan kepada putera laki-laki tertua dari raja dan permaisuri (*garwa padmi*). Apabila raja tidak memiliki putera dari permaisuri, yang dapat diangkat menjadi raja berikutnya adalah putera tertua dari raja dengan selir (*garwa ampeyan*) atau kerabat laki-laki raja lainnya.

Pajang mendapat pengaruh Islam yang cukup kental. Beberapa contoh adanya akulturasi kebudayaan tradisional Jawa dengan Islam antara lain adalah munculnya *kejawen*, diadakannya *Grebeg Syawal* dan *Grebeg Maulud*, serta perubahan hitungan tarikh yang semula berdasarkan peredaran matahari menjadi peredaran bulan. Pada masa Kerajaan Pajang, peran Wali Songo mulai memudar. Sunan Kalijaga sempat berpesan kepada Sunan Kudus supaya para wali berperan hanya sebagai ulama dan penasehat, serta tidak ikut campur dalam urusan pemerintahan. Akan tetapi sepeninggal Sunan Kalijaga, Sunan Kudus justru terlibat dalam upaya pembunuhan Sunan Prawoto dan Hadiwijaya.

Peninggalan Kerajaan Pajang tidak banyak ditemukan. Di daerah Pajang saat ini hanya dapat ditemui reruntuhan yang dipercaya sebagai petilasan keraton Pajang. Yosodipuro dan Ronggowarsito, konon, merupakan pujangga-pujangga kesusasteraan Jawa keturunan Prabuwijaya, raja terakhir Kerajaan Pajang.

KERAJAAN KUTAI KARTANEGARA

Pada awal abad ke-13, berdirilah sebuah kerajaan baru di Tepian Batu atau Kutai Lama yang bernama Kerajaan Kutai Kartanegara dengan rajanya yang pertama Aji Batara Agung Dewa Sakti (1300-1325), Kutai lama dalam bab ini adalah Kutai yang masih memeluk agama Hindu, Dengan adanya dua kerajaan di kawasan Sungai Mahakam ini tentunya menimbulkan friksi diantara kedua kerajaan tersebut. Pada abad ke-16 terjadilah peperangan di antara kedua kerajaan Kutai ini. Dan pada akhirnya kerajaan Kutai Kartanegara di bawah rajanya Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa berhasil menaklukkan Kerajaan Kutai Martadipura. Raja kemudian menamakan kerajaannya menjadi Kerajaan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.

Pada abad ke-17 agama Islam mulai diterima dengan baik oleh Kerajaan Kutai Kartanegara. Namun peristiwa yang mengubah sejarah terjadi ketika pemerintahan Raja Makota. Dua penyebar Islam Tuan Haji Tunggang Parnagan dan Tuan

Di Bandang dari Makassar datang untuk menyebarkan Islam. Peristiwa diawali dengan debat teologis antara Raja Makota dan dua penyebar Islam ini. Selain itu, juga dilakukan adu kesaktian yang membuat Raja Makota mengakui kesaktian dua penyebar Islam ini. Ia akhirnya masuk Islam dan seluruh rakyat harus mengikuti. Raja Makota adalah raja pertama yang memeluk Islam serta mulai didirikan Mesjid. Selanjutnya nama-nama Islami banyak yang digunakan, termasuk pada nama-nama raja dan keluarga kerajaan Kutai Kartanegara. Masuknya agama Islam ini dalam kerajaan Kutai membuat panggilan raja berganti dengan sebutan Sultan. Sultan Kutai yang pertama kali menggunakan nama Islam adalah Sultan Aji Muhammad Idris (1735-1778).

Awal mula dari runtuhnya kerajaan Kutai Kartanegara adalah pada tahun 1525-1600 M dimana mereka diserang oleh kerajaan Banjar yang saat itu dipimpin oleh pangeran Samudera dengan bantuan dari Belanda, hingga akhirnya Kerajaan Kutai menyerah kalah dan menjadi kerajaan bawahan dari kerajaan Banjar, menjadi daerah *Vasal* (bawahan) dari kerajaan Banjar menjadikan Belanda dengan mudah ikut melakukan intervensi ke dalam kerajaan Kutai. Pada puncaknya terjadi pada tahun 1787, kerajaan Banjar melalui rajannya saat itu Sultan Tamjidillah II menandatangani penyerahan kekuasaan atas Kutai sesuai dengan perjanjian dahulunya bahwa Belanda akan mendapatkan wilayah kekuasaan atas bantuannya pada Pangeran Samudera dalam memerangi pangeran Amir.

Dan mulai tahun 1787 secara *de facto* kerajaan Kutai menjadi daerah dibawah kekuasaan Belanda, dimana raja Kutai

saat itu adalah Aji Sultan Muhammad Salehudin, dan isi dari perjanjian yang ditanda tangani oleh Sultan Tamjidillah II dengan Belanda sebagai berikut: Sultan Banjar menyerahkan tanah kerajaannya kepada pemerintah Belanda, di antaranya itu akan diterimanya kembali sebagai pinjaman, yang akan tetap diserahkan kepada pemerintah Belanda, daerah yang dimaksud adalah tanah Bumbu, Pagatan, Pasir, Kutai, Berau, Bulongan dan Kota Waringin.

Jika dilihat dari kekuatan hukum atas kekuasaan Belanda di Kutai maka hanya sebatas *de facto* belum *de jure* mengingat bahwa raja-raja di kerajaan Kutai tidak dilibatkan dalam penanda tangan atas kekuasaan tersebut, baru kemudian pada tahun 1825 atas inisiatif dari G.Muller yang saat itu menjabat sebagai residen Banjarmasin mengikat secara resmi kerajaan Kutai Kartanegara dengan ditanda-tanganinya perjanjian antara pemerintah Belanda dengan Aji Sultan Muhammad Salehudin, dalam isi perjanjian yang ditandatangani tersebut berisi antara lain adalah bahwa pemerintah Belanda memegang kekuasaan penuh atas kerajaan Kutai Kartanegara dengan kompensasi bahwa Belanda memegang peradilan, urusan pajak bea cukai, pajak-pajak orang Cina, pajak tambang emas dan sebagainya dengan kemudian raja mendapatkan kompensasi uang sebesar 8000 gulden per tahun. Belanda juga menempatkan seorang *civiel gezaghebber* bernama H. van Dewall yang bertugas sebagai penguasa sipil pengelola pemerintahan Belanda di Kutai Kartanegara.

Alasan dilakukan pengikatan kekuasaan secara *de jure* tersebut adalah bahwa kerajaan Kutai memiliki kekayaan alam yang sangat melimpah dari kekayaan alam batu bara, sarang

brung walet, emas, intan, hasil hutan dan juga kerajaan Kutai memiliki jalur perdagangan yang strategis terlebih dengan adanya sungai Mahakam sebagai jalur transportasi dan perdagangan.

Mulai runtuhnya kerajaan Kutai ditambah dengan seringnya ada perompak/ bajak laut dari Sulu yang mengganggu stabilitas perdagangan dan ekonomi kerajaan, pada tahun 1871 memindahkan ibu kota kerajaan ke Tenggarong. Sampai kependudukan Jepang di Indonesia kerajaan Kutai tidak berubah, masih menjadi kerajaan *vassal* walau berganti kepemimpinan, pada masa pendudukan Jepang kerajaan Kutai Kartanegara dengan kepemimpinan raja saat itu Aji Sultan Muhammad Parikesit (1920-1960 M) berani memilih bekerja sama dengan pergerakan nasional dalam menghadapi Jepang, sikap ini diambil karena kebiadaban Jepang dengan membunuh 300 keluarga kerajaan yang menolak bekerja sama dengan pemerintahan pendudukan Jepang.

Baru setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya kerajaan Kutai benar-benar menjadi daerah yang merdeka dari cengkeraman kependudukan Jepang dan pada tahun 1947 kerajaan Kutai dimasukkan ke dalam wilayah federasi Kalimantan Timur bersama dengan Bulungan, Sambaliung, Gunung Tabur dan Pasir dengan nama dewan kesultanan. Perubahan status terus berubah yaitu pada 27 Desember 1949 dewan kesultanan tergabung dalam Republik Indonesia Serikat.

KERAJAAN SIAK

Sejarah Berdirinya Kerajaan Siak

Membandingkan dengan catatan Tomé Pires yang ditulis antara tahun 1513-1515, *Siak* adalah kawasan yang berada antara *Arcat* dan *Indragiri*. Sebelum kerajaan Siak berdiri, daerah Siak adalah wilayah yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Johor. Pemimpin yang memerintah dan mengawasi daerah ini adalah raja yang ditunjuk dan di angkat oleh Sultan Johor. Namun, ketika hampir 100 tahun saat daerah ini tidak ada yang memerintah karena kerajaan Johor runtuh karena adanya perebutan kekuasaan dalam tubuh kerajaan Johor sendiri.

Pada tahun 1717 Raja Kecil yang merupakan keturunan dari Raja Johor berhasil merebut kembali menghidupkan Johor setelah perang saudara. Akan tetapi, tahun 1722 Kerajaan Johor terjadi perang saudara kembali dengan direbutnya kekuasaan oleh Tengku Sulaiman putera Sultan Abdul Jalil Riayat Syah, Tengku Sulaiman adalah ipar Raja Kecil. Dalam merebut Kerajaan Johor

ini, Tengku Sulaiman dibantu oleh beberapa bangsawan Bugis. Terjadilah perang saudara yang mengakibatkan kerugian yang cukup besar pada kedua belah pihak, maka akhirnya masing-masing pihak mengundurkan diri. Pihak Johor mengundurkan diri ke Pahang, dan Raja Kecil mengundurkan diri ke Bintan dan seterusnya mendirikan negeri baru di pinggir Sungai Buntan anak Sungai Siak. Demikianlah awal berdirinya kerajaan Siak di Buntan.

Pusat Kerajaan Siak tidak menetap di Buntan. Pusat kerajaan kemudian selalu berpindah-pindah dari kota Buntan pindah ke Mempura, pindah kemudian ke Senapelan Pekanbaru dan kembali lagi ke Mempura. Semasa pemerintahan Sultan Ismail dengan Sultan Assyaidis Syarif Ismail Jalil Jalaluddin yang memerintah dari tahun 1827 sampai tahun 1864 pusat Kerajaan Siak dipindahkan ke kota Siak Sri Indrapura dan akhirnya menetap di sana sampai akhirnya masa pemerintahan Sultan Siak terakhir.

Perkembangan agama Islam di Siak, menjadikan kawasan ini sebagai salah satu pusat penyebaran dakwah Islam, hal ini tidak lepas dari penggunaan nama *Siak* secara luas di kawasan Melayu. Pada masa pemerintahan Sultan ke-11 yaitu Sultan Assayaidis Syarif Hasyim Abdul Jalil Syaifuddin yang memerintah pada tahun 1889, dibangunlah istana yang megah terletak di kota Siak dan istana ini diberi nama Istana Asseraiyah Hasyimiah

Jika dikaitkan dengan pepatah Minangkabau yang terkenal: *Adat menurun, syara' mendaki* dapat bermakna masuknya Islam ke dataran tinggi pedalaman Minangkabau dari Siak sehingga orang-orang yang ahli dalam agama Islam, sejak dahulu sampai

sekarang, masih tetap disebut dengan *Orang Siak*. Sementara di Semenanjung Malaya, penyebutan Siak masih digunakan sebagai nama jabatan yang berkaitan dengan urusan agama Islam.

Pengaruh Minangkabau dengan identitas matrilinealnya masih mewarnai tradisi masyarakat Siak meskipun telah menerapkan hukum Islam pada masyarakatnya, hal ini dapat dilihat dalam tata-cara pembagian warisan, masyarakat Siak mengikuti hukum waris sebagaimana berlaku dalam Islam. Namun dalam hal tertentu, mereka menyepakati secara adat bahwa untuk warisan dalam bentuk rumah hanya diserahkan kepada anak perempuan saja.

Pada masa pemerintahan Sultan Syarif Hasyim ini Siak mengalami kemajuan terutama dalam bidang ekonomi. Sultan Syarif Hasyim bahkan berkesempatan untuk berkunjung ke Eropa yaitu Jerman dan Belanda. Setelah wafat, beliau digantikan oleh putranya yang masih kecil dan sedang bersekolah di Batavia yaitu Tengku Sulung Syarif Kasim dan baru pada tahun 1915 beliau ditabalkan sebagai Sultan Siak ke-12 dengan gelar Assayaidis Syarif Kasim Abdul Jalil Syaifuddin dan terakhir terkenal dengan nama Sultan Syarif Kasim Tsani atau Sultan Syarif Kasim II.

Keruntuhan kerajaan Siak diawali dari ekspansi kolonialisasi Belanda ke kawasan timur Pulau Sumatra, Ekspansi Belanda tersebut tidak mampu dihadang oleh Kesultanan Siak, pengaruh ekspansi Belanda sedikit demi sedikit mulai terlihat dengan runtuhnya Kesultanan Deli, Kesultanan Asahan dan Kesultanan Langkat, kemudian muncul Inderagiri sebagai kawasan mandiri. Begitu juga kerajaan Johor yang kembali berdiri dengan dipimpin

oleh seorang sultan dari keturunan Tumenggung Johor, kerajaan Johor ini berada dalam perlindungan Inggris di Singapura. Tidak mau kalah dengan Inggris, Belanda kemudian memulihkan kedudukan Yang Dipertuan Muda di Pulau Penyengat dan kemudian mendirikan Kesultanan Lingga di Pulau Lingga. Selain itu Belanda juga mempersempit wilayah kedaulatan Siak, dengan mendirikan *Residentie Riouw* pemerintahan Hindia-Belanda yang berkedudukan di Tanjung Pinang.

Pada tahun 1840 penguasaan Inggris atas Selat Melaka memaksa Sultan Siak untuk menerima tawaran perjanjian baru mengganti perjanjian yang telah mereka buat sebelumnya pada tahun 1819. Didalam perjanjian tersebut tak lain menyebabkan Kesultanan Siak semakin kecil dan terjepit di antara wilayah kerajaan-kerajaan kecil yang mendapat perlindungan dari Inggris. Demikian juga pihak Belanda memaksa Sultan Siak menandatangani perjanjian pada 1 Februari 1858 yang menjadikan kawasan Siak sebagai salah satu bagian dari pemerintahan Hindia-Belanda, kerajaan Siak Sri Inderapura benar-benar kehilangan kedaulatannya setelah perjanjian dengan Belanda tersebut, ditambah aturan bahwa dalam setiap pengangkatan raja Siak mesti mendapat persetujuan dari Belanda. Tidak berhenti sampai disitu Belanda mendirikan pos militer di Bengkalis serta melarang Sultan Siak membuat perjanjian dengan pihak asing tanpa persetujuan Residen Riau pemerintahan Hindia-Belanda sebagai usaha Belanda dalam pengawasan dan control wilayah.

Pengaruh hegemoni Kesultanan Siak atas wilayah-wilayah yang pernah dikuasainya lenyap sama sekali setelah adanya perubahan peta politik atas penguasaan jalur Selat Malaka, kemudian adanya pertikaian internal Siak dan persaingan dengan Inggris dan Belanda. Tarik ulur kepentingan kekuatan asing terlihat pada Perjanjian Sumatra antara pihak Inggris dan Belanda, menjadikan Siak berada pada posisi yang dilematis, berada dalam posisi tawar yang lemah. Kemudian berdasarkan perjanjian pada 26 Juli 1873, pemerintah Hindia-Belanda memaksa Sultan Siak, untuk menyerahkan wilayah Bengkalis kepada Residen Riau. Namun, di tengah tekanan tersebut Kesultanan Siak tetap masih mampu bertahan sampai masa kemerdekaan Indonesia, walau pada masa pendudukan tentara Jepang sebagian besar kekuatan militer Kesultanan Siak dianggap sudah tidak berarti lagi. Dan Sultan Syarif Kasim II, merupakan Sultan Siak terakhir yang tidak memiliki putra, seiring dengan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Kasim II menyatakan kerajaannya bergabung dengan negara Republik Indonesia. Dimana penyerahan ini merupakan berakhirnya kekuasaan kerajaan Siak di Nusantara.

DAFTAR PUSTAKA

Unang Sunardjo. *Masa Kejayaan Kerajaan Cirebon*. 1996. Cirebon: Yayasan Keraton Kasepuhan Cirebon.

Marwati D.P dan Nugroho Notosusanto. *Sejarah Nasional Indonesia III*. 2008 (Cetakan ke-2). Jakarta: Balai Pustaka.

M.C Rickefs. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. 2008 (Revisi ke-2). Jakarta: Serambi.

<http://blogtaufik-taufik.blogspot.com/2012/11/makalah-kerajaan-banjar.html>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Banjar

<http://kerajaanbanjar.wordpress.com/2007/04/06/sistem-politik-dan-pemerintahan-kerajaan-banjar/>

<http://melayuonline.com/ind/history/dig/211/kesultanan-banjar>

<http://kerajaanbanjar.wordpress.com/2007/03/21/>

lapisan-sosial-rakyat-kerajaan-banjar/

<http://banuahujungtanah.wordpress.com/2010/03/24/sejarah-kehidupan-di-tanah-banjar/>

http://id.wikipedia.org/wiki/Perang_Banjar

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Gowa

<http://suwandi-sejarah.blogspot.com/2010/09/kerajaan-gowa-tallo.html>

<http://makassarnolkm.com/hikayat-benteng-kerajaan-gowa-1/>

<http://www.g-excess.com/37776/sejarah-kerajaan-islam-kerajaan-gowa-tallo/>

<http://sejarahnasionaldandunia.blogspot.com/2012/10/kerajaan-goa-dan-talo.html>

<http://id.shvoong.com/humanities/history/1948258-kerajaan-gowa-tallo-kekuatan-perkasa/#ixzz2KAdsum5e>

<http://ssbelajar.blogspot.com/2012/06/kerajaan-goa-tallo-makassar-dan.html>

<http://melayuonline.com/ind/history/dig/63/kesultanan-samudera-pasai>

http://id.wikipedia.org/wiki/Kesultanan_Pajang

<http://pendidikan4sejarah.blogspot.com/2011/11/kerajaan-pajang.html>

<http://budisma.web.id/materi/sma/sejarah-kelas-xi/>

perkembangan-politik-kerajaan-pajang/

<http://ajiraksa.blogspot.com/2011/09/pajang-kerajaan-islam-kedua-di-tanah.html>

<http://remenmaos.blogspot.com/2012/06/asal-mula-kraton-pajang.html>

TENTANG PENULIS

Binuko Amarseto : Lahir di Sukoharjo 10 Mei 1988.
Laki-laki yang mempunyai ketertarikan terhadap sejarah, tulis menulis dan menggambar. Pengagum dari “ Pramoedya Ananta Toer ”.

Twitter : @decungkringo

